RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KABUPATEN BATANG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

TAHUN 2024



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah setiap tahun;
b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuK periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
   a. BAB I PENDAHULUAN
      1.1. Latar Belakang
      1.2. Landasan Hukum
      1.3. Maksud dan Tujuan
      1.4. Sistematika Penulisan
   b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
      2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2024
      2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
      2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
      2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
   c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
      3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
      3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
   d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
      4.1. Program dan Kegiatan
   e. BAB V PENUTUP

(2) Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2025

URAIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
c. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 telah merujuk atau mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, maupun RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... I-1
BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum..... I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-21
2.1.3 Aspek Daya Saing II-60
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum..... II-70
2.1.5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal II-144
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD II-149
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-233
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah..... II-233
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-245
2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah..... II-255
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-5
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Masa Transisi Penyusunan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045..... IV-4
4.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Batang 2023-2026 .. IV-11
4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-16
4.3.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-16
4.3.2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 ..... IV-20
4.3.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... IV-22
4.3.4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 ..... IV-23
4.3 Inovasi Kabupaten Batang..... IV-93

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 ..... V-1
5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 ..... V-2
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025 ..... VI-1
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VI-1
6.3 Indikator Kinerja Daerah VI-16
BAB VII PENUTUP VII-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Perencanaan Pembangunan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada dokumen jangka menengah daerah (RPJMD/RPD) dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Disisi lain, penyusunan RKPD bagi Kabupaten yang masa jabatan bupati berakhir pada tahun 2022 seperti Kabupaten Batang, mendasari instruksi menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 maka disusunlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2023-2026 yang menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2025, RKP Tahun 2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026, dan RKPD Provinsi Tahun 2025.

Dalam menjamin kualias perencanaan pembangunan, penyusunan RKPD dilakukan melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, serta *bottom-up* dan *top-down* yang berbasis pada data (*data-based planning*), berbasis risiko (*risk based planning*) melalui pendekatan *money follows program* dengan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 1. 1
Konsep Penyusunan Perencanaan Pembangunan



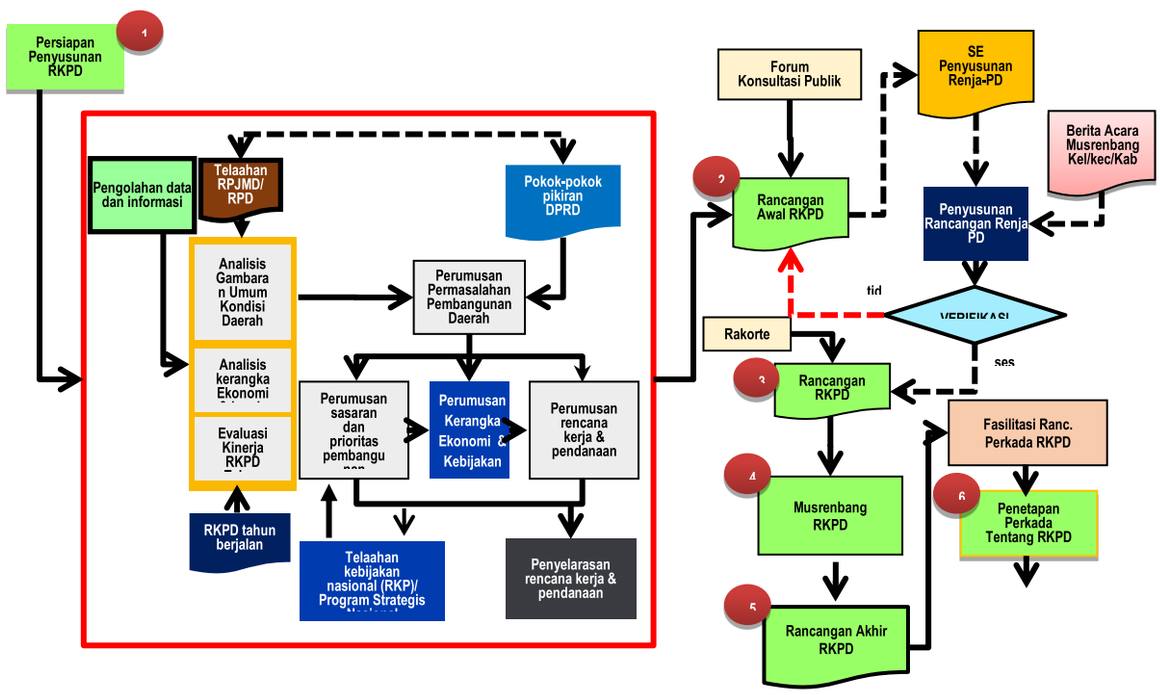
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting yakni a) Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD/RPD ; b) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah; c) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD/RPD ; d) Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan e) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Penyusunan program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2025

memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Batang sesuai Tema Pembangunan Tahun 2025 adalah **"Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sektor pariwisata".**

Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 meliputi: a) Persiapan penyusunan RKPD, b) Penyusunan rancangan awal RKPD, c) Penyusunan rancangan RKPD, d) Pelaksanaan musrenbang RKPD, e) Perumusan rancangan akhir RKPD, dan f) Penetapan RKPD tahun 2025.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 secara sederhana terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. 2 Proses Penyusunan RKPD Tahun 2025

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sejalan dengan amanat peraturan perundang undangan diatas, penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 merupakan hal yang amat penting dalam rangka implementasi program dan kegiatan pembangunan

tahunan. Melalui RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 akan dirumuskan program dan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan secara khusus bagi masyarakat Batang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

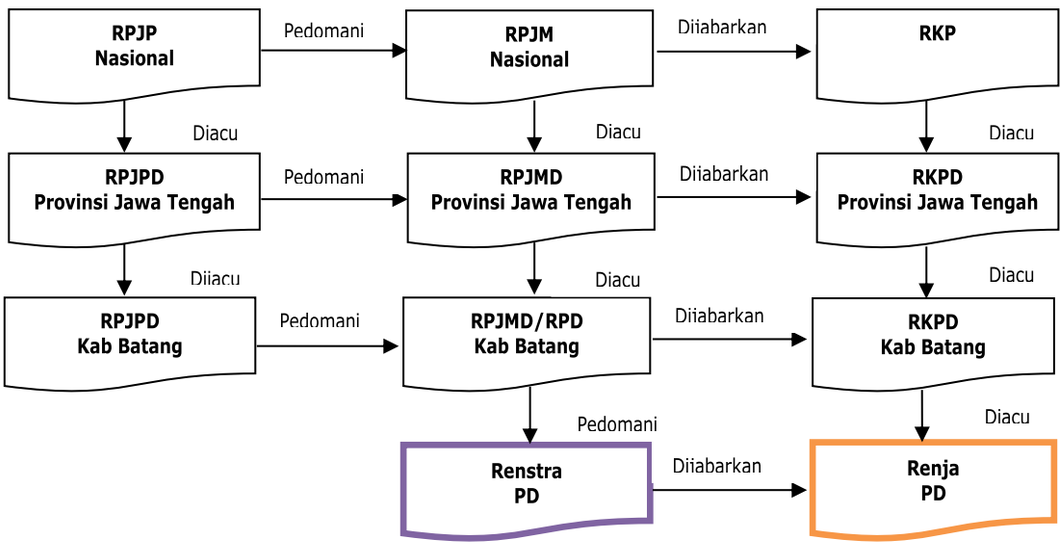
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dengan tetap memperhatiakan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 dan dengan tetap menjaga sinergitas dengan dokumen perencanaan lainnya ditingkat provinsi dan nasional.

Selain itu, secara hierarki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Batang Tahun 2025 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 akan digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025, serta sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Batang Tahun 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2025.

Secara ringkas hubungan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

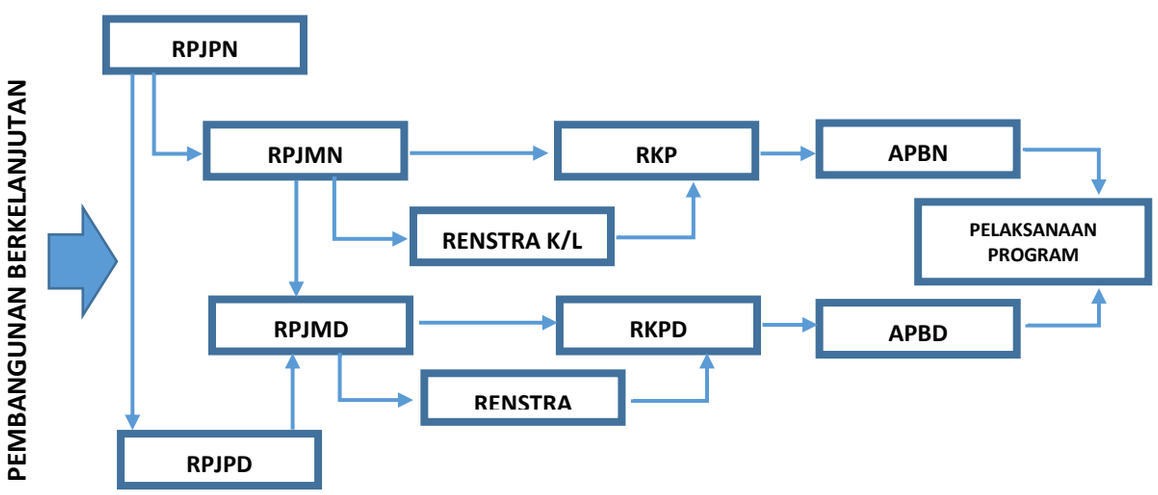


Gambar 1. 3 Keterkaitan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

a. Keterkaitan RKPD dengan SDG's

Integrasi pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional dan daerah. Dalam rencana pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah dan diterjemahkan melalui tujuan sasaran Kabupaten, kemudian dijadikan sebuah rencana pembangunan daerah, dari hasil RPJMD maka dibuat sebuah Renstra SKPD untuk menjadi Rencana Kerja tahunan Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah (RKPD). Dari segi pembiayaan untuk pelaksanaan program maka bersumber dari APBD. Dengan pola integrasi seperti ini maka pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan baik ditingkatan pusat ataupun tingkatan daerah.

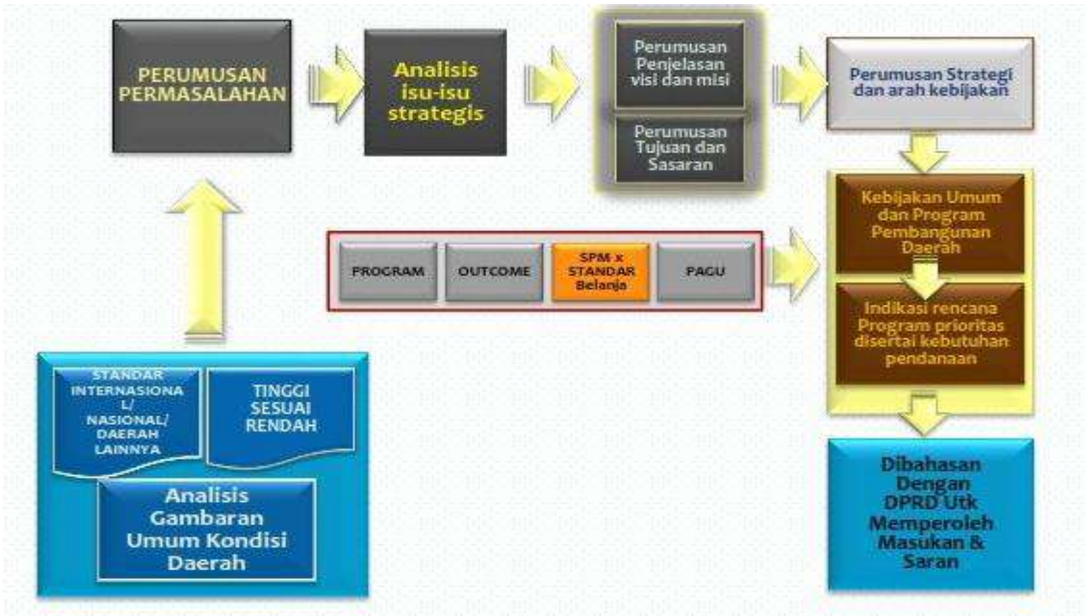


Gambar 1. 4 Keterkaitan dokumen Perencanaan Daerah dengan SGD's

Sumber : Bappenas

b. Keterkaitan RKPD dengan SPM

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar (SPM) dimuat dalam dokumen RKPD dimana kondisi dan rencana pemenuhan harus diintegrasikan dalam setiap substansi di RKPD. Perumusan pemenuhan SPM dalam dokumen RKPD meliputi kondisi eksisting pemenuhan SPM ditahun berjalan, besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar, serta perogram/ kegiatan beserta target capaian, alokasi dana indikatif, serta sumber pendanaan pemenuhan pelayanan dasar ditahun perencanaan.



Gambar 1. 5 Integrasi SPM dalam RKPD

Sumber : Bappenas

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2025, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025.

Sementara tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 yaitu:

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2025.

3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Batang Tahun 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2025.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaah kondisi ekonomi makro Kabupaten Batang mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan prioritas yang termuat dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan secara menyeluruh mengenai rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi serta tindak lanjut yang diperlukan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

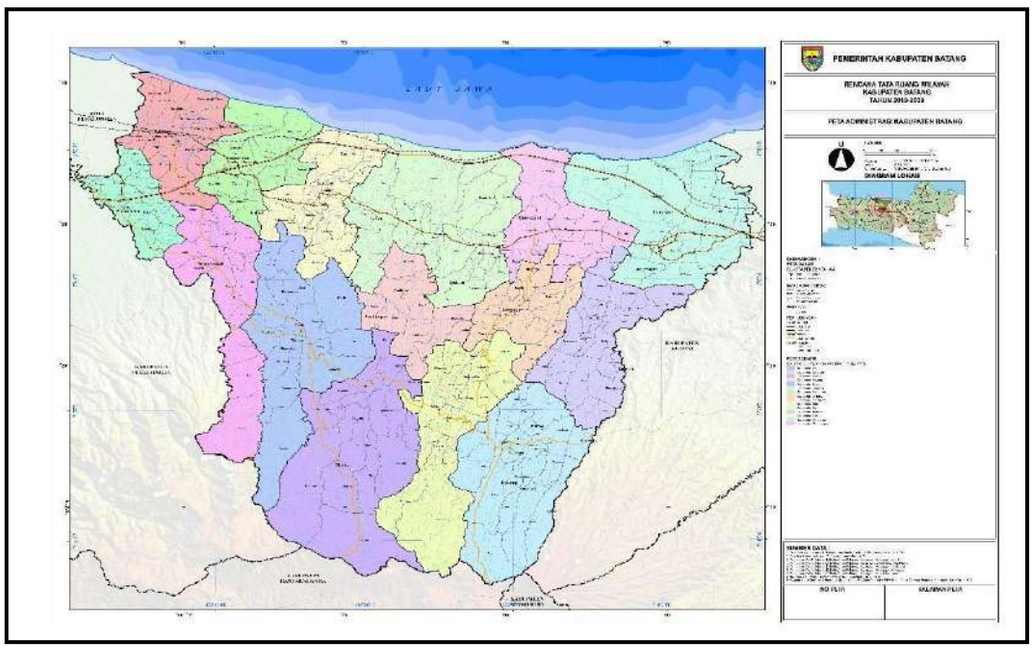
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

1. Geografis

Luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 85.721 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar dengan batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Batang
Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Batang 2019-2039

Posisi letak geografis tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, sebagai bagian dari aglomerasi Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang) dan sebagai jalur penghubung lintas provinsi di Pulau Jawa terutama wilayah bagian utara yang dilintasi oleh jalur pantura, jalur kereta api dan tol. Kemudahan akses dan peningkatan aksesibilitas di Kabupaten Batang akan memicu peningkatan aktivitas berbagai sektor, terutama sektor perdagangan dan jasa yang akan mendatangkan banyak investasi ke

Kabupaten Batang. Dalam pengembangan wilayah, Kabupaten Batang memiliki fokus pada beberapa sektor, diantaranya adalah industri barang modal dan jasa, agroindustri, industri maritim, pariwisata, pertanian dan perkebunan, serta industri aneka. Setiap sektor tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Batang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Batang

Kecamatan	Luas (Ha)	Desa/Kel	Dukuh	RT	RW
01. Wonotunggal	5.543,02	15	71	197	61
02. Bandar	7.936,76	17	79	351	71
03. Blado	9.644,67	18	74	234	68
04. Reban	6.947,07	19	67	248	68
05. Bawang	7.696,92	20	88	354	104
06. Tersono	5.135,60	20	79	263	73
07. Gringsing	7.974,10	15	89	313	83
08. Limpung	3.271,72	17	80	233	70
09. Banyuputih	4.232,80	11	49	175	47
10. Subah	9.143,39	17	68	287	72
11. Pecalungan	3.342,14	10	56	182	54
12. Tulis	4.405,09	17	52	173	52
13. Kandeman	4.063,75	13	62	231	59
14. Batang	3.938,95	21	114	493	111
15. Warungasem	2.445,36	18	68	221	73
Jumlah	85.721	248	1.096	3.955	1.066

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Kabupaten Batang yang terbagi menjadi 15 kecamatan memiliki luas total yaitu 85.721 Ha. Berdasarkan hasil digitasi tutupan lahan pada tahun 2021, luas Kabupaten Batang terdiri dari 13.532 Ha atau 15,8% adalah lahan terbangun dan 72.189 Ha atau 84,2% adalah lahan tidak terbangun.

Dari lahan terbangun tersebut terdapat industri seluas 5.028 Ha (5,9%), permukiman seluas 8.036 Ha (9,4%), PLTU seluas 219 Ha (0,3%),

dan jalan seluas seluas 250 Ha (0,3%). Sedangkan dari lahan tidak terbangun terdapat cagar alam seluas 82 Ha (0,1%), hutan seluas 17.987 Ha (21,0%), perkebunan seluas 2.773 Ha (3,2%), Sawah seluas 17.386 Ha (20,3%), tegalan seluas 32.380 Ha (37,8%), dan tubuh perairan seluas 1.580 Ha (1,8%).

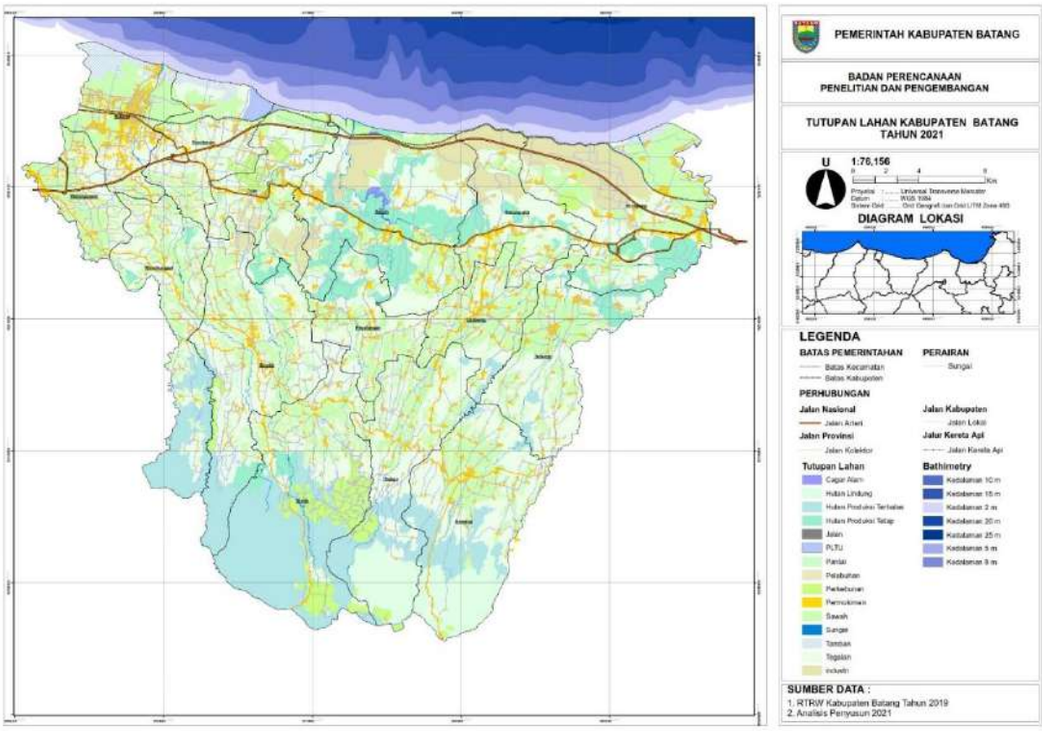
Penggunaan lahan sawah di Kabupaten Batang terdapat beberapa perubahan pada beberapa tahun terakhir. pada berdasarkan hasil digitasi, pada tahun 2016 lahan sawah di Kabupaten Batang seluas 17.487 Ha, kemudian pada tahun 2018 terdapat sedikit pengurangan luasan sebesar 0,03% menjadi 17.481 Ha, dan data terakhir menunjukkan pada tahun 2020 terdapat pengurangan lahan sebesar 0,54% sawah menjadi 17.386 Ha. Pengurangan lahan sawah memang berkaitan erat dengan dinamika perekonomian, walaupun begitu lahan sawah harus dilindungi untuk menjamin ketahanan pangan di masa depan. Besaran Lahan Sawah yang Dilindung (LSD) berdasarkan hasil verifikasi aktual, dari luas 17.064,67 ha LSD yang ditetapkan dalam Kepmen ATR/ Ka BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, LSD yang disepakati dipertahankan adalah seluas 15.228,12 ha dan yang disepakati tidak dapat dipertahankan adalah seluas 1.404,39 ha.

Tabel 2. 2
Tutupan Lahan Kabupaten Batang Tahun 2021

No.	Tutupan Lahan	Luah (Ha)
1	Cagar Alam	82
2	Hutan Lindung	2.930
3	Hutan Produksi Terbatas	9.442
4	Hutan Produksi Tetap	5.615
5	Industri	5.028
6	Jalan	250
7	Pantai	33
8	Perkebunan	2.773
9	Permukiman	8.036
10	PLTU	219
11	Sawah	17.386
12	Sungai	596
13	Tambak	952

No.	Tutupan Lahan	Luah (Ha)
14	Tegalan	32.380
Jumlah Luas		85.721

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang 2021



Gambar 2. 2 Peta Tutupan Lahan Tahun 2021
Sumber: Digitasi citra satelit, 2021

Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara astronomis daerah ini terletak antara 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Kabupaten Batang berada di tengah-tengah pulau jawa, dan merupakan koridor jalan pantura yang merupakan koridor pertumbuhan Pulau Jawa. Jarak ibu kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut:

1. Pekalongan : 9 km
2. Pemalang : 43 km
3. Tegal : 72 km

4.	Brebes	:	85 km
5.	Cirebon	:	144 km
6.	Jakarta	:	392 km
7.	Kendal	:	64 km
8.	Semarang	:	93 km
9.	Surabaya	:	480 km



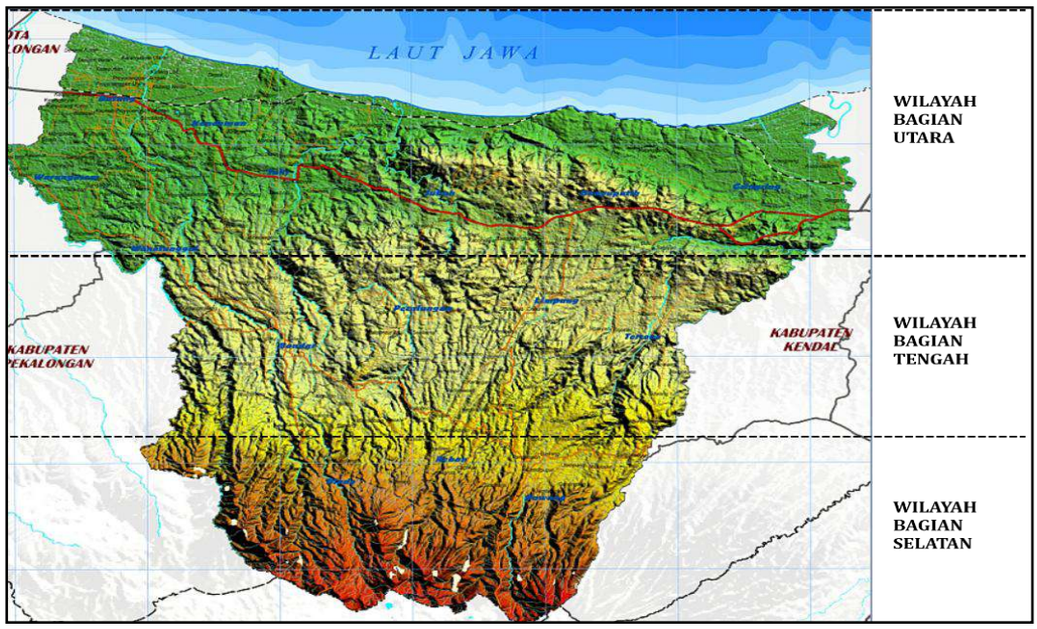
Gambar 2. 3 Posisi Kabupaten Batang
Sumber: Bapelitbang Kab. Batang, 2021

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

Kabupaten Batang memiliki karakteristik morfologi wilayah yang beragam. Secara morfologi, wilayah Kabupaten Batang dibagi menjadi 3 yaitu wilayah bagian utara, wilayah bagian tengah dan wilayah bagian selatan. Pada sisi Utara Kabupaten Batang memiliki morfologi dataran rendah dan pesisir pantai. Morfologi wilayah bagian Utara ini mencakup Kecamatan Gringsing, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Batang. Bagian Utara Kabupaten Batang memiliki potensi pengembangan wilayah perkotaan dan juga industri.

Adapun pada sisi Tengah dan Selatan, Kabupaten Batang memiliki morfologi pegunungan. Kondisi alam tersebut memberikan keuntungan bagi tumbuhnya potensi-potensi wisata alami. Selain itu, Bagian Tengah Kabupaten Batang sebagian besar dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan hutan rakyat. Morfologi wilayah bagian Tengah ini mencakup Kecamatan Tersono, Kecamatan Limpung, Kecamatan Pecalungan, dan Kecamatan Warungasem.

Sedangkan bagian Selatan sebagian tanah di luar kawasan hutan digunakan untuk budidaya sayur dan wilayah konservasi alam sebagai upaya untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam serta keanekaragaman hayati dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia dan lingkungan. Morfologi wilayah bagian Selatan ini mencakup Kecamatan Bawang, Kecamatan Reban, Kecamatan Blado, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Wonotunggal.



Gambar 2. 4 Peta Morfologi Kabupaten Batang
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Batang Tahun 2024-2044

Strategi pusat pertumbuhan dilaksanakan melalui rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang terbentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten. Sistem perkotaan dimaksud meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL adalah kawasan perkotaan yang ebrfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PPL meliputi Kawasan Perkotaan Batang dan Kawasan Perkotaan Limpung. PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK meliputi Kawasan Perkotaan Tulis, Kawasan Perkotaan Banyuputih, Kawasan Perkotaan Warungasem, Kawasan Perkotaan Bandar, Kawasan Perkotaan Kandeman, Kawasan

Perkotaan Wonotunggal, Kawasan Perkotaan Subah, Kawasan Perkotaan Pecalungan, Kawasan Perkotaan Blado, Kawasan Perkotaan Reban, Kawasan Perkotaan Bawang, Kawasan Perkotaan Tersono dan Kawasan Perkotaan Gringsing. PPL adalah pusat permukiam yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPL meliputi Kawasan Desa Sengon Kecamatan Subah, Kawasan Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang, Kawasan Desa Maduguwongjati Kecamatan Gringsing, Kawasan Desa Sidalang Kecamatan Tersono, Kawasan Desa Toso Kecamatan Bandar, Kawasan Desa Kembanglangit Kecamatan Blado, dan Kawasan Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal.

2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah dapat dilihat dari dua jenis yaitu ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Kabupaten Batang memiliki relief yang bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan berbukit dengan pegunungan landai hingga curam, dan daerah pantai.



Gambar 2. 5 Peta 5 Wilayah Pengembangan Kabupaten Batang

Sumber : Master Development Plan 5 Kota Pusat Pertumbuhan Kabupaten Batang Tahun 2018

Kabupaten Batang dilihat dari letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 8 wilayah ketinggian mulai dari 0 meter (pantai) sampai dengan 2.565 meter (pegunungan), yaitu:

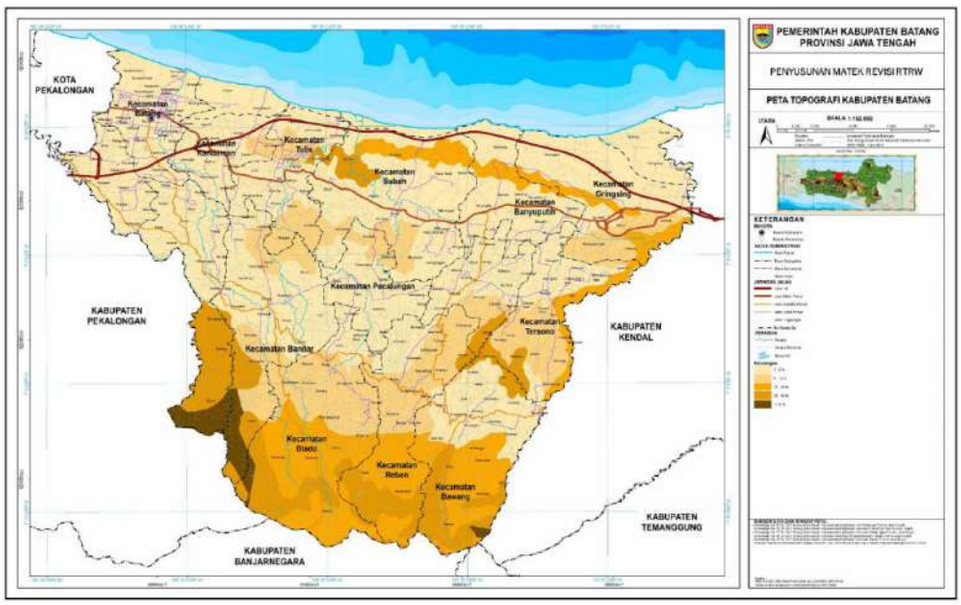
a. Ketinggian 0–7 m, seluas 9,05 %, di sebagian Kecamatan Banyuputih, Batang, Gringsing, Kandeman, Subah, Tulis, dan Warungasem.
b. Ketinggian 7–25 m, seluas 6,83% di wilayah Kecamatan Banyuputih, Batang, Gringsing, Kandeman, Subah, Tulis, dan Warungasem.

c. Ketinggian 25–100 m, seluas 12,71 % di sebagian Kecamatan Bandar, Banyuputih, Gringsing, Kandeman, Subah, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal.
d. Ketinggian 100–250m, seluas 21,11 % di sebagian Kecamatan Bandar, Banyuputih, Gringsing, Kandeman, Limpung, Pecalungan, Subah, Tersono, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal.
e. Ketinggian 250–500m, seluas 17,77 % di sebagian Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Gringsing, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono, Tulis, dan Wonotunggal.
f. Ketinggian 500–1000m, seluas 17,67 % di sebagian Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Limpung, Reban, Pecalungan, Tersono, dan Wonotunggal.
g. Ketinggian 1000–2000m, seluas 13,78 % di sebagian Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, dan Reban.
h. Ketinggian >2000 m, seluas 1,08 % di sebagian Kecamatan Blado, Reban dan Bawang.

Sedangkan berdasarkan letak kemiringannya, wilayah Kabupaten Batang dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu:

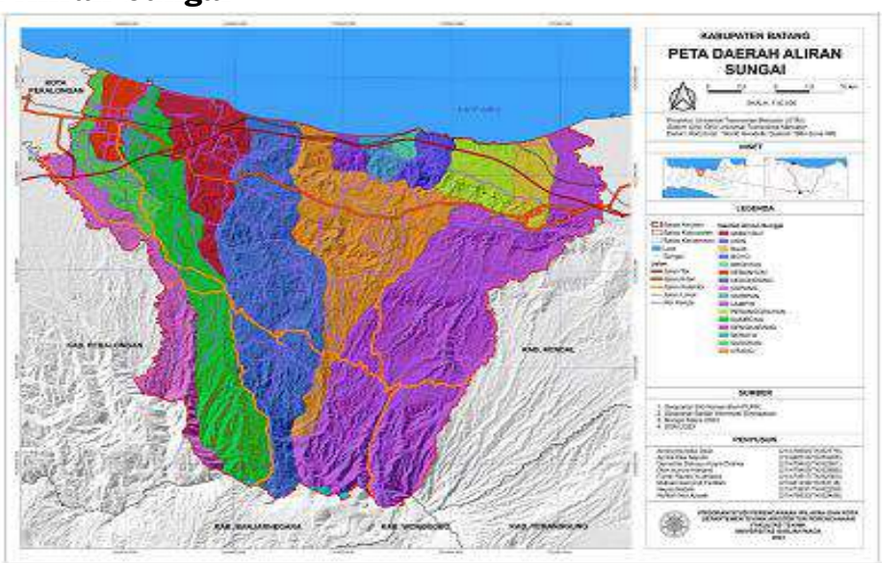
a. Kelas lereng I (kemiringan 0 – 8 %) seluas 56,37 %, dengan penyebarannya di sebagian Kecamatan Bandar, Banyuputih, Batang, Bawang, Blado, Gringsing, Kandeman, Limpung, Reban, Pecalungan, Subah, Tersono, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal.
b. Kelas lereng II (kemiringan 8 – 15%) seluas 17,33 %, dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Gringsing, Kandeman, Limpung, Reban, Subah, Tersono, Tulis, dan Wonotunggal.
c. Kelas lereng III (kemiringan 15 – 25%) seluas 12,68 % dengan penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bandar, Banyuputih, Bawang, Blado, Gringsing, Reban, Subah, dan Tersono.
d. Kelas lereng IV (kelerengan 25 - 40%) seluas 11,66 %, dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Limpung, Reban, Subah, Tersono, Tulis, dan Wonotunggal.
e. Kelas lereng V (kelerengan > 40%) seluas 1,95%, dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, dan Wonotunggal.

Peta topografi Kabupaten Batang berdasarkan kemiringan lahan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. 6 Peta Topografi Kabupaten Batang
Sumber: materi teknis RTRW 2024 – 2044

3. Daerah Aliran Sungai



Gambar 2. 7 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Batang
Sumber: DPUPR Kabupaten Batang, 2023

Terdapat 16 sungai yang melintasi Kabupaten Batang, yaitu Sungai Kupang, Sambong, Urang, Lampir , Susukan, Ambo Biji, Boyo, Kebanyon, Asin, Baja, Kedondong, Brontak, Pesanggrahan, Kuripan, Sengkarang, dan Serayu. Banyaknya sungai yang melintasi Kabupaten Batang dapat menyediakan air bagi permukiman, pertanian dan industri. Data Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Batang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 3
Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kabupaten Batang

No.	Wilayah Sungai/ Daerah Aliran Sungai	Kabupaten	Pengelola
I.	WS Pemali-Comal		PUSDATARU Jateng
1.	DAS Kupang	Kab. Batang dan Kota Pekalongan	
2.	DAS Gabus	Kab. Batang dan Kota Pekalongan	
3.	DAS Sambong	Kab. Batang	
4.	DAS Sono	Kab. Batang	
5.	DAS Karanggeneng	Kab. Batang	
6.	DAS Boyo	Kab. Batang	
7.	DAS Urang	Kab. Batang	
8.	DAS Kretek	Kab. Batang	
9.	DAS Bugel	Kab. Batang	
10.	DAS Kuripan	Kab. Batang	
11.	DAS Kedondong	Kab. Batang	
II.	WS Bodri-Kuto		PUSDATARU Jateng
1.	DAS Brontak	Kab. Batang	
2.	DAS Kedondong	Kab. Batang	
3.	DAS Kuto	Kab. Batang dan Kab. Kendal	
4.	DAS Pesanggrahan	Kab. Batang dan Kab. Kendal	
5.	DAS Lampir	Kab. Batang	

Sumber : Bapelitbang, 2024

4. Klimatologi

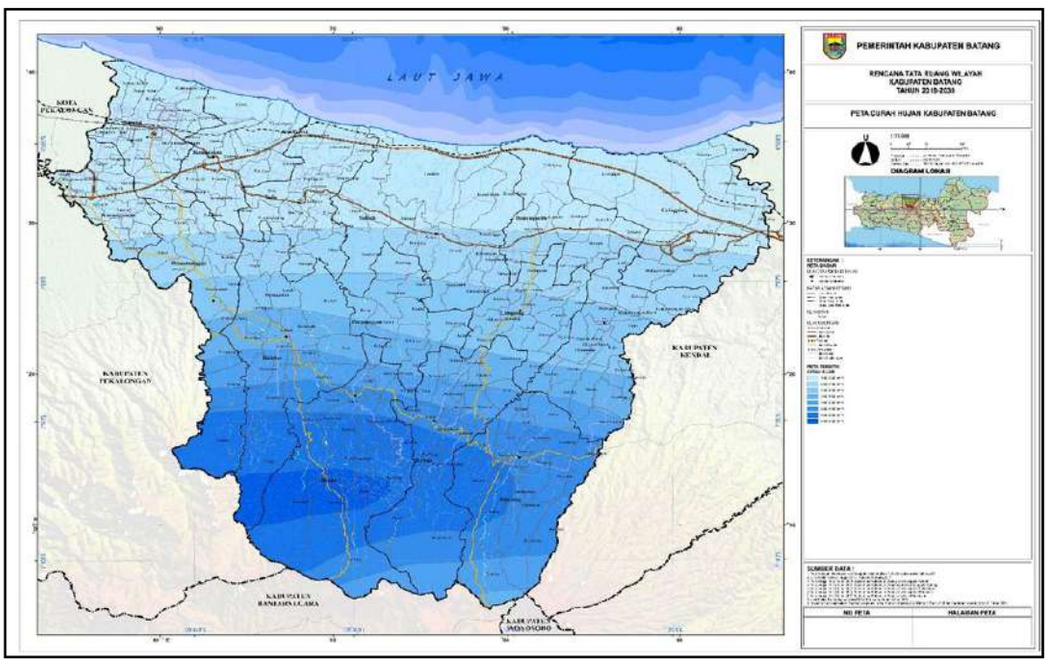
Dari aspek klimatologi, diketahui bahwa suhu udara rata-rata di Kabupaten Batang berkisar berkisar antara 25^{o}C-32^{o}C. Kelembaban udara rata-rata relatif bervariasi berkisar 55 persen sampai dengan 91 persen. Sedangkan untuk curah hujan, menurut data pengukuran tinggi curah hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, selama tahun 2021 rata-rata hari hujan terbanyak berada pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan 23,20 hari. Rata-rata curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Februari yaitu 970,07 mm.

Tabel 2. 4
Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan
di Kabupaten Batang Tahun 2023

No	Bulan	Rata-rata Hari Hujan Bulanan (Hari)	Rata-rata Curah Hujan Bulanan (mm)
1	Januari	21,93	463,27
2	Februari	22,53	596,72

No	Bulan	Rata-rata Hari Hujan Bulanan (Hari)	Rata-rata Curah Hujan Bulanan (mm)
3	Maret	16,73	377,90
4	April	12,73	231,63
5	Mei	5,47	96,07
6	Juni	6,53	62,07
7	Juli	3,69	44,92
8	Agustus	1,00	64,00
9	September	1,83	7,20
10	Oktober	2,57	15,25
11	November	13,31	180,58
12	Desember	14,47	281,00
Rata rata 2022		**10,23**	**201,72**
Rata rata 2021		**14,97**	**283,60**
Rata rata 2020		**11,83**	**304,58**
Rata rata 2019		**11,16**	**177,35**

Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 2. 8 Peta Curah Hujan Kabupaten Batang
Sumber: RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Dengan berbagai macam kondisi tersebut menggambarkan juga bahwa wilayah Kabupaten Batang berpotensi rawan bencana alam. Melihat potensi luasan wilayah bencana di Kabupaten Batang, setidaknya terdapat 24.202 ha merupakan daerah rawan banjir

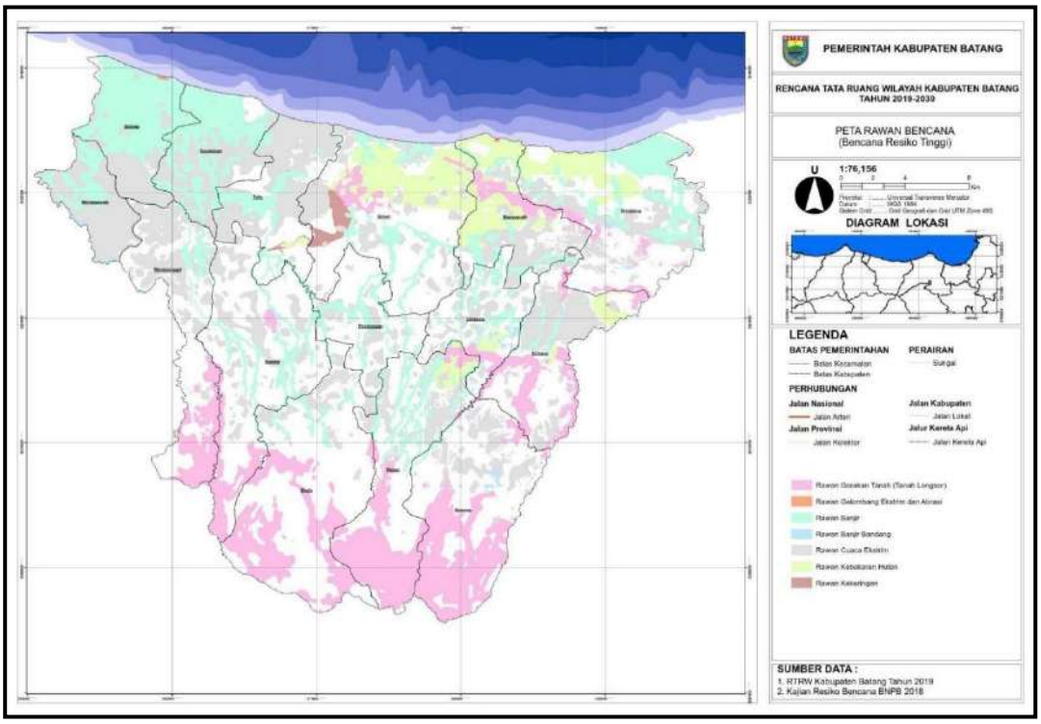
meskipun dengan tingkat bahaya yang berbeda, yaitu 4.555 ha bahaya rendah, 5.713 ha bahaya sedang dan 13.934 ha bahaya tinggi. Sekitar 35.821 ha merupakan daerah rawan tanah longsor, dengan tingkat bahaya rendah seluas 5.158 ha, bahaya sedang seluas 19.483 ha, dan tingkat bahaya tinggi seluas 11.179 ha . Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Batang seluas 718 ha juga berpotensi terkena abrasi.

Tabel 2. 5
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Batang

No	Jenis Bahaya	Tingkat Risiko	Luas Bahaya (Ha)	Kecamatan Terpapar	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp.Milyar)	Ekonomi (Rp. Milyar)	Lingkungan (Ha)
1	Banjir	SEDANG-TINGGI	10.903	12	188.405	701.872	411.104	0
2	Banjir Bandang	TINGGI	4.269	15	57.394	382.137	177.927	8
3	Cuaca Ekstrim	SEDANG-TINGGI	43.271	15	652.504	5.108.009	1.352.170	0
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	SEDANG-TINGGI	325	6	146.486	584.549	348.510	0
5	Gempa Bumi	SEDANG-TINGGI	1338	15	0	0	0	0
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	SEDANG-TINGGI	27.603	15	0	0	960.958	2.088
7	Kekeringan	SEDANG-TINGGI	86.664	15	807.593	0	4.500.054	4.728
8	Letusan Gunung Api	SEDANG-TINGGI	456	1	2.861	9.581	15.660	44
9	Tanah Longsor	SEDANG-TINGGI	11.600	12	58.445	596.296	1.718.013	21

Sumber: Data INARISK BNPB, 2023

Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Batang. Tingkat risiko untuk 9 (Sembilan) jenis bencana di Kabupaten Batang memiliki potensi dengan tingkat risiko SEDANG-TINGGI. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Batang dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Batang dan perlu terus diantisipasi melalui mitigasi dan penanganan pasca bencana dan kesiapan dimasa mendatang untuk antisipasi jika sewaktu waktu kejadian tersebut terulang kembali, sehingga dampak bencana baik korban jiwa maupun materiil dapat diminimalisir.



Gambar 2. 9 Peta Rawan Bencana Di Kabupaten Batang
Sumber: RTRW Kabupaten Batang 2019-2039 dan KRB BNPB 2018

Peta diatas hanya menampilkan risiko bencana tinggi yang termuat dalam dokumen Kajian Rawan Bencana tahun 2018 yang disusun oleh BNPB yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.

5. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan materi teknis revisi RTRW Kabupaten Batang Tahun 2024-2044, arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Batang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Arah kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebegai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

a. Badan Air

Badan air yang dimaksud merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. Badan Air di Kabupaten Batang seluas 737,77 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektare tersebar di 15 (limba belas) kecamatan di Kabupaten Batang.

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya pada Kabupaten Batang berupa kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung merupakan Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung dengan kode HL di Kabupaten Batang seluas 2.885,31 (dua ribu delapan ratus delapan lima koma tiga satu) hektare berada di Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, dan Kecamatan Reban.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Perlindungan Setempat merupakan Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber - sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Adapun kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Batang meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Batang seluas 151,39 (seratus lima puluh satu koma tiga sembilan) hektare berada di Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Batang, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Subah, dan Kecamatan Tulis.

d. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi pada Kabupaten Batang berupa cagar alam. Cagar alam merupakan keadaan alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Kawasan cagar alam di Kabupaten Batang seluas 94,55 (sembilan puluh empat koma lima lima) hektare direncanakan berada di Kecamatan Subah.

2. Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Batang meliputi kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, dan kawasan permukiman.

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi dengan luas 15.345 (lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima) hektare terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 8.760,91 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh koma sembilan satu) hektar tersebar di Kecamatan Bandar Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, dan Kecamatan Wonotunggal. Sedangkan kawasan hutan produksi tetap dengan luas 6.528,09 (enam ribu lima ratus dua puluh delapan koma nol sembilan) tersebar di Kecamatan Bandar, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, Kecamatan Tersono, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Wonotunggal.

b. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Perkebunan Rakyat dengan luas 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) hektare berada di Kecamatan Bandar, Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Limpung, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, Kecamatan Tersono, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Wonotunggal.

c. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian dengan luas 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) hektare terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan.

Kawasan Tanaman Pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rangka penyediaan bahan pangan pokok di Kabupaten dengan luas kurang lebih 26.402,01 (dua puluh enam ribu empat ratus dua koma nol satu) hektar meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 16.681,27 (enam belas ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua tujuh) hektar dan Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan luas kurang lebih 9.720,74 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh koma tujuh empat).

Kawasan hortikultura (dengan luas 19.738 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Batang.

Kawasan perkebunan dengan luas 2.144 (dua ribu seratus empat puluh empat) hektar berada di Kecamatan Bandar, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Wonotunggal.

d. Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan dengan luas 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektare berupa kawasan perikanan budi daya yang berada di Kecamatan Batang, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Subah, dan Kecamatan Tulis.

e. Kawasan Pertambangan Energi

Kawasan Pertambangan Dan Energi dengan luas 252 (dua ratus lima puluh dua) hektare berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yang berada di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis.

f. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri dengan luas 7.938 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) hektare berada di Kecamatan Bandar, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Batang, Kecamatan Blado, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Wonotunggal.

g. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman dengan luas 19.030 (sembilan belas ribu tiga puluh) hektar meliputi Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 15.924 hektare dan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 3.105 (tiga ribu seratus lima) hektar.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan percepatan dan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan kondisi wilayah secara geografis dan administrasi maka potensi pengembangan wilayah dikelompokkan menjadi 5 (lima) Wilayah Perencanaan (WP) berdasarkan potensi dan sumber daya pengembangannya, yaitu :

(1) WP – I meliputi Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Warungasem dengan arah pengembangan wilayah meliputi:

a. penerpaduan pengembangan dengan Kawasan Perkotaan PETANGLONG;
b. penataan dan pengembangan PKL Batang;
c. pengembangan PPK yang mampu menjadi simpul dan distribusi produk olahan hasil pertanian
d. pengembangan industri maritim dan perikanan;
e. pengembangan kawasan peruntukan industri;
f. pengembangan wisata laut dan pesisir;
g. pengembangan pusat pendidikan dan olah raga; dan
h. pengendalian alif fungsi lahan pertanian pangan;

(2) WP - II meliputi Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Blado s dengan arah pengembangan meliputi:
a. pengembangan wisata berskala nasional;
b. penataan dan pengembangan PPK Bandar sebagai pusat WP;
c. pengembangan PPK yang mampu menjadi simpul dan distribusi produk olahan hasil pertanian
d. pengembangan industri pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
e. pengendalian alif fungsi lahan pertanian pangan; dan
f. pengembangan perikanan darat.

(3) WP – III meliputi Kecamatan Subah dan Kecamatan Tulis dengan arah pengembangan meliputi:
a. pengembangan kawasan industri;
b. penataan dan pengembangan Kawasan permukiman perkotaan sebagai pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB);
c. pengembangan industri pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
d. pengembangan wisata buatan, teknologi dan edukasi; dan
e. pengembangan fasilitas logistik pendukung kegiatan industri.

(4) WP - IV meliputi Kecamatan Gringsing Kecamatan Banyuputih dengan arah pengembangan meliputi:
a. pengembangan kawasan industri;
b. penataan dan pengembangan Kawasan permukiman perkotaan sebagai pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB);
c. Pengembangan industri pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan; dan

d. pengembangan wisata buatan, teknologi dan edukasi.
e. pengembangan pelabuhan darat (*dryport*) dan laut pendukung industri.

(5) WP - V meliputi Kecamatan Limpung, Kecamatan Tersono, Kecamatan Reban, dan Kecamatan Bawang dengan arah pengembangan meliputi:
a. pengembangan pariwisata berbasis eko-wisata;
b. penataan dan pengembangan PKL Limpung;
c. pengembangan PPK yang mampu menjadi simpul dan distribusi produk olahan hasil pertanian;
d. pengembangan industri pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
e. pengendalian alif fungsi lahan pertanian pangan;
f. pengembangan perikanan darat.

Sedangkan arahan kebijakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2024-2044, kawasan strategis wilayah Kabupaten Batang terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Batang;
   b. Kawasan Perkotaan Banyuputih-Gringsing;
   c. Kawasan Perkotaan Limpung;
   d. Kawasan Industri Terpadu Batang; dan
   e. Kawasan Pengembangan Pariwisata berbasis eko wisata (wisata pegunungan, wisata budaya, wisata petualangan, dan wisata pantai).
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

6. Demografi

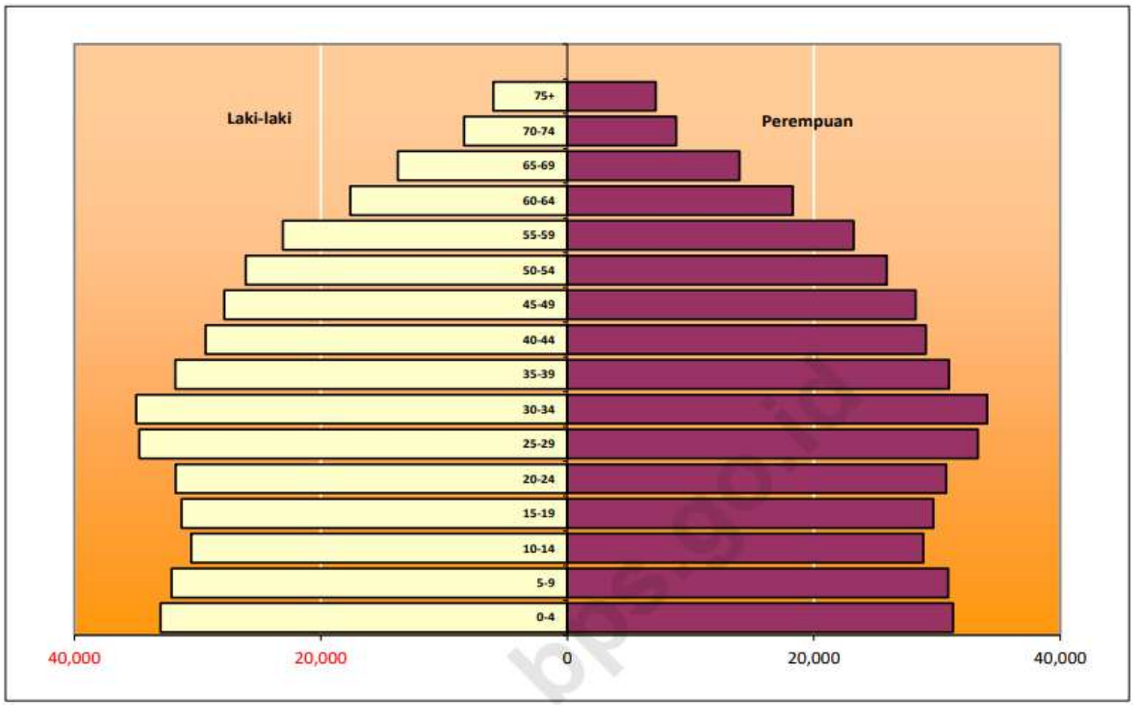
Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan Proyeksi Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 828.883 jiwa dengan

komposisi 417.808 laki-laki dan 411.075 perempuan. Penduduk terbanyak beradad di Kecamatan Batang sebanyak 16,65 persen dan paling sedikit di kecamatan Pecalungan 4,00 persen dari total penduduk Kabupaten Batang. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2023 sebesar 1,44 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Batang tahun 2023 mencapai 1.051 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batang dengan kepadatan sebesar 4.018 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Blado sebesar 597 jiwa/km^2.

Tabel 2. 6
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki Laki	Perempuan	
1	Wonotunggal	20.086	19.844	39.930
2	Bandar	37.552	36.518	74.070
3	Blado	23.831	22.977	46.808
4	Reban	20.875	20.851	41.726
5	Bawang	28.093	27.913	57.006
6	Tersono	21.073	20.808	41.881
7	Gringsing	32.586	32.454	64.040
8	Limpung	22.658	22.710	45.368
9	Subah	27.378	26.473	54.435
10	Tulis	20.085	20.272	40.357
11	Batang	69.391	68.635	138.026
12	Warungasem	28.339	27.462	55.801
13	Kandeman	29.117	28.327	57.444
14	Pecalungan	16.705	16.483	33.188
15	Banyuputih	19.039	18.764	37.803
Jumlah		417.808	411.075	828.883

Sumber: Batang dalam Angka, 2024



Gambar 2. 10 Piramida Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2023
Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2. 7
Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2023

Usia	Total			
	Pria	Wanita	Jumlah	%
0-4	33.752	32.257	66.009	7,96
5-9	33.103	31.562	64.665	7,80
10-14	31.657	30.122	61.779	7,45
15-19	30.930	29.196	60.126	7,25
20-24	31.844	30.629	62.473	7,54
25-29	33.483	32.291	65.774	7,94
30-34	35.074	34.034	69.108	8,34
35-39	33.491	32.814	66.305	8,00
40-44	30.048	29.659	59.707	7,20
45-49	27.718	28.071	55.789	6,73
50-54	25.693	26.170	51.863	6,26
55-59	23.209	23.351	46.560	5,62
60-64	18.643	19.189	37.832	4,56
65-69	13.599	14.236	27.835	3,36
70-74	9.091	9.614	18.705	2,26
75+	6.473	7.880	14.353	1,73
Jumlah	**412.365**	**411.075**	**828.883**	**100**

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2024

Dari Gambar 2.10 dan Tabel 2.8 diketahui bahwa berdasarkan kelompok usia penduduk, populasi penduduk usia muda dan produktif lebih besar bila dibandingkan dengan penduduk populasi usia non produktif. Pertumbuhan

jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), sedangkan penduduk kabupaten Batang terbanyak berada pada rentang usia 30 - 34 tahun sebanyak 8,34 persen. Kondisi ini disebut sebagai bonus demografi dimana jumlah penduduk produktif semakin banyak dan jumlah penduduk non produktif semakin berkurang. Bonus demografi akan menjadi keuntungan bagi suatu daerah jika penduduk produktif tersebut merupakan penduduk yang berkualitas yaitu berpendidikan tinggi dan terampil atau berkeahlian.

Tabel 2. 8
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Batang
Tahun 2019 - 2023

TAHUN	TIDAK / BELUM TAMAT SD	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	STRATA
2019	24,38	37,01	20,39	14,17	1,02	3,03
2020	24,58	33,86	20,35	16,97	0,81	3,44
2021	24,92	33,71	21,69	16,02	0,66	2,99
2022	23,94	33,60	21,48	17,13	0,80	3,05
2023	23,47	33,14	22,21	17,17	0,62	3,40

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2024

Pada Tabel 2.9 diketahui bahwa persentase penduduk pada penduduk 10 tahun keatas yang belum tamat SD selama 5 tahun terakhir baru menurun pada tahun 2023 yakni dari 23,94 di tahun 2022 menjadi 23,47 di tahun 2023 sementara itu tamatan SMP, SMA dan Strata mengalami peningkatan pada tahun 2023. Capaian tersebut mencerminkan semakin membaiknya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Batang.

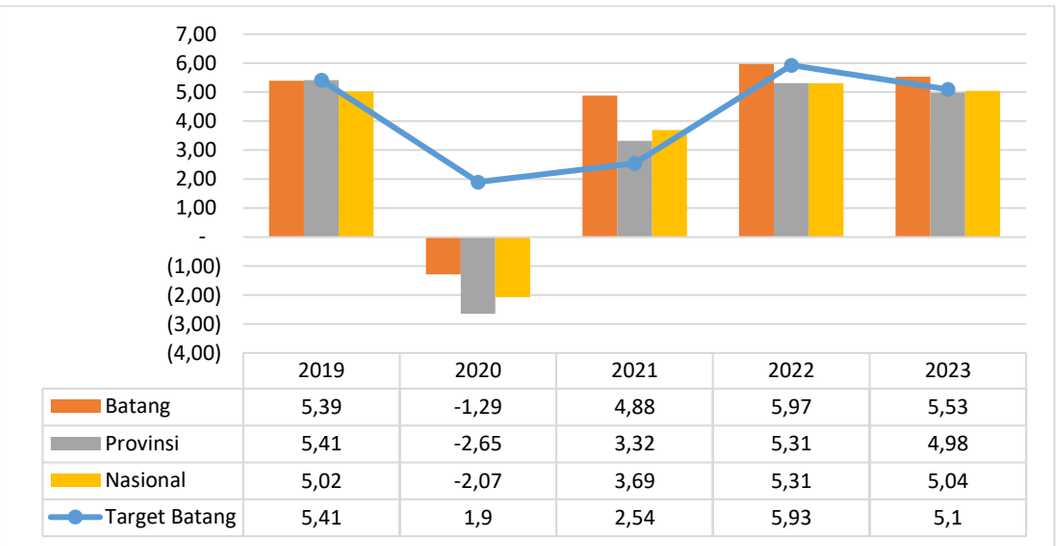
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kesejahteraan sosial dapat dilihat dari kondisi capaian indikator berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada kisaran minus 1,29 persen hingga tertinggi pada capaian 5,97 persen. Pada tahun 2019,

perekonomian Kabupaten Batang tumbuh sebesar 5,39 persen dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 1,29 persen akibat dari adanya pandemi *Covid*-19. Capaian ini jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1,90 persen. Bukan hanya di Kabupaten Batang, pandemi *Covid*-19 juga menyebabkan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar 2,65 persen dan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2021 perekenomian Kabupaten Batang mulai bangkit menjadi 4,88 persen, angka ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yaitu sebesar 2,54 persen dan jauh lebih tinggi dibanding dengan capaian provinsi dan nasional yakni sebesar 3,32 persen dan 3,69 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,97 persen yang kemudian menurun menjadi 5,53 persen pada tahun 2023. Namun angka ini masih lebih tinggi disbanding capaian nasional dan provinsi. Kondisi ekonomi Kabupaten Batang jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2019 – 2023 sebagaimana tersaji dalam grafik gambar berikut :



	2019	2020	2021	2022	2023
Batang	5,39	-1,29	4,88	5,97	5,53
Provinsi	5,41	-2,65	3,32	5,31	4,98
Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04
Target Batang	5,41	1,9	2,54	5,93	5,1

Gambar 2. 11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021-2024 dan Statistik Indonesia Tahun 2024

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang tidak terlepas dari sumbangan dari masing-masing sektor perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Kabupaten Batang mengalami tren kenaikan tiap tahun. Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Batang pada tahun 2023 berasal dari sektor industri pengolahan yang menyumbang 9.636.926,23 juta rupiah (34,56%) dari total PDRB yang disusul dari sektor Pertanian dengan menyumbang sebesar

5.307.404,68 juta rupiah (19,03%). Selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3.493.458,89 juta rupiah (12,53%) dan sektor konstruksi sebesar 2.160.740,00 juta rupiah (7,75%) yang kemudian di lima besar terakhir penyumbang PDRB terbesar dari sektor Jasa Pendidikan 1.515.335,64juta rupiah (5,43%).

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Batang Tahun 2023 mencapai 27.886.599,15 juta rupiah, jumlah ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 25.488.048,01 juta rupiah. Selengkapnya PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Batang Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 9
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.395.176,61	4.656.020,56	4.746.326,78	5.057.304,20	5.307.404,68
B	Pertambangan dan Penggalian	646.533,89	660.610,77	706.207,85	722.803,73	767.067,70
C	Industri Pengolahan	7.436.242,61	7.368.499,52	7.883.059,12	8.717.236,63	9.636.926,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.758,78	14.383,77	15.673,91	16.649,29	17.762,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.419,44	23.209,85	23.743,67	24.779,49	27.164,02
F	Konstruksi	1.196.356,29	1.189.042,66	1.668.969,88	1.854.880,61	2.160.740,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.848.979,37	2.746.140,70	2.946.563,79	3.175.421,16	3.493.458,89
H	Transportasi dan Pergudangan	497.698,55	375.835,73	396.530,85	744.366,16	881.721,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	830.855,81	784.096,84	845.052,24	1.058.517,93	1.165.319,58
J	Informasi dan Komunikasi	579.618,62	679.710,57	710.773,34	734.157,78	789.766,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	367.418,38	369.556,79	394.436,65	431.428,06	454.448,93
L	Real Estate	224.537,47	222.325,48	227.883,62	242.399,80	106.475,94
M,N	Jasa Perusahaan	88.522,90	84.314,96	87.603,25	97.502,85	106.475,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	503.877,61	504.043,88	495.122,31	517.915,64	524.752,35
P	Jasa Pendidikan	1.345.408,13	1.353.876,24	1.371.476,63	1.408.731,62	1.515.335,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.514,55	179.312,69	186.521,06	196.704,79	217.336,21
R,S,T,U	Jasa lainnya	427.945,48	408.311,82	419.811,05	492.648,27	553.100,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**21.585.864,48**	**21.619.292,81**	**23.125.755,99**	**25.488.048,01**	**27.886.599,15**

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023 dan Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2. 10
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2023

Sektor PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.24	4.06	-0.47	1.75	-0.29
B. Pertambangan dan Penggalian	0.90	-0.18	5.83	-0.76	3.19
C. Industri Pengolahan	5.45	-2.82	4.38	5.46	5.28
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.61	6.13	9.89	5.42	3.41
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.57	2.38	1.22	2.33	8.49
F. Konstruksi	1.09	-1.03	35.78	4.36	13.01
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.49	-4.26	5.95	3.65	6.26
H. Transportasi dan Pergudangan	8.39	-26.50	1.68	77.42	8.11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.10	-6.48	5.31	20.32	14.31
J. Informasi dan Komunikasi	10.49	17.13	4.54	3.02	7.25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.77	0.66	2.35	0.56	3.17
L. Real Estate	5.42	-1.26	1.33	4.67	9.23
M,N. Jasa Perusahaan	9.03	-6.74	2.65	6.56	5.14
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.11	-1.20	-0.74	1.79	-0.01
P. Jasa Pendidikan	7.82	-0.10	0.07	2.13	6.31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	6.87	9.14	2.94	3.82	7.59
R,S,T,U. Jasa Lainnya	10.80	-5.65	1.96	12.68	9.27
Produk Domestik Regional Bruto	**5.39**	**-1.29**	**4.88**	**5.97**	**5.53**

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023 dan Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel 2.14 terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB tertinggi terdapat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 14,31% yang disusul oleh sektor Konstruksi sebesar 13,01%. Sebaliknya laju pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yaitu masing masing -0,29 dan -0,01.

Selanjutnya jika dilihat dari distribusi persentase PDRB pada 5 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Batang masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan (34,56%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (19,03%); dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor (12,53%). Pada tahun 2023, ketiga sektor tersebut berkontribusi sebesar 66,12% dari total PDRB Kabupaten Batang, turun sebesar 0,36% jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 66,48 %. Dari ketiga sektor tersebut, penurunan kontribusi terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang turun 0,85% pada tahun 2023 menjadi 19,03% dari 19,88% pada tahun 2022. Kondisi sebaliknya terjadi pada sektor Konstruksi yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Batang. Dari 7,29% pada tahun 2022 menjadi 7,75% di tahun 2023, atau mengalami kenaikan sebesar 0,46%. Pembangunan Kawasan industri menjadi faktor penting kenaikan persentase distribusi pada sektor tersebut. Sementara sektor-sektor lain cenderung stabil.

Tabel 2. 11
Distribusi persentase PDRB Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Sektor PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,36	21,53	20,52	19,82	19,03
B. Pertambangan dan Penggalian	3,00	3,06	3,05	2,84	2,75
C. Industri Pengolahan	34,45	34,08	34,09	34,20	34,56
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,10	0,10	0,1
F. Konstruksi	5,54	5,50	7,22	7,28	7,75
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,20	12,70	12,74	12,46	12,53
H. Transportasi dan Pergudangan	2,31	1,75	1,71	2,92	3,16
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,85	3,63	3,65	4,15	4,18
J. Informasi dan Komunikasi	2,69	3,14	3,07	2,88	2,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,70	1,71	1,71	1,69	1,63
L. Real Estate	1,04	1,03	0,99	0,95	0,96
M,N. Jasa Perusahaan	0,41	0,39	0,38	0,38	0,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	2,33	2,14	2,03	1,88
P. Jasa Pendidikan	6,23	6,26	5,93	5,53	5,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	0,74	0,83	0,81	0,77	0,78
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,98	1,89	1,82	1,93	1,98
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023 dan Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Sedangkan PDRB atas harga konstan Kabupaten Batang tahun 2023 sebesar 17.629.389,28 juta rupiah meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 16.704.986,75 juta rupiah. Kontribusi tertinggi diberikan oleh sektor Industri Pengolahan dengan menyumbang sebesar 5.760.221,01 juta rupiah (32,67%) selanjutnya disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan menyumbang sebesar 3.006.924,88 juta rupiah (17,06%). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2.452.940,00 juta rupiah (13,91%) dari PDRB yang kemudian disusul sektor Konstruksi sebesar 1.311.612,98 juta rupiah (7,44%) dan lima besar penyumbang terbesar terakhir dari sektor Jasa Pendidikan sebesar 921.900,83 juta rupiah (5,23%). Peningkatan terbesar ADHK menurut Lapangan Usaha pada tahun 2023 berada di sektor Konstruksi yakni mencapai angka 13,00% yang kemudian disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan peningkatan sebesar 10,47%. Sebagaimana kondisi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 12
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.861.458,05	2.977.772,61	2.963.785,83	3.016.331,06	3.006.924,88
B	Pertambangan dan Penggalian	406.042,94	405.324,81	428.966,34	425.714,77	439.315,74
C	Industri Pengolahan	5.091.398,13	4.947.572,62	5.164.177,57	5.445.934,39	5.760.221,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.662,00	12.376,51	13.600,45	14.337,02	14.826,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.616,75	19.059,92	19.292,48	19.742,41	21.418,74
F	Konstruksi	827.610,09	819.046,23	1.112.109,97	1.160.652,38	1.311.612,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.195.585,27	2.102.712,81	2.227.173,18	2.308.457,86	2.452.940,00
H	Transportasi dan Pergudangan	424.195,54	310.474,56	317.018,69	562.440,12	608.055,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	628.835,79	588.060,38	619.311,59	745.174,61	823.251,85
J	Informasi dan Komunikasi	614.640,75	719.911,65	752.583,55	775.319,10	831.507,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	251.831,84	253.493,64	259.462,43	260.903,41	269.161,86

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
L	Real Estate	183.684,34	181.361,19	183.778,74	192.365,06	210.126,51
M,N	Jasa Perusahaan	61.948,33	57.775,36	59.304,10	63.195,90	66.443,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	343.704,55	339.564,23	337.041,69	343.078,99	343.044,63
P	Jasa Pendidikan	849.340,21	848.468,12	849.039,14	867.162,11	921.900,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115.243,59	125.776,75	129.472,68	134.422,04	144.621,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	341.086,84	321.825,63	328.147,12	369.755,51	404.015,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**15.226.885,02**	**15.030.577,04**	**15.764.265,54**	**16.704.986,75**	**17.629.389,28**

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023 dan Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Selanjutnya nilai ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran mencapai 25.488.048.01 juta rupiah, yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga sebesar 17.860.508.26 (69,68%) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6.810.506,03 juta rupiah (26,72%). Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) yaitu 77,32 persen. Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventori (1,99). Nilai PDRB Kabupaten Batang ADHB menurut pengeluaran selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut masih dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi.

Tabel *2. 13*
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran) Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.465.989,48	15.568.041,10	16.184.573,40	17.860.508.26	17.860.508.26
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	366.508,69	352.637,80	364.824,14	410.823.63	410.823.63
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.543.955,31	1.527.434,99	1.567.301,04	1.584.128.07	1.584.128.07
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8.625.319,98	6.116.316,15	6.229.771,65	6.810.506.03	6.810.506.03

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran) Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perubahan Inventori	- 476.473,55	521.481,68	390.464,63	500.782.76	500.782.76
Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.939.580,44	-2.364.548,91	-1.611.178,87	-1.678.700.73	-1.678.700.73
Produk Domestik Regional Bruto	**21.585.719,48**	**21.621.362,81**	**23.125.755,99**	**25.488.048.01**	**25.488.048.01**

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023 dan Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Selama periode 2019-2023, konsumsi rumah tangga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran tahun 2023 peranannya masih begitu dominan yaitu sebesar 70,98 persen. Pengeluaran untuk pembentukan modal atau kapital (PMTB) porsinya terhadap PDRB menempati urutan kedua setelah konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2023 porsi PMTB sebesar 24,77 persen. Pada pengeluaran konsumsi akhir pemerintah tahun 2023, hanya mencapai 5,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam membentuk PDRB tidak mendominasi. Pada tahun 2019-2023, perdagangan Kabupaten Batang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa net ekspor barang dan jasa bernilai negatif, yang berarti bahwa perdagangan Kabupaten Batang selama kurun waktu 2019-2023 selalu menunjukkan posisi “defisit” yang mencapai-5,55 persen di tahun 2023. Capaian ini cenderung menurun dari tahun ke tahun. Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1,39 persen. Peranan institusi ini dalam perekonomian masih perlu mendapat perhatian, sehingga pada masa mendatang dapat semakin meningkat. Kondisi PDRB ADHK Menurut pengeluaran tersaji dalam tabel berikut ini :

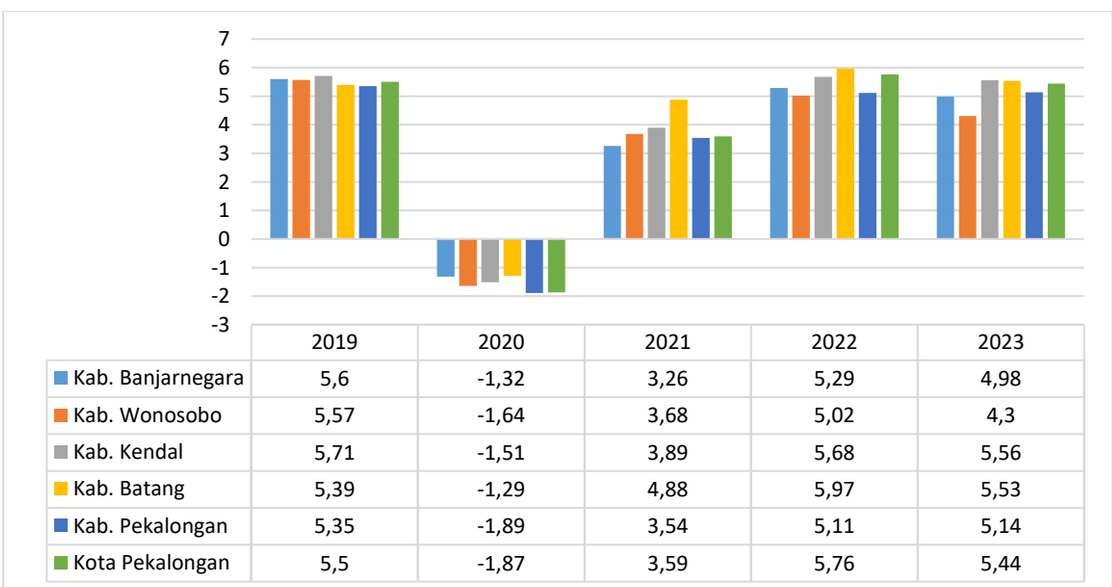
Tabel 2. 14
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Batang Tahun 2019 – 2023

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran) Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.196.748,99	11.068.624,84	11.265.953,40	11.916.678,77	12.514.561,45
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	229.889,33	217.574,16	218.713,77	229.482,09	246.043,64
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	971.488,58	960.782,78	960.632,13	961.400,63	982.841,68
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5.357.248,90	3.839.547,20	3.924.731,82	4.150.417,12	4.366.661,36

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran) Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perubahan Inventori	- 434.472,76	504.245,43	372.517,51	479.746,43	497.870,23
Ekspor Barang dan Jasa	- 2.094.018,01	- 1.560.197,36	- 978.283,08	- 1.032.738,29	- 978.589,09
Produk Domestik Regional Bruto	**15.226.885,02**	**15.030.577,04**	**15.764.265,54**	**16.704.986,75**	**17.629.389,28**

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023 dan Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Kontraksi ekonomi di tahun 2020 akibat Pandemi *Covid*-19 cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Kabupaten/Kota di sekitar Batang hingga mencapai rentang minus 1,29 persen hingga minus 1,89 persen. Namun pada tahun 2021 hingga 2023 ini, kondisi ekonomi di sekitar kabupaten/kota sekitar Batang sudah berangsur membaik yang ditandai dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2023 mencapai 5,53 persen dimana capaian ini menurun dari tahun 2022 yang mencapai 5,97 persen. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan 3 Kabupaten/Kota sekitar yakni Kabupaten Wonosobo sebesar 4,30 persen, Kabupaten Pekalongan sebesar 5,14 persen, dan Kabupaten Banjarnegara sebesar 4,98 persen. Dan masih lebih rendah disbanding 2 kabupaten kota yaitu Kabupaten Kendal sebesar 5,56 persen dan Kota Pekalongan sebesar 5,44 persen. Sebagaimana capaian tersebut tersaji dalam grafik berikut ini :



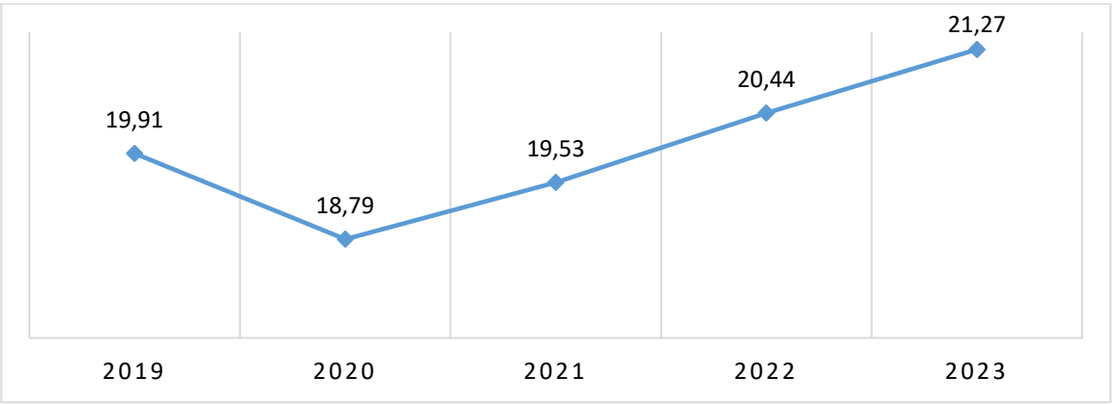
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Banjarnegara	5,6	-1,32	3,26	5,29	4,98
Kab. Wonosobo	5,57	-1,64	3,68	5,02	4,3
Kab. Kendal	5,71	-1,51	3,89	5,68	5,56
Kab. Batang	5,39	-1,29	4,88	5,97	5,53
Kab. Pekalongan	5,35	-1,89	3,54	5,11	5,14
Kota Pekalongan	5,5	-1,87	3,59	5,76	5,44

Gambar 2. 12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021-2024

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dengan mengetahui besarnya nilai pendapatan per kapita yaitu dengan

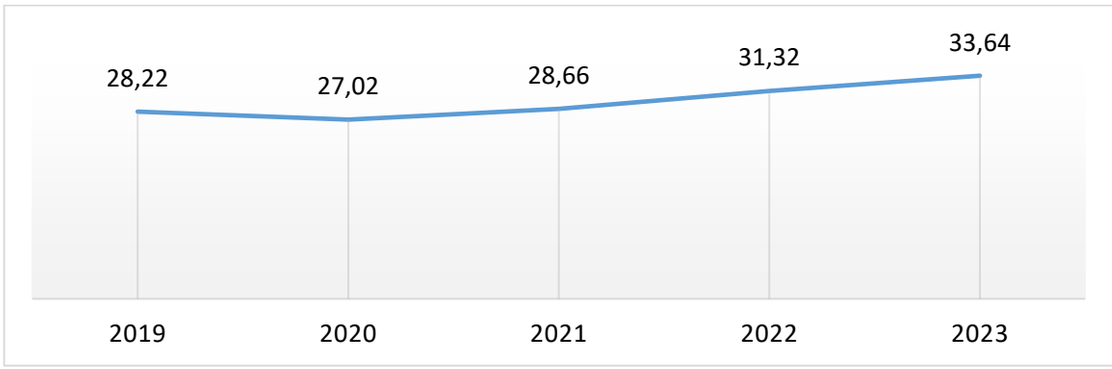
menghitung PDRB per kapita. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita ADHK untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Batang kurun waktu 2019-2023 terus mengalami peningkatan walaupun sempat menurun akibat adanya pandemi COVID 19 di tahun 2020. PDRB ADHK Kabupaten Batang tahun 2018 sebesar 19,91 juta Rupiah terus meningkat menjadi sebesar 21,27 juta Rupiah di tahun 2023, namun akibat dampak pandemi *Covid*-19, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Batang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 18,79 juta rupiah, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 13 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Batang Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023 dan Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

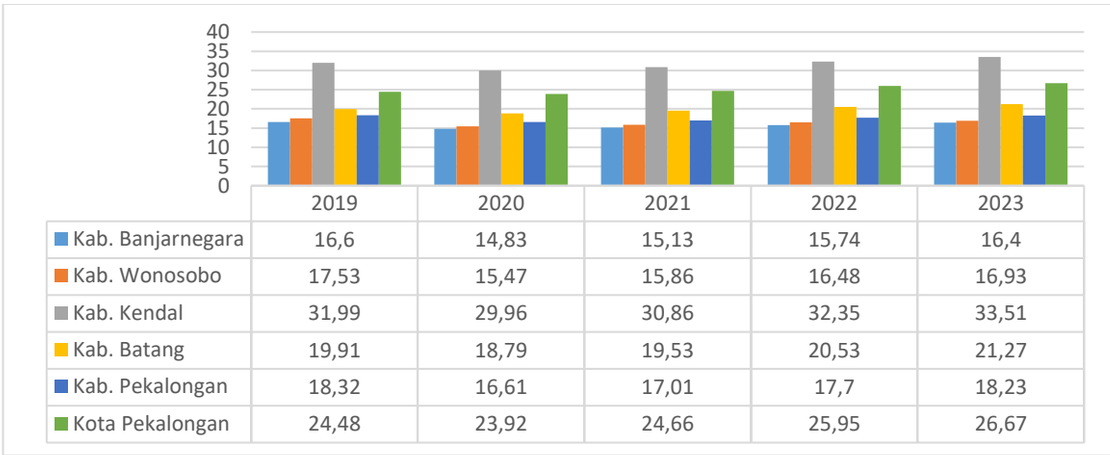
Sedangkan pada PDRB per kapita ADHB Kabupaten Batang kurun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2019 PDRB Perkapita ADHB sebesar 28,22. Namun, pada tahun 2020 PDRB per kapita ADHB Kabupaten Batang mengalami penurunan menjadi sebesar 27,02 juta rupiah dan mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2023 menjadi sebebsar 33,64. Perubahan PDRB per Kapita tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian juga karena faktor inflasi, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 14 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2024

Capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Batang Tahun 2023 (21,27%) jika dibandingkan Kabupaten/Kota sekitar terlihat lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara (16,4%), Kabupaten Wonosobo (16,93%), dan Kabupaten Pekalongan (18,23%). Namun capaian Kabupaten Batang lebih rendah dibanding Kabupaten Kendal (33,51%) dan Kota Pekalongan (26,67%), sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini :



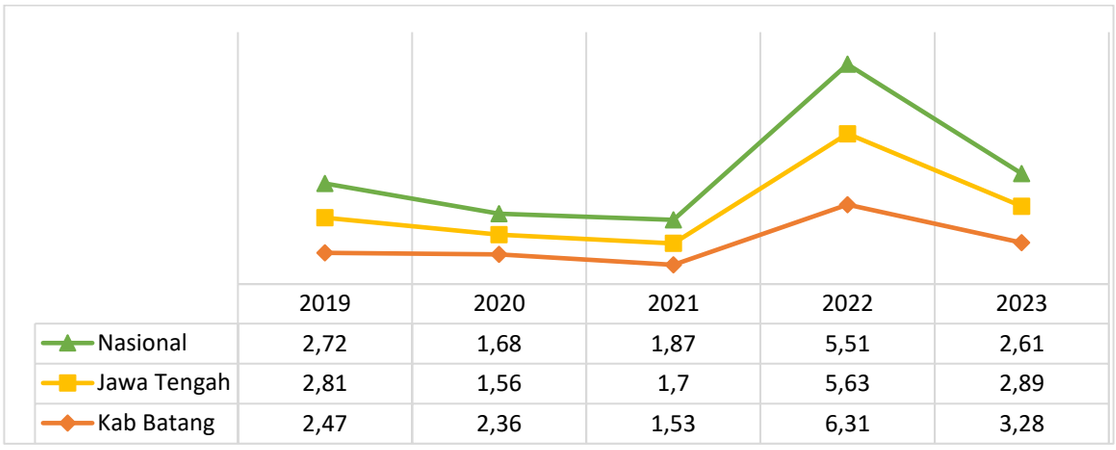
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Banjarnegara	16,6	14,83	15,13	15,74	16,4
Kab. Wonosobo	17,53	15,47	15,86	16,48	16,93
Kab. Kendal	31,99	29,96	30,86	32,35	33,51
Kab. Batang	19,91	18,79	19,53	20,53	21,27
Kab. Pekalongan	18,32	16,61	17,01	17,7	18,23
Kota Pekalongan	24,48	23,92	24,66	25,95	26,67

Gambar 2. 15 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK dengan rata rata capaian wilayah sekitar Tahun 2019-2023

Sumber : Prov Jateng dalam Angka, 2024

2. Laju Inflasi

Sejak tahun 2020 angka inflasi sudah tidak dihitung pada semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, angka inflasi hanya dihitung pada 6 Kota (*sister* city) yaitu Tegal, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Semarang dan Surakarta. Angka inflasi Kabupaten Batang mengacu pada angka inflasi Kota Tegal tahun 2019-2023 selengkapnya tersaji pada gambar berikut:



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61
Jawa Tengah	2,81	1,56	1,7	5,63	2,89
Kab Batang	2,47	2,36	1,53	6,31	3,28

Gambar 2. 16 Laju inflasi Kabupaten Batang dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023 (%)

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2024 & Statistik Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa laju inflasi di Kabupaten Batang dalam kurun waktu tahun 2019-2023 relatif terkendali berada pada rentang 2,47 persen hingga 3,38 persen. Capaian inflasi 3,38 persen di Kabupaten Batang pada tahun 2023 jauh lebih lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Tengah dan Nasional. Selama bulan Januari hingg Desember tahun 2023, penyumbang utama inflasi didominasi oleh komoditas cabai dan beras.

3. Tingkat Ketimpangan

Jumlah pendapatan atau distribusi pendapatan yang diterima oleh penduduk mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk atau wilayah. Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai range nilai 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati 0 menunjukan semakin rendah ketimpangannya dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukan semakin tinggi ketimpangan (jurang pemisah antara si kaya dan si miskin lebar). Secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

0,00 < G < 0,35	pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
0,35 ≤ G ≤ 0,50	pemerataan / ketimpangan sedang
G > 0,50	pemerataan rendah / ketimpangan tinggi.

Namun sejak tahun 2016, indeks Gini sudah tidak lagi dilakukan di tingkat Kabupaten. Alternatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan di daerah adalah menggunakan indikator ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Distribusi pengeluaran Kabupaten Batang pada pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah berdasarkan kriteria Bank Dunia 2019-2023 pada kurun waktu empat tahun terakhir berada diatas 17 persen, tahun 2019 sebesar 21,56 persen yang terus menurun hingga tahun 2023 sebesar 20,17 yang artinya tingkat ketimpangan di Kabupaten Batang berada pada kategori ketimpangan rendah.

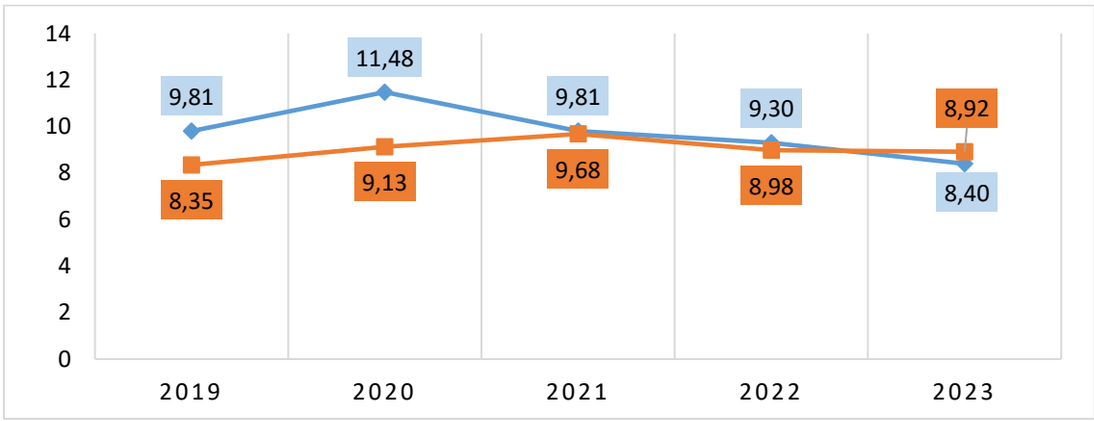
Tabel 2. 15
Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Kategori	40% bawah	40% tengah	20% atas
2019	21,56	39,65	38,79
2020	21,26	40,61	38,13
2021	21,79	38,97	39,24
2022	22,41	39,06	38,53
2023	20,17	38,29	41,54

Sumber : Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2019- 2024

4. Kondisi Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Batang berfluktuasi dari periode tahun 2019-2023 sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini :

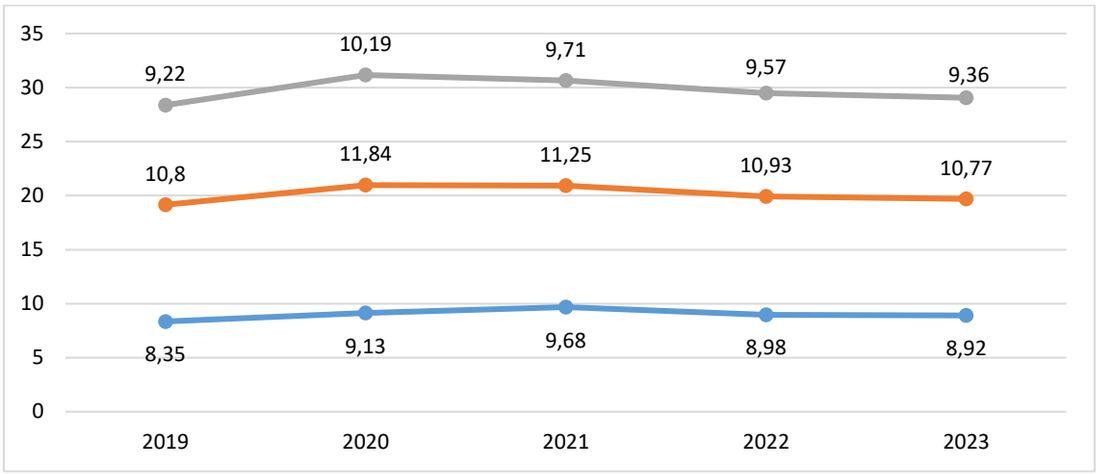


Gambar 2. 17 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan target daerah tahun 2019 - 2023

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel 2.16 terlihat bahwa terjadi penurunan kemiskinan Kabupaten Batang dari sebesar 8,35% pada tahun 2019 menjadi 8,92% pada tahun 2023. Tingkat Pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar -0,71%. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang Tahun 2023. Kondisi kemiskinan Kabupaten Batang mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 namun menurun kembali hingga tahun 2023. Upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang salah satunya melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan kemudahan akses berupa bantuan atau stimulan pendidikan, kesehatan, pangan, rumah layak, dan akses KB, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial/subsidi untuk masyarakat miskin, penanganan masalah kesejahteraan sosial dan jaminan sosial dan jaminan kesehatan warga miskin.

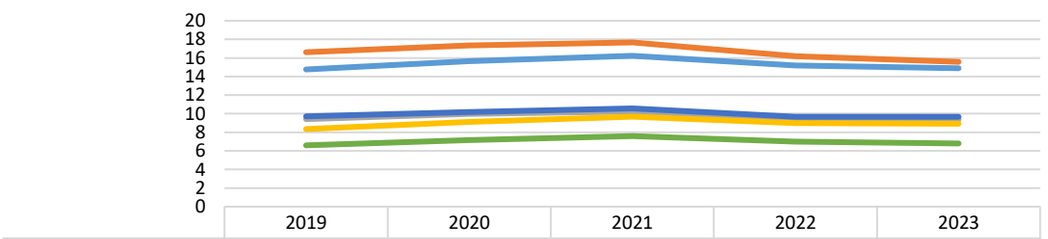
Persentase penduduk miskin Kabupaten Batang di tahun 2023 jauh dibawah angka capaian Provinsi Jawa tengah dan Nasional yakni pada angka 8,92% dimana capaian provinsi sebesar 10,77% dan nasional sebesar 9,36%. Selengkapnya pada gambar berikut :



Gambar 2. 18 Perbandingan pencapaian persentase penduduk miskin daerah dengan capaian provinsi dan nasional tahun 2019 - 2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024, Statistik Indonesia 2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, persentase penduduk miskin Kabupaten Batang tahun 2023 masih lebih rendah dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 14,90%, Kabupaten Wonosobo sebesar 15,58%, Kabupaten Kendal sebesar 9,39% dan Kabupaten Pekalongan sebesar 9,67%, namun masih lebih tinggi capaiannya jika dibandingkan Kota Pekalongan yaitu sebesar 6,81%. Sebagaimana perbandingan tersebut tersaji dalam grafik berikut ini :

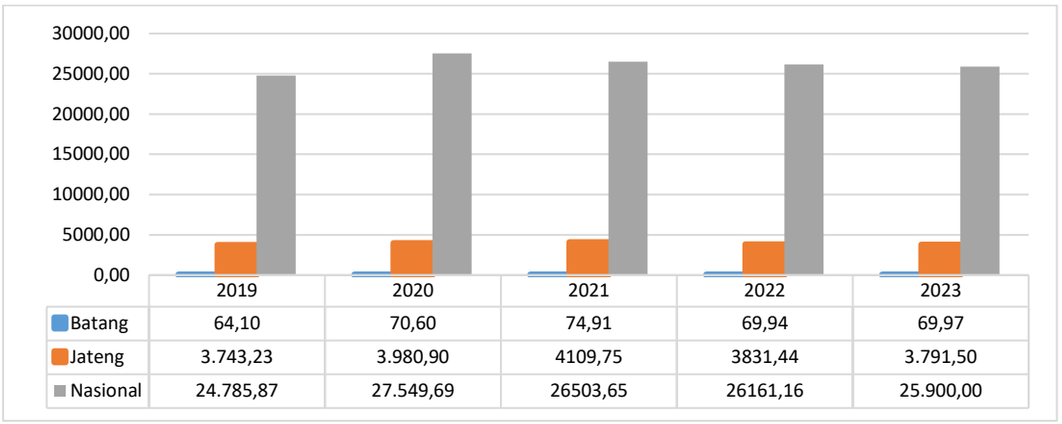


	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Banjarnegara	14,76	15,64	16,23	15,2	14,9
Kab. Wonosobo	16,63	17,36	17,67	16,17	15,58
Kab. Kendal	9,41	9,99	10,24	9,48	9,39
Kab. Batang	8,35	9,13	9,68	8,98	8,92
Kab. Pekalongan	9,71	10,19	10,57	9,67	9,67
Kota Pekalongan	6,6	7,17	7,59	7	6,81

Gambar 2. 19 Perbandingan perubahan persentase penduduk miskin dengan capaian kab/kota sekitar tahun 2019 - 2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024

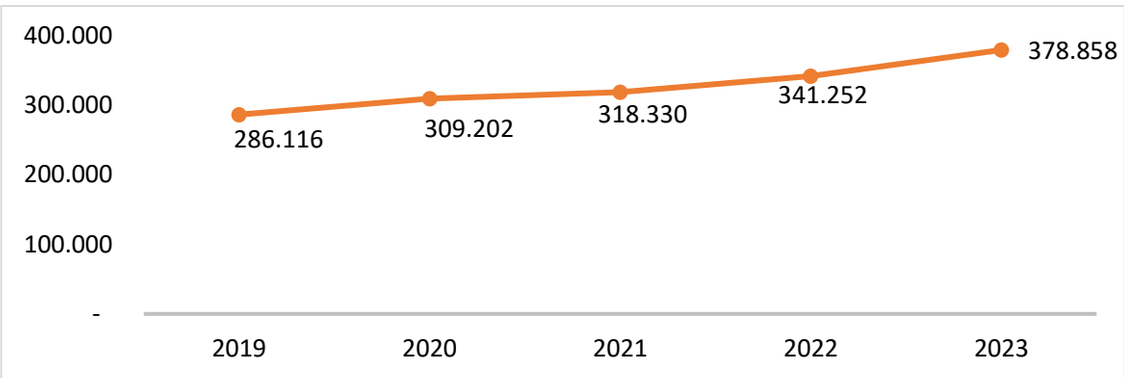
Tingkat perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang dibanding dengan capaian nasional dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2020 menuju 2021 meningkat akibat pandemi *covid 19* yang kemudian menurun menjadi 69,94 ribu jiwa pada tahun 2022. Dan meningkat kembali menjadi 69,97 ribu jiwa pada tahun 2023. Sebagaimana tersaji dalam grafik dibawah ini :



	2019	2020	2021	2022	2023
Batang	64,10	70,60	74,91	69,94	69,97
Jateng	3.743,23	3.980,90	4109,75	3831,44	3.791,50
Nasional	24.785,87	27.549,69	26503,65	26161,16	25.900,00

Gambar 2. 20
Perbandingan Pertumbuhan jumlah penduduk miskin daerah dengan capaian nasional Tahun 2019 – 2023 (ribu jiwa)
Sumber : Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024, Statistik Indonesia 2024

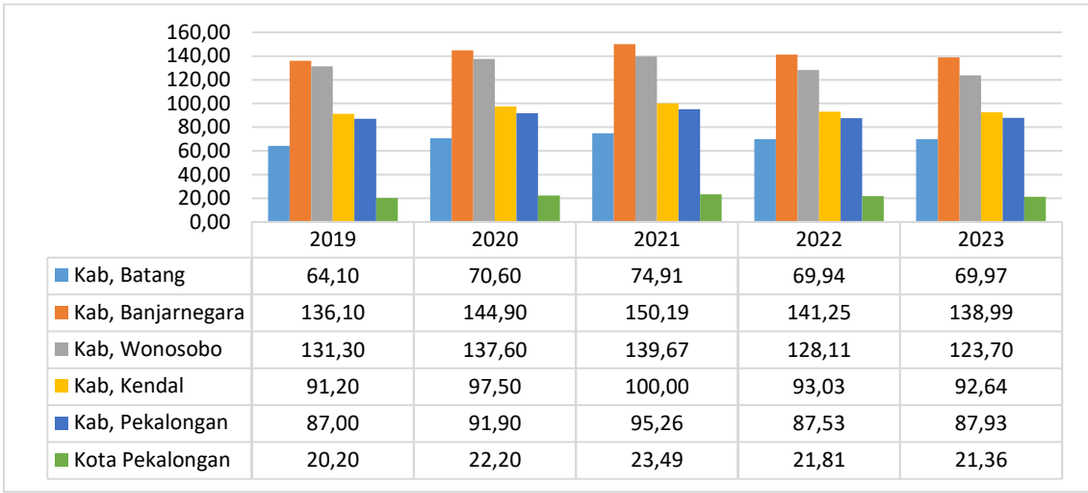
Peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabuptaen Batang pada tahun 2023 disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Batang serta peningkatan garis kemiskinan (GKM). Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Batang terus meningkat, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 21 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Tahun 2019-2023
Sumber : Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di sekitar, jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang tahun pada tahun 2022 masih lebih rendah dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Kendal. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang pada tahun 2023 sejumlah 69,97 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 138,99 ribu jiwa, Kabupaten Wonosobo sebesar 123,70 ribu jiwa, Kabupaten Kendal sebesar 92,64 ribu jiwa, Kabupaten Pekalongan sebesar 87,93 ribu jiwa. Namun demikian, jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota Pekalongan sebesar 21,86 ribu jiwa.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2019-2023 selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:



	2019	2020	2021	2022	2023
Kab, Batang	64,10	70,60	74,91	69,94	69,97
Kab, Banjarnegara	136,10	144,90	150,19	141,25	138,99
Kab, Wonosobo	131,30	137,60	139,67	128,11	123,70
Kab, Kendal	91,20	97,50	100,00	93,03	92,64
Kab, Pekalongan	87,00	91,90	95,26	87,53	87,93
Kota Pekalongan	20,20	22,20	23,49	21,81	21,36

Gambar 2. 22 Perbandingan pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang dengan rata rata capaian wilayah kab/kota sekitar Tahun 2019 - 2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024

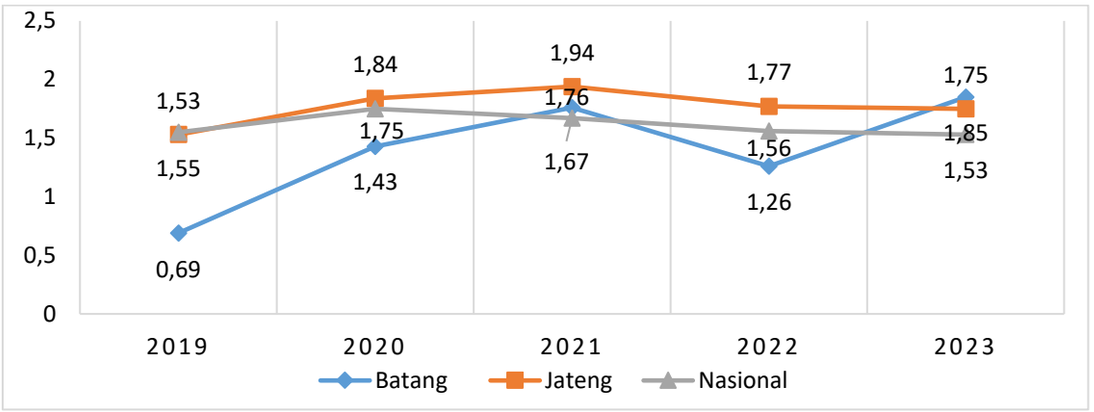
a) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) selama periode 2019-2023 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, P1 Kabupaten Batang berada pada angka 0,69 dan terus meningkat menjadi 1,85 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar.

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di atas provinsi dan nasional;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan di atas nasional;
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:

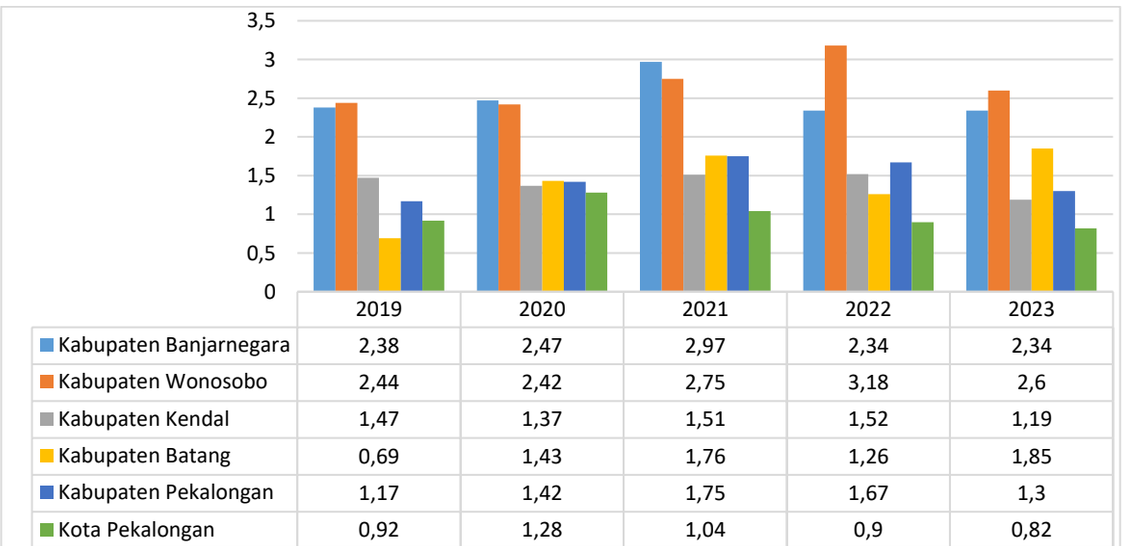


Gambar 2. 23 Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang Dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024, Statistik Indonesia 2024

Berdasarkan grafik dan kriteria relative di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang tahun 2023 sebesar 1,85 masuk dalam kategori Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi yang artinya bahwa Kabupaten Batang memiliki P1 dibawah provinsi sebesar 1,75 dan nasional sebesar 1,53. Hal ini menandakan bahwa semakin jauhnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan Kabupaten Batang.

Pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batang dengan Kabupaten/Kota sekitar dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini :



	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Banjarnegara	2,38	2,47	2,97	2,34	2,34
Kabupaten Wonosobo	2,44	2,42	2,75	3,18	2,6
Kabupaten Kendal	1,47	1,37	1,51	1,52	1,19
Kabupaten Batang	0,69	1,43	1,76	1,26	1,85
Kabupaten Pekalongan	1,17	1,42	1,75	1,67	1,3
Kota Pekalongan	0,92	1,28	1,04	0,9	0,82

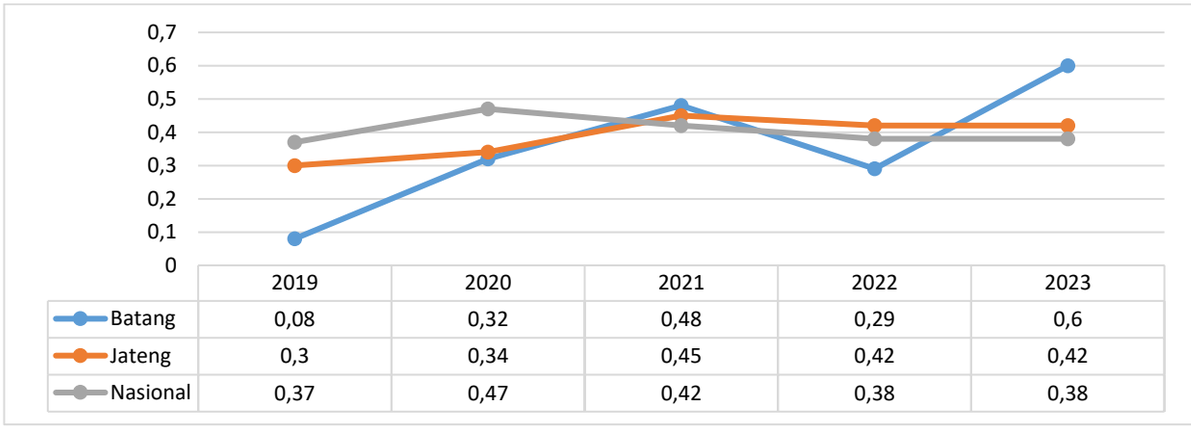
Gambar 2. 24 Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batang dengan rata rata capaian Kab/Kota sekitar Tahun 2019 - 2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024

b) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2

menandakan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

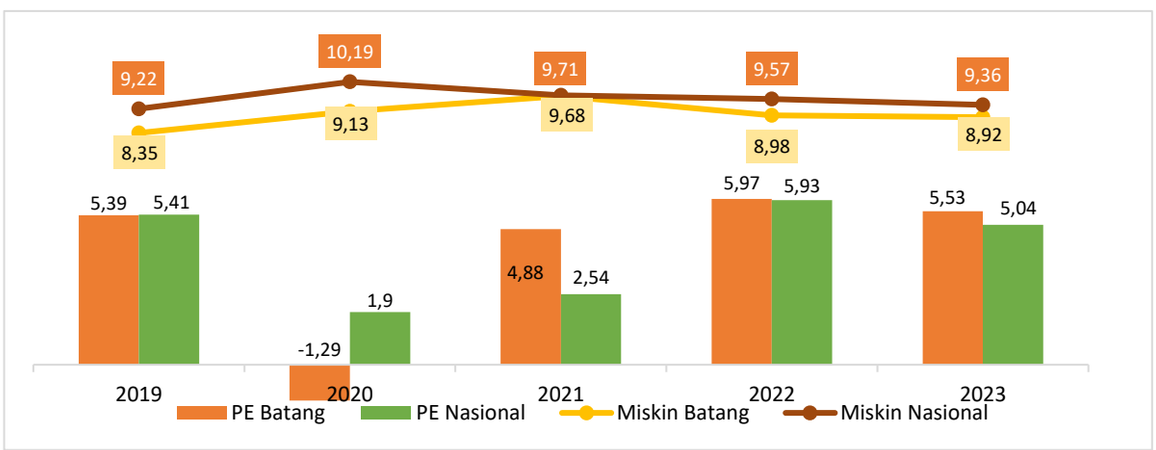


	2019	2020	2021	2022	2023
Batang	0,08	0,32	0,48	0,29	0,6
Jateng	0,3	0,34	0,45	0,42	0,42
Nasional	0,37	0,47	0,42	0,38	0,38

Gambar 2. 25 Tingkat Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan
Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023 dan Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Berangkat dari P2 sebesar 0,08 pada tahun 2019, hingga tahun 2023 P2 atau keparahan kemiskinan di Kabupaten Batang meningkat menjadi 0,60 poin dan masih jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menandakan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Batang. Sehingga masih perlu dilakukan perbaikan dalam upaya pemerataan ekonomi di masyarakat guna mengurangi tingkat kesejangan masyarakat.

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional masuk pada kategori rendah, yang artinya Kabupaten Batang memiliki P2 di bawah provinsi (0,42) dan di bawah nasional (0,38).



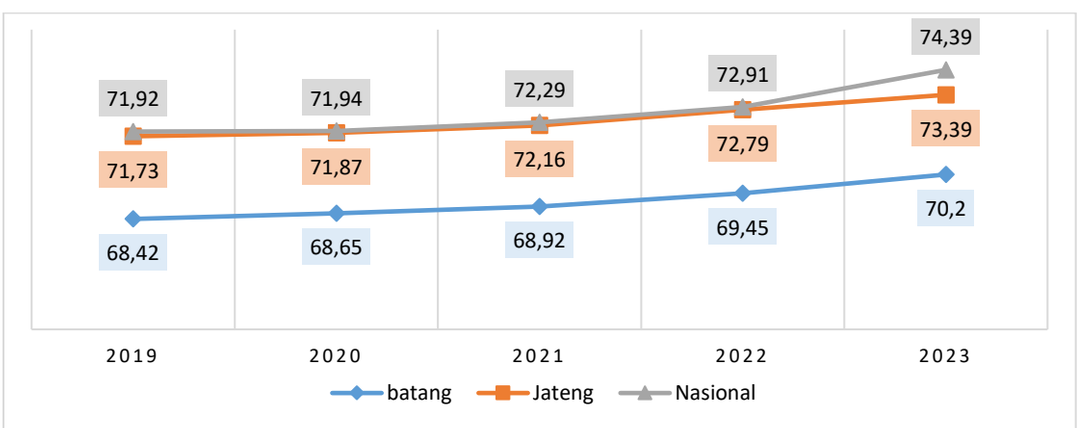
Gambar 2. 26 Perbandingan Rasio Perubahan Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dengan Capaian Nasional Tahun 2019-2023
Sumber : Kabupaten Batang dalam Angka tahun 2023-2024, Statistik Indonesia 2024

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjadi tolok ukur untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, Pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*). Untuk melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori yaitu:

- IPM rendah, jika nilai IPM < 60;
- IPM sedang, jika nilai 60 < IPM < 70;
- IPM tinggi, jika nilai 70< IPM < 80;
- IPM sangat tinggi, jika nilai IPM > 80.

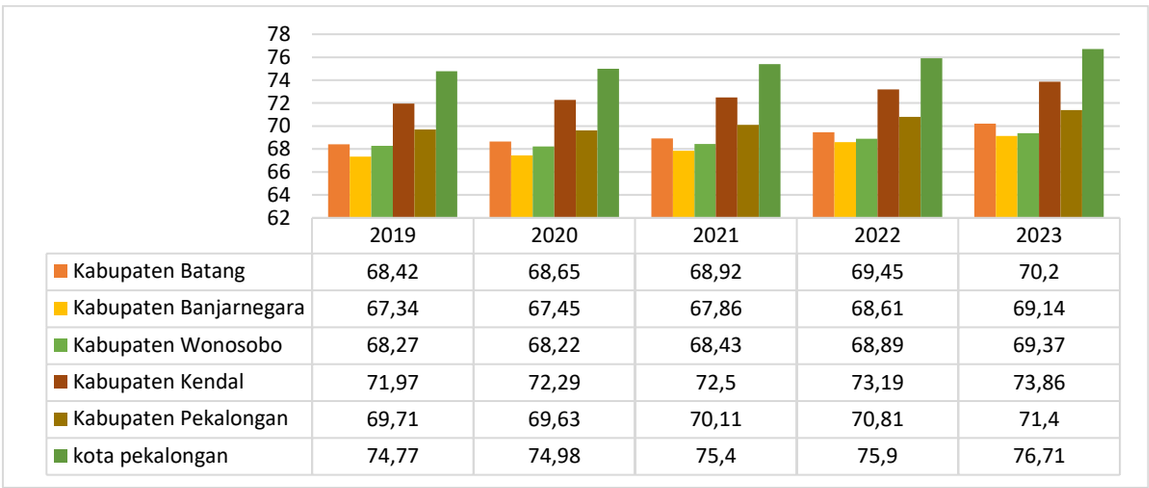
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang menurut metode baru menunjukkan tren positif selama 5 tahun terakhir. IPM Kabupaten Batang tahun 2023 ini meningkat 0,75 poin dibandingkan tahun 2022 dan telah menyentuh angka 70 (tinggi) dari sejarah perkembangan IPM di Kabupaten Batang. Peningkatan IPM tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, maupun pada dimensi standar hidup layak masyarakat. Namun IPM Kabupaten Batang sendiri masih jauh dibawah angka capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 27 IPM Kabupaten Batang Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024, Statistik Indonesia 2024

Capaian IPM Kabupaten Batang jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, berada diatas Kabupaten Banjarnegara (69,14) dan Kabupaten Wonosobo (69,37), namun lebih rendah dibandingkan capaian Kabupaten Pekalongan (71,40), Kabupaten Kendal (73,86) dan Kota Pekalongan (76,71). Perbandingan capaian IPM Kabupaten Batang dengan kabupaten sekitar adalah sebagai berikut:



	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	68,42	68,65	68,92	69,45	70,2
Kabupaten Banjarnegara	67,34	67,45	67,86	68,61	69,14
Kabupaten Wonosobo	68,27	68,22	68,43	68,89	69,37
Kabupaten Kendal	71,97	72,29	72,5	73,19	73,86
Kabupaten Pekalongan	69,71	69,63	70,11	70,81	71,4
kota pekalongan	74,77	74,98	75,4	75,9	76,71

Gambar 2. 28 IPM Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021-2024

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung pencapaian IPM yaitu penyusunan program dan kegiatan lintas sektoral dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat yang diharapkan masyarakat dengan ekonomi yang cukup dapat mempengaruhi tingkat motivasi untuk menyekolahkan anaknya. Hal tersebut diharapkan akan berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Upaya lainnya adalah dengan melaksanakan inovasi pelayanan pendidikan yang mengarah kepada peningkatan kompetensi dan keterampilan anak di masa depan yang diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan Angka Harapan Hidup dan pengeluaran per kapita masyarakat karena sejatinya pendidikan merupakan bekal bagi mereka untuk bertahan hidup di masa depan.

Pertumbuhan IPM 2023 Kabupaten Batang mengalami percepatan dari tahun 2022. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan terutama pada dimensi pengetahuan dan standar hidup layak masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 16

Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Batang 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
AHH (TH)	74,59	74,69	74,74	74,79	74,85

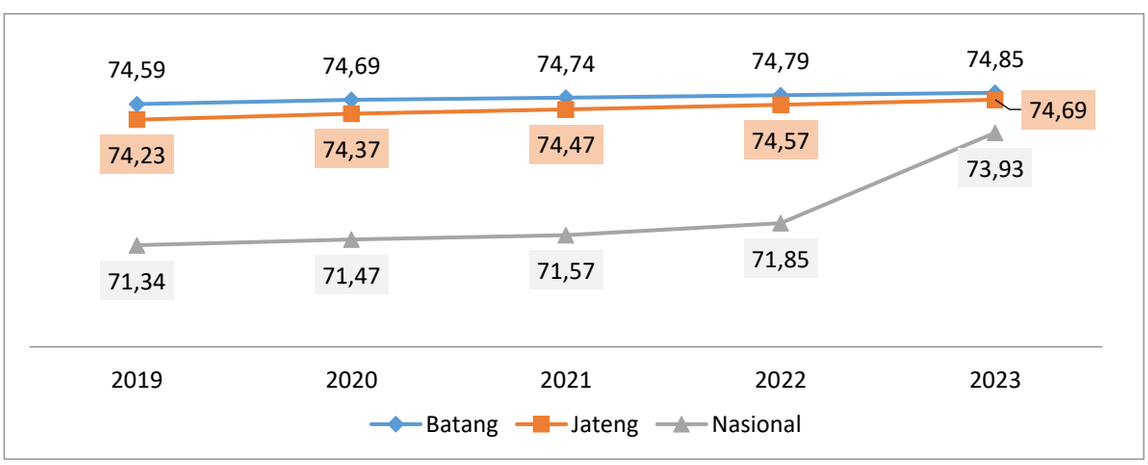
Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
HLS (TH)	12,00	12,01	12,13	12,14	12,15
RLS (TH)	6,63	6,87	6,88	6,90	7,07
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu Rp/orang/th)	9.573	9.431	9.524	9.972	10.470
IPM	**68,42**	**68,65**	**68,92**	**69,45**	**70,20**

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Faktor yang mempengaruhi AHH antara lain aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi AHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, diperlukan upaya melalui paradigma sehat dengan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor.

Perwujudan peningkatan AHH dipengaruhi kesehatan ibu, bayi, balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang komprehensif di sepanjang siklus hidup mulai dari kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup keluarga, komunitas, puskesmas dan fasilitas kesehatan rujukan.

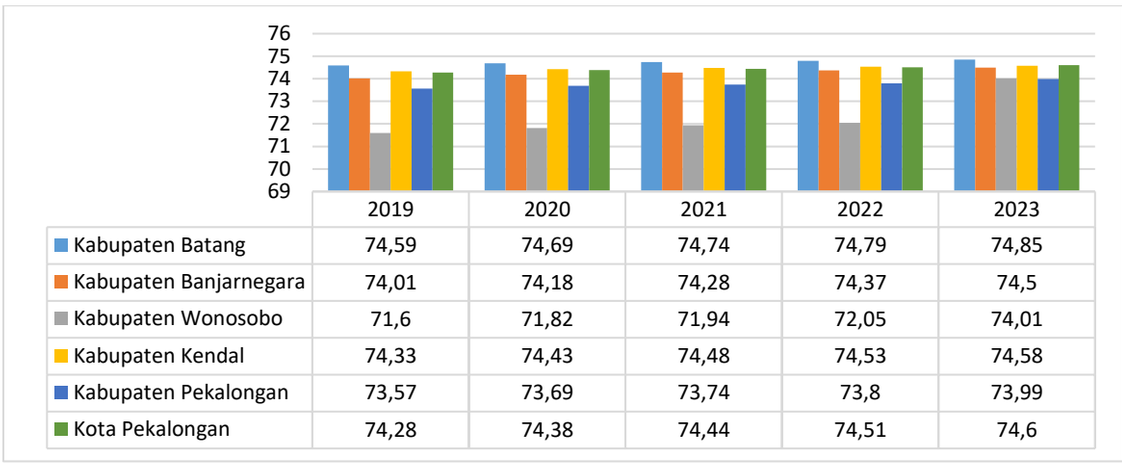


Gambar 2. 29 Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang dibandingkan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024, Statistik Indonesia 2024

Pada tabel diatas terlihat bahwa AHH di Kabupaten Batang lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dimana bayi yang

lahir pada tahun 2023 memiliki harapan hdup hingga 74,85 tahun, meningkat 0,06 tahun dibanding pada bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas hidup pada bayi baru lahir dari tahun ketahun terus meningkat.



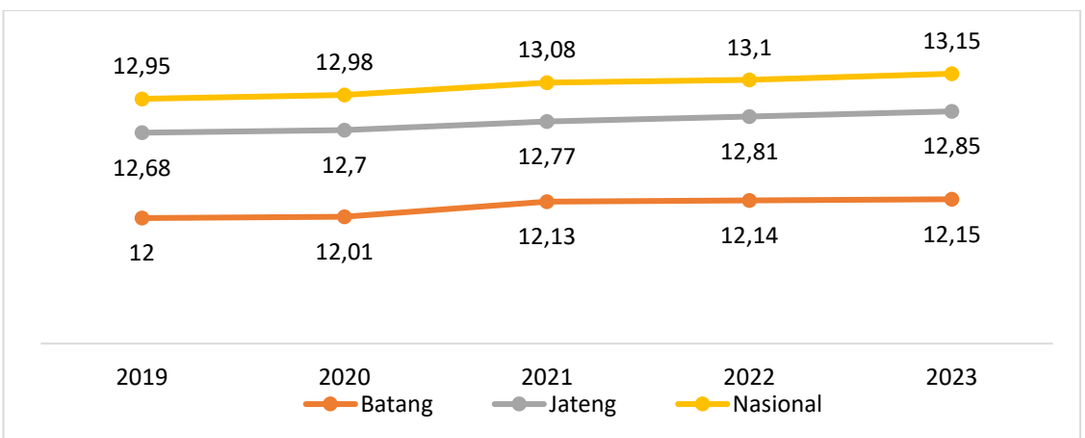
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	74,59	74,69	74,74	74,79	74,85
Kabupaten Banjarnegara	74,01	74,18	74,28	74,37	74,5
Kabupaten Wonosobo	71,6	71,82	71,94	72,05	74,01
Kabupaten Kendal	74,33	74,43	74,48	74,53	74,58
Kabupaten Pekalongan	73,57	73,69	73,74	73,8	73,99
Kota Pekalongan	74,28	74,38	74,44	74,51	74,6

Gambar 2. 30 Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pencapaian HLS Kabupaten Batang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (12,15 tahun) masih lebih rendah dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (12,85 tahun) dan Nasional (13,15 tahun). Artinya pada tahun 2023 anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Batang memiliki harapan dapat menjalani pendidikan selama 12 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. sebagaimana capaian HLS Kabupaten Batang dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut ini:

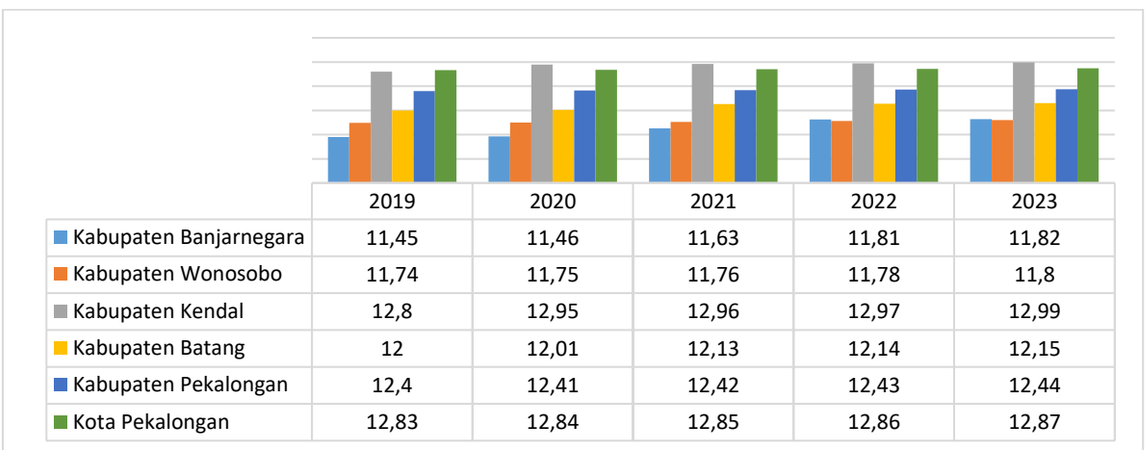


Gambar 2. 31 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024, Statistik Indonesia 2024

Sehingga kedepan diperlukan upaya guna meningkatkan angka HLS Kabupaten Batang, serta lebih mewaspadai potensi anak putus sekolah dengan melibatkan peran masyarakat dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi pendidikan. Permasalahan utama selain kondisi ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang yaitu perubahan paradigma dan *mindset* masyarakat tentang pendidikan. Sehingga upaya peningkatan HLS ini perlu diperkuat dengan adanya sosialisasi menyeluruh melalui berbagai bentuk dan media agar masyarakat dapat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan serta pemerataan akses layanan Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang juga terus diupayakan melalui optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, pelaksanaan pendidikan dasar bebas pungutan dan berkualitas sesuai standar pendidikan nasional, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan manajemen dan tata kelola layanan pendidikan terus dilakukan guna mendukung pencegahan anak putus sekolah serta perbaikan akses dan layanan pendidikan di Kabupaten Batang.

Capaian angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang pada tahun 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan kabupaten sekitar Kabupaten Kabupaten Kendal; Kabupaten Pekalongan; dan Kota Pekalongan. Namun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo sebagaimana pada diagram berikut :



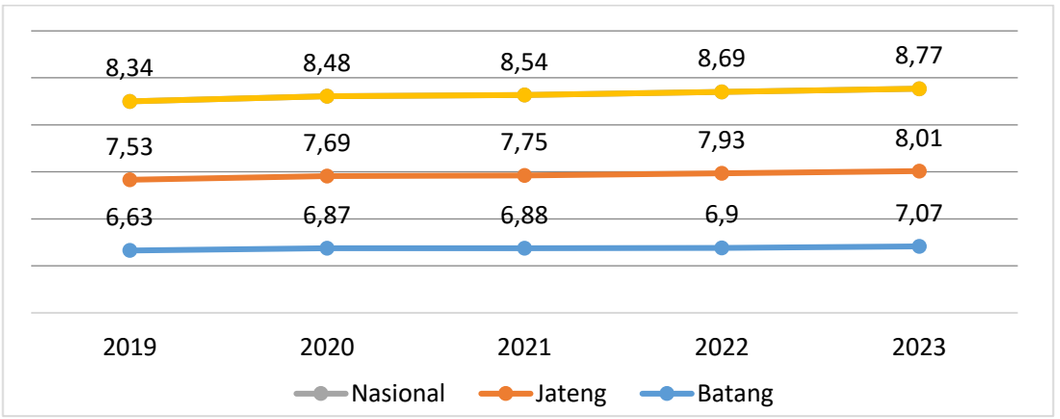
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Banjarnegara	11,45	11,46	11,63	11,81	11,82
Kabupaten Wonosobo	11,74	11,75	11,76	11,78	11,8
Kabupaten Kendal	12,8	12,95	12,96	12,97	12,99
Kabupaten Batang	12	12,01	12,13	12,14	12,15
Kabupaten Pekalongan	12,4	12,41	12,42	12,43	12,44
Kota Pekalongan	12,83	12,84	12,85	12,86	12,87

Gambar 2. 32 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2020 - 2024

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun belajar penduduk yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.



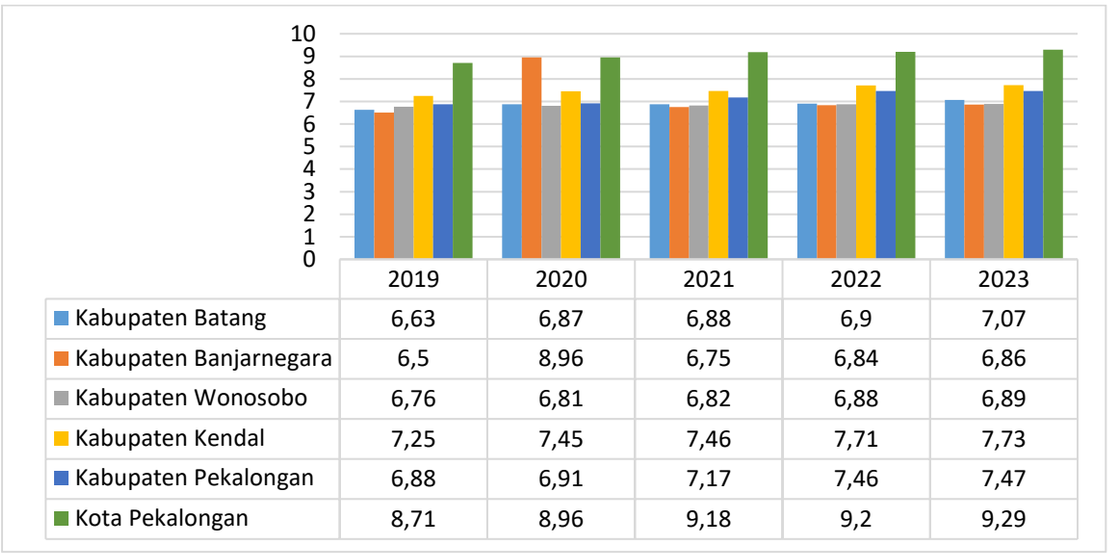
Gambar 2. 33 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2020-2024, Statistik Indonesia 2024

Pencapaian RLS Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dari tahun 2018 sebesar 6,62 tahun naik menjadi 7,07 tahun pada tahun 2023. Hal ini menandakan pada tahun 2023 rata rata lama sekolah yang ditempuh penduduk berusia 25 tahun keatas selama 7 tahun atau setara dengan jenjang sekolah menengah pertama kelas 1. Namun demikian, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 8,01 tahun dan Nasional 8,77 tahun.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk terus meningkatkan HLS diantaranya Penelusuran AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah). AUSTS meliputi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan di SD/MI, usia 12-15 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan di SMP/MTs, dan usia 15-18 yang sedang tidak bersekolah di SMA/SMK/MA dan menyalurkannya kembali ke sekolah formal atau melalui pendidikan kesetaraan serta membebaskan biaya pendidikannya. Optimalisasi peran masyarakat dan sekolah dalam mewaspadai anak-anak putus sekolah serta mengawal lulusan sekolah agar tetap melanjutkan ke jenjang berikutnya juga terus ditingkatkan melalui kegiatan belajar mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) selain upaya peningkatan pembiayaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan manajemen dan tata kelola pelayanan. Jumlah PKBM eksisting di Kabupaten Batang hingga tahun 2023 ini sebanyak 23 unit PKBM.

Selengkapnya rata-rata lama sekolah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar :



	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	6,63	6,87	6,88	6,9	7,07
Kabupaten Banjarnegara	6,5	8,96	6,75	6,84	6,86
Kabupaten Wonosobo	6,76	6,81	6,82	6,88	6,89
Kabupaten Kendal	7,25	7,45	7,46	7,71	7,73
Kabupaten Pekalongan	6,88	6,91	7,17	7,46	7,47
Kota Pekalongan	8,71	8,96	9,18	9,2	9,29

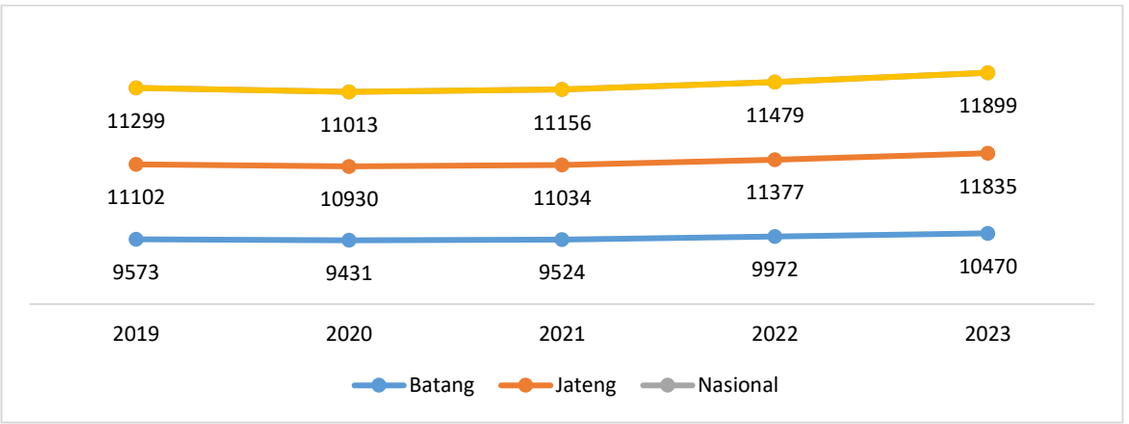
Gambar 2. 34 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2020-2024

Dari grafik diatas, Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang tahun 2023 sebesar 7,07 tahun jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar masih lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,86 tahun dan kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 6,89 tahun, namun lebih rendah dari Kabupaten Kendal sebesar 7,73 tahun, Kabupaten Pekalongan sebesar 7,47 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 9,29 tahun.

d. Pengeluaran per Kapita

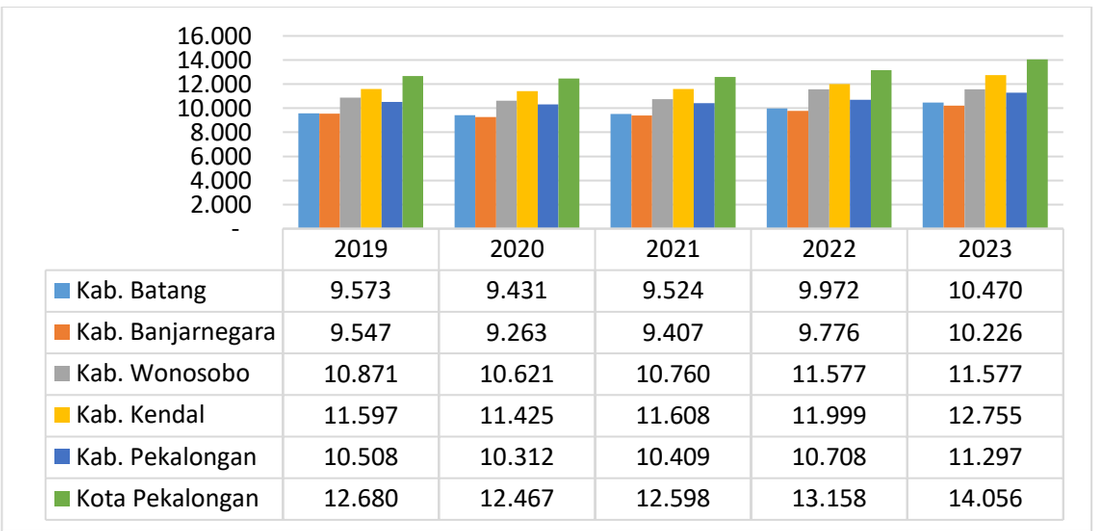
Pencapaian pengeluaran per kapita Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, pada tahun 2019 sebesar Rp 9573 ribu per orang per tahun naik menjadi menjadi Rp 10470 ribu per orang per tahun pada tahun 2023. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 9.431 ribu per orang per tahun karena adanya pandemi Covid-19 namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp 9.524 ribu per orang per tahun meskipun pandemi *Covid*-19 belum berakhir. Meskipun capaian pengeluaran per kapita naik jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian ini juga lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah sebesar Rp 11835 ribu per orang per tahun dan Nasional sebesar Rp 11899 ribu per orang per tahun. Selengkapnya pada grafik berikut :



Gambar 2. 35 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah/orang/tahun)

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2020-2024, Statistik Indonesia 2024

Pengeluaran per kapita Kabupaten Batang tahun 2023 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar masih lebih tinggi dari Kabupaten Banjanegara namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Selengkapnya tersaji dalam grafik berikut ini :



	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Batang	9.573	9.431	9.524	9.972	10.470
Kab. Banjarnegara	9.547	9.263	9.407	9.776	10.226
Kab. Wonosobo	10.871	10.621	10.760	11.577	11.577
Kab. Kendal	11.597	11.425	11.608	11.999	12.755
Kab. Pekalongan	10.508	10.312	10.409	10.708	11.297
Kota Pekalongan	12.680	12.467	12.598	13.158	14.056

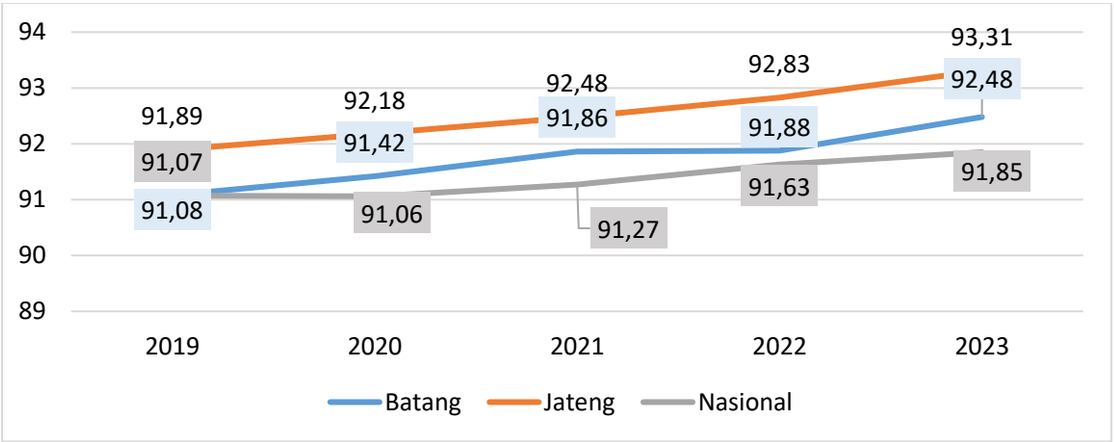
Gambar 2. 36 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023 (ribu rupiah/orang/tahun)

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2020-2024

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender (pemilahan jenis kelamin setiap komponennya). IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tercapai apabila angka IPM perempuan dibanding lai-laki berada pada angka 100. Jika angka IPG makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).



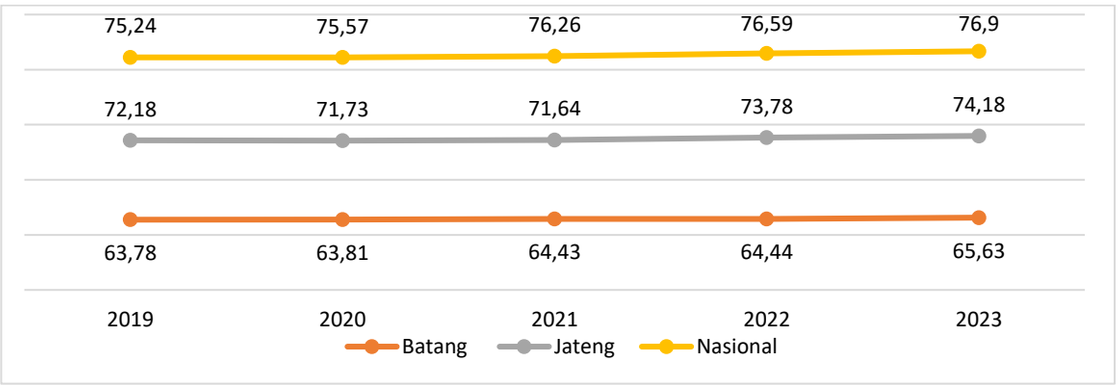
Gambar 2. 37 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Indonesia, Indeks Pembangunan Gender, www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html diakses pada tanggal 1 Mei 2024

IPG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Berangkat dari 91,08 tahun 2019 meningkat menjadi 92,48 tahun 2023. Namun capaian Kabupaten Batang lebih rendah dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah (93,31) dan masih lebih tinggi dari Nasional (91,85).

7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

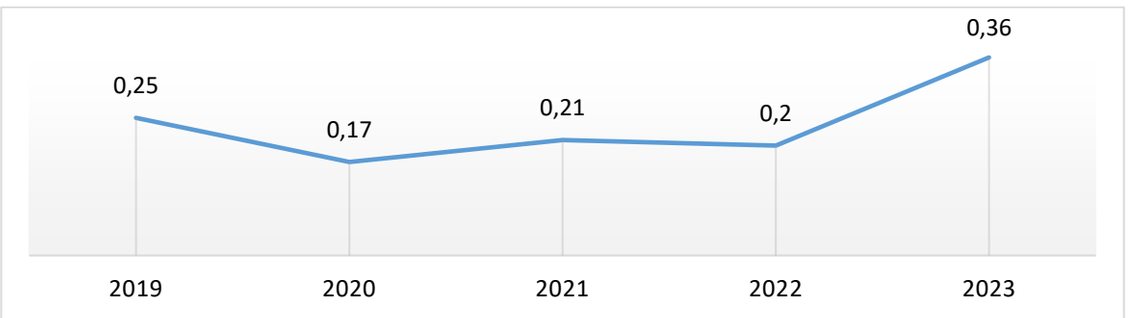
Capaian IDG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2019 sebesar 63,78 meningkat menjadi 65,63 pada tahun 2023, namun demikian capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 74,18 dan Nasional 76,9. Selengkapnya pada gambar berikut:



Gambar 2. 38 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Indonesia, Indeks Pemberdayaan Gender, www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.htmldiakses pada tanggal 1 Mei 2024

8. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Batang fluktuatif dalam periode tahun 2019-2023, dari 0,25% pada tahun 2019 dan sempat menurun menjadi 0,17% pada tahun 2020 namun kembali meningkat menjadi 0,36% di tahun 2023. Fluktuasi pada prevalensi gizi buruk sangat dipengaruhi oleh Angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan menurunnya bayi yang ditimbang yang menyebabkan kasus gizi buruk tidak terdeteksi secara cepat/dini, sehingga pemulihannya menjadi lebih lama. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesehatan balita diantaranya dengan memberikan intervensi pada balita kurus dengan pemberian PMT pemulihan, memberikan perawatan pada balita gizi buruk serta meningkatkan penyuluhan pada ibu-ibu untuk menimbangkan balitanya ke posyandu, untuk mengetahui tumbuh kembang balita. Peningkatan balita fizi buruk ini mengindikasikan bahwa kedepan diperlukan upaya yang lebih keras untuk menurunkan angka prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Batang. Sebagaimana kondisi prevalensi balita gizi buruk tersaji dalam grafik berikut ini :



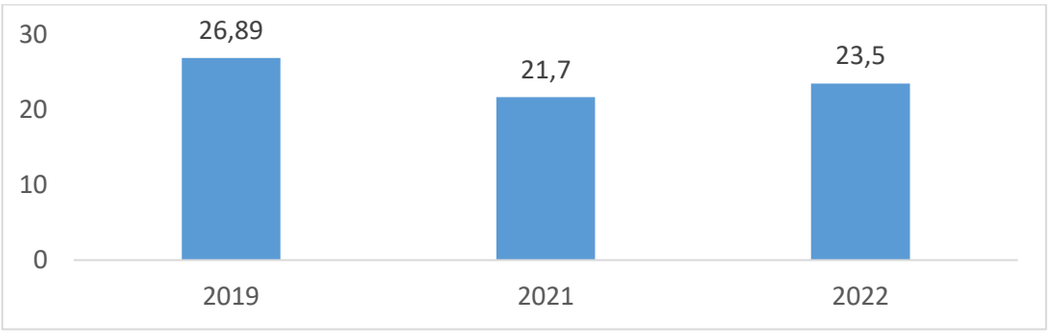
Gambar 2. 39 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu

lama maupun infeksi berulang yang mengganggu *intake* zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (*stunting*). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (*underweight* dan *wasted*). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

9. Prevalensi Stunting

Kondisi stunting di Kabupaten Batang berdasarkan data SSGBI (Studi Status Gizi Balita di Indonesia) dan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) pada Tahun 2019-2022 berfluktuasi menurun. Pada Tahun 2019 persentase stunting sebesar 26,89%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar 21,7% dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 23,5%. Sedangkan untuk tahun 2020 pengukuran tidak dilaksanakan karena pandemi Covid.

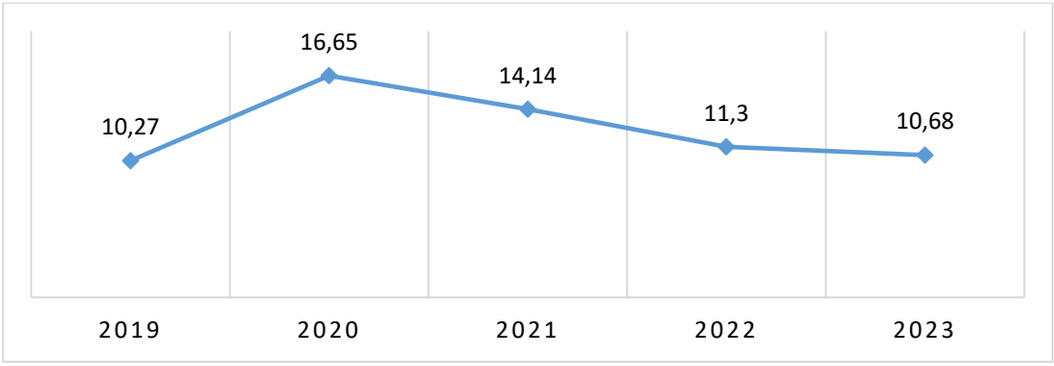


Gambar 2. 40 Prevalensi Stunting berdasarkan data SSGBI dan SSGI Tahun 2019-2022

Sumber: SSGBI (2019) & SSGI (2021-2022)

Sedangkan terkait kondisi stunting di Kabupaten Batang berdasarkan data e –PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) pada Tahun 2019-2023 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2019 capaian stunting sebesar 10,27% dan meningkat kembali menjadi sebesar 16,65% ditahun 2020. Namun demikian, tahun 2021 prevalensi stunting turun menjadi 14,14%, hingga di tahun 2023 menjadi sebesar 10,68%. Perhitungan stunting tahun 2017-2019 analisis perhitungan persentase stunting menggunakan cara analisis manual, sedangkan pada tahun 2020- 2023 perhitungan persentase stunting mulai menggunakan

aplikasi e-PPGBM (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang lebih akurat dan detail.



Gambar 2. 41 Prevalensi Stunting Kabupaten Batang (e-PPGBM) Tahun 2019-2023

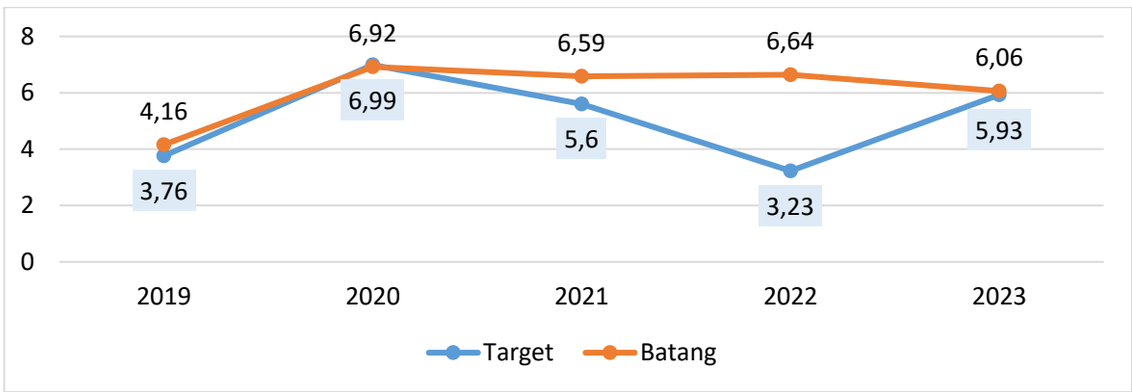
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Baik berdasarkan data SSGI maupun e-PPGBM, dapat disimpulkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Batang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan intervensi program dan kegiatan untuk menurunkan persentase stunting. Intervensi yang dilakukan tersebut meliputi intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, dengan sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Intervensi program dan kegiatan dalam rangka penurunan persentase stunting ini berhasil menurunkan angka persentase stunting dari 14,14% pada Tahun 2020 menjadi 10,68% pada tahun 2023.

10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

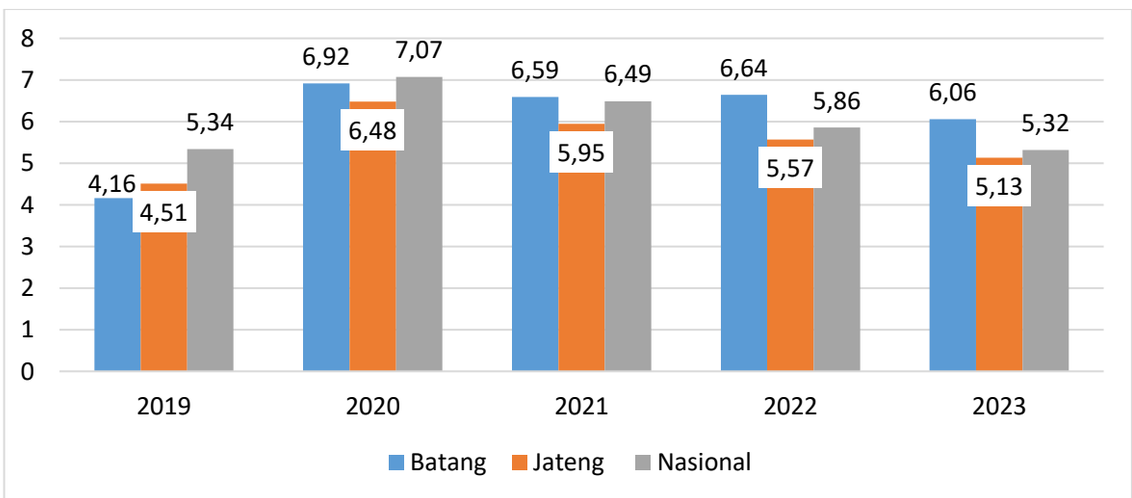
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang selama periode 2019-2023 fluktuatif, yaitu sebesar 4,19 di tahun 2019 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 6,92 persen akibat dampak pandemi Covid 19 dan terjadi peningkatan kembali tahun 2022 menjadi sebesar 6,64 persen yang kemudian menurun menjadi 6,06 pada tahun 2023. Peningkatan pada tahun 2020 disebabkan akibat Pandemi *Covid*-19 yang berdampak masyarakat termasuk dalam kelompok 40 persen berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap setiap bulan, yang terbanyak adalah mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha UKM, pedagang pasar, pedagang kaki lima, ojek online, dan lain-lainnya. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam penanganan dampak *Covid*-19 diantaranya melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja utamanya bagi masyarakat terdampak *Covid*-19 dengan program padat karya di sektor infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan kerja dan serta mendorong kemandirian berwirausaha melalui bantuan alat. Upaya tersebut cukup berdampak kepada masyarakat

sehingga angka TPT pada tahun 2021 mampu ditekan menjadi sebesar 6,59%. Namun demikian, kembali meningkat menjadi 6,64 % di tahun 2022 yang disebabkan karena banyaknya masyarakat usia produktif perantau kembali ke daerah dalam kondisi menganggur dengan harapan dapat bekerja di Kawasan Industri Kabupaten Batang. Sehingga perhitungan jumlah usia produktif kembali meningkat akibat banyaknya pekerja rantau yang kembali ke daerah dalam kondisi menganggur dan pencari kerja pendatang luar daerah yang berharap dapat bekerja di Kabupaten Batang. Namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 6,06%. Sebagaimana capaian tersebut tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 42 Perbandingan TPT dengan target daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 - 2023
Sumber : BPS Kab. Batang, 2023

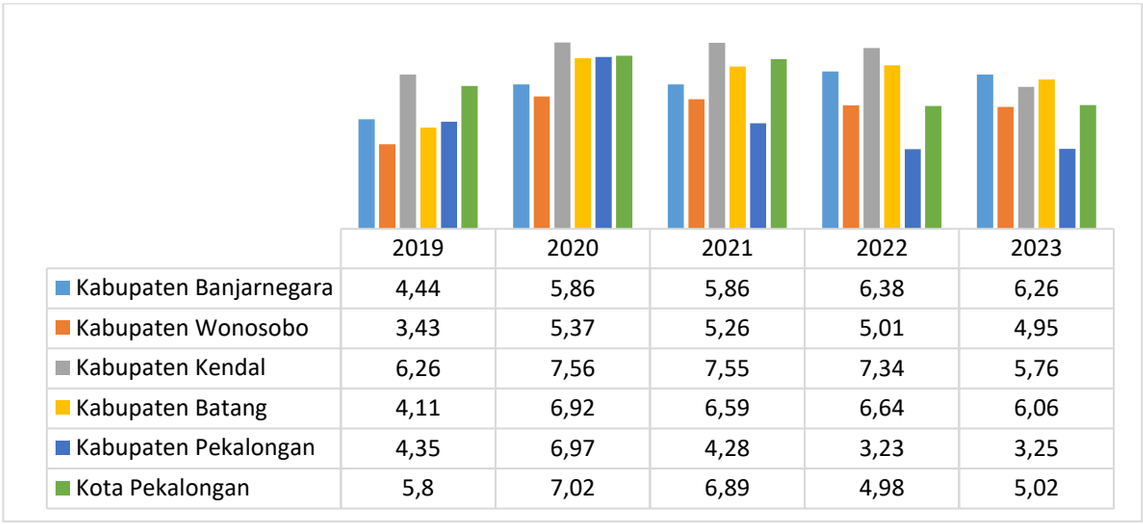
Capaian TPT Kabupaten Batang Tahun 2023 masih lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dimana capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,57 persen dan Nasional sebesar 5,86 persen.



Gambar 2. 43 Perbandingan perubahan pencapaian TPT dengan capaian Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023
Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2023

Tingkat Pertumbuhan jumlah penganggur TPT Kabupaten Batang sebesar 6,64 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Kendal

sebesar 7,34 persen. Namun demikian masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Pekalongan sebesar 3,23 persen, Kabupaten Wonosobo sebesar 5,01 persen, Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,38 persen, dan Kota Pekalongan sebesar 4,98 persen.

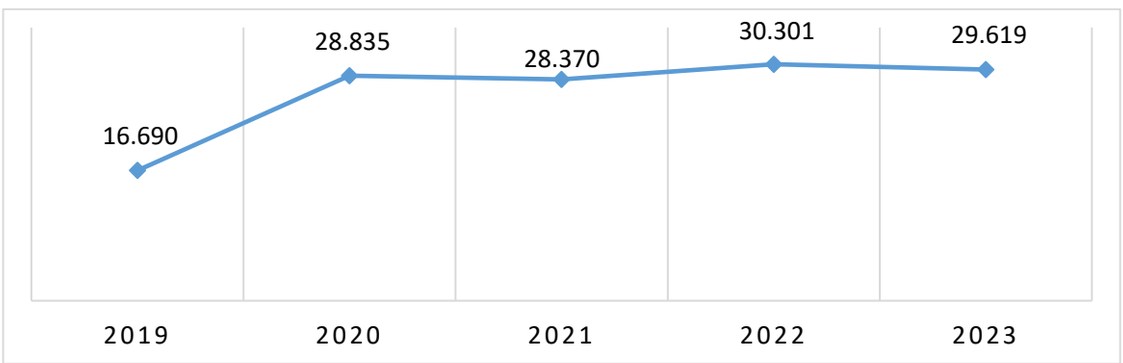


	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Banjarnegara	4,44	5,86	5,86	6,38	6,26
Kabupaten Wonosobo	3,43	5,37	5,26	5,01	4,95
Kabupaten Kendal	6,26	7,56	7,55	7,34	5,76
Kabupaten Batang	4,11	6,92	6,59	6,64	6,06
Kabupaten Pekalongan	4,35	6,97	4,28	3,23	3,25
Kota Pekalongan	5,8	7,02	6,89	4,98	5,02

Gambar 2. 44 Perbandingan perubahan TPT daerah dengan Kab/Kota Tahun 2019 - 2023

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

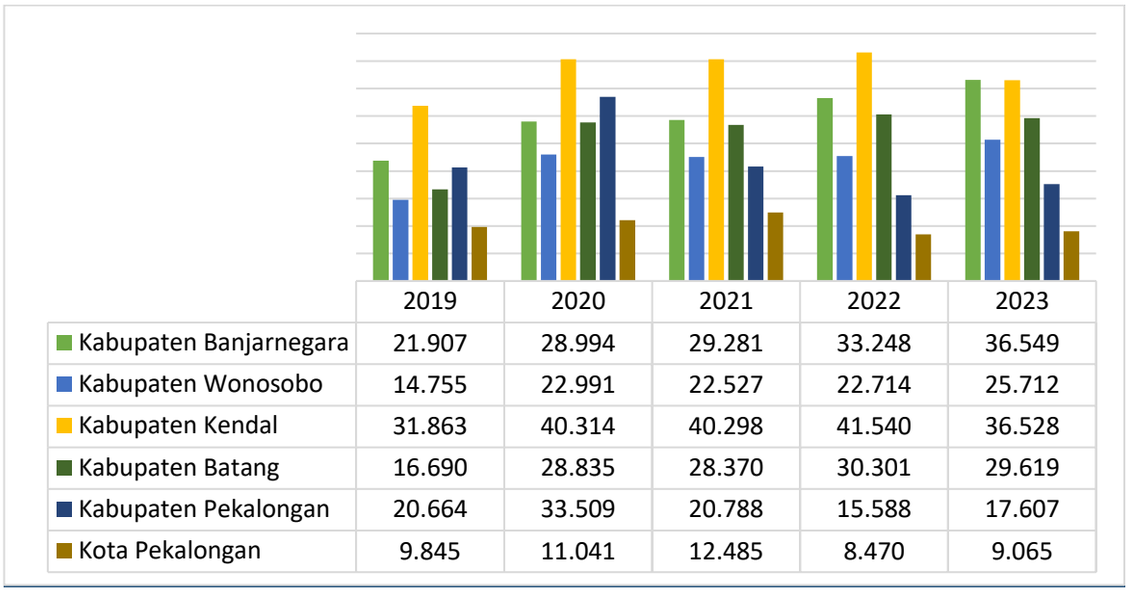
Jumlah penganggur Kabupaten Batang Tahun 2019 – 2023 cenderung fluktuatif. Dalam 5 tahun terakhir kondisi terendah jumlah penganggur terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 16.690 jiwa namun meningkat kembali akibat adanya pandemi covid 19 pada tahun 2020 menjadi 28.835 jiwa. Hingga tahun 2023 terus meningkat menjadi 29.619 jiwa. Jumlah penganggur hingga tahun 2019 belum kembali pada kondisi sebelum covid 19. Sebagaimana tergambarkan dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 45 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Batang Tahun 2019 - 2023 (jiwa)

Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2024

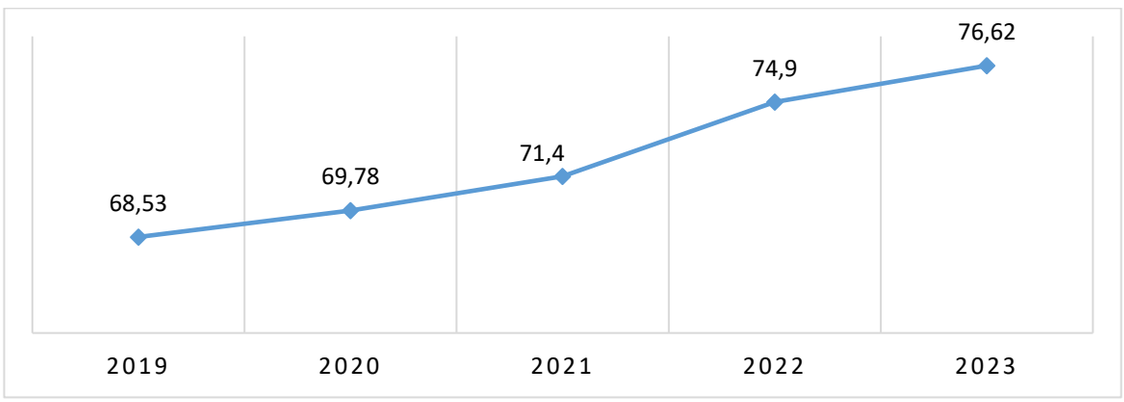
Pertumbuhan jumlah penganggur di wilayah kab/kota sekitar Batang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut :



	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Banjarnegara	21.907	28.994	29.281	33.248	36.549
Kabupaten Wonosobo	14.755	22.991	22.527	22.714	25.712
Kabupaten Kendal	31.863	40.314	40.298	41.540	36.528
Kabupaten Batang	16.690	28.835	28.370	30.301	29.619
Kabupaten Pekalongan	20.664	33.509	20.788	15.588	17.607
Kota Pekalongan	9.845	11.041	12.485	8.470	9.065

Gambar 2. 46 Perbandingan pertumbuhan jumlah penganggur daerah dengan rata-rata capaian Kab/Kota sekitar Tahun 2019 - 2023 (jiwa)
Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021-2024

Dari grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2023, jumlah penganggur tertinggi ada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 36.549 penganggur dengan penurunan tertinggi berada di Kabupaten Kendal dari 41.540 penganggur tahun 2022 menjadi 36.528 penganggur tahun 2023. Sedangkan pada Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan jumlah penganggur cenderung meningkat.

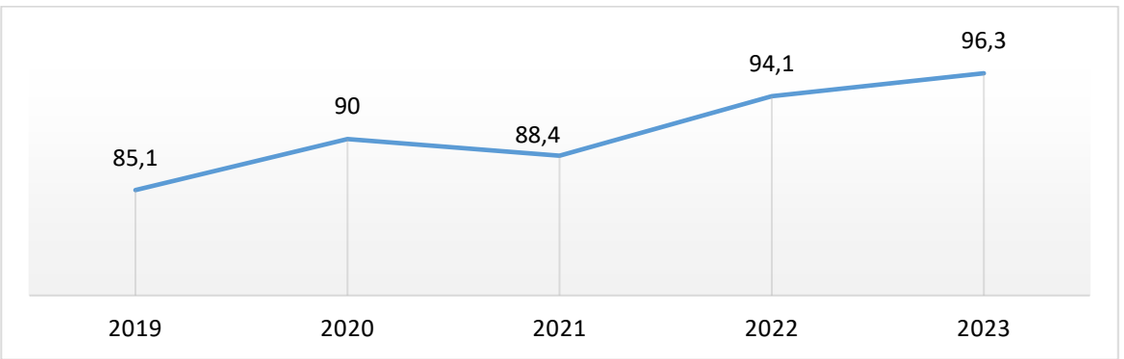


Gambar 2. 47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batang
Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2024

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat, sebesar 68,53 persen pada tahun 201 dan terus meningkat menjadi 76,62 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Batang.

11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan sebagai susunan proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Keragaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Batang periode 2019-2023 selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:



Gambar 2. 48 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

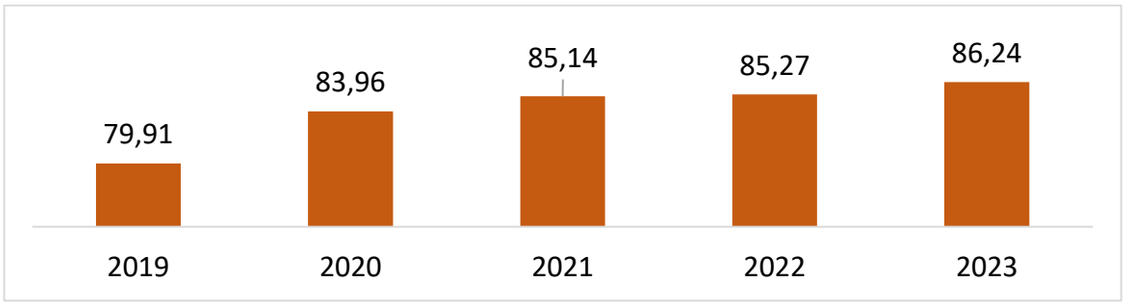
Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2024

Skor PPH dalam periode lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 sebesar 85,1 menjadi sebesar 90 pada tahun 2020. Namun demikian terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 88,40 yang kemudian meningkat menjadi 96,30 di tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan keberagaman pola konsumsi masyarakat mulai terlihat.

12. Pelayanan Publik

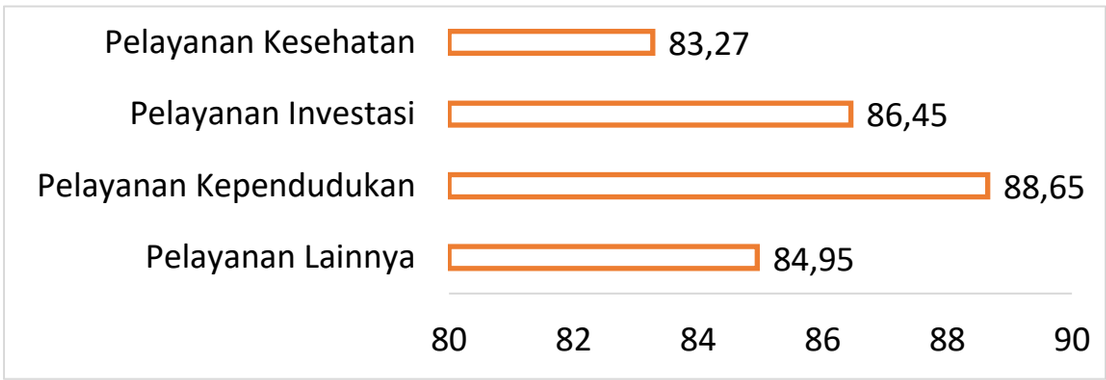
Salah satu fungsi pemerintah dalam kehidupan bernegara adalah memberikan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka mengetahui sejauh mana kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelayanan Publik (UPP), baik yang pelaksanaannya difasilitasi maupun dilakukan secara mandiri oleh masing masing UPP (dilaksanakan sendiri maupun kerjasama pihak ketiga). Pengukuran IKM di Kabupaten Batang berfluktuasi meningkat dalam periode 2019-2023. Tahun 2019 capaian IKM Kabupaten Batang sebesar 79,91 persen meningkat terus hingga tahun 2023 menjadi sebesar 86,24 persen. Hal ini mengindikasikan

upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk kualitas pelayanan publik cukup berhasil. Upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan diantaranya melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada UPP. Dalam periode lima tahun terakhir penerapan SOP dan SPP pada UPP di Kabupaten Batang sudah mencapai angka 100%. Meningkatnya pelayanan publik di Kabupaten Batang juga didukung oleh adanya layanan elektronik atau *e-service* melalui website, Mall Pelayanan Publik (MPP), dan inovasi terbaru yaitu dibentuknya *Service Point* di Kecamatan Gringsing yang rencananya akan dikembangkan di setiap kecamatan. Serta untuk persentase Perangkat Daerah telah memiliki website aktif mencapai angka 100%.



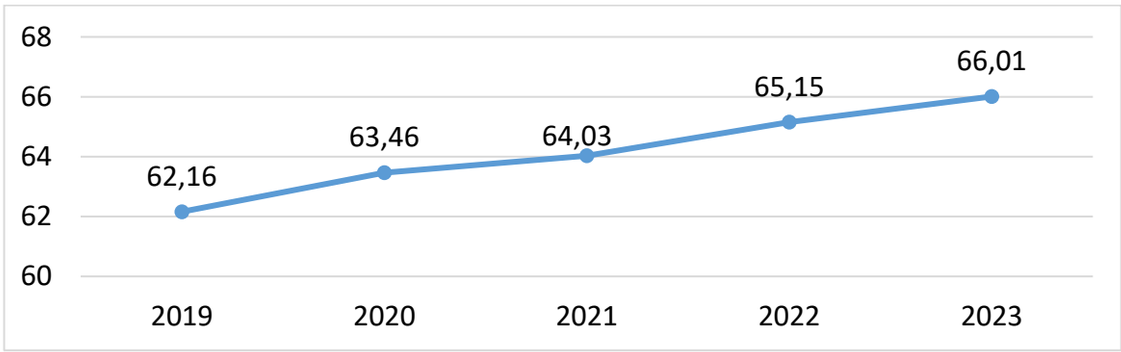
Gambar 2. 49 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Batang
Sumber: Bag Organisasi Setda Kabupaten Batang, 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM untuk berbagai jenis pelayanan seperti pelayanan kesehatan, Pelayanan Investasi, Pelayanan Kependudukan dan Pelayanan Lainnya pada tahun 2023 tergambar dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 50 Nilai IKM berdasarkan jenis pelayanan Tahun 2023
Sumber : Bag Organisasi Setda, 2024

Sedangkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2019-2023 berfluktuasi. Tahun 2019 capaian PMPRB Kabupaten Batang 62,16 dan terus meningkat hingga 66,01 ditahun 2023.



Gambar 2. 51 Nilai Pemeringkatan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Batang, 2024

a. Transparansi

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Selain kualitas dan profesionalisme aparatur serta akuntabilitas kinerja pembangunan, keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi juga menjadi faktor penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima.

- **PPID**

Undang-undang Nomor 14 tahun tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/107/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan telah diperbaharui beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/187/2017 tanggal 6 Februari 2017.

Pemerintah Kabupaten Batang juga membentuk PPID Pembantu untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di tingkat Perangkat Daerah dan kemudian dilaporkan ke PPID. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, sebagai bentuk peningkatan transparansi Kabupaten Batang juga telah menerapkan sistem informasi berbasis web melalui aplikasi sistem pengendalian pembangunan (simpelbang) yang dapat diakses oleh masyarakat.

- **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mendorong percepatan produk dalam Negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang menerbitkan Keputusan Bupati Batang Nomor 500/119/2022 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Batang serta Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 020/006/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Pada APBD Tahun 2023.

Dalam Surat Edaran tersebut diarahkan untuk PA/KPA wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% dari total Anggaran untuk Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Hal ini Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 65 ayat 2 dan 3 yaitu “Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri” dan “Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah”. Menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) apabila terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

Guna mendukung gerakan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Batang diperlukan sinergisitas seluruh Perangkat Daerah melalui perannya masing-masing sebagai berikut :

1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berperan aktif dalam mendampingi/memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi agar berpartisipasi dalam Katalog Lokal dan Toko Daring.
2) Inspektur Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
3) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk memfasilitasi pendaftaran akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi serta mendampingi/memfasilitasi pendaftaran dan penanyangan produk (on boarding) ke dalam Katalog Lokal dan Toko Daring.
4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
5) Perangkat Daerah ikut mendorong penyedia yang sudah bermitra untuk menayangkan dan menambah jumlah produk serta meningkatkan transaksi belanja melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.

   Adapun capaian P3DN sampai tanggal 31 Desember 2023 realisasi sebesar Rp. 416.966.774.877 atau sebesar 99,06 % dari total belanja Barang/Jasa yang telah di validasi

b. Akuntabilitas Kinerja

Salah satu syarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya adalah adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Menpan RB, nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yaitu dari 62,64 (B) pada tahun 2018 terus meningkat menjadi 68,06 (B) pada tahun 2022.

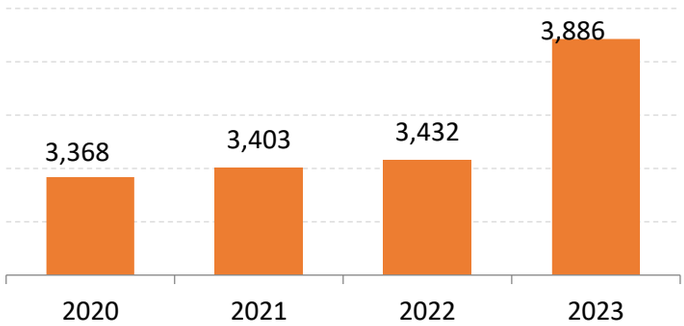
Tabel 2. 17
Nilai SAKIP Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8		
1	Nilai SAKIP	skor	65,02	66,14	66,30	67,27	68,06
			(B)	(B)	(B)	(B)	(B)

Sumber: Setda Kabupaten Batang Tahun 2024

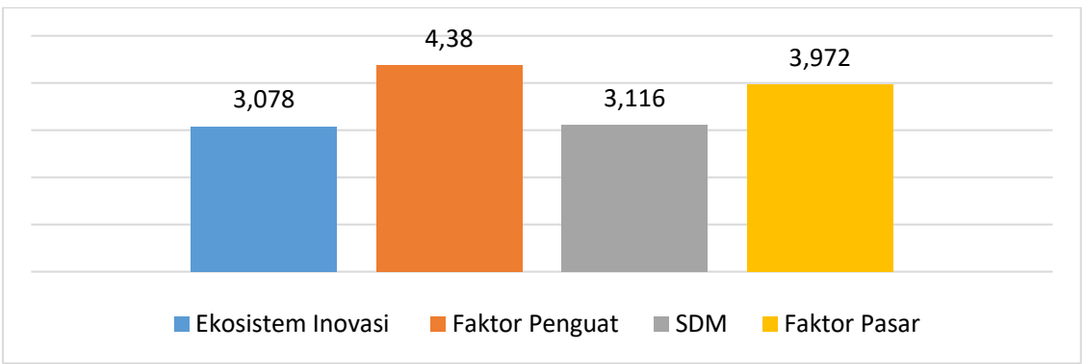
2.1.3 Aspek Daya Saing

1. Daya Saing Daerah



Gambar 2. 52 Hasil Penilaian Daya Saing Daerah Tahun 2020-2023
Sumber : Bapelitbang Kab Batang, 2023

Tahapan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan daya saing daerah yang optimal. Pembentuk Daya Saing Daerah dapat dihitung dari 4 (empat) aspek, yaitu : Faktor Penguat, Sumber Daya Manusia, Faktor Pasar dan Ekosistem Inovasi. Empat aspek ini dikontribusi oleh 12 pilar, 23 dimensi dan 97 indikator.



Gambar 2. 53 Aspek PDSD Kabupaten Batang Tahun 2023
Sumber : Bapelitbang Kab Batang, 2024

Ditahun 2023, Aspek Faktor Penguat di Kabupaten Batang merupakan aspek paling unggul dengan nilai 4,380 diatas nilai rata rata 3,95. Hal ini ditunjang oleh kelembagaan yang tertata, infrastruktur yang memadai dan perekonomian yang mantap.

1.1 Aspek Ekosistem Inovasi

Pengembangan ekosistem inovasi sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan revolusi industri. Kemampuan inovasi bertumpu pada lembaga litbang untuk mendukung ekosistem inovasi yang terbagi dalam beberapa pilar antara lain :

a. Pilar Dinamika Bisnis
b. Pilar Kapasitas Inovasi
c. Pilar Kesiapan Teknologi

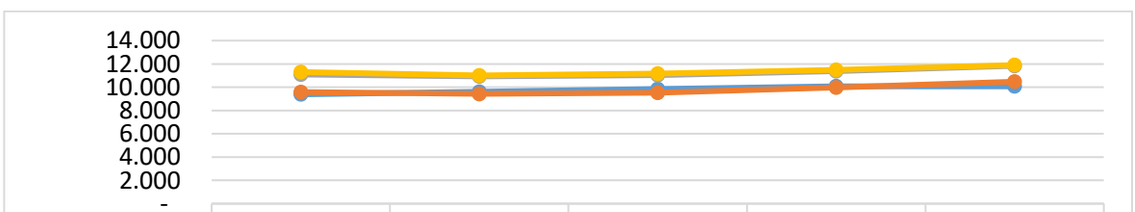
1.2 Aspek Faktor Penguat, terbagi dalam beberapa dimensi antara lain kelembagaan yang tertata, infrastruktur yang memadai dan perekonomian Daerah yang mantap.

1.3 Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital,* aspek sumber daya manusia ini ditunjang oleh kesehatan dan pendidikan serta keterampilan yang semakin membaik.

1.4 Aspek Faktor Pasar/ *Market*, penilaian aspek pasar ini ditunjang dari pilar akses keuangan, ketenagakerjaan, serta ukuran pasar.

2. Pengeluaran per Kapita

Pencapaian pengeluaran per kapita Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, pada tahun 2019 sebesar Rp 9.573 ribu per orang per tahun dan berfluktuasi naik menjadi Rp 9.972 ribu per orang per tahun pada tahun 2022. Walaupun pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan menjadi Rp 9.431 ribu per orang per tahun namun telah meningkat kembali hingga Rp 10.470 ribu per orang per tahun tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang memberi hasil yang positif terhadap peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Meskipun capaian pengeluaran per kapita hingga tahun 2023 naik, namun jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah sebesar 11.835 ribu per orang per tahun dan Nasional sebesar 11.899 ribu per orang per tahun. Selengkapnya dijelaskan pada gambar berikut :



	2019	2020	2021	2022	2023
Target	9.387	9.616	9.845	10.074	10.074
Batang	9.573	9.431	9.524	9.972	10.470
Jateng	11.102	10.930	11.034	11.377	11.835
Nasional	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Gambar 2. 54 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah/orang/tahun)

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024, Statistik Indonesia 2024

1. Rasio Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB ADHK

Jumlah net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB ADHK Kabupaten Batang menunjukkan angka negatif dalam kurun waktu 2019-2023, yang artinya nilai impor masih lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor di Kabupaten Batang. Dari tahun 2019-2023 defisit ekspor dalam tiap tahunnya semakin menurun dari -13,75% tahun 2019 menjadi -5,55% tahun 2023. Sedangkan untuk nilai ekspor, di Kabupaten Batang masih didongkrak oleh komoditas pertanian.

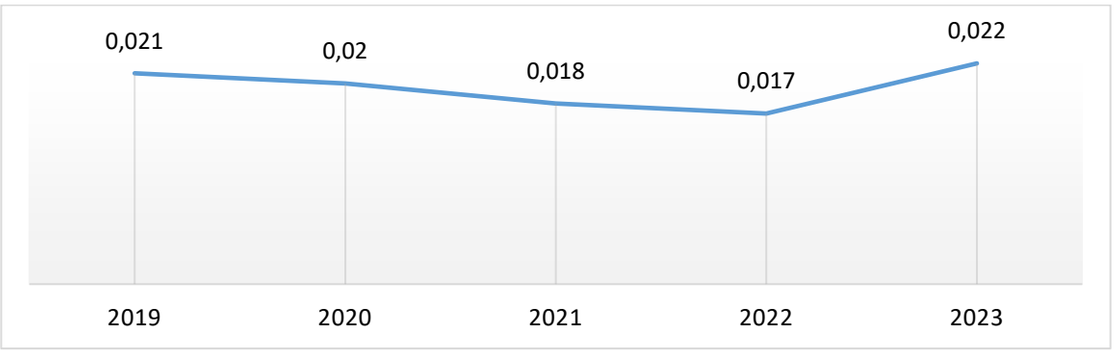
Tabel 2. 18
Rasio Ekspor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Batang

Tahun	PDRB ADHK (Juta Rp)	Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rp)	Rasio
2019	15.226.885,73	-2.094.116,5	-13,75
2020	15.030.577	-1.559.690,55	-10,38
2021	15.764.265,54	-1.058.270,41	-6,71
2022	16.704.986,75	-1.032.738,29	-6,18
2023	17.629.389,28	-978.589,09	-5,55

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023-2024

2. Angka Kriminalitas yang ditangani

Angka kriminalitas menjadi indikator yang menggambarkan kondusivitas wilayah. Angka Kriminalitas di Kabupaten Batang cenderung fluktuatif dalam periode tahun 2019-2023, tahun 2019 sebesar 0,021% meningkat sedikit menjadi 0,022% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kondusivitas di Kabupaten Batang cukup terjaga. Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini :



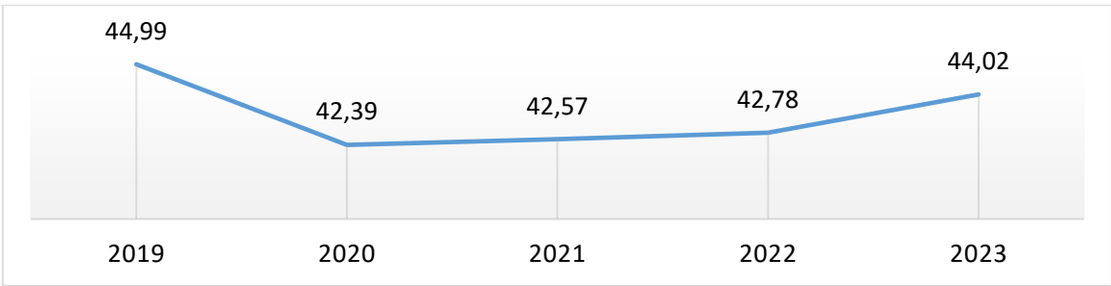
Gambar 2. 55 Angka Kriminalitas di Kabupaten Batang
Sumber: Satpol PP Kabupaten Batang, 2024

3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif, dan penduduk yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan, maka akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.



Gambar 2. 56 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Batang
Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2024

Selama periode 2019-2023, angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 angka beban tanggungan Kabupaten Batang yaitu sebesar 44,99 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif, maka menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif dan kemudian menurun menjadi 42,39 persen pada tahun 2020. Namun kembali meningkat hingga tahun 2024 angka beban ketergantungan penduduk sebesar 44,02 persen, artinya adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 44 penduduk tidak produktif (penduduk dibawah umur 15 tahun dan umur 65 tahun keatas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung berkurang, belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi pada sumber daya manusia guna mendorong produksi. Hal ini disebut sebagai fenomena Bonus Demografi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi, sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik, apabila banyak yang tidak bekerja.

Hal ini karena pada usia produktif tapi tenaganya tidak dapat dimanfaatkan karena tidak terserap di pasar kerja.

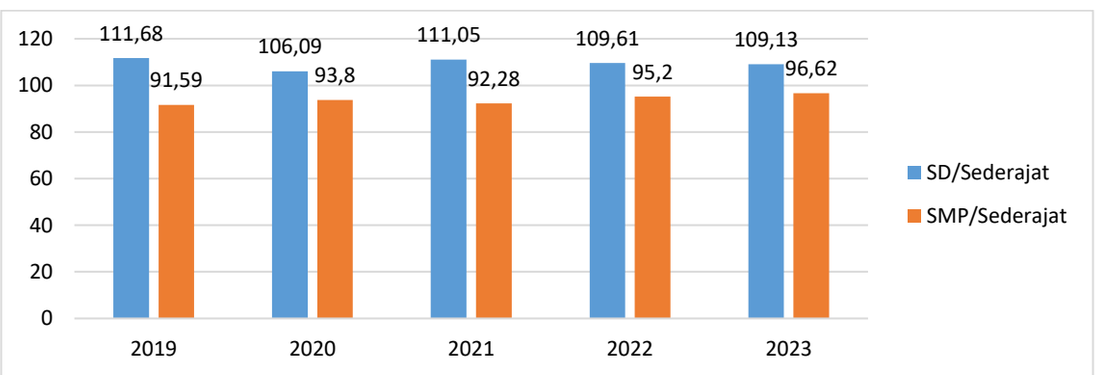
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia secara formal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan kabupaten dan dalam rangka pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu pelayanan dasar untuk jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional (BOP), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Kualitas pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang dapat digambarkan dari beberapa indikator keberhasilan, antara lain Angka Melek Huruf, angka partisipasi sekolah, dan penyediaan prasarana sarana pendidikan sesuai standar. Angka partisipasi diukur dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, secara keseluruhan baik APK dan APM semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dan dapat dilihat pada tabel berikut.

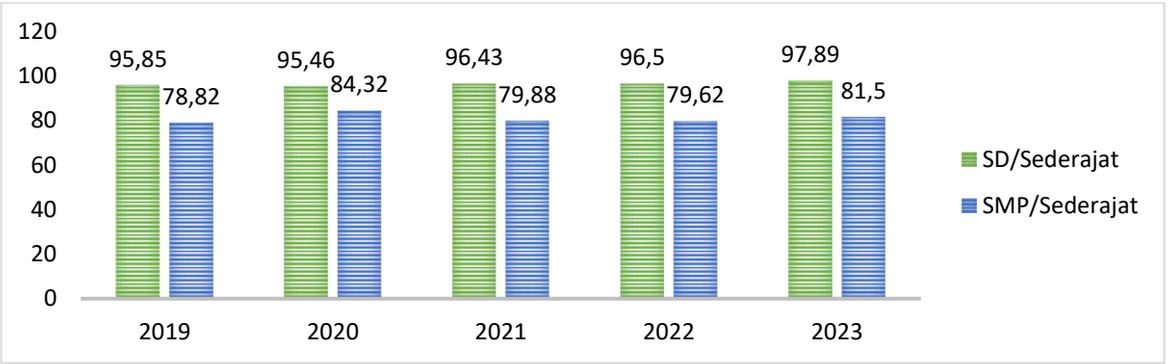


Gambar 2. 57 Angka Partisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2022-2024

Jika dilihat dari grafik diatas, APK per jenjang pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir APK SD/MI/sederajat cenderung fluktuatif, dari

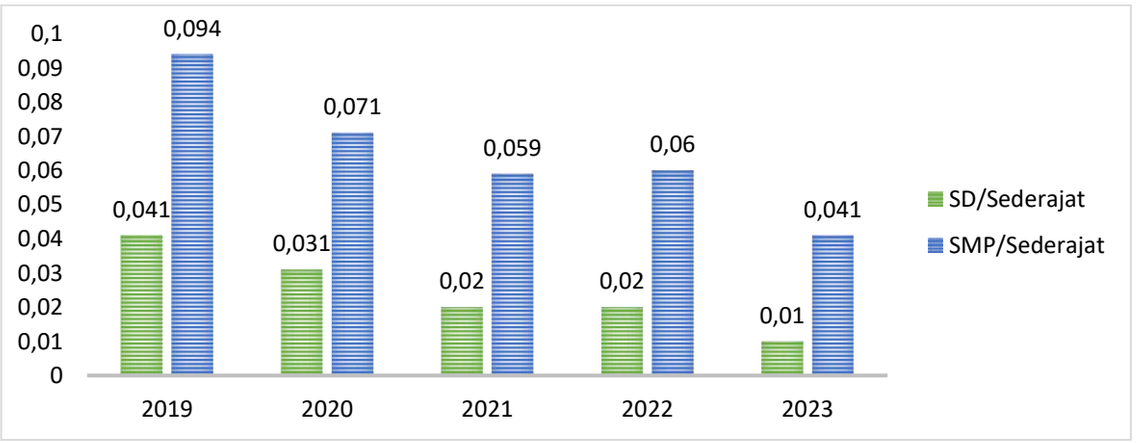
111,68 pada tahun 2019 menjadi 109,13 pada tahun 2023. Sedangkan APK SMp/MTs/sederajat cenderung menurun dalam 2019-2023, dari 97,52 pada tahun 2019 menjadi 96,62 pada tahun 2023. Capaian ini menandakan bahwa semakin menurunnya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang SD Sederajat maupun SMP Sederajat.



Gambar 2. 58 Angka Partisipasi Murni Per Jenjang Pendidikan Kab. Batang Tahun 2019-2023

Sumber : Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2022-2024

APM pada jenjang SD/MI/sederajat terus mengalami peningkatan pada periode lima tahun terakhir, dari 95,85 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 97,89 pada tahun 2023. Pada jenjang SMP/MTs/sederajat dalam kurun waktu 2019-2023 terus mengalami peningkatan dari 78,82 di tahun 2019 menjadi 81,50 di tahun 2023.



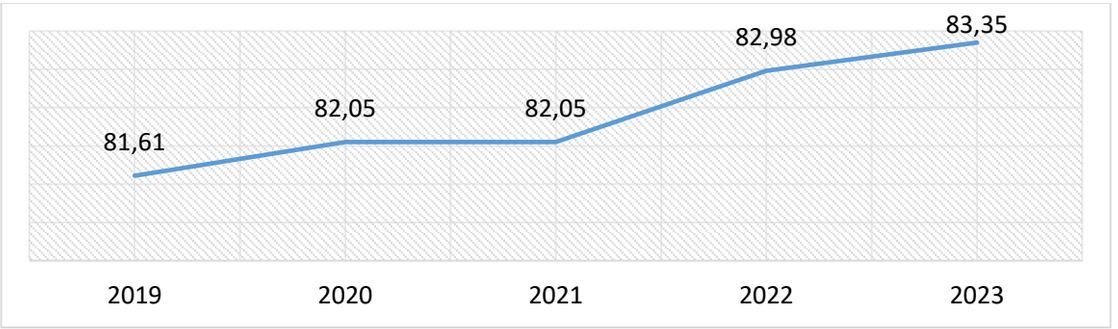
Gambar 2. 59 Angka Putus Sekolah Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber : Disdikbud Kab. Batang, 2024

Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang SD/Sederajat pada tahun 2019 menunjukkan angka 0,041% dan terus menurun hingga tahun 2023 menjadi 0,01%. Sedangkan pada jenjang SMP/Sederajat, angka putus sekolah cenderung menurun dimana realisasi sebesar 0,094% di tahun 2019 dan terus menurun menjadi 0,041% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada kualitas pendidikan di Kabupaten Batang. Indikator Angka

Putus Sekolah yang dibawah angka 0,10% ini menunjukkan kepastian peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Upaya penanganan anak tidak sekolah akan terus dilaksanakan melalui pemenuhan layanan Pendidikan PAUD dan Dikdas serta strategi pencegahan melalui penguatan PKBM.

Sedangkan Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus meningkat dari 81,58% pada tahun 2019 menjadi 83,35% pada tahun 2023. Selengkapnya dijelaskan pada grafik berikut ini :



Gambar 2. 60 Angka Partisipasi PAUD Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2024

Tabel 2. 19
Kondisi sarpras pendidikan Kab.Batang
Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja	Stn	Realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94,48	94,48	94,61	85,00	89,27
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	84,43	84,43	85,15	86,00	92,16
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	63,93	64,21	65,08	56,00	58,68
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	18,28	18,28	19,31	26,00	27,73

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2024

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan dalam hal ini bangunan sekolah SD/MI menurun dari 94,48% pada tahun 2019 menjadi 89,27% pada tahun 2023, sedangkan bangunan sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik meningkat dari 84,43% pada tahun 2019 menjadi 92,16% pada tahun 2023.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar dalam periode tahun 2019-2023 menurun dari 63,93% di tahun 2019 menjadi sebesar 58,68% pada tahun 2023 yang disebabkan karena semakin tingginya pertumbuhan penduduk usia sekolah dasar yang tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan sekolah sedangkan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir yaitu dari 18,28% pada tahun 2019, naik menjadi 27,73% pada tahun 2023.

Tabel 2. 20
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	7	8	9
	Angka Pendidikan yang ditamatkan						
1	a. Jenjang SD/Sederajat	%	74,00	76,00	51,00	67,40	53,56
2	b. Jenjang SMP/Sederajat	%	38,00	38,00	28,21	26,22	34,17

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2024

Angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SD/sederajat cenderung menurun pada periode tahun 2019-2023 dari 74,00% pada tahun 2019 menjadi 53,56% pada tahun 2023. Pada jenjang SMP/sederajat juga berfluktuasi menurun pada periode lima tahun terakhir dari 38,00% pada tahun 2019 menjadi 34,17% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu upaya yang lebih keras untuk kembali meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan baik jenjang SD/sederajat maupun SMP/sederajat.

Sedangkan kualitas tenaga pendidik berdasarkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dari 81,10% di tahun 2018 yang meningkat menjadi 97,35% di tahun 2023. Selengkapnya dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 21
Guru yang Memenuhi Kualifikasi Tahun 2019-2023

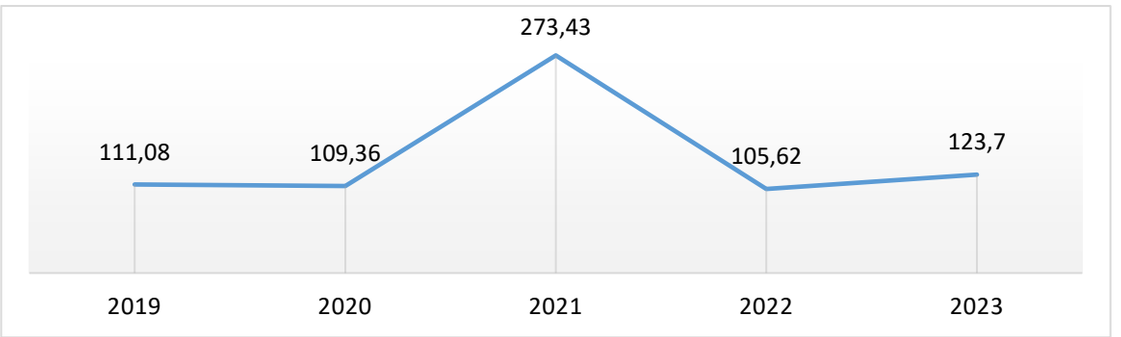
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	88,88	89,37	90,11	92,81	97,35

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2024

2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Batang terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Adapun sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang yaitu Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 2 (dua) Rumah Sakit meliputi RSUD Batang dan RSUD Limpung serta 1 (satu) Rumah Sakit swasta yaitu Rumah Sakit Umum QIM, puskesmas rawat inap sebanyak 4 buah, puskesmas rawat jalan sebanyak 17 buah, puskesmas pembantu sebanyak 42 buah, puskesmas keliling/ambulan sebanyak 23 buah, Poliklinik Kesehatan Desa sebanyak 200 unit serta posyandu sebanyak 1.236 buah yang tersebar di seluruh Kabupaten Batang.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan prevalensi gizi buruk pada Balita.



Gambar 2. 61 Angka Kematian Ibu Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

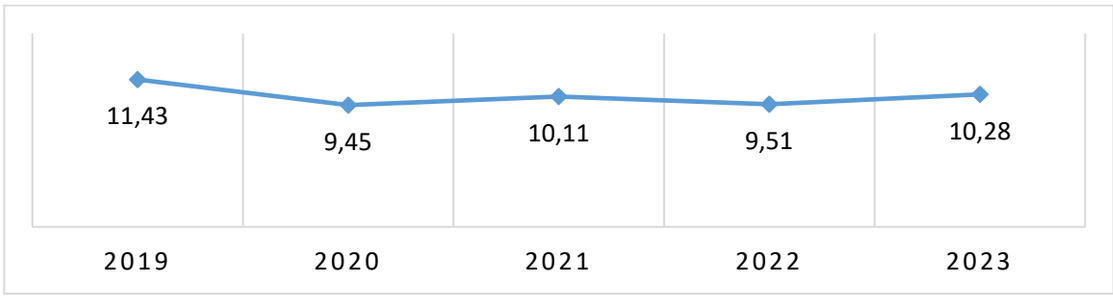
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi naik dan turun, dari 111,08 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menurun hingga 109,36 di tahun 2020 dan meningkat kembali hingga 273,43 di tahun 2021 dan menurun kembali menjadi 105,62 di tahun 2022 namun kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 123,7 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Kasus AKI di Kabupaten Batang antara lain disebabkan oleh masih tingginya kasus ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) karena adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu diwaktu hamil, komplikasi kebidanan dan masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur. Persentase terbesar dari AKI disebabkan oleh penyakit penyerta (bukan karena hal yang berkaitan langsung dengan kehamilan), misalnya jantung, TB dan hipertensi. Namun demikian, terdapat perbaikan sehingga

terdapat penurunan angka kematian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan AKI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang membawa hasil positif. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI diantaranya pemberian tablet tambah darah (Pil Cantik) pada remaja putri, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (minimal 4 kali selama kehamilan, Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya dan Memberikan PMT pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis, peningkatan perawatan dan non perawatan melalui penyediaan ruang persalinan dan alat kesehatan untuk persalinan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan serta melibatkan dan meningkatkan kerja sama lintas sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan kegiatan 5-ng dalam rangka mengenal kehamilan ibu-ibu di wilayah kerjaya dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.

Dukungan terhadap pencapaian SDG's dapat dilihat dari kinerja pencapaian gizi, yang ditunjukkan pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi gizi buruk. Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional dan daerah tahun 2023, akan dilakukan melalui aktivitas yang kongkrit utamanya hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan audit kematian *maternal perinatal* untuk mengetahun akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perumusan rencana intervensi;
2. Menugaskan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk melakukan pembinaan kepada Puskesmas, termasuk mengupayakan penugasan dokter spesialis di Puskesmas secara berkala;
3. Menggalakkan Kembali Gerakan 5Ng dengan memberdayakan kader-kader yang ada di tingkat desa/kelurahan;
4. Memperkuat kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal.

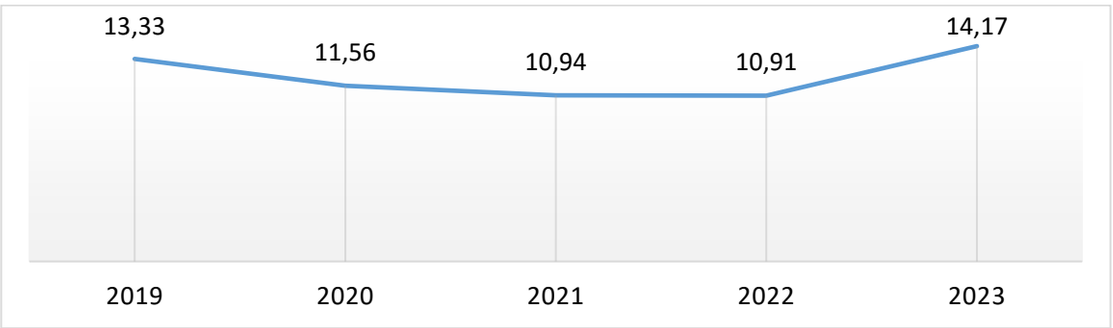
Selanjutnya kondisi angka kematian bayi (AKB) Kabupaten Batang tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 62 Angka Kematian Bayi per 1000 KH Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) dalam periode tahun 2019-2023 cenderung menurun, dari 11,43 per 1000 KH pada tahun 2019 turun menjadi 9,45 per 1000 KH pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 angka AKB naik kembali menjadi sebesar 12,3 per 1000 KH yang kemudian menurun kembali menjadi 9,51 per 1000 KH di tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 10,28 per 1000 KH pada tahun 2023. Meningkatnya AKB ini diantaranya disebabkan oleh meningkatnya angka komplikasi neonatal dan meningkatnya kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan PMT pada ibu hamil KEK, pemberian ASI eksklusif, pemeriksaan neonatus dan bayi serta meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi dengan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta pemberian vit A pada bayi umur 6 bulan – 1 tahun. Sementara itu angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Batang pada tahun 2023 sebesar 0,99178 yang berarti pada 1000 Kelahiran hidup terdapat 991 bayi yang bertahan hidup.

Kondisi peningkatan derajat kesehatan juag dilihat dari kondisi balita melalui indikator Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Batang cenderung fluktuatif dari tahun 2019-2023 yaitu dari 13,36 per 1000 KH pada tahun 2019 menurun menjadi 10,91 per 1000 KH pada tahun 2022 dan kemudian meningkat kembali menjadi 14,17 per 1000 KH pada tahun 2023. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk penurunan AKBA diantaranya melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi lewat kegiatan posyandu, pemeriksaan kesehatan balita dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali setahun, memberikan imunisasi lanjutan dan memberikan vitamin A, namun perlu ditingkatkan kembali untuk kembali menurunkan angka AKBA ini. Selengkapnya dijelaskan dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 63 Angka Kematian Balita per 1000 KH Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2023

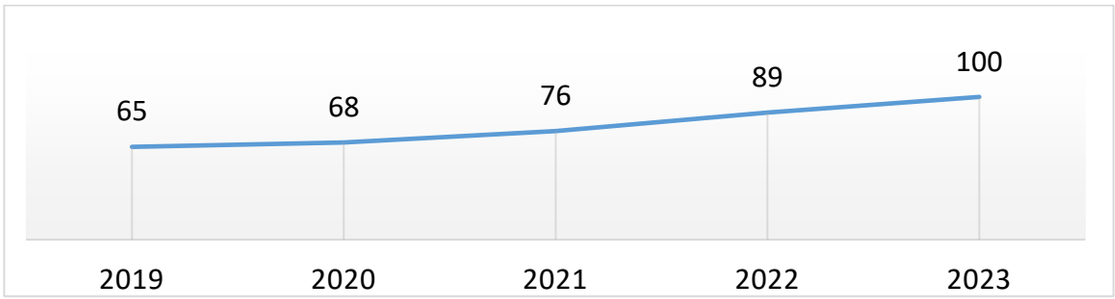
Pemenuhan sarana prasarana kesehatan berdasarkan indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dan Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 22
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit per satuan penduduk Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per penduduk	1:9.372	1:9.564	1:9.539	1:9.635	1:9491
2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per penduduk	1:256.194	1:258.230	1:270.282	1:276.192	1:27839

Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2024

Perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah melalui program *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang adalah melakukan penyuluhan pola hidup sehat kepada masyarakat, sosialisasi Perda KTR, pengaktifan Germas dan penguatan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pengadaan jamban sehat dan pemberian stimulan jamban keluarga



Gambar 2. 64 Peningkatan Jumlah Desa ODF di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber : Dinkes Kab. Batang, 2023

Tahun 2020, jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Batang yang diverifikasi sebagai ODF sebanyak 68 desa/kelurahan meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 65 desa/kelurahan. tahun 2021 jumlah desa terverifikasi ODF meningkat menjadi 76 desa/kelurahan dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 89 desa. Kemudian di tahun 2023 awal tahun terdapat penambahan 1 desa ODF menjadi 90 desa dan hingga akhir tahun 2023 telah mencapai 248 desa/kelurahan dengan status ODF atau sudah 100% desa di Kabupaten Batang ODF. Penyelesaian ODF melalui pembangunan sarpras dan akses sanitasi serta pemberian stimulan jamban baik melalui sumber dana APBD maupun CSR. Selain itu juga dilakukan upaya membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang urgensi sanitasi dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

1) Jalan dalam kondisi baik

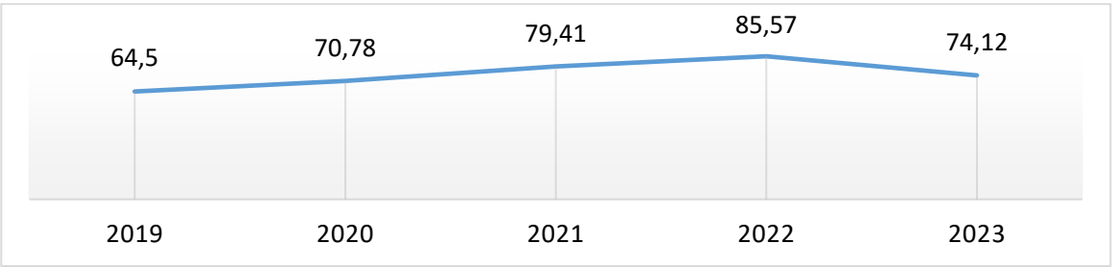
Salah satu infrastruktur pembangunan yang sangat umum adalah penyediaan prasarana transportasi berupa Jalan, agar pelaksanaan barang dan jasa berjalan dengan lancar. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Batang terdiri dari 540,45 km jalan kewenangan nasional, 37,31 km jalan kewenangan provinsi dan 552,42 km merupakan jalan kewenangan kabupaten.

Tabel 2. 23
Kondisi Infrastruktur Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

No	Kondisi jalan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baik	Km	297,92	279,316	160,240	317,96	400,57
2	Sedang	Km	95,87	111,788	249,694	148,75	49,93

No	Kondisi jalan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rusak Ringan	Km	90,37	64,967	83,792	56,88	51,69
4	Rusak Berat	Km	68,28	96,350	58,595	28,83	38,26

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2024



Gambar 2. 65 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang, 2024

Dari tabel 2.22 dan gambar 2.65 terlihat bahwa Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten sepanjang 540,49 km, dengan kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar 64,5% pada tahun 2019 menjadi 74,12% pada tahun 2023. Namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 dari 85,57% tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena total panjang jalan yang berubah dan banyak ruas jalan yang naik status menjadi jalan provinsi (SK Gubernur Jawa Tengah No.622/2 Tahun 2023) maupun yang turun menjadi jalan desa serta terdapat penyesuaian panjang jalan dengan realita panjang di lapangan.

2) Kondisi Jaringan Irigasi

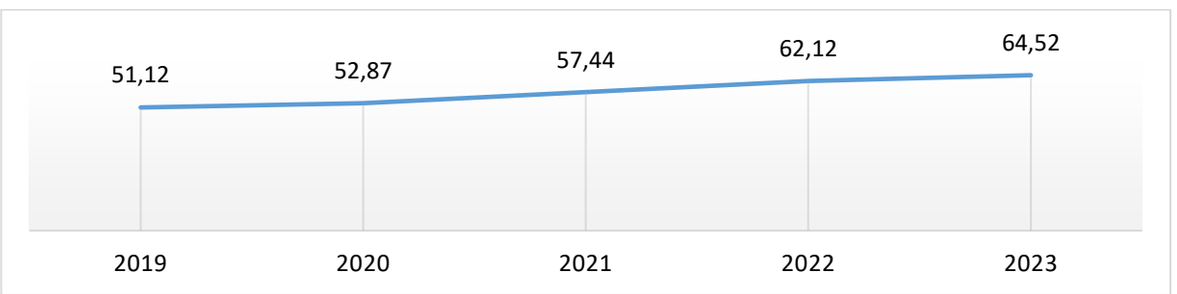
Pengelolaan jaringan irigasi bertujuan untuk memenuhi permintaan air irigasi bagi daerah layanan. Di Kabupaten Batang, luas areal jaringan irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten seluas 20.329,896 Ha dengan nilai indeks kinerja sistem irigasi sebesar 57,35 dan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 2,4% di tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Batang terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, hal ini dapat dilihat dari luasan irigasi dalam kondisi baik yang luasannya terus meningkat dalam periode lima tahun terakhir.

Tabel 2. 24
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten
Tahun 2019-2023

NO	Kondisi Irigasi	Stn	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baik	Ha	10.595,94	11.561,61	11.676,97	12.628,93	13,116,38
2	Rusak	Ha	9.733,95	8.768,28	8.652,92	7.700,966	7.213,514
	Total luas	Ha	20.329,90	20.329,90	20.329,89	20.329,89	20.329,89

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2024

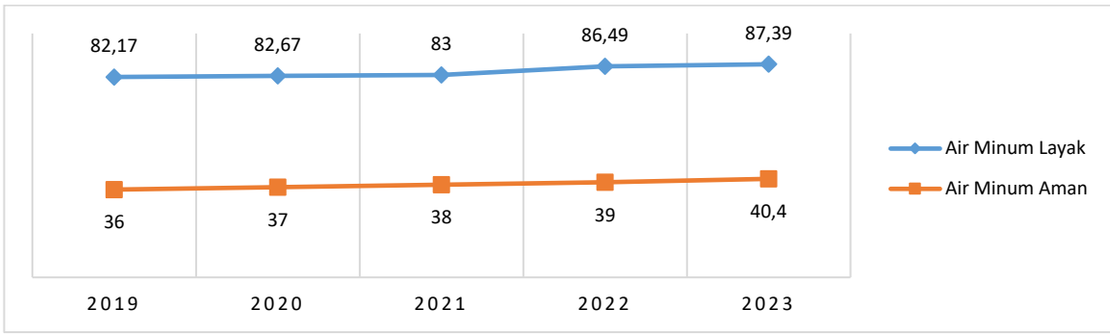
Sementara itu, pada luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Batang dalam kurun tahun 2019 hingga 2023 cenderung meningkat dimana pada tahun 2019, luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Batang sebesar 10.595,94 ha dan terus meningkat menjadi 13.116,38 ha (64,52%) pada tahun 2023. Luasan irigasi dalam kondisi baik ini juga lebih besar dibandingkan dengan luasan irigasi dalam kondisi rusak yaitu sebesar 7.213,51 ha pada tahun 2023, menurun dari tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang fokus terhadap upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Batang guna menunjang produktivitas pertanian serta kedepan masih perlu lebih ditingkatkan karena masih banyaknya bangunan irigasi yang rusak disebabkan umurnya sudah lama dan tidak tertangani dengan baik serta seringnya terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan irigasi. Sebagaimana capaian tersebut tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 66 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023
Sumber: DPUPR Kabupaten Batang, 2024

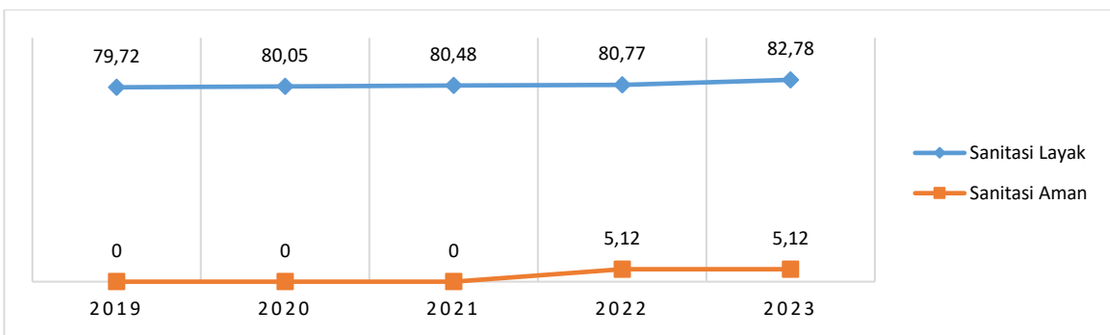
3) Akses Air Minum dan sanitasi

Air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kebutuhan manusia. Pelayanan terhadap akses air minum di Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sebagaimana kondisi air minum tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 67 Persentase Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak dan aman Kabupaten Batang Tahun 2019-2023
Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2024

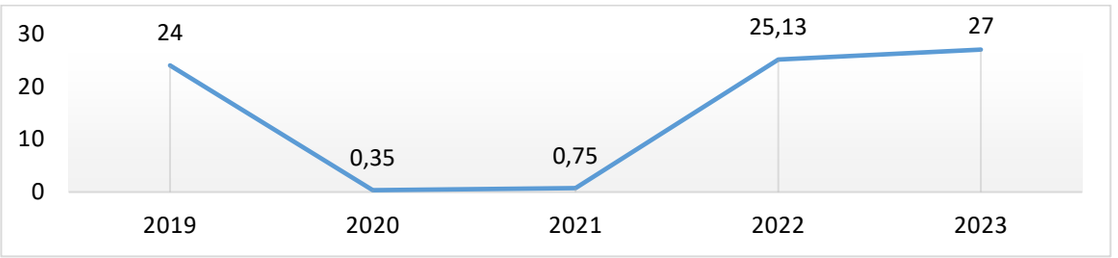
Berdasarkan grafik diatas, cakupan layanan akses air minum Layak yang terus meningkat dari tahun 2019-2023, dari 82,17% di tahun 2018 menjadi 87,39% di tahun 2023. Sementara itu, cakupan layanan akses air minum aman hingga tahun 2023 telah mencapai 40,4%. Hal ini mengindikasikan sebesar 40,4% akses air minum di Kabupaten Batang telah memenuhi syarat kesehatan alam sistem penyediaan air minum yang dikelola. Demikian juga untuk cakupan layanan akses sanitasi layak, dalam periode 2019-2023 terus mengalami peningkatan dari 79,72% di tahun 2019 menjadi 82,78% di tahun 2023 sedangkan sanitasi aman hingga tahun 2023 baru mencapai 5,12%. Sebagaimana cakupan sanitasi aman dan layak tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 68 Persentase Cakupan layanan Sanitasi aman dan layak Kabupaten Batang Tahun 2019-2023
Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2024

4) Drainase dalam kondisi baik

Drainase sebagai sistem pengelolaan air untuk mengalur aliran air dari suatu area ke permukaan tertentu. Di Kabupaten Batang kondisi drainase dalam lima tahun terakhir tahun 2019-2023 menunjukkan tren positif dari 24% pada tahun 2019 menjadi 27% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi infrastruktur di Kabupaten Batang. Sebagaimana kondisi tersebut tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 69 Luas Drainase Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber : DPUPR Kab. Batang, 2024

b. Penataan Ruang

Kondisi Ruang Terbuka Hijau dan Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Batang dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 25
Rasio RTH dan Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Batang (%)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8	
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan	%	7,34	24,32	28,83	25,42	25,51
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	72,73	72,73	72,73	72,15	71,84

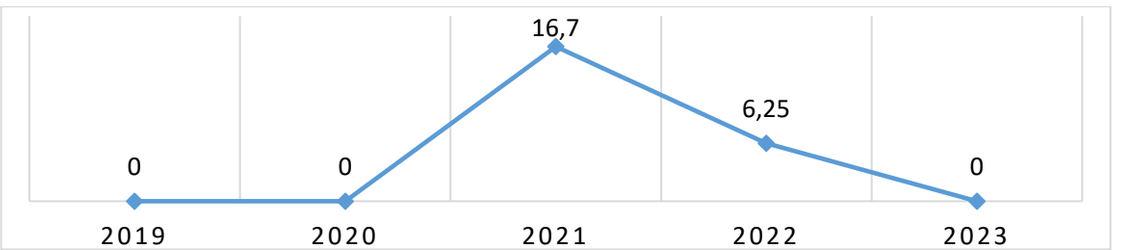
Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2024

Dari tabel diatas, capaian rasio ruang terbuka hijau berfluktuasi dalam periode tahun 2019-2023, yaitu sebesar 7,34% pada tahun 2019 kemudian meningkat kembali menjadi 25,51 di tahun 2023. Sedangkan persentase ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Batang tahun 2019 - 2023 cenderung stagnan di angka 72,73 dari tahun 2018-2021 dan menurun menjadi 72,15 persen pada tahun 2022 dan 71,84 ditahun 2023. Hal ini disebabkan kondisi riil pemanfaatan ruang di lapangan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah dipetakan pada RTRW sehingga terjadi simpangan pemanfaatan ruang.

Pemerintah kabupaten Batang berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dalam Gerakan Sinergi Reforma Agraria. Tujuan ini adalah untuk mensingkronkan kegiatan penataan aset dan akses, serta mendorong potensi usaha kegiatan penataan akses di kabupaten Batang. Pemerintah Kabupaten Batang dapat memberikan dukungan teknis dan non-teknis kepada Kantah dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria. seperti memberikan kolaborasi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan lainnya.

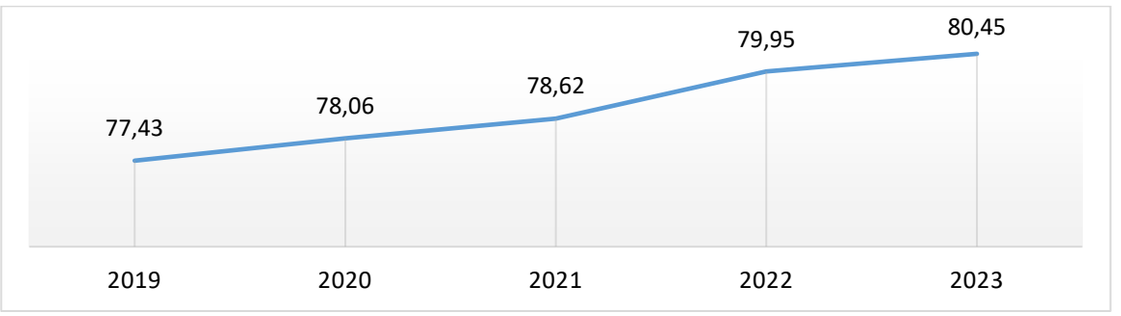
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Batang dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Dalam SK terbaru terkait kawasan kumuh di Kabupaten Batang, total luasan kumuh tahun 2023 seluas 105,38 Ha. Upaya pengurangan luasan kawasan kumuh dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang tidak terlalu signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase pengurangan luasan kawasan kumuh yang meningkat dari tahun 2019– 2023. Dari tahun 2019 sebesar 0%. kemudian mengalami peningkatan penanganan yang cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 16,7% dan kemudian menurun 6,25% pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 tidak ada *progress* dalam upaya pengurangan luasan kawasan kumuh.



Gambar 2. 70 Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Batang Tahun 2019-2023
Sumber: DPRKP Kabupaten Batang, 2024

Persentase rumah layak huni mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 77,43% menjadi 80,45% pada tahun 2023. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang melalui pemugaran rumah tidak layak huni.



Gambar 2. 71 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Batang (%)
Sumber: DPRKP Kabupaten Batang, 2024

5. Sosial

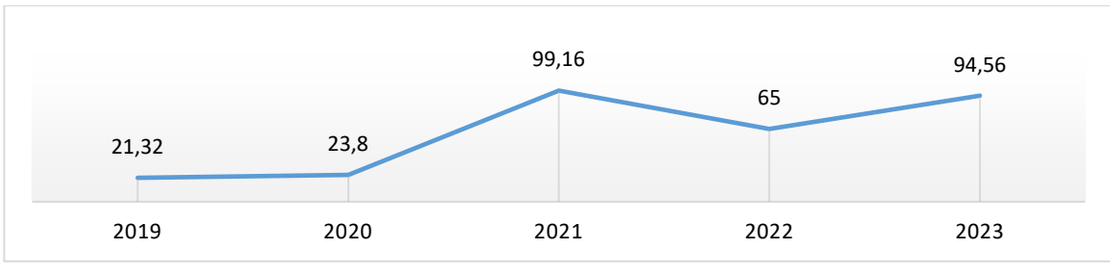
Penyelenggaraan urusan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang antara lain meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana. Salah satu fokus pemberdayaan dan perlindungan sosial yang ditangani antara lain PMKS yang terdiri dari 26 kriteria. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sejak tahun 2021, Kabupaten Batang telah memiliki rumah singgah untuk PMKS sejak tahun 2021 dan telah beroperasional secara aktif

Penanganan PMKS yang tertangani bersifat fluktuatif dalam periode 2019-2023. Pada Tahun 2019 PMKS yang tertangani sebesar 19,8% dan terus mengalami peningkatan hingga 99,16% ditahun 2021 namun terjadi penurunan kembali di tahun 2022 menjadi sebesar 65% dan meningkat menjadi 94,56% pada tahun 2023. Penurunan persentase PMKS yang tertangani ini terjadi karena adanya penambahan Namun demikian, pelayanan dasar bagi PMKS yang juga merupakan salah satu indikator SPM urusan Sosial ini capaiannya masih relatif kecil.

Rendahnya capaian penanganan PMKS pada Tahun 2019 - 2020 terjadi karena proses pendataan DTKS mulai dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG sehingga terjadi penambahan jumlah PMKS di Kabupaten Batang. Pada Tahun 2020 proses pemutakhiran dan verifikasi validasi DTKS mulai dilaksanakan tetapi belum mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial sehingga data PMKS dalam DTKS belum mengalami pengurangan secara signifikan. Selain itu, pada Tahun 2020, untuk mengatasi dampak Pandemi, pemerintah memberikan banyak bantuan untuk warga miskin baik melalui Anggaran APDB, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun Dana Desa.

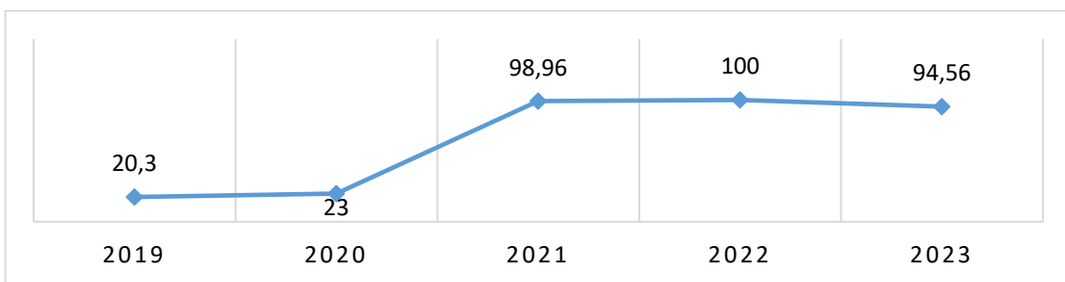
Pada Tahun 2022, proses verifikasi dan validasi sudah berjalan sehingga jumlah warga miskin yang masuk ke dalam DTKS berkurang dari 426.263 jiwa pada Tahun 2018 menjadi 160.595 jiwa pada Tahun 2021 kemudan meningkat kembali menjadi 502,596 jiwa ditahun 2022 dan menurun menjadi sebanyak 487.160 orang. Fluktuasi ini terjadi karena pada saat proses verifikasi dan validasi ditemukan data warga yang tidak valid, misalnya sudah meninggal dunia atau sudah tidak miskin. Fluktuasi jumlah warga miskin ini

berpengaruh signifikan terhadap jumlah bantuan membuat persentase penanganan PMKS pada setiap tahunnya serta pengajuan dari masing masing desa. Sebagaimana grafik capaian PMKS yang tertangani di Kabupaten Batang dari 2019-2023 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 72 PMKS yang tertangani Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024

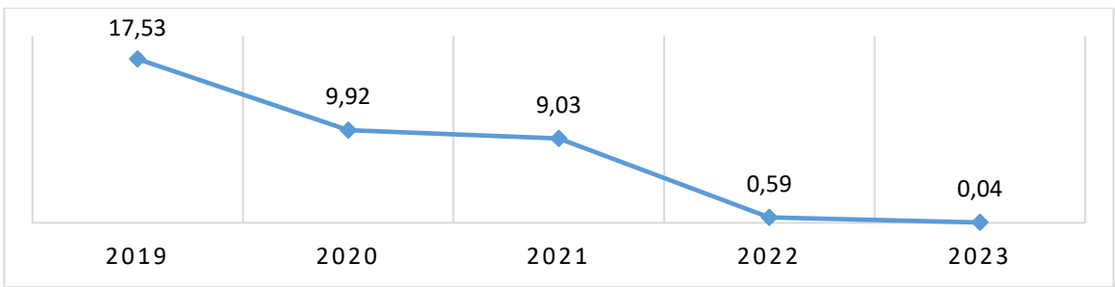
Salah satu upaya penanganan PMKS adalah mendorong dan menciptakan kemandirian sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara optimal. Salah satu media/alat untuk mendukung proses rehabilitasi sosial adalah pemberian stimulan/bantuan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosia serta adaya alokasi anggaran bantuan sosial yang terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten. Namun demikian, banyaknya bantuan sosial untuk PMKS dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dari 18,84% di tahun 2018 menjadi 94,56% di tahun 2023, meskipun pada tahun 2018 capaiannya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena asistensi untuk lanjut usia dan asistensi orang dengan kecacatan tidak diberikan, namun disisi lain diberikan alokasi bantuan untuk korban bencana dan operasional rawat inap bagi anggota keluarga PMKS yang dirawat di rumah sakit. Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan signifikan yang disebabkan oleh sudah tertatanya data base PMKS (dalam hal ini termasuk di dalamnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban warga akibat adanya Pandemi *Covid*-19.



Gambar 2. 73 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024

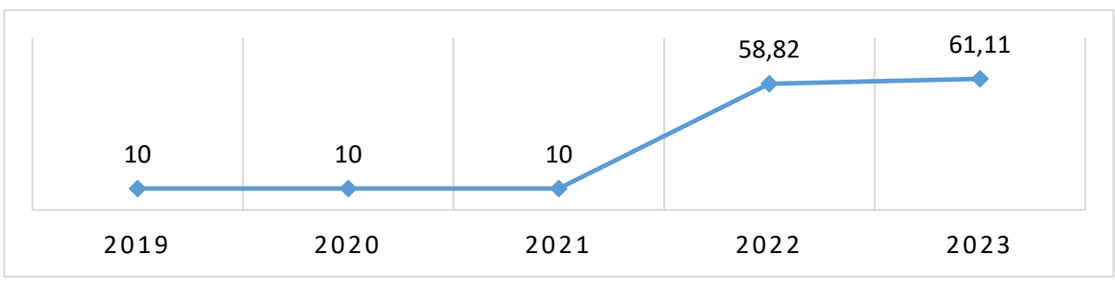
Penanganan PMKS juga dilakukan melalui pemberdayaan sosial bagi PMKS dengan membentuk kelompok usaha bersama keluarga miskin, RTLH dan santunan kematian bagi warga miskin.

Kinerja pemberdayaan sosial dapat dilihat dari capaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan dalam periode lima tahun terakhir (2019-2023). Persentase PMKS yang diberdayakan cenderung menurun, pada tahun 2019 sebesar 17,53 per 1000 dan terus menurun hingga tahun 2023 menjadi 0,04. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlu upaya yang lebih keras terkait peningkatan pemberdayaan PMKS di Kabupaten Batang. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan asistensi sosial bagi PMKS antara lain berupa asistensi kepada para penyandang disabilitas, asistensi lanjut usia serta santunan kematian kepada untuk ahli waris warga miskin yang meninggal dunia. Sebagaim grafik PMKS yang diberdayakan tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 74 PMKS yang Diberdayakan di Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024

Sedangkan Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan capaiannya cenderung stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2019 hingga 2021 terdapat 10% panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan, kemudian meningkat menjadi 61,11% ditahun 2023.



Gambar 2. 75 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Batang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Gangguan keamanan yang tertangani di Kabupaten Batang fluktuatif dalam periode tahun 2019-2023, tahun 2019 sebesar 87,97% dan menurun

karena terdapat kasus yang dilaporkan tidak semuanya dapat diselesaikan pada tahun berkenaan, tetapi baru dapat diselesaikan pada tahun berikutnya. Kemudian menurun hingga tahun 2022 kinerja menjadi sebesar 70,61% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 73,25%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penanganan tindak pidana yang selesai pada tahun 2023. Sebagaimana kinerja tindak pidana di Kabupaten Batang selama 5 tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 26
Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani di Kabupaten Batang

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja Penyelesaian Tindak Pidana (%)
		Lapor	Selesai	
1	2019	158	139	87,97
2	2020	163	135	82,82
3	2021	149	107	71,81
4	2022	194	137	70,61
5	2023	258	189	73,25

Sumber: Kepolisian Resort Batang Tahun 2024

Dalam mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat tak terlepas dari peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lain. Jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Batang tahun 2023 berjumlah 8.388 personil. Dengan 8.295 personil berjenis kelamin laki-laki dan 93 personil berjenis kelamin perempuan.

b. Penanggulangan Bencana

Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Batang terdiri dari kawasan rawan tanah longsor (gerakan tanah), kawasan rawan gelombang pasang/banjir dan kawasan rawan abrasi laut.

Di Kabupaten Batang tercatat setidaknya 71 kejadian bencana pada periode tahun 2019 – 2023 dimana tanah longsor merupakan kejadian bencana yang paling sering terjadi selama 5 tahun terakhir sebanyak 19 kejadian di tahun 2023. Kejadian bencana lainnya yang sering terjadi adalah tanah longsor dan banjir. Sebagaimana pada tabel berikut:

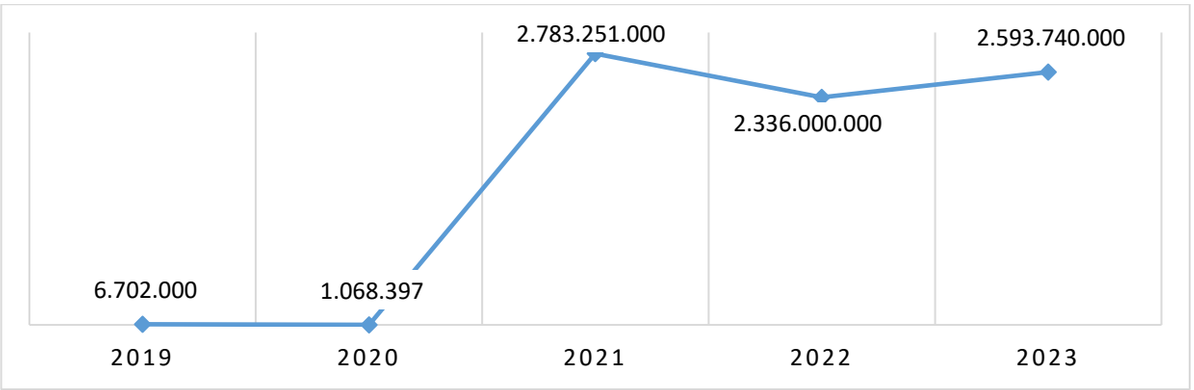
Tabel 2. 27
Kejadian Bencana Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Jenis Kejadian	2019	2020	2021	2022	2023
Abrasi					1
Angin	12	5	19	24	
Banjir		8	7	11	10
Cuaca Ekstrim	35				14
Kebakaran Hutan dan Lahan	39	35	8		12
Kekeringan					4

Jenis Kejadian	2019	2020	2021	2022	2023
Tanah Longsor	14	18	22	16	19
lain-lain			4	10	11
TOTAL	**100**	**66**	**60**	**61**	**71**

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana, 2024

Sebagaimana kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana dalam kurun waktu 2019-2023 berfluktuasi, pada tahun 2019 sebesar Rp. 6.702.000 yang kemudian meningkat hingga tahun 2023 dengan total kerugian Rp 2.293.740.000,-. Yang tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 76 Kerugian/Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2019-2023
Sumber: BPBD Kabupaten Batang Tahun 2024

Pada fase pra bencana tahap mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan berperan penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan mitigasi, masyarakat memahami potensi dan resiko bencana yang berada di lingkungan mereka, Sosialisasi/penyuluhan kebencanaan dan penanggulangannya menjadi sangat dibutuhkan agar masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana dan mitigasi struktural berupa penguatan bangunan fisik pencegah/pengurang dampak bencana yang sesuai dengan karakteristik bencananya. Disamping hal tersebut perlu dibangun sistem peringatan dini/early warning system untuk jenis-jenis bencana agar program pengurangan resiko berjalan baik.

Pada Fase tanggap darurat dukungan relawan penanggulangan bencana lebih optimal apabila ditunjang Sarana prasarana dan peralatan kebencanaan yang memadai. Untuk mencapai kondisi pemulihan saat tanggap darurat dalam waktu singakat perlu mobilisasi relawan dan peralatan kebencanaan, beberapa upaya yang sudah dilakukan antara lain pemenuhan sarana seperti perahu karet dan prasarana lainnya untuk memenuhi respon time penanganan bencana.

Desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman

bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Kabupaten Batang baru dilaksanakan di tahun 2019 sebanyak 2 desa. Sedangkan upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan melalui mitigasi non struktural antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan Early Warning System (sistem peringatan dini) berbasis masyarakat di lokasi yang rentan terhadap bencana. Pemasangan EWS untuk tahun 2015 sebanyak 2 buah, sedangkan pemasangan rambu jalur evakuasi sebanyak 13 buah di tahun 2018.

Meskipun kejadian bencana di Kabupaten Batang hanya pada tahun 2020 yang terdapat korban jiwa yang meninggal (1 jiwa), namun masyarakat yang terdampak bencana perlu mendapatkan penanganan dan bantuan agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara normal serta pemulihan dari dampak bencana yang dilaksanakan secara terpadu diantaranya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Selama kurun waktu 2017 – 2021, beberapa bencana yang terjadi di Kabupaten Batang baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam dan jumlah korbannya terinci pada tabel berikut :

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2023 di Kabupaten Batang sebesar 76,62 persen dan 23,38 persen adalah Bukan Angkatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Batang 2023 sebesar 6,06 persen, kondisi ini menurun dari tahun 2022 sebesar 6,64 persen. Sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 28

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Batang (orang)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja Total
2019	385 .747	16.755	402.502
2020	387 .741	28.835	416.576
2021	402 .320	28 .370	430.690
2022	426.004	30.301	456.305
2023	459.118	29.619	488.737

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, Angkatan Kerja tahun 2023 sebanyak 488.737 orang terbagi menjadi penduduk Bekerja 459.118 orang dengan Pengangguran 29.619 orang. Jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja sebanyak 149.128 orang, dengan komposisi penduduk sekolah sebanyak 36.383 orang.

Selanjutnya persentase bekerja terhadap angkatan kerja sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 29
Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)
di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Tahun	Penduduk 15+ Tahun	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
2019	586.190	95,84	68,67
2020	586.190	95,84	68,67
2021	603.186	92,46	71,40
2022	609.256	93,36	74,90
2023	637.865	93,94	76,62

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

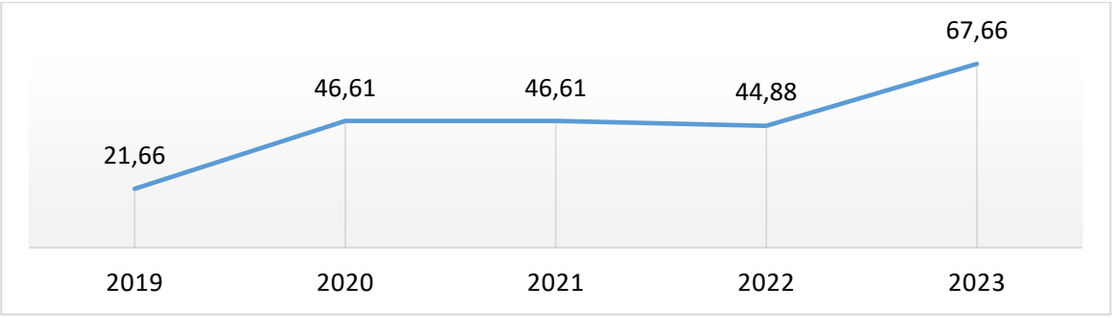
Salah satu penyebab angka pengangguran di Kabupaten Batang adalah jumlah lowongan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2022 sebanyak 6.453 orang menurun jumlahnya dari tahun sebelumnya 7.234 orang. Sementara lowongan kerja yang tersedia tahun 2022 sebanyak 3.401 lowongan meningkat dari tahun sebelumnya dimana sebanyak 2.231 lowongan. Pada tahun 2022 lowongan untuk perempuan lebih banyak tersedia sejumlah 1.907 posisi dibanding untuk laki laki sebanyak 1.494 posisi. Jumlah lowongan kerja yang tersedia selama kurun waktu 2018-2022 jumlahnya selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan masih perlunya upaya yang keras untuk memperluas atau menciptakan lapangan kerja baru.

Tabel 2. 30
Jumlah Pencari Kerja dibandingkan Lowongan Kerja
di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Lowongan Kerja
2019	5.327	1.649
2020	3.956	2.141
2021	7.234	2.231
2022	6.453	3.401
2023	3.376	2.762

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2024

Sedangkan persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam periode tahun 2019-2023 berfluktuasi, yaitu pada tahun 2019 sebesar 44,99% yang menurun menjadi 21,66% di tahun 2019 kemudian kembali meningkat menjadi 46,61 di tahun 2021 dan menurun kembali menjadi 44,88% ditahun 2022 yang kemudian meningkat kembali menjadi 67,66 persen di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan maupun menambah lapangan kerja baru serta penyiapan kapasitas SDM sesuai keahlian yang dibutuhkan melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja sudah baik namun perlu digenjot kembali agar pencari kerja di Kabupaten Batang mampu memenuhi kriteria pasar tenaga kerja.

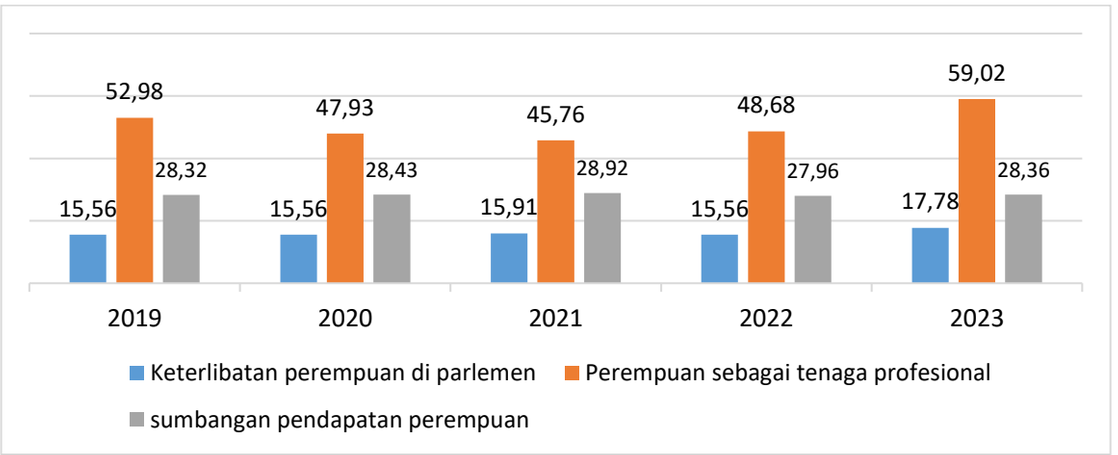


Gambar 2. 77 Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan produktivitas masyarakat adalah melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu upaya untuk menghadapi bonus demografi karena sebesar 34,72% penduduk produktif di Kabupaten Batang adalah perempuan. Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Batang jika dilihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini :

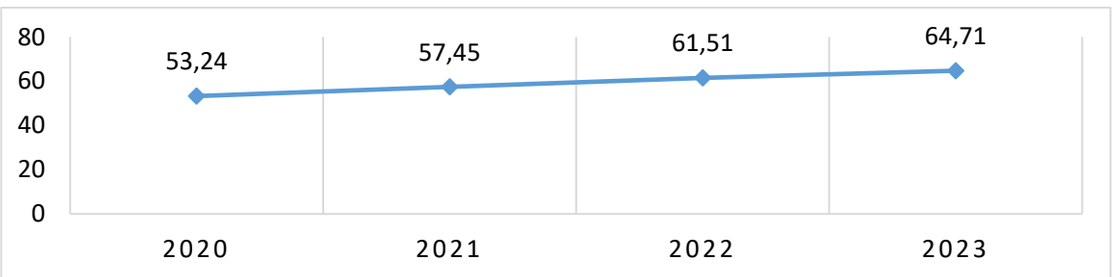


Gambar 2. 78 Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan, swasta dan legislatif Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Keterlibatan Perempuan di parlemen; Perempuan sebagai tenaga professional; Sunbangan pendapatan perempuan, jateng.bps.go.id/subject/40/gender.html diakses tanggal 1 Mei 2024

Dari tabel diatas, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif pada tahun 2019 sebesar 15,56% menjadi 17,78 % di tahun 2023 namun indikator ini cukup sulit untuk ditargetkan secara langsung karena merupakan hasil dari pemilihan legislatif. Pada indikator perempuan sebagai tenaga professional di Kabupaten Batang cenderung fluktuatif dari 52,98% di tahun 2019 menjadi 59,02% pada tahun 2023. Hal ini menandakan peran perempuan sebagai tenaga professional di kabupaten Batang kian meningkat sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan gender di Kabupaten Batang. Sedangkan pada sumbangan pendapatan perempuan capaian tahun 2019 sebesar 28,32 % dan menurun hingga tahun 2022 menjadi 27,96% dan kemudian meningkat menjadi 28,36% pada tahun 2023. Capaian ini menandakan peran perempuan dalam berkontribusi dalam pendapatan keluarga kian cenderung fluktuatif.

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Batang selama periode empat tahun terakhir (2020-2023) fluktuatif, pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sebesar 53,24 persen yang meningkat terus menjadi 64,71 persen tahun 2023.



Tabel 2. 31 Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2024

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan dengan peningkatan pemenuhan hak anak meliputi pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas. Ukuran keberhasilan upaya pemenuhan hak anak di kabupaten/kota ditunjukkan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Batang untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Beberapa upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak adalah adanya aturan tentang ruang atau area tanpa asap rokok, serta kerjasama antara DP3AP2KB dengan Dinas Perhubungan melalui pemasangan rambu-rambu Zona Selamat Sekolah, serta mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Meskipun capain indikator Kabupaten Layak Anak belum semua terpenuhi tetapi Pemerintah Kabupaten Batang sudah menerbitkan aturan mengenai perlindungan anak, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Upaya Pemerintah Kabupaten Batang untuk mewujudkan KLA juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Kecamatan Ramah Anak dari 6 kecamatan ramah anak pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 13 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang.

Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Batang pada periode 2019-2023 cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu sebanyak 30 kasus naik menjadi 84 kasus pada tahun 2023.

Tabel 2. 32
Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap anak
di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Seksual	17	21	12	15	67
2	Eksploitasi	-	-	-	-	-
3	KDRT	7	6	-	18	11
4	Penelantaran	2	2	3	3	-
5	TPPO	-	-	-	-	-
6	ABH	5	20	8	1	6
	Jumlah	**31**	**49**	**23**	**37**	**84**

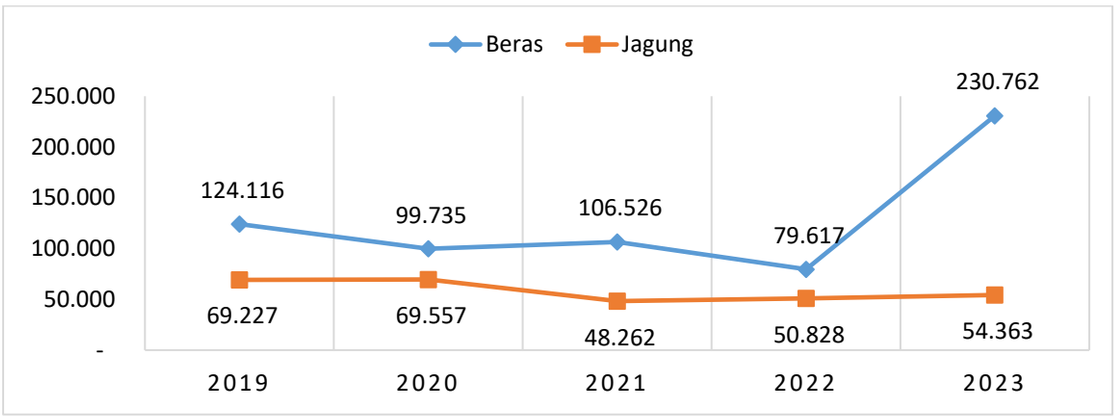
Sumber: P2TP2A melalui DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2024

3. Pangan

Pelayanan urusan pangan Tahun 2019 – 2023 dilakukan melalui aspek: ketersediaan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan manajemen ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Batang masih di dominasi oleh beras dan jagung. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ketersediaan beras cenderung menurun yaitu sebanyak 124.116 ton pada tahun 2019 dan terus menurun menjadi 79.617 ton di tahun 2022. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya bencana banjir pada bulan November dan Desember tahun 2022 yang mengakibatkan lahan seluas 150 Ha gagal panen yang berakibat pada penurunan produksi padi dan ketersediaan beras di Kabupaten Batang yang kemudian meningkat menjadi 230.762 ton pada tahun 2023. Peningkatan produksi beras yang cukup signifikan pada tahun 2023 ini disebabkan adanya program IP 400 atau penanaman padi sebanyak 4 kali setahun guna menggenjot produksi padi untuk mendorong ketahanan pangan daerah dan berdampak positif pada produksi beras di Kabupaten Batang.

Sedangkan pada ketersediaan jagung juga menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun 2019 – 2023. Dimana pada tahun 2019 dengan ketersediaan pangan jagung sebanyak 60.227 ton kemudian berfluktuasi dan menurun di tahun 2023 menjadi sebanyak 54.363 ton.



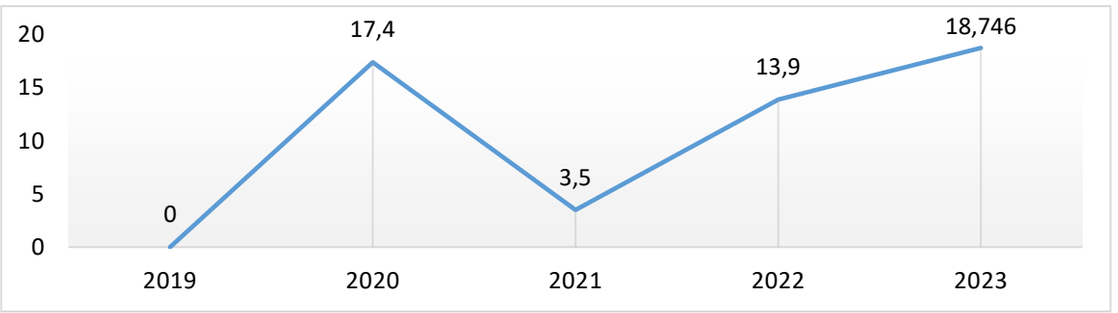
Gambar 2. 79 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Batang (ton) Tahun 2019-2023

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2024

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan mencapai 100% melalui *website : komoditas.batangkab.go.id.* Penyediaan informasi ini merupakan salah satu upaya yang bersifat antisipatif yaitu dengan melakukan pemantauan untuk meninjau ketersediaan produksi di tingkat produsen maupun bersifat responsif yang didukung sistem distribusi yang efektif dan efisien sehingga menciptakan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Cadangan pangan daerah digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di wilayah kabupaten Batang akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya. Cadangan pangan daerah Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2019-2023

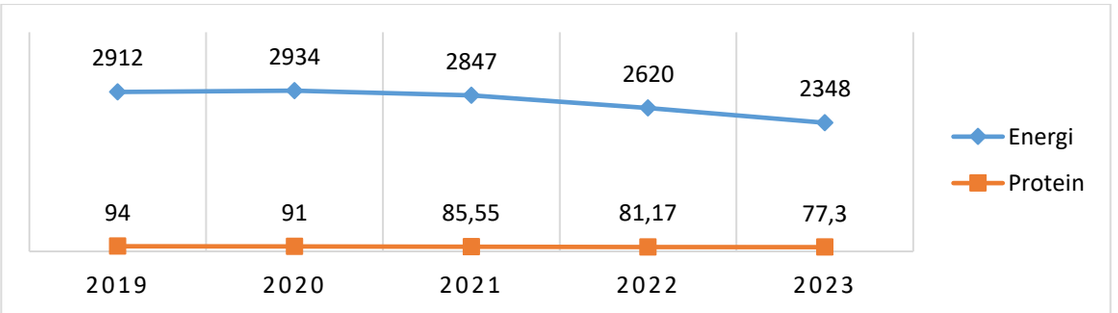
cenderung berfluktuasi. Hal ini disebabkan cadangan pangan berupa gabah yang memiliki masa simpan tertentu, sehingga Pemerintah Kabupaten Batang tidak setiap tahun membeli gabah baru, tetapi menghabiskan dulu stok yang masih ada. Pada akhir tahun 2019 cadangan pangan 0 namun tahun 2020 cadangan pangan daerah kembali naik menjadi 17,4 ton. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 3,5 ton dikarenakan Tidak ada kegiatan yang menunjang pengadaan cadangan pangan karena menghabiskan stok cadangan pangan yang masih ada dari tahun sebelumnya. Kemudian meningkat kembali menjadi 18,746 ton di tahun 2023. Hal ini didukung pengoptimalisasian kegiatan cadangan pangan di Kabupaten Batang dan kedepan Pemerintah Daerah akan tetap memperhatikan alokasi cadangan pangan daerah untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga.



Gambar 2. 80 Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Batang (ton)

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2024

Ketersediaan energi per kapita Kabupaten Batang dalam periode 2019-2023 juga fluktuatif dengan kecenderungan menurun, tahun 2019 sebesar 2912 kal dan menurun terus menjadi 2348 di tahun 2023. Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita yang cenderung berfluktuasi menurun dari 94 G di tahun 2019 menjadi 77,3 G di tahun 2023. Namun meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka capaian ini masih melebihi dari angka yang ditargetkan, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam jumlah yang cukup dan aman.

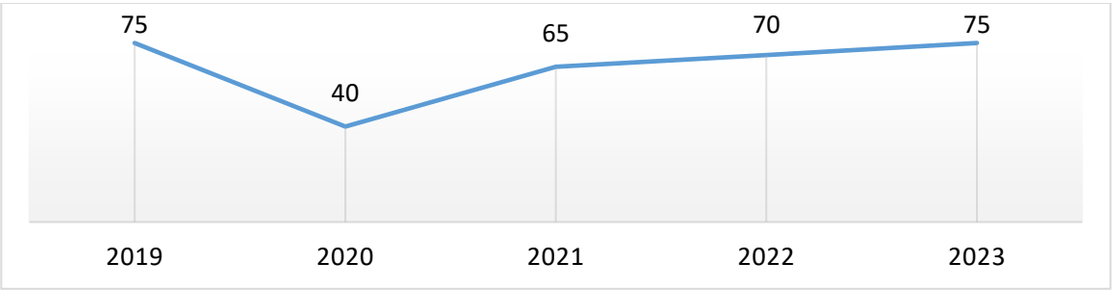


Gambar 2. 81 Ketersediaan energi per kapita (kal) dan protein per kapita (G)

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2024

4. Pertanahan

Pelayanan urusan pertanahan tahun 2019 – 2023 dilakukan melalui fasilitasi hak atas tanah dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam periode tahun 2019 – 2023 fasilitasi hak atas tanah di Kabupaten Batang cenderung berfluktuasi, pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan dari 75% menjadi 40%. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2023 meningkat dari 65% menjadi 75%. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kasus tanah desa yang prosesnya masih berjalan dan belum selesai sampai akhir tahun.

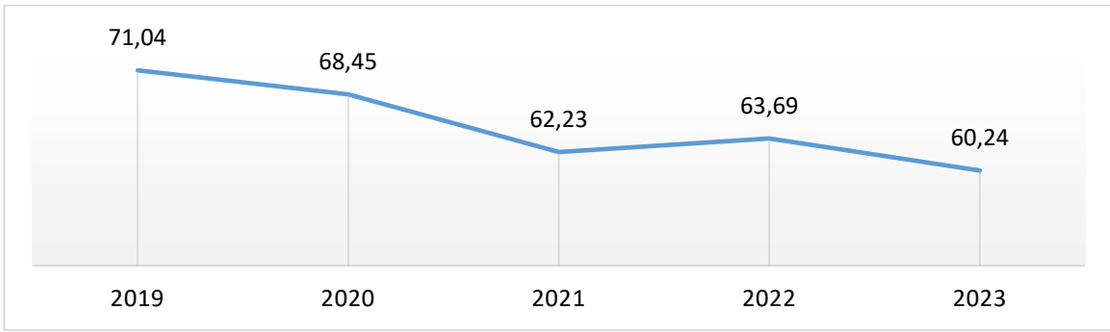


Tabel 2. 33 Fasilitasi Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2024

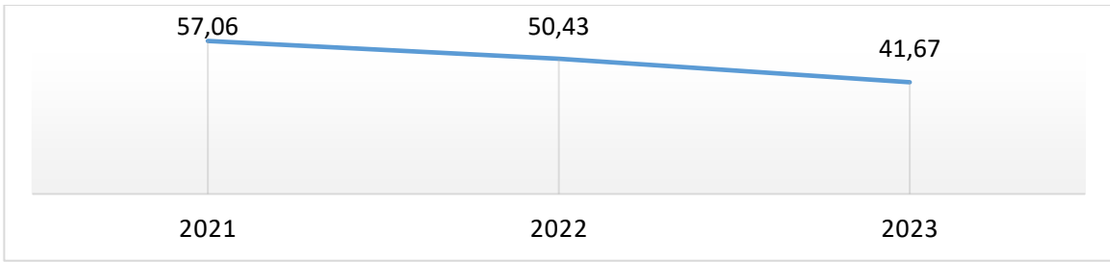
5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, mengingat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat mempunyai dampak cukup besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Pencemaran Air, Indeks Kualitas Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang selama periode 2019-2023 cenderung menurun yaitu dari 71,04 di tahun 2019 turun hingga 60,24 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan kualitas lingkungan. Pembangunan kawasan industri baru dan pembukaan lahan di daerah Batang bagian selatan mempengaruhi indeks kualitas lingkungan hidup. Walaupun dapat dikatakan cukup berhasil, namun diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan agar keberlanjutan dapat dipertahankan.

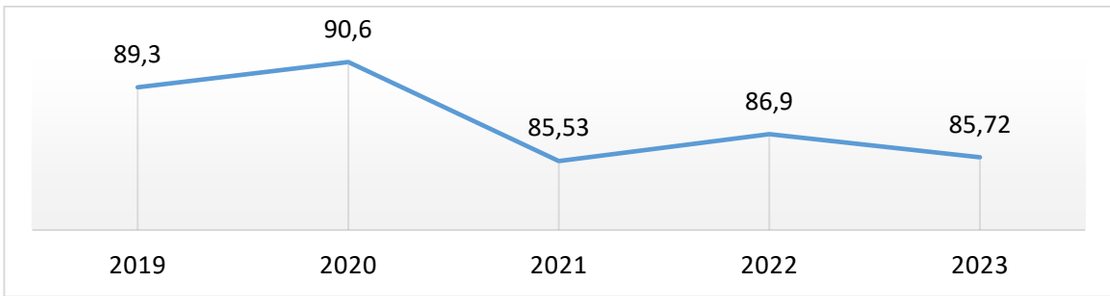


Gambar 2. 82 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2024

Jika dilihat dari komponen pembentuknya, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air, pada tahun 2021 nilai indeks kualitas air sebesar 55. Demikian juga untuk Indeks Kualitas Udara juga terus meningkat dari tahun 2019 sebesar 89,3 dan cenderung menurun menjadi 85,53 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas air dan udara di Kabupaten Batang namun tetap diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja untuk mempertahankan kualitas udara.



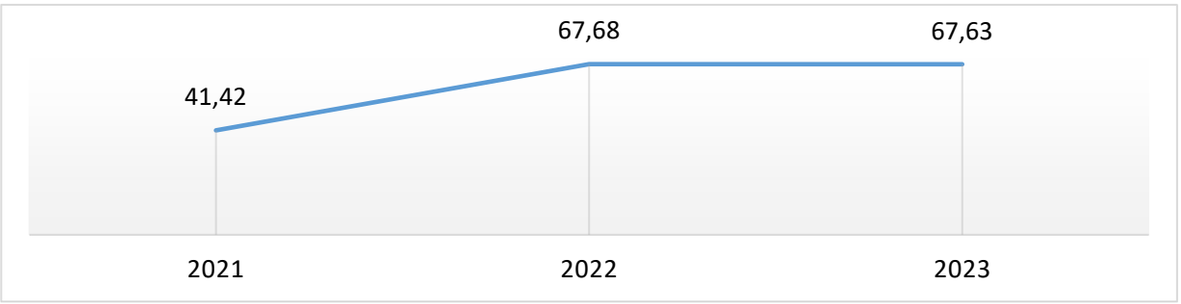
Gambar 2. 83 Indeks Kualitas Air Kabupaten Batang Tahun 2021-2023
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2023



Gambar 2. 84 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Batang Tahun 2019-2023
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2024

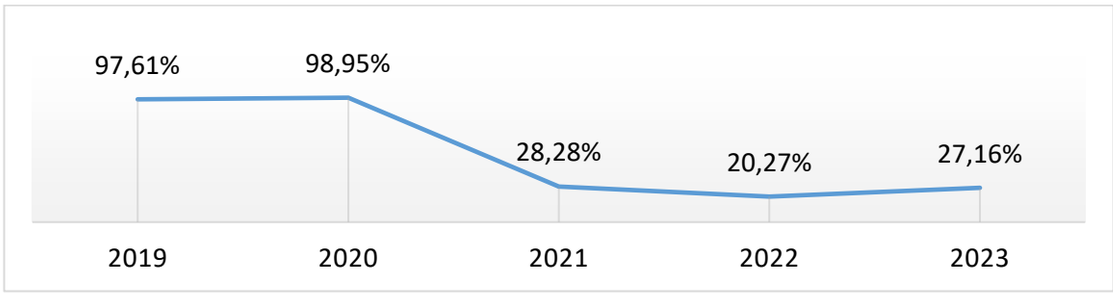
Indeks Kualitas Lahan merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan. Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai kawasan lindung, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Batang terus

meningkat dari tahun 2021 sebesar 41,42 menjadi 67,63 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perbaikan yang terus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penataan lahan untuk mendapatkan kondisi ekologis yang baik.



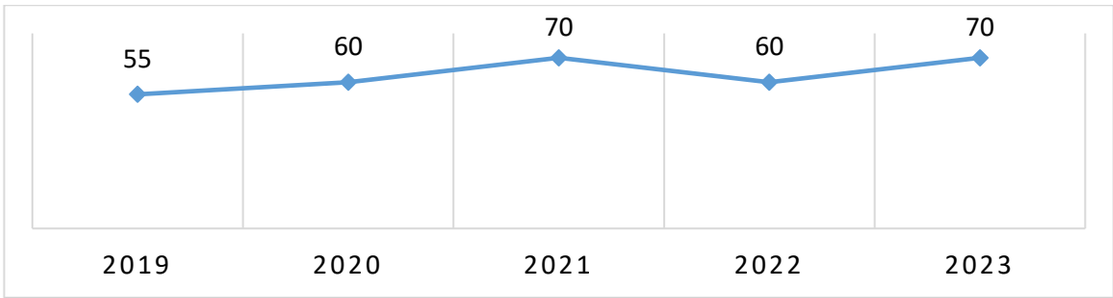
Gambar 2. 85 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Batang (%)
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2024

Salah satu penyebab ketidakseimbangan lingkungan hidup adalah sampah yang tidak ditangani dengan baik. Bukan hanya mengganggu keseimbangan lingkungan saja, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan juga sosial ekonomi masyarakat. Upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam menangani masalah persampahan dapat dilihat dari kinerja penanganan sampah sampah di Kabupaten Batang yang terus meningkat selama lima tahun terakhir (2019-2023), dari 97,61% sampah yang tertangani di tahun 2019 meningkat menjadi 98,95% di tahun 2021 dan kemudian menurun terus hingga tahun 2023 menjadi 27,18%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan bank sampah, pembuatan TPS composting dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk menangani masalah persampahan belum cukup berhasil. Namun demikian, capaian penanganan sampah di Kabupaten Batang masih belum mencapai 50% karena itu kedepan upaya penanganan sampah terutama pembangunan TPA dan TPST baru perlu segera dilaksanakan karena daya tampung TPA Randukuning sudah overload. Sebagaimana capaian penanganan persampahan dalam kurun tahun 2019-2023 tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 86 Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Batang
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2024

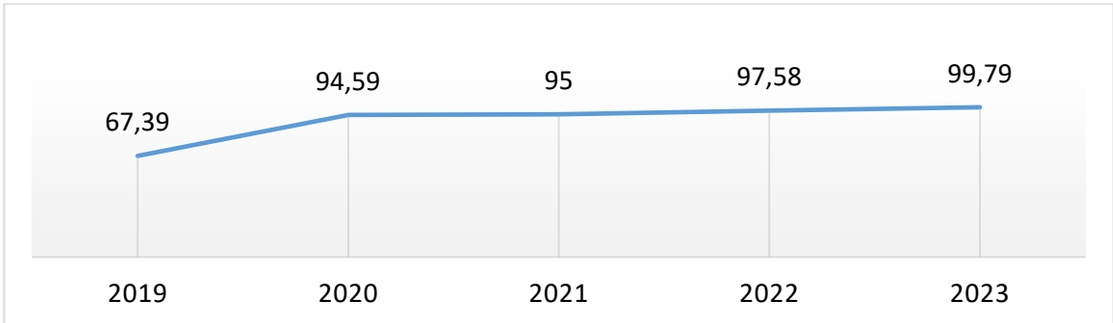
Sementara itu pada Cakupan area pelayanan penanganan persampahan juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 seluas 55 persen menjadi 70 persen di tahun 2021 kemudian menurun menjadi 60 persen di tahun 2022 dan meningkat menjadi 70 kembali pada tahun 2023. Peningkatan ini didukung dengan adanya penambahan sarana prasarana persampahan.



Gambar 2. 87 Cakupan Area Pelayanan Penanganan Sampah Kabupaten Batang Tahun 2019-2023
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2024

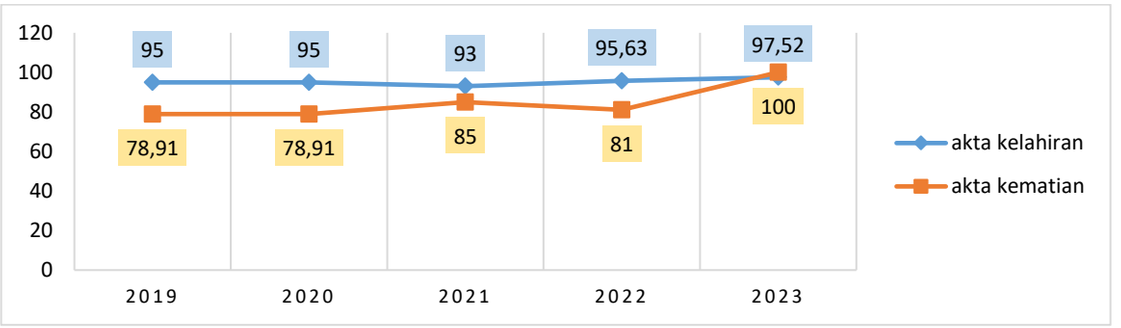
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio kepemilikan eKTP cenderung meningkat pada periode 2019-2023, tahun 2019 sebesar 67,39 persen kemudian meningkat menjadi 99,79 di tahun 2023. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan dalam proses perekaman dan penerbitan eKTP telah berjalan dengan baik melalui berbagai upaya inovatif seperti jemput bola ke masyarakat secara langsung serta meningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan.



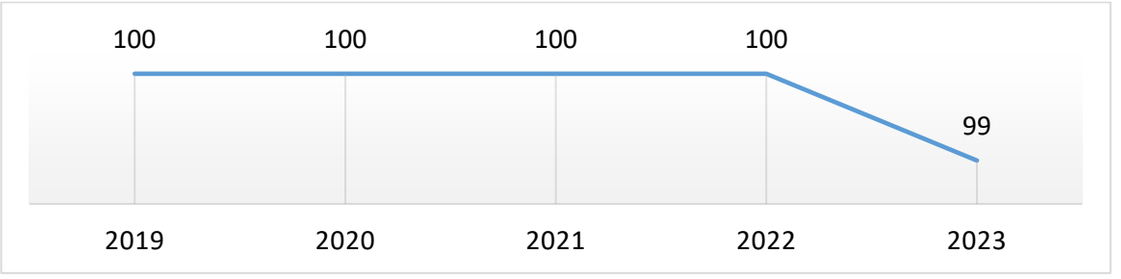
Gambar 2. 88 Rasio Penduduk ber KTP elektronik Kabupaten Batang (%)
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2024

Kepemilikan akta kelahiran dalam periode lima tahun terakhir mengalami tren meningkat dari tahun 2019 sebesar 95 persen menjadi sebesar 97,52 persen pada tahun 2023. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan capaian akta kematian yang meningkat dari 78,91 persen tahun 2019 menjadi 100 persen ditahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai administrasi mulai meningkat namun kedepan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan diantaranya melalui sosialisasi dan meningkatkan pelayanan jemput bola ke desa/kelurahan.



Gambar 2. 89 Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Batang (%)
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2024

Sedangkan untuk kepemilikan akta nikah, dalam periode lima tahun terakhir semua pasangan di Kabupaten Batang sudah memiliki akta nikah selama 2019-2022 menjadi 99 persen ditahun 2023.



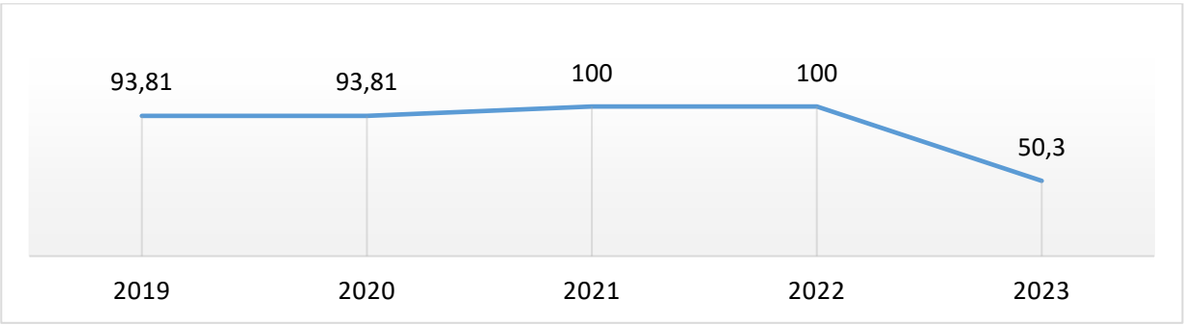
Gambar 2. 90 Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Batang (%)
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2023

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pembinaan kelompok oleh LPM.

Persentase PKK Aktif dalam periode tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari 93,81 persen di tahun 2019 kemudian terus mengalami

peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 100 persen. Namun mengalami penurunan menjadi 50,3 persen di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan monitoring secara intensif baik ke desa binaan maupun desa non binaan.



Gambar 2. 91 Persentase PKK Aktif Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa dilaksanakan dengan upaya untuk menginisiasi pembentukan dan penguatan lembaga ekonomi yang terwujud dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pada Tahun 2023 di Kabupaten Batang sudah terbentuk 218 Bumdes yang terbagi menjadi 4 klasifikasi seperti yang tercantum dalam Tabel 2.34.

Tabel 2. 34
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Klasifikasi di Kabupaten Batang Tahun 2023

NO	KLASIFIKASI BUMDES	JUMLAH
1	Perintis	114
2	Tumbuh	93
3	Berkembang	11
4	Maju	0
	JUMLAH	**218**

Sumber: Sidesa Dispermades, 2024

Pada Tahun 2032, di Kabupaten Batang terdapat 114 Bumdes yang termasuk ke dalam klasifikasi Perintis, 93 Bumdes berklasifikasi Tumbuh, dan 11 Bumdes berklasifikasi Berkembang. Perkembangan pemberdayaan masyarakat dan desa juga dapat dilihat dari status Indeks Desa Membangun (IDM) dari masing-masing desa. Data perkembangan IDM desa berdasarkan kategorinya disajikan dalam tabel 2.35.

Tabel 2. 35
Status Desa Hasil Pemutakhiran IDM Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

NO	STATUS DESA	JUMLAH DESA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	MANDIRI	1	0	0	0	1

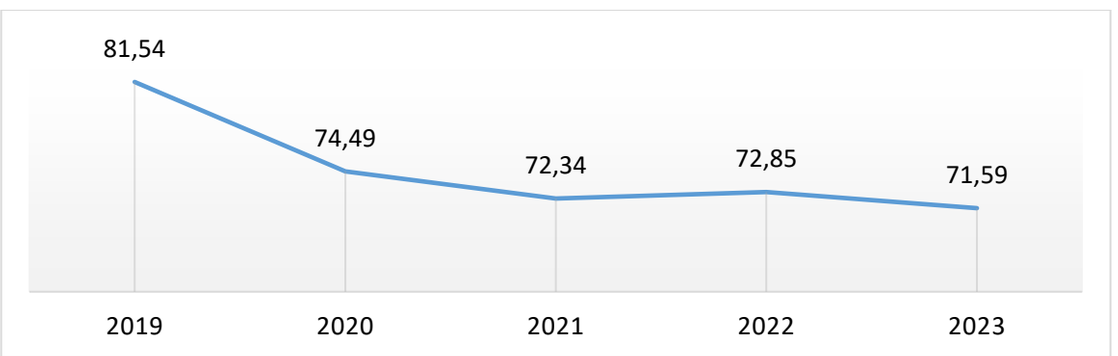
NO	STATUS DESA	JUMLAH DESA				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	MAJU	32	41	49	63	73
3	BERKEMBANG	192	190	184	172	165
4	TERTINGGAL	14	8	6	4	0
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0	0	0	0

Sumber: Dispermades, 2024

Status desa hasil pemutakhiran IDM Kabupaten Batang dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 mengalami perkembangan dari Desa Tertinggal menuju Desa Mandiri. Desa dengan status tertinggal mengalami penurunan dari 14 desa pada Tahun 2019 menjadi 0 (nol) pada Tahun 2023. Desa dengan status Berkembang juga mengalami penurunan dari 192 desa pada Tahun 2019 menjadi 165 desa pada Tahun 2023. Desa berstatus Maju mengalami peningkatan dari 32 desa Pada Tahun 2019 menjadi 73 pada Tahun 2023. Sedangkan untuk Desa Mandiri mengalami fluktuasi dari 1 desa pada Tahun 2019 menjadi 0 (nol) pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Desa yang mendapat status Desa Mandiri kembali ada pada Tahun 2023. Status ini didapatkan oleh Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan hasil-hasil pembangunan kurang bisa dirasakan masyarakat dan menjadi beban berat bagi pembangunan selanjutnya. Salah satu upaya menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana, diantaranya yaitu dengan mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) agar memakai alat kontrasepsi. Sebagaimana capaian PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Batang tersaji dalam grafik berikut ini :



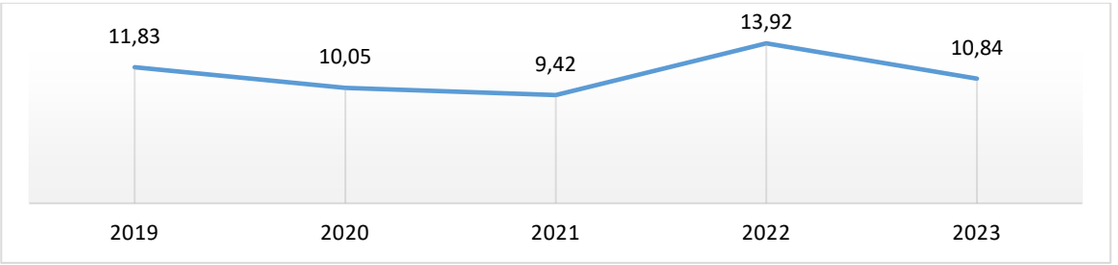
Gambar 2. 92 Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Batang cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2019-2023.

Pada tahun 2019 sebesar 81,54% persen mengalami penurunan di tiap tahun menjadi 71,59% pada tahun 2023.

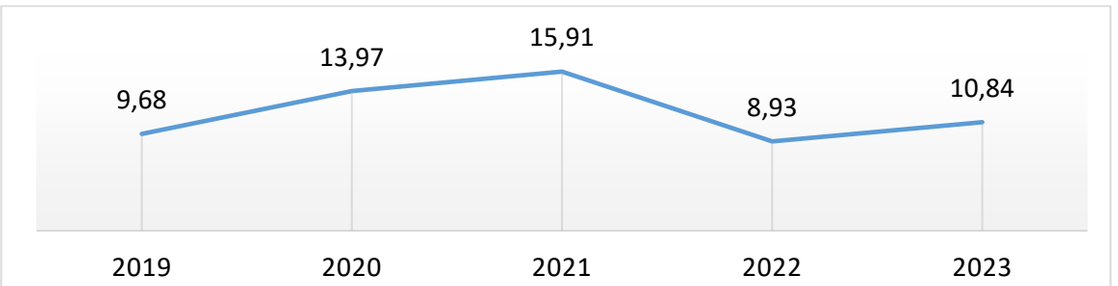
Demikian juga, akseptor KB pada kurun waktu 2019-2023 mengalami penurunan tiap tahunnya, tahun 2019 sebesar 11,83 persen, tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga menjadi 9,42 persen di tahun 2021. Kemudian meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 13,92 persen dan menurun kembali menjadi 10,84 persen di tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran pasangan usia subur dalam ber KB. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :



Gambar 2. 93 Rasio Akseptor KB di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2024

Perkembangan PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tapi tidak ber-KB (unmetneed KB) dari tahun 2019 – 2023 secara umum mengalami tren peningkatan, dari sebesar 9,68 di tahun 2019 menurun menjadi 10,84 persen di tahun 2023. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmetneed KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase unmetneed KB nya tinggi, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitasi pelaksanaan kampung KB. Kondisi perkembangan PUS di Kabupaten Batang selengkapnya tergambar dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 94 Unmetneed KB (%) di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

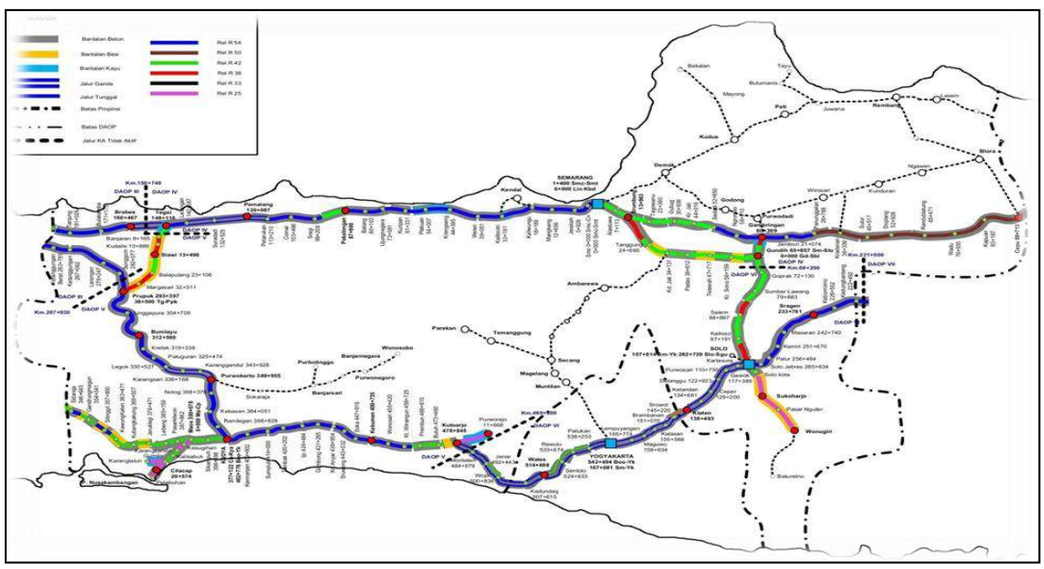
Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2024

9. Perhubungan

9.1. Perkeretaapian

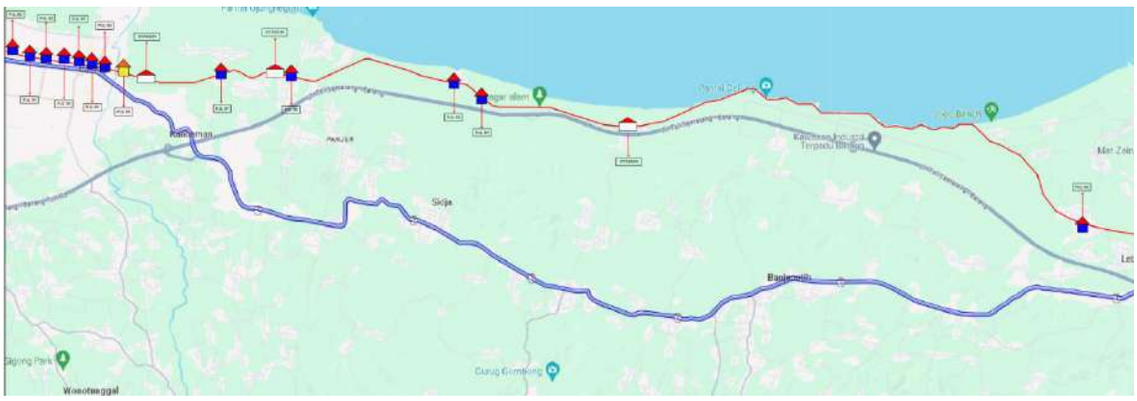
Untuk wilayah di Batang terdapat jaringan rel kereta api aktif digunakan sebagai salah satu moda transportasi untuk melayani pergerakan orang dan barang sehingga mengurangi beban lalu lintas di jalan raya berkurang. Jika distribusi barang utamanya untuk jarak sedang dan jauh dapat dilayani dengan jaringan rel kereta api dapat menurunkan biaya logistik sehingga daya saing daerah akan meningkat.

Total panjang jalur kereta api di Batang sampai dengan tahun 2021 sepanjang 41 km/sp, jalur rel aktif/operasional. 5 stasiun dengan perincian 1 stasiun (Batang Baru) berfungsi sebagai stasiun operasional dan komersial dan 4 stasiun (Ujungnegoro, Kuripan, Plabuan dan Krengseng) berfungsi sebagai stasiun operasional. Posisi Batang yang sangat strategis karena berada jalur utara pulau jawa (Jakarta - Surabaya), sehingga jalur rel di Batang cukup padat, dan kondisi rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara cukup baik dalam keselamatan perjalanan kereta api.



Gambar 2. 95 Jaringan Jalan Rel Kereta Api di Jawa Tengah
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2019

Di Batang terdapat 12 titik perlintasan jalur kereta api yang sudah berpenjaga kurang lebih 5-6 orang.



Gambar 2. 96 Peta Titik Lokasi Pos PJL
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2024

Tabel 2. 36 Pos Penjagaan perlintasan kereta api yang dijaga oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

No.	NAMA POS	LOKASI POS PJL
1	POS PJL 95 Gabus	Desa Denasri Kec.Batang
2	POS PJL 94 GOR	Desa Denasri Kec.Batang
3	POS PJL 93 Kalisari	Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang
4	POS PJL 92 Tampangsono	Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang
5	POS PJL 91 Yosudarso	Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang
6	POS PJL 90 RE	Kelurahan Proyonanggan Kec. Batang
7	POS PJL 89 Pasar	Kelurahan Proyonanggan Kec. Batang
8	POS PJL 88 SAMSAT	ASET PT. KAI
9	POS PJL 87 Grugak	Desa Grugak Kec. Kandeman
10	POS PJL 86 UJUNGNEGORO	Desa Ujung Negoro, Kec. Kandeman
11	POS PJL 85 ROBAN BARAT	Desa Kedungsego Kec. Tulis
12	POS PJL 84 ROBAN TIMUR	Desa Sengon Kec. Subah
13	POS PJL 83 KEBONDALEM	Desa Kebondalem Kec. Gringsing

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Tabel 2. 37
Persebaran Perlintasan Jalan Kabupaten Batang dengan Rel Kereta Api Tahun 2023

No	Tempat / Lokasi	Pos	Penjagaan	Kelengkapan	Sistem Pengoperasian	Keterangan
1	Kebon Dalem Gringsing	78	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
2	Stasiun Pelabuhan Banyuputih		Tidak Dijaga	Tidak Berpalang	-	
3	Kuripan Timur Subah		Tidak Dijaga	Tidak Berpalang	-	
4	Kuripan Barat Subah		Tidak Dijaga	Tidak Berpalang	-	
5	Roban Timur Subah		Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
6	Roban Barat Tulis		Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
7	Ujung Negoro Kandeman	86	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
8	Grugak Kandeman	81	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
9	Samsat Batang	88	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	Milik KAI
10	Pasar Batang	89	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
11	RE Martadinata Batang	90	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	

No	Tempat / Lokasi	Pos	Penjagaan	Kelengkapan	Sistem Pengoperasian	Keterangan
12	Yos Sudarso Batang	91	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
13	Tampangsono Batang	92	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
14	Kalisari Batang	93	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
15	Gor Batang	94	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
16	Gabus Batang	95	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2023

9.2. Perhubungan Darat

1) Terminal Penumpang

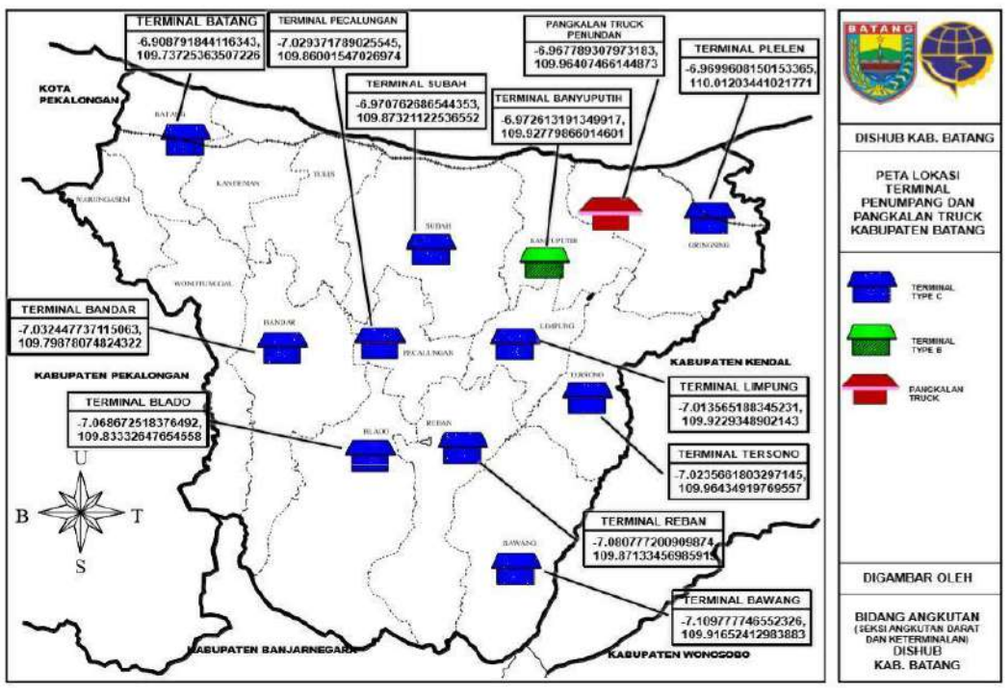
Terminal angkutan merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal tipe A yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat merupakan terminal induk yang berfungsi melayani kendaraan umum secara nasional seperti angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Terminal tipe B atau terminal regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Sedangkan Terminal tipe C atau sub-terminal merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Pada Tahun 2022 terdapat 2 terminal tipe B, 9 terminal tipe C, dan 2 pangkalan truk namun salah satu pangkalan truk sudah dialihfungsikan menjadi Islamic Center. Terminal tipe B yang ada di Kabupaten Batang berada di Kecamatan Blado dan Kecamatan Banyuputih, sedangkan terminal tipe C yang berada di Kabupaten Batang tersebar di Kecamatan Batang, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Limpung, Kecamatan Plelen, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, dan Kecamatan Tersono. Kemudian untuk pangkalan truk yang ada di Kabupaten Batang berada di Kecamatan Banyuputih yaitu Pangkalan Truk Penundan dan Pangkalan Truk Petamanan, namun Pangkalan Truk Petamanan ini sudah dialihfungsikan menjadi Islamic Center. Persebaran terminal selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 38
Persebaran Terminal Tipe B, C, dan Pangkalan Truk
di Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Nama Terminal	Type Terminal	Jenis Terminal	Lokasi
1	Terminal Blado	Terminal Type B	Terminal Angkutan Umum	Blado
2	Terminal Banyuputih	Terminal Type B	Terminal Angkutan Umum	Banyuputih
3	Terminal Batang	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Batang
4	Terminal Bandar	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Bandar
5	Terminal Bawang	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Bawang
6	Terminal Blado	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	BLado
7	Terminal Limpung	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Limpung
8	Terminal Plelen	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Plelen
9	Terminal Reban	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Reban
10	Terminal Subah	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Subah
11	Terminal Tersono	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Tersono
12	Pangkalan Truk Penundan (Banyuputih)	Tempat khusus parkir	Pangkalan Angkutan Barang	Banyuputih

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2024



Gambar 2. 97 Persebaran Terminal Tipe B, Terminal Tipe C dan Pangkalan Truk

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2024

Mendasarkan kebutuhan dan rencana tata ruang wilayah pada revisi Perda RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019 – 2039, setidaknya terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Batang yang perlu pembangunan terminal baru tipe

C yaitu di Kecamatan Tulis, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Gringsing, dan Kecamatan Pecalungan.

Kondisi terminal tipe C Kabupaten Batang berdasarkan ketersediaan fasilitas yang meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, fasilitas uji kelayakan kendaraan, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan kelayakan kendaraan, fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan, informasi jadwal dan rute trayek, kantor penyelenggaraan terminal, petugas operasional terminal, ruang/tempat tunggu penumpang, tilet, sarana ibadah, ruang terbuka hijau, kios, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak angkutan, tempat merokok, drainase, lampu penerangan ruangan, lajur kedatangan, lajur keberangkatan, informasi pelayanan, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum/pribadi dan ruang menyusui masih terdapat *gap* yang cukup besar antara fasilitas yang dibutuhkan dengan fasilitas yang telah tersedia sebagaimana kondisi terminal tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 39 Kondisi Terminal di Kabupaten Batang

No.	NAMA TERMINAL	TIPE TERMINAL	LOKASI TERMINAL	KONDISI
1	Terminal Banyuputih	**B**	Kecamatan Banyuputih	BAIK
2	Terminal Batang	**C**	Kecamatan Batang	CUKUP BAIK
3	Terminal Limpung	**C**	Kecamatan Limpung	CUKUP BAIK
4	Terminal Reban	**C**	Kecamatan Reban	CUKUP BAIK
5	Terminal Bandar	**C**	Kecamatan Bandar	CUKUP BAIK
6	Terminal Tersono	**C**	Kecamatan Tersono	CUKUP BAIK
7	Terminal Plelen	**C**	Kecamatan Plelen	CUKUP BAIK
8	Terminal Bawang	**C**	Kecamatan Bawang	CUKUP BAIK
9	Terminal Blado	**C**	Kecamatan Blado	CUKUP BAIK
10	Terminal Pecalungan	**C**	Kecamatan Pecalungan	CUKUP BAIK
12	Terminal Subah	**C**	Kecamatan Subah	CUKUP BAIK

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2024

b) Penyelenggaraan Parkir

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Parkir Ditepi Jalan Umum terdapat 248 titik parkir dengan persebaran sebagai berikut:

Tabel 2. 40
Rekapitulasi Data Parkir Per Wilayah di Kabupaten Batang

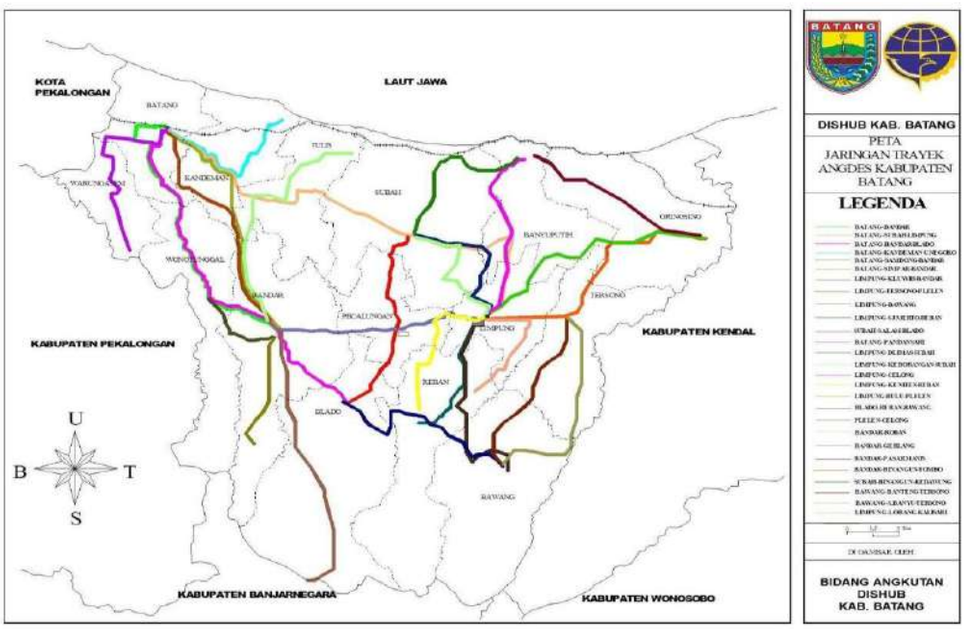
No	Lokasi	Jumlah Titik Parkir
1	Wilayah Warungasem	2
2	Wilayah Limpung	40
3	Wilayah Subah	12

No	Lokasi	Jumlah Titik Parkir
4	Wilayah Tersono	6
5	Wilayah Blado	14
6	Wilayah Bawang	8
7	Wilayah Banyuputih	3
8	Wilayah Bandar	31
9	Wilayah Batang Kota	79
10	Wilayah Plelen	1
	TOTAL	196

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2024

2) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kinerja urusan perhubungan terkait lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya dapat dilihat melalui capaian rasio ijin trayek cenderung meningkat dalam periode 2019-2023 Pada tahun 2018 sebesar 70 persen, kemudian terdapat penurunan hingga tahun 2020 menjadi 54,68 persen dan ada kenaikan hingga tahun 2022 menjadi 81,83 persen. Namun pada tahun 2023 terdapat perbedaan cara perhitungan yang berdasar pada Permendagri 86/2017 dengan hasil hitungan sebesar 0,00002. Selengkapnya tergambar dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 98 Peta Jaringan Trayek Kabupaten Batang

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

Tabel 2. 41 Koridor Pelayanan Angkutan Umum Berbasis Jalan di Kabupaten Batang

No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
I	**Yang Berpusat di Batang**			
1	Batang-Wonotunggal-Bandar-Blado PP	Bus 16 Seat	35	4
2	Batang-Tulis-Subah-Banyuputih-Limpung PP	Bus 16 Seat	93	54
3	Batang-Wonotunggal-Bandar PP	Bus 12 Seat	48	30
4	Batang-Tulis-Botolambat-Sigayam-Simpar-Pucang Gading-Bandar PP	Bus 12 Seat	15	9
5	Batang-Kandeman-Ujungnegoro PP	Bus 12 Seat	15	14
6	Batang-Sambong-Lawangaji-Botolambat-Pucang Gading-Bandar PP	Bus 12 Seat	10	0
7	Batang - Kalisari - Karanganyar - Pesaren - Sidorejo - Pandansari PP	Bus 12 Seat	10	0
II	**Yang Berpusat di Limpung**			
1	Limpung — Sukorejo — Lobang — Kalisari PP	Bus 12 seat	8	0
2	Limpung — Tersono — Timbang — Plelen PP	Bus 12 seat	55	16
3	Limpung — Kalangsono — Timbang — Plelen PP	Bus 12 seat	15	3
4	Limpung — Sojomerto — Reban PP	Bus 12 seat	45	20
5	Limpung — Sojomerto — Bawang PP	Bus 12 seat	10	7
6	Limpung — Kalisalak — Sidomulyo — Salam — Kluwih — Bandar PP	Bus 16 seat	12	0
7	Limpung — Kalisalak — Dlimas — Petamanan — Subah PP.	Bus 12 seai	10	0
8	Limpung — Banyuputih — Kedawung - Mangunsari (Celong) PP	Bus 12 seat	15	0
9	Limpung — Sidomulyo — Plaosan — Keniten — Wonosobo — Reban PP	Bus 12 seat	8	0
III	**Yang Berpusat di Bawang**			
1	Bawang-Sangubanyu-Tersono PP	Bus 12 Seat	10	0
2	Bawang - Getas - Banteng - Gondo - Rejosari Timur - Tersono PP	Bus 12 Seat	16	2

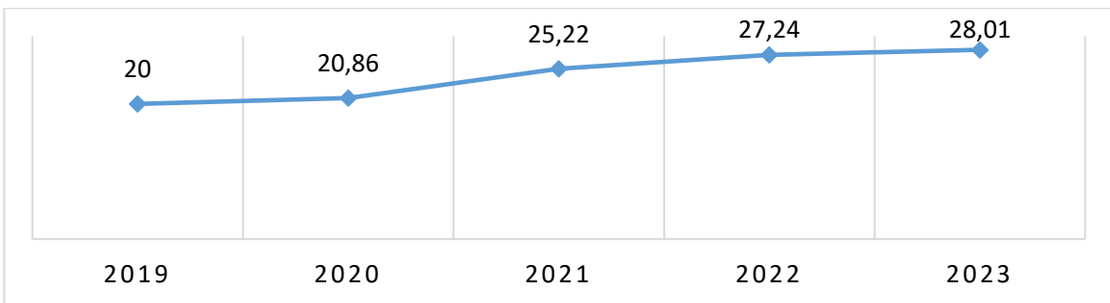
No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
IV	**Yang Berpusat di Subah**			
1	Subah — Gondang — Kemiri — Kedawung PP.	Bus 12 Seat	8	0
	Subah — Keborangan — Menjangan — Karang Tengah — Kalisalak — Limpung PP	Bus 12 Seat	8	0
V	**Yang berpusat di Bandar.**			
1	Bandar - Binangun - Wonodadi - Tombo PP	Bus 12 Seat	7	0
2	Bandar - Pesalakan - Pasar Manis PP	Bus 12 Seat	9	0
3	Bandar - Kembanglangit - Gerlang PP	Bus 16 Seat	12	0
4	Bandar - Beji - Kenconorejo - Roban PP	Bus 12 Seat	12	0
VI	**Yang berpusat di Blado.**			
1	Pagilaran - Blado - Reban - Bawang PP	Bus 12 Seat	22	0
2	Blado - Siguci - Salam - Subah PP	Bus 12 Seat	15	3
VII	**Yang berpusat di Plelen**			
1	Plelen - Sawangan - Ketanggan - Celong PP	Bus 12 Seat	17	0
	Angkutan SK Bersama Kota Pekalongan			
	Batang — Pekalongan PP	Bus 12 seat	80	28
	Batang — Warungasem — Pekalongan PP	Bus 12 seat	25	0
	Pasir Kencana — Jl. Seruni — TPI Batang PP	Bus 12 seat	20	0
	Bandar — Warungasem — Pekalongan PP	Bus 12 seat	24	12
	Angkutan SK Bersama Kabupaten Kendal			
	Weleri — Kalikuto — Gringsing — Pancuran — Krengseng — Pancuran — Plelen PP	Bus 12/16 seat	12	0
	Weleri — Kalikuto — Gringsing — Lebo — Krengseng — Siklayu PP	Bus 12/16 seat	8	0
	"Weleri — Kalikuto — Gringsing — Pancuran — Plelen — Sentul — Surodadi— Timbang —	Bus 12/16 seat	27	6
	Sembung — Banyuputih — Limpung PP"	Bus 12/16 seat	3	0

No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
	Sukorejo — Plantungan — Sangubanyu — Wirosari — Bawang PP	Bus 12/16 seat	5	1
	Sukorejo — Plantungan — Sangubanyu — Wirosari — Bawang — Limpung PP	Bus 12/16 seat	8	0
	"Bawang — Sangubanyu — Sumurbanger — Plosowangi — Pujut — Tersono — Pujut—	Bus 12/16 seat	6	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2024

3) Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan

Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten diantaranya melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan umum. Pemasangan rambu-rambu dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 20 persen pada tahun 2019 hingga menjadi 28,01 persen pada tahun 2023. Namun demikian, kedepan masih perlu ditingkatkan, karena meskipun terus meningkat namun capaian tersebut masih di bawah 50%, terlebih hal ini berkaitan dengan keselamatan jalan.



Gambar 2. 99 Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Batang

Sumber: Dishub Kabupaten Batang Tahun 2024

Kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Batang membutuhkan 95.000 titik dimana hingga tahun 2023 telah terpasang pada 44.103 titik atau sekitar 46,4% dari jumlah kebutuhan LPJU yang dibutuhkan dengan 42.353 titik dalam kondisi baik dan 1.750 titik dalam kondisi rusak. Kekurangan pemasangan LPJU pada 50.897 titik baik di jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, maupun pada lingkungan desa. Sebagaimana kondisi fasilitas LPJU tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 42
Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang
di Kabupaten Batang Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (LPJU) terpasang (titik)	40.093	40.593	41.693	42.193	44.103

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Tambahan LPJU Terpasang	7.947	500	1.100	500	1.910
3.	Prosentase fasilitas perlengkapan jalan (LPJU) terpasang	42,2	42,7	43,9	44,4	46,4

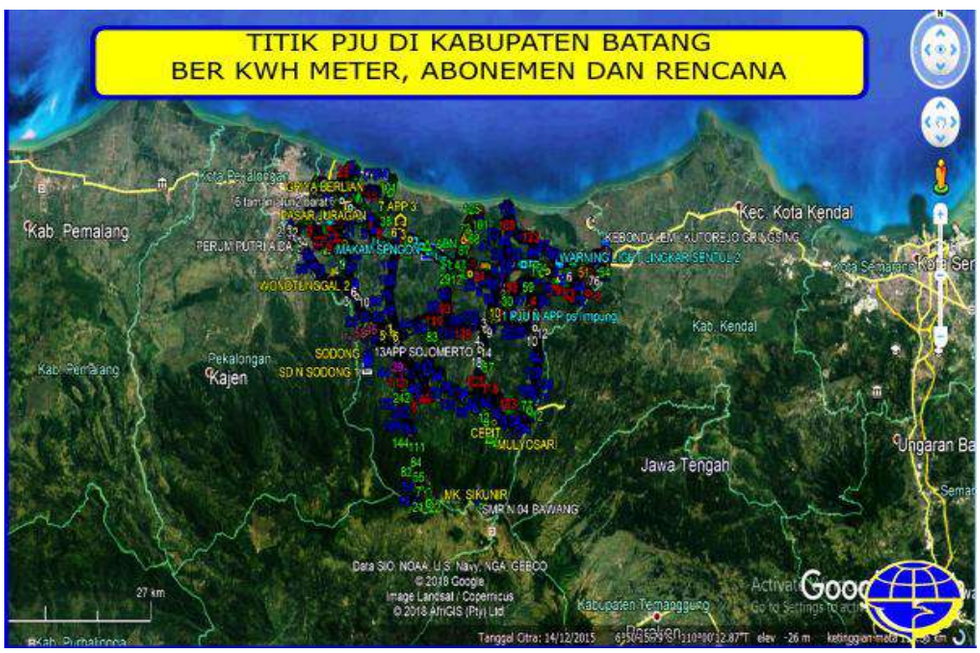
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2024

Meskipun jumlah fasilitas perlengkapan jalan terpasang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, namun jumlah tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan pada masing-masing ruas jalan.

Tabel 2. 43
Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang Berdasar Ruas Jalan di Kabupaten Batang

No	Nama Ruas	Panjang (KM)	Kebutuhan PJU (Titik)	Ada Terpasang	Selisih Kurang	%
1.	JALAN NASIONAL	52.839	2.042	769	1.273	62,34%
2.	JALAN PROVINSI	87.555	1.751	564	1.187	34,13%
3.	JALAN KABUPATEN	521.181	10.423	1.974	8.449	81,06%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2024



Gambar 2. 100 Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang di Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020



Gambar 2. 101 Titik PJU di Kabupaten Batang pada Jalan Provinsi
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020



Gambar 2. 102 Titik PJU di Kabupaten Batang pada Jalan Nasional
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020

10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Batang melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik, ditempuh melalui upaya peningkatan jumlah jaringan komunikasi, membangun sarana komunikasi dua arah melalui *website* serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Jumlah jaringan komunikasi terus meningkat dalam periode tahun 2019-2023, yaitu sebanyak 115 pada tahun 2019, meningkat menjadi sebanyak 130 jaringan pada tahun 2023. Persentase perangkat daerah yang memiliki website aktif juga telah mencapai 100%. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan terus dilakukan terhadap 41 kelompok pada masing-masing kecamatan pada tahun 2019 hingga tahun 2020, dan ada peningkatan jumlah signifikan hingga tahun 2023 menjadi 78 kelompok. Kondisi pengembangan dan pemanfaatan TIK di Kabupaten Batang juga semakin baik, dapat dilihat dari skor Indeks SPBE yang terus meningkat dari 3,29 pada tahun 2019 menjadi 3,6 pada tahun 2021 yang kemudian menurun menjadi 3,24 pada tahun 2022 dan 2023. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 44
Indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

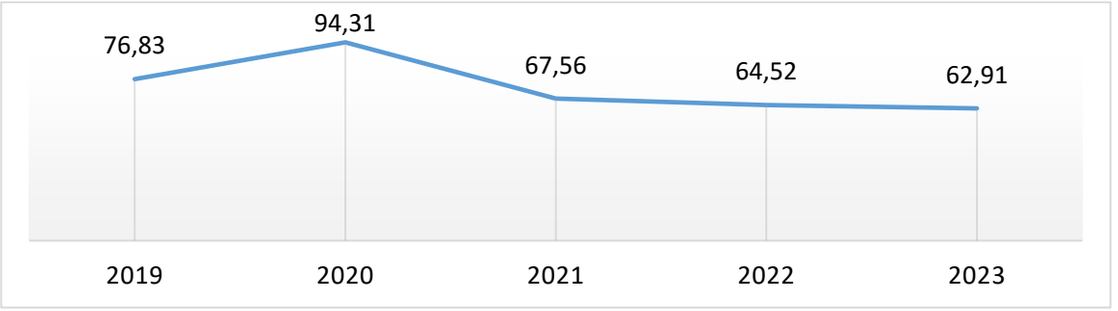
No	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8	
1	Jumlah jaringan komunikasi	titik	115	120	130	130	130
2	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100	100	100
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	41	41	78	78	78
4	Indeks SPBE	skor	3,29	3,29	3,6	3,24	3,24

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2024

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari capaian indikator koperasi aktif, koperasi sehat serta pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Batang. Di Kabupaten Batang terdapat Koperasi Jasa sebanyak sebanyak 13 unit, Koperasi Konsumen sebanyak 97 unit, Koperasi Pemasaran sebanyak 8 unit, Koperasi Produsen sebanyak 34 unit dan Koperasi

Simpan Pinjam sebanyak 52 unit sedangkan Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 15 unit. dengan total koperasi aktif hingga tahun 2023 sebesar 62,91%, menurun dari capaian 2022 yang semula 64,52%.

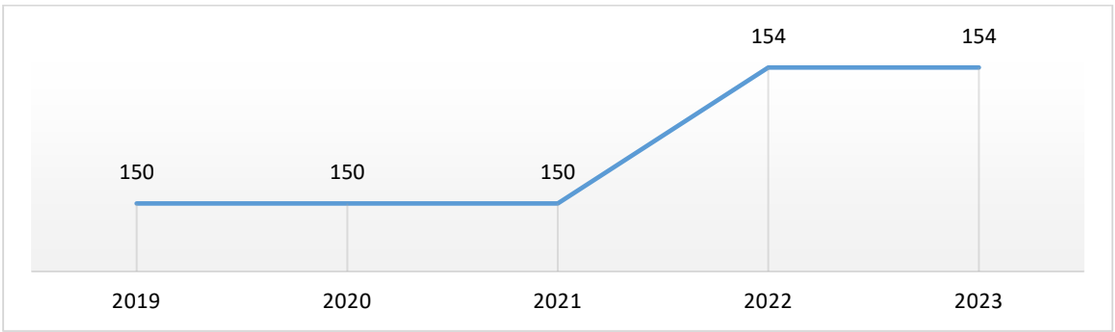


Gambar 2. 103 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2024

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam menghadapi bonus demografi di Kabupaten Batang adalah melalui perluasan dan penciptaan lapangan kerja baru, diantaranya dengan menciptakan wirausaha baru yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu pada jumlah wirausaha baru di Kabupaten Batang dalam periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sebanyak 150 wirausaha baru pada tahun 2019 dan kemudian meningkat menjadi 154 wirausaha baru di tahun 2022 dan 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan dalam fasilitasi permodalan, kerjasama dengan kementerian hukum dan HAM dalam rangka pemberian izin Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di desa-desa secara online melalui Dana Desa. Namun pada tahun 2019 dan 2020 jumlah wirausaha baru mengalami penurunan menjadi sebesar 150 wirausaha baru yang disebabkan karena menurunnya minat masyarakat serta daya beli masyarakat yang menurun sehingga beberapa wirausaha baru tidak dapat bertahan. Sebagaimana perkembangan jumlah wirausaha baru di Kabupaten Batang selama tahun 2019-2023 tersaji dalam grafik berikut ini :



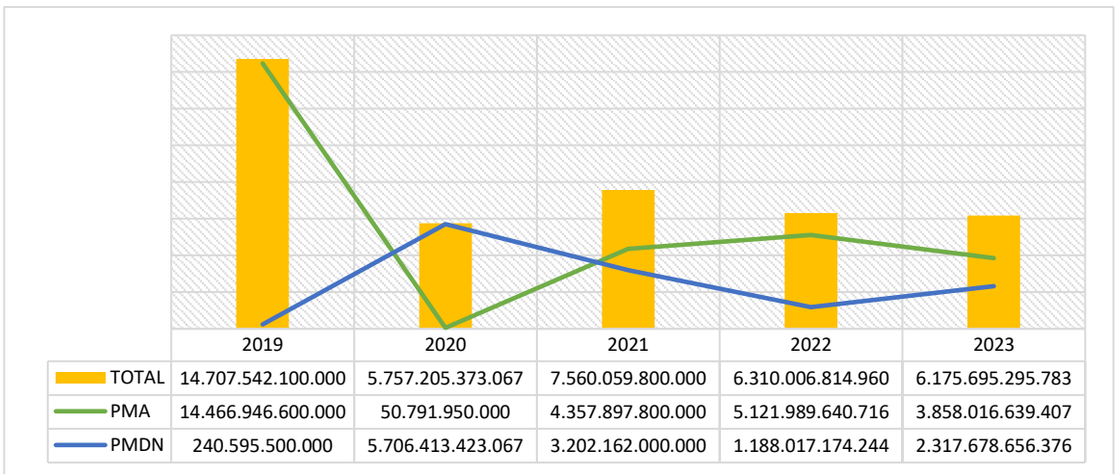
Gambar 2. 104 Jumlah Wirausaha baru Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2023

12. Penanaman Modal

Kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari capaian jumlah realisasi investasi di Kabupaten Batang, jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Batang serta jumlah penyerapan tenaga kerja.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Batang dalam periode tahun 2019-2023 cenderung berfluktuasi. Dimana total investasi yang masuk di Kabupaten Batang tahun 2019 sebanyak 14.707,54 M kemudian menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 5.757,20 M dan kemudian meningkat kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 7.560,0 M kemudian menurun menjadi 6.310 M di tahun 2022 dan meningkat menjadi 6.175 M pada tahun 2023, hal ini didukung adanya Kawasan Industri di KITB dan laporan LKPM tepat waktu sehingga dari target 1,5 T menjadi 6,1T.



	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL	14.707.542.100.000	5.757.205.373.067	7.560.059.800.000	6.310.006.814.960	6.175.695.295.783
PMA	14.466.946.600.000	50.791.950.000	4.357.897.800.000	5.121.989.640.716	3.858.016.639.407
PMDN	240.595.500.000	5.706.413.423.067	3.202.162.000.000	1.188.017.174.244	2.317.678.656.376

Gambar 2. 105 Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2023

Realisasi investasi di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi pada periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 realisasi investasi dalam negeri di Kabupaten Batang mencapai Rp. 240.595.500.000. Realisasi investasi terbesar berada di Kecamatan Subah dengan nilai investasi mencapai Rp. 121.706.000.000. Jika dirinci menurut sektor dan sub sektor, realisasi

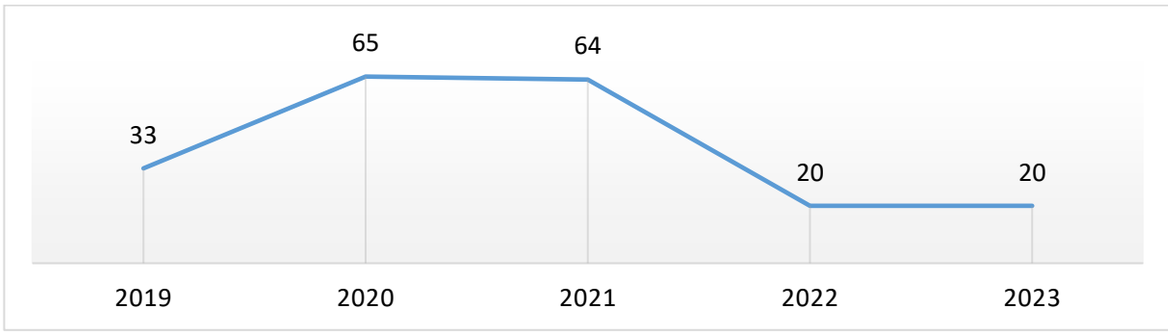
investasi terbesar berada pada sektor tersier dengan sub sektor perdagangan dan reparasi dengan realisasi investasi mencapai Rp. 22.350.000.000. Sedangkan penanaman modal asing mencapai Rp. 14.466.946.600.000 dengan nilai investasi tertinggi berada di Kecamatan Kandeman yaitu sebesar Rp. 14.344.057.610.000. Menurut sektor dan sub sektor, realisasi tertinggi investasi modal asing di Kabupaten Batang pada tahun 2019 berada pada sektor tersier dengan sub sektor listrik, air, dan gas dengan nilai investasi mencapai Rp. 14.344.057.600.000.

Pada tahun 2020, penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Batang mencapai Rp. 5.706.413.423.067 dengan realisasi investasi terbesar berada di Kecamatan Tulis dengan nilai investasi sebesar Rp. 4.598.400.000.000. Sektor tersier dengan sub sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran menjadi sub sektor dengan penanaman modal dalam negeri tertinggi dengan realisasi investasi sebesar Rp. 4.876.340.000.000. Sedangkan penanaman modal asing hanya berada di satu kecamatan yaitu Kecamatan Kandeman dengan realisasi investasi sebesar Rp. 50.791.950.000 pada sektor sekunder dengan sub sektor industri tekstil.

Pada tahun 2021, penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan menjadi Rp. 3.202.162.000.000 dengan investasi terbesar berada di Kecamatan Warungasem dengan nilai investasi Rp. 1.844.954.700.000. Menurut sektor dan sub sektor, realisasi investasi terbesar berada pada sektor tersier dengan sub sektor transportasi, gudang, dan komunikasi dengan realisasi investasi mencapai Rp. 1.836. 083.700.000. Sedangkan untuk penanaman modal asing mencapai Rp. 4.357.897.800.000 dengan nilai investasi terbesar berada di Kecamatan Kandeman dengan realisasi investasi mencapai Rp. 3.553.757.560.000. Jika dirinci menurut sektor dan sub sektor, sektor tersier dengan sub sektor listrik, gas, dan air menjadi sub sektor dengan penanaman modal asing terbesar di Kabupaten Batang pada tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.236.043.930.000.

Pada tahun 2022, penanaman modal dalam negeri menurun kembali menjadi sebesar Rp. 1.188.017.174.244 dan meningkat menjadi 2.317 M pada tahun 2023. sedangkan pada Penanaman modal Asing realisasi di Tahun 2023 sebesar 3.858 M menurun dari tahun 2022 yang semula 5.121 M.

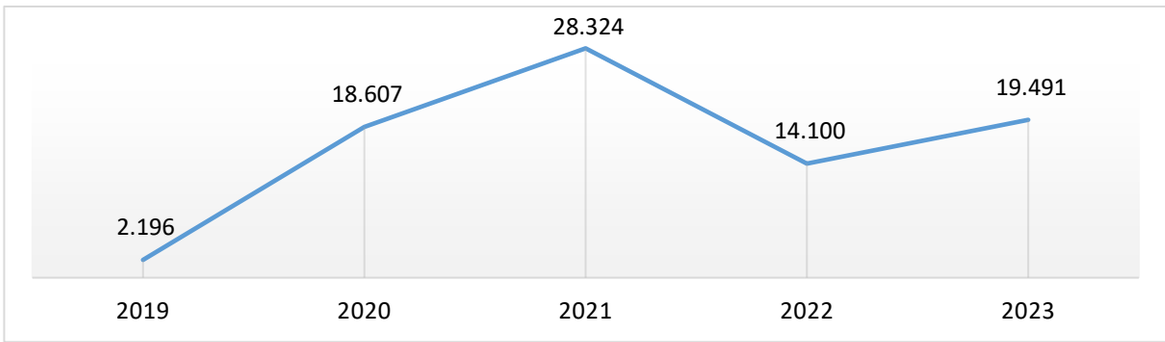
Sementara itu, dari total investasi yang ada di Kabupaten Batang baik PMA maupun PMDN, jumlah perusahaan yang masuk sebanyak 20 perusahaan di tahun 2023 dengan total 592 proyek di Kabupaten Batang/. Sebagaiman tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 106 Jumlah Perusahaan Baru yang Berinvestasi di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2024

Seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan baru yang berinvestasi, jumlah ijin usaha yang diterbitkan juga meningkat di tahun 2023.



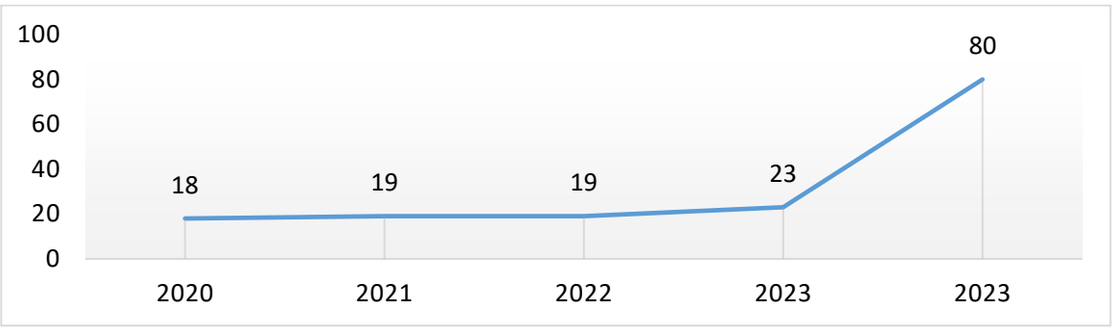
Gambar 2. 107 Jumlah Ijin Usaha yang Diterbitkan Tahun 2019-2023

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2024

Jumlah ijin usaha yang diterbitkan dalam periode 2019-2023 cenderung meningkat dari 2.196 ijin yang diterbitkan tahun 2019 meningkat hingga sebanyak 28.324 ijin di tahun 2021 namun menurun di tahun 2022 menjadi sebanyak 14.100 ijin dan meningkat kembali menjadi 19.491 ijin. Peningkatan ini didukung dengan adanya Kawasan Industri Terpadu Batang.

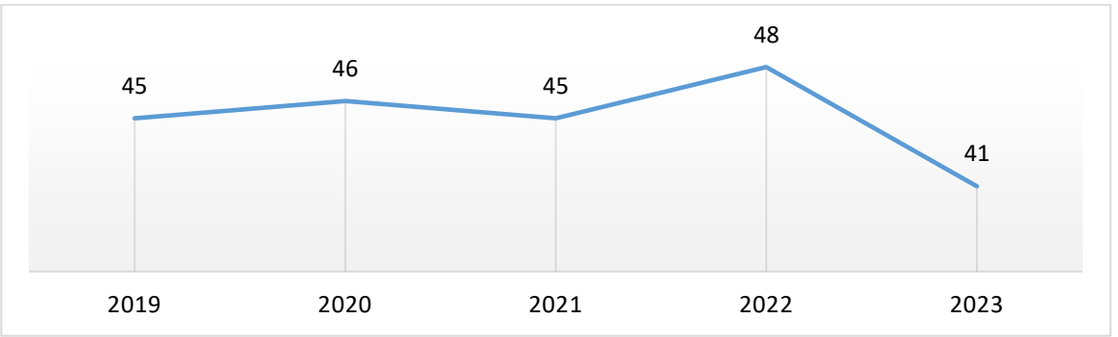
13. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian kinerja bidang kepemudaan pada 2019-2023 dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan yang dibina dan persentase pemuda berwirausaha di Kabupaten Batang. Peran aktif kepemudaan sangat menunjang keberhasilan pembangunan. Melalui peran serta pemuda dalam kewirausahaan diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru untuk menjawab tantangan bonus demografi di Kabupaten Batang.



Gambar 2. 108 Organisasi pemuda yang dibina di Kabupaten Batang
Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2024

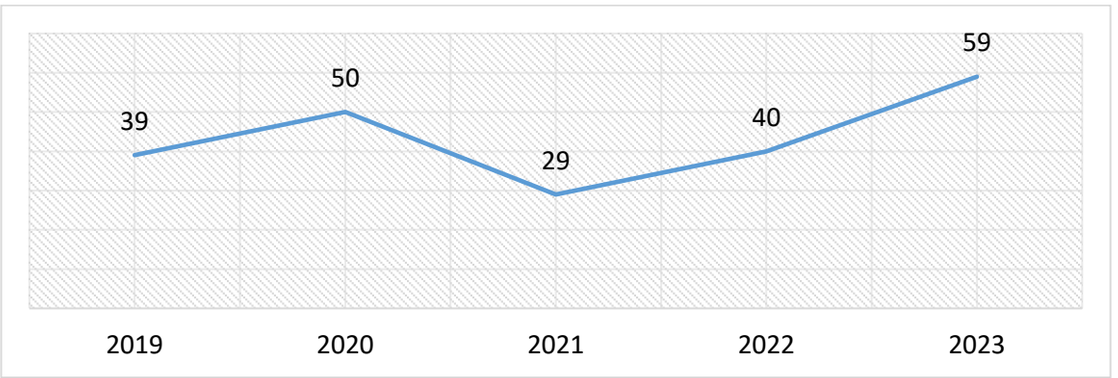
Berdasarkan data diatas, persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi di Kabupaten Batang fluktuatif dari tahun 2019-2023, yaitu sebanyak 21 organisasi kepemudaan pada tahun 2019 namun kemudian mengalami penurunan menjadi 19 organisasi kepemudaan yang dibina dan meningkat menjadi 80 organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan pada tahun 2023.



Gambar 2. 109 Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina di Kabupaten Batang
Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2023

Sedangkan kinerja bidang olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi olahraga yang dibina serta jumlah kejuaraan dalam bidang olahraga yang diraih di tingkat provinsi. Jumlah organisasi olahraga yang dibina berfluktuasi naik dari tahun 2019-2023, yaitu sebanyak 46 organisasi pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 48 organisasi pada tahun 2022 yang kemudian menurun menjadi 41 organisasi tahun 2023

Jumlah kejuaraan yang diikuti juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023, dari 39 kejuaraan tahun 2019 menjadi 50 kejuaraan pada tahun 2020 dan kemudian menurun menjadi 29 pada tahun 2021 yang diakibatkan adanya pandemi Covid19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan di masyarakat. Namun perlahan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 40 kejuaraan yang diikuti dan hingga akhir tahun 2023 menyabet 59 kejuaraan oleh altet Kabupaten Batang.



Gambar 2. 110 Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2024

Tabel 2. 45
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional Atlet Kabupaten Batang Tahun 2023

No	Cabang Olahraga	Medali	Jumlah
1	POPNAS	Perak	1
2	POPPROV	Emas	13
3		Perak	11
4		Perunggu	17
5	POPDA	Emas	3
6		Perak	3
7		Perunggu	4
8	PEPARPROV	Emas	2
9		Perak	1
10		Perunggu	4
Jumlah Medali			149

Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2024

Pada tahun 2023 atlet Kabupaten Batang memperoleh total 149 medali dari berbagai cabang olahraga yang diikuti baik pada level provinsi dan Nasional dengan medali terbanyak dari kejuaraan PORPROV Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) terus mendorong prestasi olahraga sebagaimana disosialisasikannya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan peningkatan SDM melalui organisasi kepemudaan. Upaya yang dilakukan untuk mendorong prestasi olahraga antara lain dengan tersedianya prasarana dan

sarana olah raga di Kabupaten Batang seperti gelanggang atau balai remaja, lapangan olahraga, dan kolam renang.

Tabel 2. 46
Jumlah Gelanggang dan Lapangan Olahraga Kabupaten Batang hingga Tahun 2023

No	Kecamatan	Gelang-gang	Lapangan Olahraga	Lap. Sepak-bola	Lap. Basket	Lap. Volley	Lap. Bulu Tangkis	Kolam Renang	Jmlh
1	WONOTUNGGAL	0	-	7	-	2	1	-	10
2	BANDAR	1	18	18	4	14	11	4	70
3	BLADO	-	9	11	-	15	7	2	44
4	REBAN	-	15	12	-	19	30	1	77
5	BAWANG	2	25	20	3	10	3	1	64
6	TERSONO	-	27	20	5	30	21	-	103
7	GRINGSING	1	15	15	5	15	7	2	60
8	LIMPUNG	-	-	12	1	34	34	2	83
9	SUBAH	2	-	13	3	27	24	-	69
10	TULIS	-	15	10	-	8	5	-	38
11	BATANG	7	7	1	8	18	12	4	57
12	WARUNGASEM	-	-	8	2	20	16	-	46
13	KANDEMAN	-	12	12	5	32	5	-	66
14	PECALUNGAN	-	-	5	1	20	15	-	41
15	BANYUPUTIH	-	11	11	-	10	8	2	42
	Kabupaten	**13**	**154**	**175**	**37**	**274**	**199**	**18**	**870**

Sumber : Disparpora Kab. Batang, 2024

Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga tingkat pelajar, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang secara rutin menggelar *multi event* kompetisi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang diselenggarakan setiap tahun. Pengembangan wisata olahraga juga terus dilakukan, antara lain olahraga paralayang yang berlokasi di Desa Pagilaran Kecamatan Blado dan *mountain bike* yang berlokasi di Desa Kembanglangit Kecamatan Blado. Cabang olahraga andalan Kabupaten Batang adalah panjat tebing, prestasi tertinggi yang pernah diperoleh dari cabang olahraga ini adalah mencetak rekor dunia kecepatan di kejuaraan dunia *World Cup International Sport Climbing (IFSC) di Salt Lake, Amerika Serikat, Kejuaraan IFSC di Chamonix, Perancis, Kejuaraan IFSC di Seoul Korea Selatan*, serta Kejuaraan *World Game di Birmingham* yang diraih oleh atlet panjat tebing Kiromal Katibin. Program peningkatan Kapasitas daya saing olahraga menjadi program utama peningkatan prestasi olahraga daerah. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui organisasi kepemudaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) secara aktif melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Batang. Dalam hal jumlah pelatih olahraga yang

memiliki kompetensi di satuan pendidikan tercatat sebanyak 48 pelatih dengan 9 pelatih sertifikasi nasional yang terdiri dari cabang olahraga Tenis Meja, Taekwondo, Atletik, Dayung, Renang, Bulutangkis, Senam, Sepakbola, Pencak Silat, Karate, Panjat Tebing, Bridge, Anggar, Kempo, Sepatu Roda, Bola Basket, Tinju, dan Balap Sepeda.

14. Statistik

Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang *reliable, up to dat*e dan *relevan* diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisa pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat. Hal ini sudah menjadi amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274 dimana, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi (*data based planning*) yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Pada tahun 2019 - 2023 capaian ketersediaan data informasi perencanaan pembangunan sebanyak 100 persen. Capaian ini didukung adanya Satu Data Indonesia yang menjadi kebijakan tata kelola data pemerintahan yang bertujuan untuk menghasilkan data akuran, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kemudahan akses dan dibagipakaikan antar instansi. Sebagaimana capaian indikator urusan statistik tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 47
Indikator kinerja urusan Statistik Kabupaten Batang
Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2024

15. Persandian

Tugas persandian daerah adalah menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah. Upaya yang yang dilakukan dalam rangka pengamanan tersebut adalah dengan mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian pada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Selama periode 2019-2023 sistem elektronik telah mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian

dengan menggunakan fasilitas *Virtual Private Network* (VPN) untuk akses server perencanaan dan penganggaran/penatausahaan keuangan.

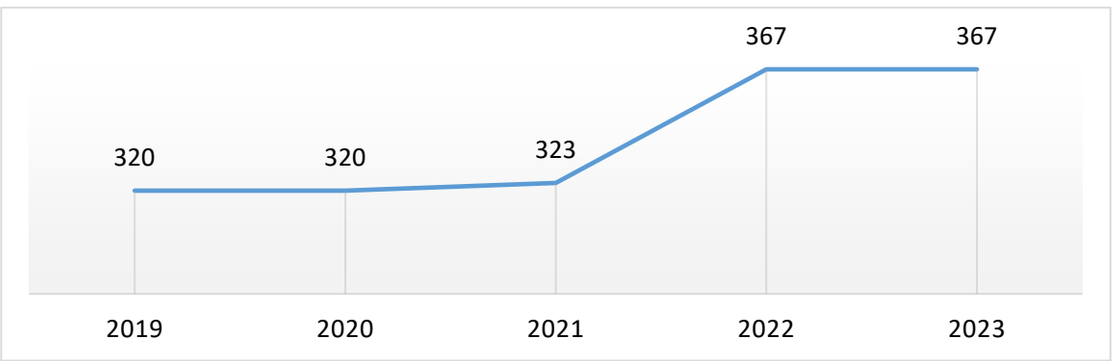
Tabel 2. 48
Indikator kinerja urusan Persandian Kabupaten Batang
Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks KAMI/ Persentase Keamanan Informasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2024

16. Kebudayaan

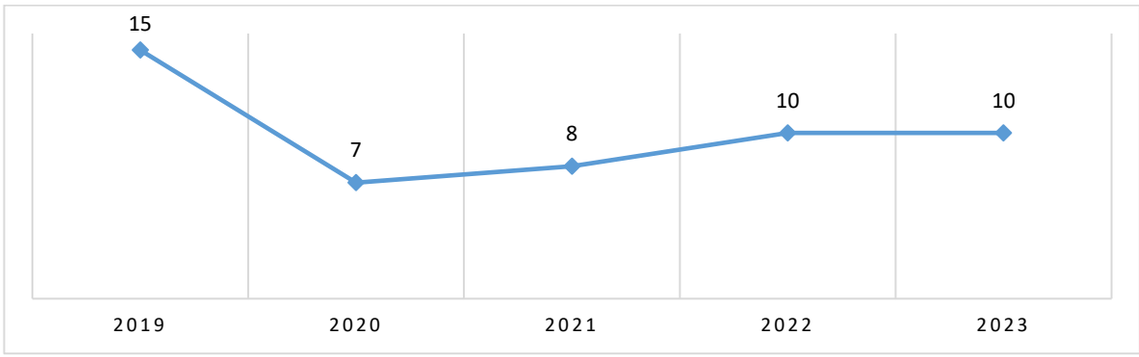
Kondisi layanan urusan Kebudayaan di Kabupaten Batang antara lain dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Batang. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2019 hingga 2020 jumlah situs dan cagar budaya sebanyak 320 situs kemudian meningkat menjadi 323 situs di tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 367 situs di tahun 2023 dimana seluruh situs benda dan kawasan cagar budaya dilestarikan langsung dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.



Gambar 2. 111 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2019-2023

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2024

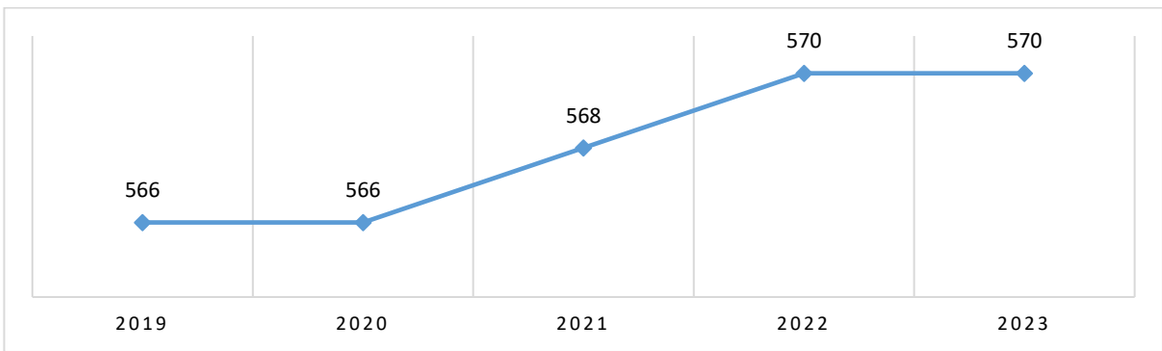
Selain pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, pembangunan budaya juga direalisasikan melalui penyelenggaraan festival dan peristiwa budaya. Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya di kabupaten Batang pada periode tahun 2019-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2019 penyelenggaraan festival dan peristiwa budaya sebanyak 15 kali dalam setahun kemudian menurun akibat adanya pandemi *Covid 19* menjadi 7 kali di tahun 2020 dan meningkat kembali hingga tahun 2022 dan 2023 sebanyak 10 kali dalam setahun.



Gambar 2. 112 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Tahun 2019-2023

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2024

Pembangunan budaya juga direalisasikan melalui pembinaan grup-grup kesenian di Kabupaten Batang. Hal tersebut sebagai upaya pelestarian budaya melalui pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Selama kurun waktu 2018-2022 jumlah grup kesenian di Kabupaten Batang meningkat, tahun 2018 berjumlah 565 grup, meningkat menjadi 566 grup di tahun 2019 dan 2020 dan meningkat kembali hingga tahun 2022 menjadi 570 grup. Semuanya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Batang.

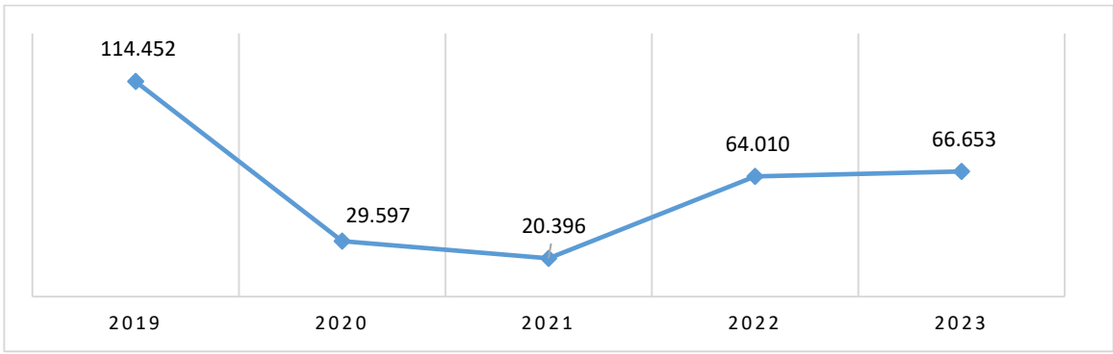


Gambar 2. 113 Jumlah grup kesenian yang dibina (grup) Tahun 2019-2023

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2024

17. Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan dilihat dari jumlah pengunjung pada periode lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi menurun. Jumlah perpustakaan daerah di Kabupaten Batang 1 unit, dengan pengunjung terbanyak selama 5 tahun terakhir pada tahun 2019 yaitu sebanyak 114.452 pengunjung perpustakaan kemudian menurun hingga 20.396 pengunjungpada tahun 2021 dan kemudian meningkat hingga 66.653 pengunjung pada tahun 2023. Dengan demikian, kedepan capain tersebut masih harus ditingkatkan lagi melalui penambahan dan pemeliharaan buku. Sebagaimana capaian jumlah pengunjung perpustakaan pertahun tersaji sebagai berikut :



Gambar 2. 114 Jumlah pengunjung Perpustakaan per Tahun
Sumber: Disperpuska Kabupaten Batang Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, capaian tahun 2023 untuk pengunjung perpustakaan sebanyak 66.653 orang dengan rata-rata harian pemustaka sebesar 266 orang/hari. Sementara itu tingkat pemanfaatan perpustakaan sebesar 0,02. Untuk meningkatkan kinerja urusan perpustakaan, upaya lain yang perlu ditingkatkan adalah kualitas SDM dalam bidang perpustakaan. Kualitas SDM dilihat dari jumlah pustakawan dan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. Pada periode 2019-2021 jumlah pustakawan sebanyak 2 orang namun hingga tahun 2023 bertambah menjadi 8 orang, sementara jumlah tenaga teknis sebanyak 27 pada tahun 2019 dan menurun menjadi 23 orang pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian ditahun 2023 meningkat menjadi sebanyak 1148 orang. Sedangkan untuk penilai yang memiliki sertifikat sampai dengan tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Batang belum memiliki penilai yang bersertifikat. Peningkatan jumlah pustakawan dan tenaga teknis di perpustakaan Kabupaten Batang disebabkan karena telah dilakukan perhitungan ulang di tahun 2022 pada berbagai jenis perpustakaan dari perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan desa, dan perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMA).

Tabel 2. 49
Jumlah pustakawan dan tenaga teknis di Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8	8	8
1	Pustakawan	Orang	2	2	2	2	8
2	Tenaga teknis	Orang	27	23	23	1123	1148

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2024

Untuk mendorong indeks literasi dan mengoptimalkan program gemar membaca akan dilakukan melalui peningkatan layanan perpustakaan dan optimalisasi taman baca masyarakat.

18. Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai sumber informasi yang akurat, sebagai alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, juga sebagai bukti kinerja organisasi dan aparaturnya, bukti pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga evaluasi kinerja dalam suatu perangkat daerah dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan urusan Kearsipan dilaksanakan melalui pengelolaan arsip secara baku serta penyelamatan arsip/dokumen yang mempunyai nilai guna.

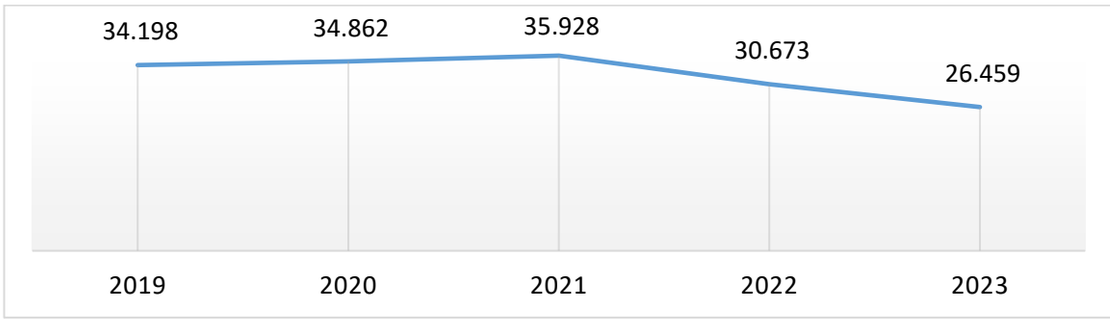
Kinerja kearsipan dilihat dari indikator persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dimana di Kabupaten Batang hingga tahun 2023 masih sebanyak 16,73% dari total keseluruhan perangkat daerah.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Batang terletak di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) yang memiliki Panjang garis pantai Kabupaten Batang 38,75 km dan lebar 4 mil yang ditunjang oleh iklim tropis dengan jumlah hari hujan pada Bulan Oktober-April dan musim kemarau pada Bulan April-Oktober, dimana kedua musim ini silih berganti sepanjang tahun merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupa tambak (air payau), dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, budidaya air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air).

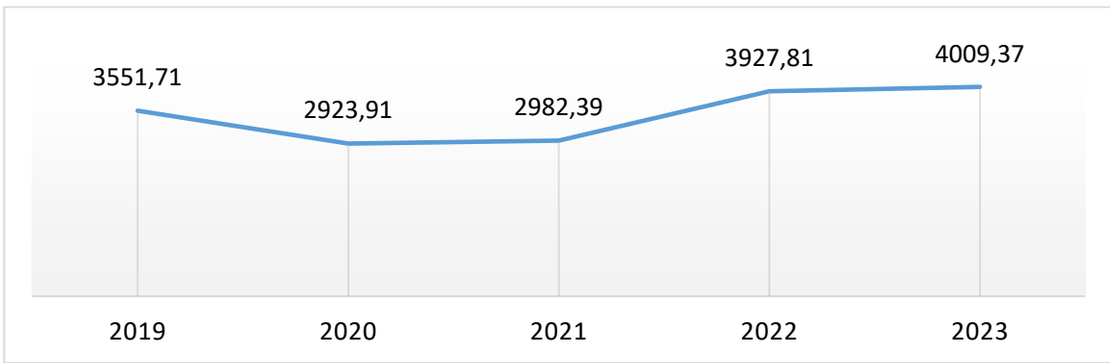
Jumlah produksi perikanan tangkap pada periode tahun 2019-2023 cenderung menurun, dari 34.198 ton pada tahun 2019 meningkat hingga 35.928 ton pada tahun 2021, hal ini didukung karena tidak adanya lagi peraturan yang melarang alat tangkap cantrang beroperasi di perairan laut Jawa serta meningkatnya jumlah kapal nelayan yang melakukan pelelangan ikan di TPI di wilayah Batang menyebabkan semakin meningkatnya produksi perikanan tangkap. Kemudian kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 30.673 ton dan menurun kembali menjadi 26.459 ton pada tahun 2023.



Gambar 2. 115 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2023

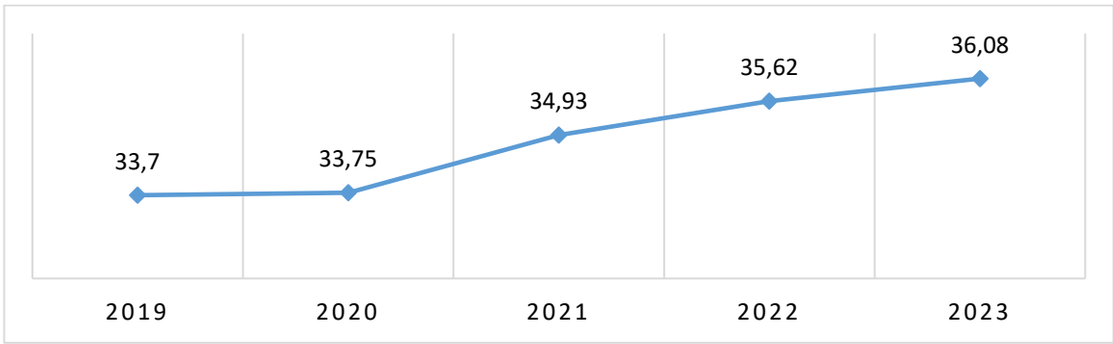
Untuk produksi perikanan budidaya dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 3551,71 ton menurun menjadi 2923,91 ton pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi *Covid*-19 yang mempengaruhi aktivitas usaha budidaya sehingga mengakibatkan penurunan produksi perikanan budidaya. Kemudian meningkat menjadi 2.982,39 ton pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 4.009,37 ton pada tahun 2023. Sebagaimana capaian perikanan budidaya di Kabupaten Batang selama 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 116 Produksi perikanan Budidaya (ton) Kabupaten Batang

Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2024

Konsumsi ikan juga cenderung naik pada periode 2019-2023, dimana pada tahun 2019 sebesar 33,7 kg/kapita/th menjadi 36,08 kg/kapita/th pada tahun 2023. Namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi sebesar 33,75 kg/kapita/th karena produksi ikan laut yang tersedia di pasar menurun.



Gambar 2. 117 Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th) Kabupaten Batang
Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2024

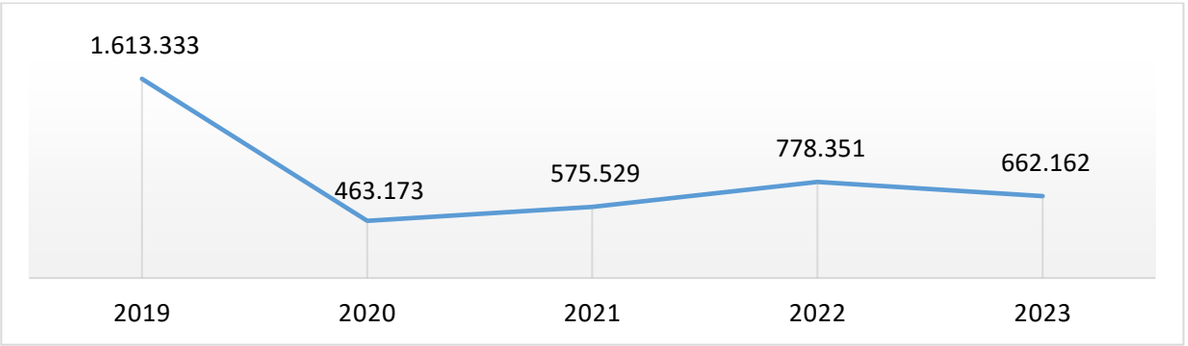
2. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Batang mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Batang yang cukup besar baik wisata pantai, wisata pegunungan, wisata religi dan wisata budaya. Sektor Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa (Pokdarwis).

Beberapa tempat wisata yang ada di kabupaten Batang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, antara lain kolam renang Bandar, THR Kramat, pantai Ujungnegoro, pantai Sigandu, pantai Celong, pantai Jodo, kebun teh Pagilaran, pemandian air panas Sangubanyu serta desa wisata Mentosari dan Pandansari.

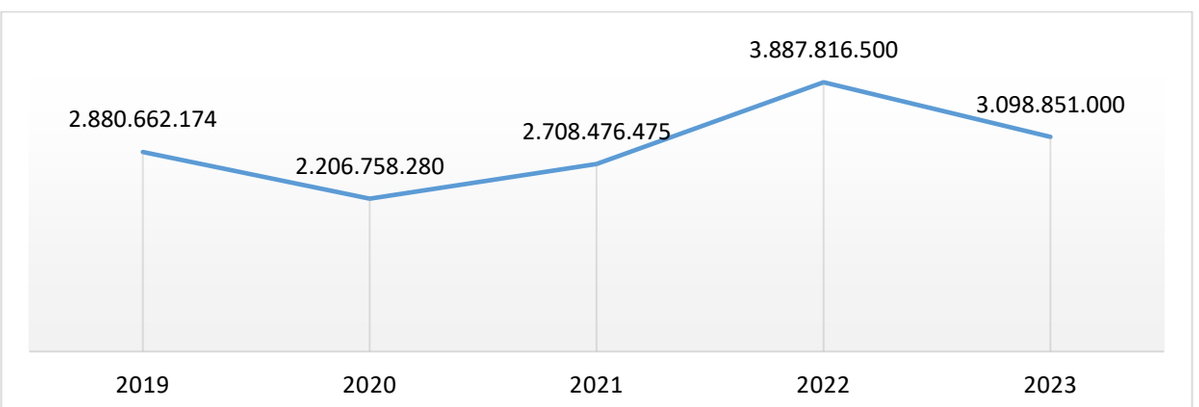
Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan pariwisata Batang diantaranya promosi melalui media sosial, televisi, dan media cetak; kalender event; mengikuti pameran pariwisata dan ekonomi kreatif serta kerjasama dengan stakeholder pariwisata (PHRI, BWI, ASPI), cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang sejak tahun 2019 kunjungan wisata Kabupaten Batang sebanyak 1.612.333 orang. Namun, tahun 2020 jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang mengalami penurunan menjadi sebesar 463.173 orang. Penurunan terjadi karena adanya Pandemi *Covid*-19 sehingga selama beberapa bulan destinasi wisata ditutup dan baru dibuka kembali pada awal Juli dengan penerapan protokol kesehatan. Hingga tahun 2022 dengan berangsur pulihnya kondisi akibat dampak Pandemi *Covid*-19 kunjungan wisata berangsur merangkak naik menjadi 778.351 orang dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 662.162 orang yang melakukan kunjungan wisata di Kabupaten

Batang. Sebagaimana jumlah kunjungan wisata Kabupaten Batang dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 118 Kunjungan Wisata Kabupaten Batang Tahun 2019-2023
Sumber: Disparpora Kabupaten Batang, 2024

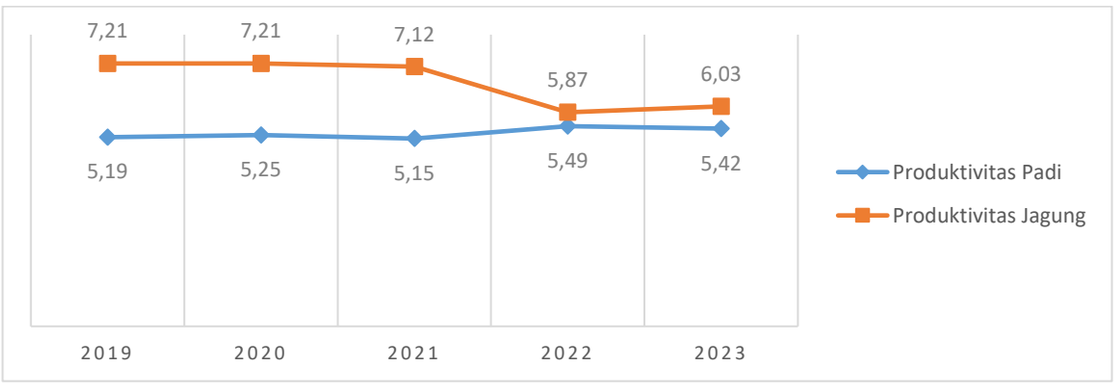
Sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang, kontribusi sektor pariwisata juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 sebesar Rp 2.880.662.174,. Namun tahun 2020 PAD sektor pariwisata mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2.206.758.280,- yang disebabkan adanya pandemi *Covid*-19 di tahun 2020, dengan berangsur membaiknya kondisi akibat dampak Pandemi *Covid*-19 hingga tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.887816.500, diantara tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batang, Pantai Sigandu masih menjadi favorit bagi masyarakat dalam berwisata. Kemudian menurun kembali menjadi Rp 3.098.851.000,- pada tahun 2023 dengan sumbangan terbesar pada pantai sigandu sebesar Rp 1.981.543.000. Kontribusi sektor pariwisata ini juga tak terlepas dari dukungan oleh upaya pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata, peningkatan akses jalan wisata serta fasilitas pendukungnya.



Gambar 2. 119 PAD sektor pariwisata Kabupaten Batang Tahun 2019-2023
Sumber: Disparpora Kabupaten Batang, 2024

3. Pertanian

Di sektor pertanian, konsep hilirisasi sebagai kebijakan pengembangan pertanian melalui konsep agro industri terus dikembangkan guna menopang ketahanan kebutuhan pangan daerah. Pada tanggal 30 Juni 2023, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki meresmikan lumbung pangan di Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing. Lumbung pangan diresmikan pada tiga lokasi yakni Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Desa Tersono Kecamatan Tersono dan Desa Wonobodro Kecamatan Blado. Tujuan adanya lumbung pangan adalah untuk menopang ketahanan kebutuhan pangan di Kabupaten Batang. Luasan lahan padi di Desa Sidorejo sebesar 150 Hektar dari total di Kecamatan Gringsing yang mempunyai luas 1.275 Hektar.



Gambar 2. 120 Produktivitas Padi sawah dan Jagung (ton/ha) Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang 2024

Produktivitas padi sawah per hektar dalam periode tahun 2019-2023 berfluktuasi meningkat, yaitu sebanyak 5,19 ton/ha pada tahun 2019 meningkat menjadi 5,42 ton/ha pada tahun 2023. Sedangkan pada jagung, produktivitas jagung dari tahun 2019 sebesar 7,21 ton/ha terus menurun hingga tahun 2023 menjadi 6,03 ton/ha, dimana capaian 2023 lebih tinggi disbanding tahun 2022 yang hanya sekitar 5,87 ton/ha. Penurunan produktivitas tak terlepas dari adanya Puso dan area panen terdampak bencana dalam perhitungan luas panen tetap menjadi pembagi pada perhitungan produktivitas sehingga disaat produksi naik belum tentu akan menaikkan produktivitas tanaman. Dalam hal ini berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi dan jagung terus dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pertanian, dilaksanakannya *Standard Operational Procedure Good Agricultural Practice* (SOP GAP), adanya bantuan alat mesin pertanian pra panen yaitu berupa Hand Sprayer, pompa air, cultivator, Hand Sprayer elektrik. Selain itu ada juga rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan besar untuk tanaman pangan, irigasi

perpompaan untuk tanaman menengah, dan juga embung. Bantuan Pupuk dan benih maupun biopestisida juga tidak lupa ikut andil dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi maupun jagung dan juga banyaknya bantuan benih jagung dan padi dari pemerintah.

Tabel 2. 50
Data Produksi Tanaman Pertanian Kabupaten Batang
Tahun 2019-2023

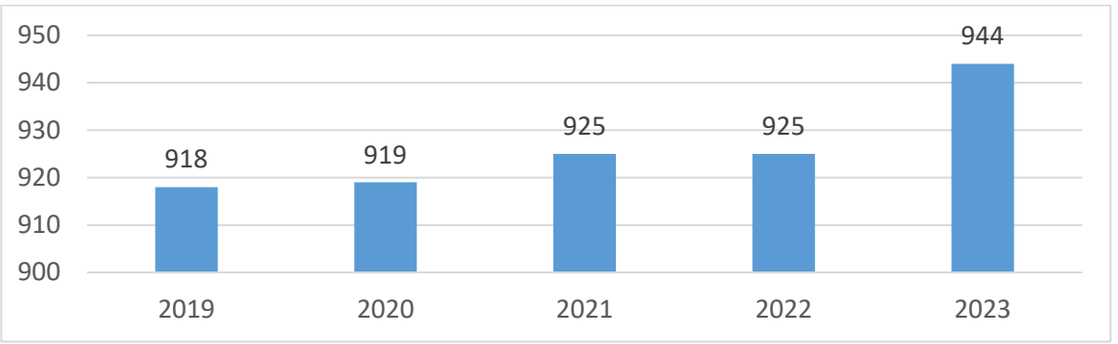
Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
	Produksi	produksi	Produksi	Produksi	Produksi	
TANAMAN PANGAN						
Padi	216.343	208.497	185.681	172.378	181.950	Ton
Jagung	77.783	79.950	77.047	81.143	77.163	Ton
Kedelai	1.382	33	57	119	-	Ton
Kacang Tanah	635	473	191	164	292	Ton
Ubi Kayu	18.900	27.310	22.639	15.517	27.440	Ton
Ubi Jalar	9.720	9.675	7.008	4.890	4.615	Ton
Kacang Hijau	1	6	31	36	-	Ton
HORTIKULTURA						
Bawang Merah	3.214	3.682	8.580	7834	2852	Kw
Bawang Daun	46.622	58.145	23.874	35755	15705	Kw
Cabai Besar	27.851	24.571	12.862	5.313	4626	Kw
Kentang	295.271	357.470	79.175	3.718	155.744	Kw
Kubis	51.720	18.675	9.037	7.994	7.663	Kw
durian	44.820	28.038	29.378	32.557	39.792	Kw/qui
Mangga	44.405	69.593	55.477	37.579	28.766	Kw
nangka	103345	150.318	68.184	70.795	44.574	Kw
Pisang	168162	208.305	161.944	239.026	137.659	Kw
PERKEBUNAN						
Teh	1.489.244	1.493.803	1.498.694	1.445.493	1.428.830	Kg

Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
	Produksi	produksi	Produksi	Produksi	Produksi	
Kakao	350.171	264.128	194.980	183.129	179.424	Kg
Kopi	764.459	789.182	811.296	701.473	727.898	Kg
Kapuk	120.743	106.834	80.565	54.388	39.042	Kg
Cengkeh	546.338	761.822	294.788	338.687	336.161	Kg
Kelapa	1.068.619	581.497	10.119.906	990.206	989.313	Kg

Sumber : Dispaperta Kabupaten Batang 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa produksi tanaman pangan terbagi menjadi 3 jenis tanaman utama yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Jenis tanaman pangan masih didominasi oleh komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Pada jenis tanaman hortikultura, meskipun mengalami penurunan, pisang masih menjadi komoditas dengan produksi tertinggi. Sementara pada jenis tanaman perkebunan, produksi tertinggi masih didominasi oleh 3 komoditas utama yaitu teh, kelapa, dan kopi. Capaian panen komoditas tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan dari grafik diatas cenderung fluktuatif dari tahun 2019-2023, hal ini sangat dipengaruhi oleh besarnya luas lahan dan luas panen dari masing masing komoditas.

Sementara itu, dalam meningkatkan kemandirian petani, pembentukan kelompok tani binaan sangat diperlukan agar mampu meningkatkan taraf hidup petani. Faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah kelompok tani binaan dipengaruhi oleh kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani binaan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian petani, penerapan inovasi dan menganalisa usaha tani yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup petani. Jumlah kelompok tani binaan, di tahun 2017 sebanyak 887 kelompok, meningkat menjadi 924 kelompok di tahun 2018, Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 918 kelompok ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang peran penting kelompok tani, sehingga belum semua petani membentuk kelompok tani, dan mengalami kenaikan kembali sampai tahun 2023 menjadi 944 kelompok tani binaan. Sebagaimana peningkatan jumlah kelompok tani binaan di Kabupaten Batang tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 121 Jumlah Kelompok Tani Binaan Kabupaten Batang
Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang 2024

Selain itu di Kabupaten Batang terdapat Koperasi Komoditas Pertanian yaitu 1) Koperasi Pemasaran Tani Maju Jaya Batang (komoditas Edamame, Bawang Merah, Bawang Putih, Jahe Emprit, Jeruk Lemon), 2) Koperasi Pemasaran Pusaka Tani Sejahtera (komoditas Jagung, Kedelai, Padi, Ubi Jalar), dan 3) Koperasi Pemasaran Kebun Berkah Makmur (komoditas Kakao, Nilam, Sereh Wangi)

Tabel 2. 51
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHK	%	20,71	20,36	20,36	19,88	19,03

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHK terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 sebesar 20,71 persen terus menurun sampai dengan tahun 2023 menjadi 19,03 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi, menurunnya luas lahan pertanian, pergeseran perilaku petani dan lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha lainnya. Dalam hal ini lapangan usaha lainnya yang berkontribusi adalah pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sementara itu, di sektor peternakan, produksi hasil peternakan khususnya daging dan telur cenderung meningkat dalam periode lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam tabel 2.52 sebagai berikut :

Tabel 2. 52
Produksi Peternakan Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2018-2022				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Produksi Hasil Ternak						
1	- Daging	kg	11.591.450	12.807.003	12.893.125	17.099.906	9.050.000
2	- Telur	kg	11.922.803	14.585.205	14.585.205	14.089.530	10.536.445
3	- Susu	Lt	87.000	120.412	122.845	129.467	83.672
	Konsumsi Protein						
1	- Daging	gr/kapita /hr	6,91	7,63	7,83	10,41	10,18
2	- Telur	gr/kapita /hr	5,05	6,17	6,78	6,10	8,19
3	- Susu	Lt/kapita /hr	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02

Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang Tahun 2024

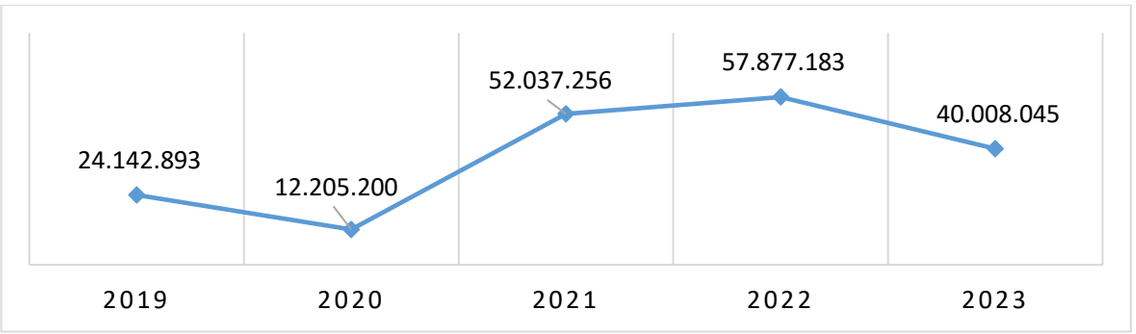
Produksi daging terus meningkat dari tahun 2019 sebesar 11.591.450 kg menjadi sebesar 17.099.906 kg pada tahun 2022 yang kemudian menurun menjadi 9.050.000 kg pada tahun 2023. Produksi telur juga terus meningkat dari tahun 2019 sebesar 11.922.803 kg menjadi sebesar 14.089.530 kg pada tahun 2022 dan kemudian menurun menjadi 10.536.445 kg pada tahun 2023. Sedangkan produksi susu cenderung meningkat, dari sebesar 87.000 liter pada tahun 2019 menjadi sebesar 129.467 liter pada tahun 2022 dan menurun drastis menjadi 83.672 liter tahun 2023. Penurunan produksi telur, daging, susu pada tahun 2023 disebabkan karena populasi ternak ruminasia yang tergolong rendah, pengendalian penyakit hewan menular belum optimal serta pengawasan pangan asal ternak ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Higienis) belum optimal.

Untuk konsumsi protein berupa konsumsi gr/kapita/hari daging dan telur cenderung berfluktuasi. Konsumsi daging pada tahun 2019 sebesar 6,91 gr/kapita/hari meningkat menjadi 10,18 gr/kapita/hr di tahun 2023. Demikian juga dengan konsumsi telur, pada tahun 2019 sebesar 5,05 gr/kapita/hari menjadi 8,19 gr/kapita/hr pada tahun 2023. Sedangkan konsumsi susu lt/kapita/hari periode empat tahun terakhir masih stagnan di

angka 0,01 pada tahun 2019 dan meningkat hingga tahun 2023 menjadi 0,02 lt/Kapita/hari.

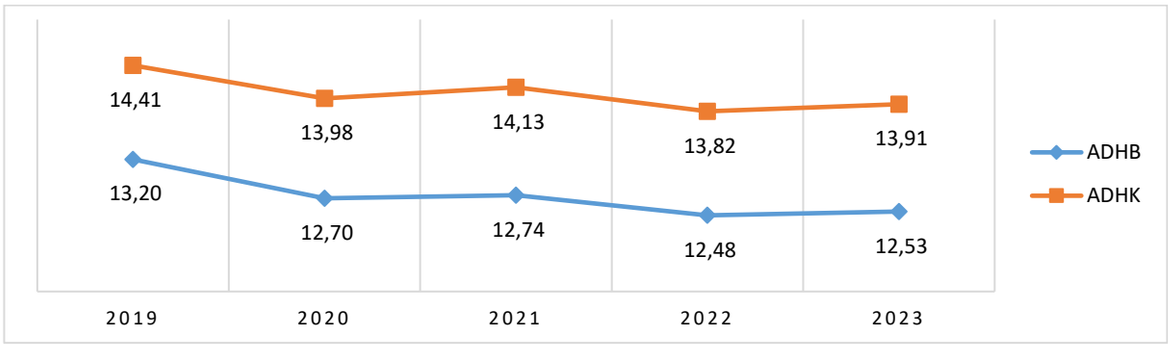
4. Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, tahun 2019 ekspor bersih Kabupaten Batang mencapai US$ 24.142.893. Dan mengalami penurunan menjadi US$ 12.205.200 di tahun 2020 kemudian meningkat pada tahun 2022 nilai ekspor bersih Kabupaten Batang kembali mengalami kenaikan menjadi US$ 57.877.183 menurun kembali menjadi US$ 40.008.045 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional serta lemahnya permintaan. Sebagaimana capaian ekspor bersih perdagangan Kabupaten Batang tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 122 Ekspor Bersih Perdagangan (US $) Kabupaten Batang
Sumber: Disperindagkop dan UKM Kab Batang, 2024

Selain itu, urusan perdagangan juga digambarkan melalui indikator kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB baik ADHB maupun ADHK fluktuatif dalam periode 2019-2023. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB pada tahun 2019 sebesar 13,20 persen dan cenderung menurun hingga tahun 12,53% pada tahun 2023. Demikian juga dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK tahun 2019 sebesar 14,41 persen dan cenderung menurun menjadi 13,91 persen pada tahun 2023.. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan tersebut disebabkan dampak pandemi *Covid*-19 yang berimplikasi pada menurunnya permintaan, serta terganggunya distribusi karena pembatasan aktivitas sosial. Sebagaimana capaian tersebut tersaji pada grafik berikut ini :

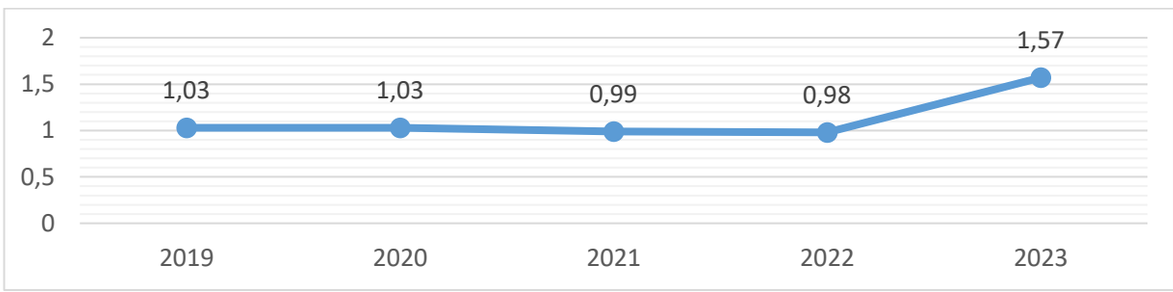


Gambar 2. 123 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dan ADHK

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2024

5. Perindustrian

Pertumbuhan Industri di Kabupaten Batang dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Sebagaimana capaian tersebut tersaji dalam grafik berikut ini :

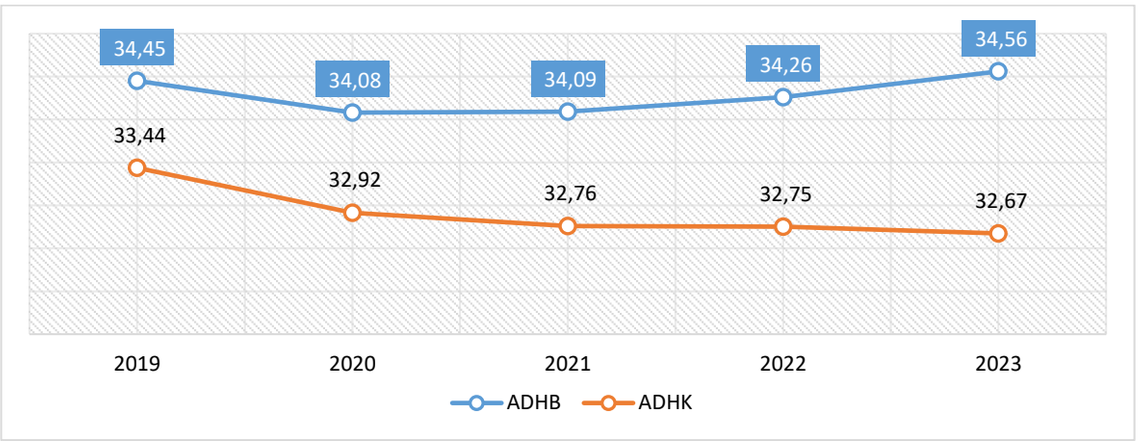


Gambar 2. 124 Pertumbuhan Industri Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2024

Hasil capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perindustrian di Kabupaten Batang pada tahun 2019-2023 dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Urusan Perindustrian. Pertumbuhan industri di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir, pada tahun 2019 sebesar 1,03 persen menjadi 0,98 persen pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 1,53 persen pada tahun 2023. Capaian ini didukung adanya kemudahan perizinan industri di Kabupaten Batang.

Sementara itu, indikator lain yang menggambarkan urusan perindustrian yaitu Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB dan ADHK, sebagaimana tersaji pada grafik berikut ini :



Gambar 2. 125 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB dan ADHK pda tahun 2019-2023

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2024

6. Transmigrasi

Dalam bidang ketransmigrasian, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa ”Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”. Tujuan resmi program transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain luar pulau Jawa. Perkembangan pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Batang ke daerah transmigran selama tahun 2018-2022 fluktuatif, hingga tahun 2023 hanya ada 1 KK yang berhasil ditempatkan pada daerah transmigrasi dikarenakan kuota dari Kementerian melalui Disnakertrans Prov Jateng, Kuota Pemberangkatan, Peserta Transmigrasi baru diberangkatkan di Bulan Desember Tahun 2023 sejumlah 1 KK serta rendahnya Minat warga untuk mengikuti transmigrasi. Sebagaimana Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi selama 5 tahun terakhir tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 53
Jumlah KK yang mengikuti Transmigrasi Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi	KK	5	0	0	0	1

Sumber: Disnaker Kabupaten Batang, 2023

c. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Kinerja fungsi penunjang perencanaan di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2019- 2023 relatif sangat baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD maupun ke dalam APBD terus mencapai 100% dalam 5 tahun terakhir. Disamping itu juga peran serta masyarakat yang relatif tinggi dalam pelaksanaan musrenbang, dimana tingkat kehadirannya dalam periode lima tahun terakhir terus meningkat, dari sebesar 90 persen di tahun 2019 menjadi 100 persen di tahun 2023. Capaian tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 54
Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Tahun 2019- 2023

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100
3	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	90	90	90	100	100

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Batang, 2023

2. Keuangan

Kinerja fungsi Penunjang Keuangan selama kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Fungsi Penunjang Keuangan dimana persentase peningkatan PAD selama rentang tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif dari peningkatan sebesar 6,00 pada tahun 2019 menjadi minus 5,5 ditahun 2023. Capaian tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 55
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2019- 2023

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase peningkatan PAD	%	6,00	4,70	25,30	-6,77	-5,5
2	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	00	0	0
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	33,49	32,14	32,11	31,32	31,18
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	16,01	16,04	23,14	21,55	22,48

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2024

Terlihat dari capaian diatas, kondisi ini disebabkan adanya pandemi *Covid*-19 selain itu adanya pelimpahan kewenangan pajak daerah yang

dilimpahkan ke Provinsi, objek pajak yang berkurang, serta terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang merupakan salah satu pendapatan terbesar baru dicetak bulan April yang mana pada tahun - tahun sebelumnya dicetak pada bulan Januari, sehingga pendistribusian ke Wajib Pajak agak terlambat.

3. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang memiliki peran penting ialah sumber daya aparaturnya. Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualitas dan komitmen dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diperlukan Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara yang siap menjadi abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan. dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana capaian kinerja fungsi penunjang kepegawaian dan pendidikan pelatihan tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 56
Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019- 2023

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2018-2022				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	85	90	55	162,50	90,10

Sumber: BKD Kabupaten Batang, 2023

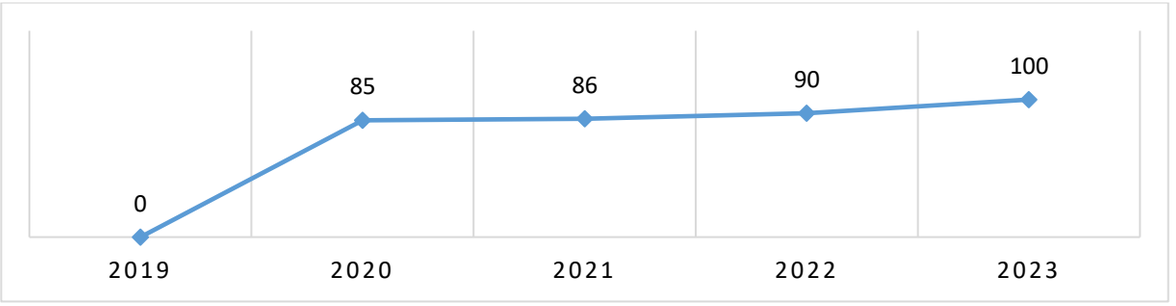
Berdasarkan tabel diatas, kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat dari indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dimana capaian tahun 2023 mencapai 90,10 persen dari target tahunan yang mengikuti diklat formal. Sementara itu, pada tahun 2023, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 17% dari seluruh pejabat structural di Kabupaten Batang. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 yang hanya sebesar 15,60%.

4. Penelitian dan pengembangan

Pada pasal 209 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan penelitian dan

pengembangan. Dalam pasal 373, pasal 374 dan pasal 388 disebutkan bahwa Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembinaan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan penguatan kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Badan Perencana dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sebagai fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Kinerja fungsi penunjang penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2019-2023 realisasinya cenderung naik yang diinterpretasikan menggunakan indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dimana hingga 2023 mencapai 100 persen pemnafaatan hasil kelitbangan.



Gambar 2. 126 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2019-2023

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Batang Tahun 2023

Inovasi memiliki peranan penting dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, terutama tuntutan inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Karena itu perlu adanya dorongan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan inovasi sebagai acuan/*roadmap* sistem inovasi daerah.

Tabel 2. 57
Realisasi Capaian IID (Indeks Inovasi Daerah
Tahun 2019-2023

TAHUN	NILAI	KETERANGAN
2019	650	Inovatif
2020	2.952	Sangat Inovatif
2021	46,84	Inovatif

TAHUN	NILAI	KETERANGAN
2022	58,58	Inovatif
2023	43,76	Inovatif

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang, 2024

Catatan: Kematangan inovasi diperoleh dari data dukung tiap inovasi daerah baik berupa regulasi, dokumentasi dan manfaat inovasi daerah

5. Pengawasan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelesaian LHP sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2019 sebesar 80 persen penyelesaian tindak lanjut LHP, kemudian pada tahun 2023 mencapai 100 persen tindak lanjut temuan. Diharapkan capaian ini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Meningkatnya kinerja pengawasan juga ditunjukkan oleh predikat WTP atas laporan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir dengan semua temuan dari BPK-RI sudah ditindaklanjuti dengan baik. Sebagaimana capaian urusan pengawasan tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 58
Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	80	100	91,69	90,00	100
2	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Batang, 2024

6. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) perumusan kebijakan teknis dan administratif oleh Perangkat Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah; 3) pembinaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah; 5) pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2019-

2023 secara umum dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Sekretariat Daerah yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 59
Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai SAKIP	%	65,02	66,14	66,3	67,27	68,06
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79,91	83,96	85,14	85,27	86,64

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, 2023

7. Sekretariat Dewan

Kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Batang selama kurun waktu dilihat dari Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Kinerja Unsur Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 60
Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, 2024

2.1.5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

1. Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja SPM Bidang Pendidikan tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 61
Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan tahun 2019-2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	100	100	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 th yg blm menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dlm Pendidikan Kesetaraan	100	100	100	100	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

Dari capaian SPM bidang pendidikan terlihat bahwa hingga tahun 2023 capaian kinerja SPM pada jenis pelayanan pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan anak usia telah mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

2.1.6 Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja SPM Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 62

Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan tahun 2019-2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	93,39	96,43	93,64	94,83	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	99,16	99,49	99,60	99,78	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	99,39	99,39	99,30	99,36	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan	88,32	72,58	80,01	92,51	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	31,92	47,79	98,81	98,97
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	67,25	58,94	62,04	81,34	83,46
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	73,02	41,41	64,09	90,81	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam	48,08	41,04	34,76	55,59	65,80

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
		wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,09	93,26	94,70	100	99,57
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	96,03	82,11	90,61	99,20
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	64,93	45,32	38,88	93,39	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	92,17	78,68	103,58	100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

Dari capaian SPM bidang kesehatan terlihat bahwa hingga tahun 2023 capaian kinerja SPM pada 12 jenis pelayanan pada bidang kesehatan telah mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

2.1.7 Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berikut capaian kinerja SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019-2023. Untuk lengkapnya tersaji sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 63
Capaian Spm Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
			%	%	%	%	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	NA	86,31	83,13	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperolehlayanan pengolahan airlimbah domestic	NA	84,92	85,69	100	100
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	NA	100	100	100	100
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	NA	100	0	0	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

Dari capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlihat bahwa hingga tahun 2023 capaian kinerja SPM pada jenis pelayanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota telah mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

2.1.8 Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman dan ketertiban umum

Capaian kinerja SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2021 hingga 2023 rata rata mencapai 100 persen. Untuk lengkapnya tersaji sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 64
Capaian Spm Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

NO	JENIS LAYANAN SPM	Indikator	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
			%	%	%	%	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	NA	100	100	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	NA	100	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesipasiagaan terhadap bencana	NA	3,99	100	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	NA	9,42	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	NA	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target 100% pada SPM Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah belum memadainya jumlah pos/unit damkar di Kabupaten Batang. Jumlah pos/unit damkar yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat Kabupaten Batang di bidang Damkar sebanyak 5 pos/unit, sedangkan saat ini baru tersedia 3 pos/unit yang berada di 1) Kantor Damkar Kabupaten Batang, 2) Kantor Kecamatan Bandar, dan 3) Kantor Kecamatan Limpung.

2.1.9 Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial

Berikut capaian kinerja SPM bidang Sosial pada tahun 2019-2023. Untuk lengkapnya tersaji sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 65
Capaian SPM Urusan Sosial dari Tahun 2019-2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negera penyandang disabilitas yang memperoleh	3,14	25,14	100	100	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
	terlantar diluar panti	rehabilitasi sosial diluar panti					
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1,03	58,33	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	86,39	0	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negera/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	21,7	85	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

Dari capaian SPM bidang Sosial terlihat bahwa hingga tahun 2023 capaian kinerja SPM pada jenis pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti , Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana telah mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Batang diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2023, rekapitulasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah per urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 66
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan
Kabupaten Batang Terhadap Target RPD Tahun 2019-2023

No	Status Pencapaian Indikator	Tahun 2023	
		Jumlah Indikator	Persentase
1.	Sangat Tinggi	164	68,62
2.	Tinggi	22	9,21
3.	Sedang	13	5,44
4.	Rendah	3	1,26
5.	Sangat Rendah	37	15,48
Jumlah		**238**	**100**

Dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	ST
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi	T
(3)	66% ≤ 75%	Sedang	S
(4)	51% ≤ 65%	Rendah	R
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Tabel 2. 67
Rata- Rata Realisasi Capaian Kinerja terhadap RKPD dan RPD
Hingga Tahun 2023

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023			
	Realisasi terhadap Target Akhir RPD	Tingkat capaian target akhir RPD	Realisasi terhadap Target RKPD 2023	Tingkat capaian thdp Target RKPD 2023
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Pendidikan	102,78	Sangat Tinggi	103,41	Sangat Tinggi
Kesehatan	91,51	Sangat Tinggi	103,14	Sangat Tinggi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65,67	Sedang	82,33	Tinggi
Perumahan dan Permukiman	114,61	Sangat Tinggi	122,29	Sangat Tinggi
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	78,11	Tinggi	78,11	Tinggi
Sosial	83,33	Tinggi	83,33	Tinggi
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Tenaga Kerja	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	68,39	Sedang	73,11	Sedang
Pangan	95,17	Sangat Tinggi	100,19	Sangat Tinggi
Pertanahan	143,06	Sangat Tinggi	171,67	Sangat Tinggi
Lingkungan Hidup	75,83	Tinggi	95,13	Sangat Tinggi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	106,29	Sangat Tinggi	109,48	Sangat Tinggi

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023			
	Realisasi terhadap Target Akhir RPD	Tingkat capaian target akhir RPD	Realisasi terhadap Target RKPD 2023	Tingkat capaian thdp Target RKPD 2023
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93,75	Sangat Tinggi	212,38	Sangat Tinggi
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	174,40	Sangat Tinggi	168,88	Sangat Tinggi
Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi	117,65	Sangat Tinggi
Komunikasi dan Informatika	112,25	Sangat Tinggi	167,30	Sangat Tinggi
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	110,72	Sangat Tinggi	134,68	Sangat Tinggi
Penanaman Modal	117,33	Sangat Tinggi	160,33	Sangat Tinggi
Kepemudaan dan Olahraga	68,87	Sedang	107,54	Sangat Tinggi
Statistik	93,25	Sangat Tinggi	93,25	Sangat Tinggi
Persandian	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Kebudayaan	89,44	Tinggi	104,76	Sangat Tinggi
Kearsipan	293,30	Sangat Tinggi	303,87	Sangat Tinggi
Perpustakaan	100,00	Sangat Tinggi	131,25	Sangat Tinggi
Urusan Pilihan				
Transmigrasi	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Kelautan dan Perikanan	64,01	Rendah	66,68	Sedang
Pertanian	114,84	Sangat Tinggi	115,50	Sangat Tinggi
Pariwisata	100,53	Sangat Tinggi	233,29	Sangat Tinggi
Perindustrian	33,33	Sangat Rendah	46,15	Sangat Rendah
Perdagangan	81,67	Tinggi	75,59	Tinggi
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan	86,71	Tinggi	87,56	Tinggi
Keuangan	75,67	Tinggi	70,20	Sedang
Penelitian dan Pengembangan	69,23	Sedang	90,00	Tinggi
Pendidikan dan Pelatihan	85,00	Tinggi	85,00	Tinggi
Kepegawaian	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
Seketariat Daerah	93,13	Sangat Tinggi	91,48	Sangat Tinggi
Sekretariat DPRD	125,00	Sangat Tinggi	155,56	Sangat Tinggi
Unsur Pengawasan				
Pengawasan	94,76	Sangat Tinggi	94,80	Sangat Tinggi
Unsur Pemerintahan Umum				
Kesatuan Bangsa dan Politik	107,00	Sangat Tinggi	108,16	Sangat Tinggi
Kewilayahan				
Kecamatan Batang	40,00	Sangat Rendah	41,28	Sangat Rendah
Kecamatan Warungasem	92,34	Sangat Tinggi	104,26	Sangat Tinggi
Kecamatan Pecalungan	103,44	Sangat Tinggi	112,73	Sangat Tinggi
Kecamatan Wonotunggal	80,92	Tinggi	90,63	Sangat Tinggi
Kecamatan Bandar	121,33	Sangat Tinggi	131,97	Sangat Tinggi
Kecamatan Tersono	99,68	Sangat Tinggi	113,33	Sangat Tinggi
Kecamatan Blado	75,29	Tinggi	82,07	Tinggi
Kecamatan Tulis	75,00	Sedang	85,20	Tinggi
Kecamatan Banyuputih	104,44	Sedang	113,73	Sangat Tinggi

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023			
	Realisasi terhadap Target Akhir RPD	**Tingkat capaian target akhir RPD**	**Realisasi terhadap Target RKPD 2023**	**Tingkat capaian thdp Target RKPD 2023**
Kecamatan Kandeman	78,33	Tinggi	85,29	Tinggi
Kecamatan Limpung	99,34	Sangat Tinggi	112,85	Sangat Tinggi
Kecamatan Subah	104,04	Sangat Tinggi	113,19	Sangat Tinggi
Kecamatan Reban	96,11	Sangat Tinggi	103,53	Sangat Tinggi
Kecamatan Bawang	9,00	Sangat Rendah	10,24	Sangat Rendah
Kecamatan Gringsing	103,44	Sangat Tinggi	112,39	Sangat Tinggi
RATA RATA CAPAIAN TAHUN 2023	**96,14**	**Sangat Tinggi**	**110,31**	**Sangat Tinggi**

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Tabel 2. 68 Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Stn	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengelolaan Pendidikan									Disdikbud
	Angka Partisipasi Sekolah	%	90	100	100	100	ST	111,11	ST	
	Persentase Capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	100	100	100	100	ST	100,00	ST	
2	Program Penembangan Kurikulum									Disdikbud
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	88	100	113,63	ST	100,00	ST	
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan									Disdikbud
	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	100	100	100	100	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PENDIDIKAN						**103,41**	**ST**	**102,78**	**ST**	

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan pendidikan sebesar 103,41 persen dengan status capaian sangat tinggi. Urusan pendidikan terdiri dari 4 indikator dalam 3 program yang keseluruhan indikatornya berstatus sangat tinggi. Hal ini didukung Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan cukup tinggi, pendidikan dasar bebas pungutan, bantuan pendidikan dari Pemerintah, Kartu Indonesia Pintar, Program BOS dan BOSDA.

b. Urusan Kesehatan

Tabel 2. 69 Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Stn	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat									Dinkes
	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	100	70,71	70,71	S	70,71	S	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									Dinkes
	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Berijin	%	99,5	100	95,47	95,47	ST	95,95	ST	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman									Dinkes
	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian Yang Berijin	%	100	80	100	125,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									Dinkes
	Rasio Posyandu Mandiri Terhadap Balita	%	13,24	11,74	21,57	183,73	ST	100,00	ST	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat									RSUD Batang
	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di RSUD Yang Sesuai Standar /Jumlah Gedung, Sarana Dan Prasarana Yang Diadakan / Jumlah Gedung Yang Dibangun	%	100	83	76,28	91,90	ST	76,28	T	

No	Program/ Indikator Program	Stn	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									RSUD Batang
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (indikator SPM)	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									RSUD Limpung
	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan (indikator SPM)	%	100	100	89,46	89,46	T	89,46	T	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									RSUD Limpung
	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**107,034**	**ST**	**94,73**	**ST**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2023 yang diampu oleh tiga perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Batang, dan RSUD Limpung, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2023 sebesar 107,034% dengan predikat sangat tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD, capaian urusan kesehatan sebesar 94,73% dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian ini didukung karena adanya keharusan pada standar pelayanan minimal mencapai 100 persen pada setiap tahunnya sehingga mengharuskan kinerja berfokus pada pelayanan minimal kepada masyarakat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2. 70 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)									DPUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	17,06	4,23	4,7	111,11	ST	27,55	SR	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase									DPUPR
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	77,4	57,67	27	46,82	SR	34,88	SR	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah									DPUPR
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional									DPUPR
	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi									DPUPR
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	12,5	0	0,00	SR	0,00	SR	
7	Program Pengembangan Permukiman									DPUPR
	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	62,04	53,04	0	0,00	SR	0,00	SR	
8	Program Penataan Bangunan Gedung									DPUPR
	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
9	Program Penyelenggaran Jalan									DPUPR
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	70,5	55,5	74,12	133,55	ST	105,13	ST	
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									DPUPR
	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	95,7	45,9	52,4	114,16	ST	54,75	R	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**82,33**	**T**	**65,67**	**S**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan PUPR terhadap target tahun 2023 sebesar 82,33% (Tinggi). Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD sebesar 65,67% (sedang). Hal ini disebabkan karena target kinerja dari program yang tidak tercapai secara maksimal.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2. 71 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Kawasan Permukiman									DPRKP
	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	64	62,5	15,63	25,00	SR	24,41	SR	
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)									DPRKP
	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	86	78	188,27	241,37	ST	218,92	ST	
3	Program Pengembangan Perumahan									DPRKP
	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah (indikator SPM)	%	100	100	100,50	100,50	ST	100,50	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						122,29	ST	114,61	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan PRKP sebesar 122,29 (sangat tinggi). Namun terdapat capaian sangat rendah pada indikator kumuh dikarenakan proses pelaksanaan konstruksi tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

e. Urusan Sosial

Tabel 2. 72 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									Dinsos
1)	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
2	Progam Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan									Dinsos
1)	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	50	35	0	0,00	SR	0	SR	
3	Program Pemberdayaan Sosial									Dinsos
1)	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
4	Program Rehabilitasi Sosial									Dinsos
1)	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan									Dinsos
1)	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
6	Program Penanganan Bencana									Dinsos
1)	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						83,33	T	83,33	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sosial tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan sosial sebesar 83,33 (Tinggi). Kinerja Urusan Sosial terdiri dari 6 program 6 indikator dengan 5 indikator berstatus sedang dan 1 indiaktor berstatus sangat rendah. Status indikator sangat rendah terdapat pada program penanganan warga Negara migran yang disebabkan karena tidak adanya warga negara migran yang akan dipulangkan ke asal daerah yang ditangani Dinas Sosial.

a. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 73 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									Satpol PP
1)	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									Satpol PP
1)	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	100	100	80,95	80,95	T	80,95	T	
3	Program Penanggulangan Bencana									BPBD
1)	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani	%	100	100	131,5	131,50	ST	131,50	ST	
2)	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)	%	100	100	0	0,00	SR	0,00	SR	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**78,11**	**T**	**78,11**	**T**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh 2 SKPD yaitu Satpol PP dan BPBD pada tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan trantibum sebesar 78,11 (Tinggi) dengan 2 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus Tinggi, dan 1 indikator berstatus sangat rendah.

B. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Tabel 2. 74 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap target RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja									Disnaker
	Persentase Kegiatan Yang Mengacu Rtk	%	100	100	99,99	99,99	ST	99,99	ST	
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja									Disnaker
	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	76	70	133,52	190,74	ST	100	ST	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja									Disnaker
	Persentase Pencari Pekerja Yang Mendapat Pekerjaan	%	46	31	78,79	254,16	ST	100	ST	
4	Program Hubungan Industrial									Disnaker
	Penurunan Jumlah Perselisihan Hi	Rasio	14,2	14,8	8	54,05	R	56,34	R	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap target RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						159,87	ST	99,30	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Tenaga Kerja tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan tenaga kerja berstatus sangat tinggi yang terdiri dari 4 indikator dengan 3 indikator berstatus sangat tinggi yang didukung oleh adanya kesesuaian pendidikan, keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan 1 indikator berstatus rendah yang disebabkan karena semakin rendahnya rasio indikator tersebut maka semakin sedikitnya jumlah perusahaan yang mengalami sengketa di Kabupaten Batang.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2. 75 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap target RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan									DP3AP2KB
	Persentase ARG Pada Belanja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Di APBD	Persen	3,5	3	0,6	20,00	SR	17,14	SR	
2	Program Perlindungan Perempuan									DP3AP2KB

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap target RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga									DP3AP2KB
	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan	Persen	28,57	14,29	0	0,00	SR	0,00	SR	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak									DP3AP2KB
	Cakupan Data Pilah Gender Dan Anak	Persen	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)									DP3AP2KB
	Cakupan Kecamatan Layak Anak	Persen	93,33	73,33	87	118,64	ST	93,22	ST	
6	Program Perlindungan Khusus Anak									DP3AP2KB
	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						73,11	S	68,39	S	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak jika sebesar 73% dengan status sedang yang terdiri dari 6 indikator dengan 4 indikator berstatus sangat tinggi dan 2 indikator berstatus sangat rendah.

c. Pangan

Tabel 2. 76 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat									Dispaperta
	Skor Pola Pangan Harapan	%	89,8	89,3	70,5	78,95	T	78,51	T	
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan									Dispaperta
	Rasio Desa mandiri Pangan	%	18	15	2,05	13,67	SR	11,39	SR	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan									Dispaperta
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	100	75	75,00	S	75	S	
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan									Dispaperta
	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	12,5	12,5	0	0,00	SR	0	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,19	ST	95,17	ST	

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pangan tahun 2023 , rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pangan jika dibandingkan dengan target RKPD 2023 dan RPD sebesar 41 persen (sangat rendah) yang terdiri dari 4 indikator dalam 3 program dengan 1 indikator berstatus tinggi, 1 indiaktor berstatus sedang, dan 1 indikator berstatus sangat rendah.

d. Pertanahan

Tabel 2. 77 Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan									DPRKP
	Persentase permohonan fasilitasi pernyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%	90	75	128,75	171,67	ST	143,06	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						171,67	ST	143,06	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pertanahan tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pertanahan mencapai >100%. Capaian ini melebihi target tahunan yang ditetapkan. Hal ini didukung adanya peran aktif dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang terkait dengan fasilitasi pertanahan di Kabupaten Batang.

e. Lingkungan Hidup

Tabel 2. 78 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3									DLH

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	100	100	91	91,00	ST	**91**	ST	
2	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)									DLH
1)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	70	55	81	147,27	ST	**115,71**	ST	
3	Program Pengelolaan Persampahan									DLH
	Persentase penanganan sampah	%	100	60	97	161,67	ST	**97**	ST	
4	Program Perencanaan lingkungan hidup									DLH
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	100	100	91	91,00	ST	**91**	ST	
5	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup									DLH
	Indeks Kualitas Air	Indek	50	50	86	172,00	ST	**172**	ST	
	Indeks Kualitas Udara		80	80	25	31,25	SR	**0**	SR	
6	Program pengelolaan keanekaragaman hayati									DLH
	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	70	50	81	162,00	ST	**115,71**	ST	
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat									DLH
	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	100	100	0	0,00	SR	**0,00**	SR	
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat									DLH

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	100	90	0	0,00	SR	**0,00**	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**95,13**	**ST**	**75,83**	**T**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup jika dibandingkan dengan target RKPD 2023 sebesar 95,13 (sangat tinggi) sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 75,83 (tinggi). Hal ini dikarenakan terdapat target kinerja dari program yang tidak tercapai secara maksimal.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2. 79 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pendaftaran Penduduk									Disdukcapil
	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	90	75	102,47	136,63	ST	113,86	ST	
2	Program Pencatatan Sipil									Disdukcapil
	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	90	97,2	92,21	94,87	ST	102,46	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									Disdukcapil
	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	%	90	95,2	92,3	96,95	ST	102,56	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**109,48**	**ST**	**106,29**	**ST**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 68,78 (sedang) yang terdiri dari 3 indikator dalam 3 program dengan 1 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus sedang, dan 1 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil didukung dengan adanya peningkatan pelayanan hingga di tingkat kecamatan guna memudahkan masyarakat dalam mengurus adminitrasi kependudukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus adminitrasi kependudukan.

g. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2. 80 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penataan Desa									Dispermades

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Budaya Desa Yang Dilestarikan	%	80	25	65	260,00	ST	81,25	T	
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa									Dispermades
	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan	%	56,49	46,03	78	169,45	ST	100,00	ST	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat									Dispermades
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif Dalam Pemberdayaan Desa	%	80	65	135	207,69	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						212,38	ST	93,75	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa lebih dari 100% atau berstatus sangat tinggi. Capaian ini didukung dengan tingginya peran aktif dari Desa dalam melakukan administrasi serta peran aktif dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Pemberdayaan Desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2. 81 Kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengendalian Penduduk									DP3AP2KB
	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana yang tersedia	Persen	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)									DP3AP2KB
1)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	74,84	73,34	145,36	198,20	ST	194,23	ST	
2)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,66	14,21	19,84	139,62	ST	170,15	ST	
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)									DP3AP2KB
	Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	Persen	79,21	77,71	184,73	237,72	ST	233,22	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**168,88**	**ST**	**174,40**	**ST**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa >90% (sangat tinggi) yang terdiri dari 4 indikator dengan 3 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus sangat rendah yang disebabkan masih adanya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi.

b. Perhubungan

Gambaran kinerja urusan Perhubungan dapat dilihat dari indikator kinerja yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 82 Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									Dishub
	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	100	85	100	117,65	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						117,65	ST	100	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perhubungan tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perhubungan sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program. Capaian ini didukung Komitmen dari sebagian besar Stake Holder Angkutan Darat yang mendukung RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas) Pilar 3 yaitu Kendaraan yang Berkeselamatan dibuktikan dengan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dari segi jumlah dalam tingkatan stabil tidak mengalami penurunan.

c. Komunikasi dan Informasi

Tabel 2. 83 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	%								Diskominfo
	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	66	100	151,52	ST	100	ST	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	%								Diskominfo
	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	100	68	124,5	183,09	ST	124,5	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						167,30	ST	112,25	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika sebesar >100% (sangat tinggi) yang terdiri dari 2 indikator dalam 2 program. Capaian ini didukung adanya kerjasama yang baik dengan para awak media dan pihak ke tiga (sumber berita) serta adanya pelatihan dari pemerintah pusat dan propinsi dalam bidang IT namun beberapa kendala dalam proses pencapaian indikator tersebut antara lain berita terkadang tidak sampai tepat waktu di redaksi dan kurangnya tenaga tenaga IT yang berkompeten dalam pembuatan aplikasi.

d. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2. 84 Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi									Disperindagkop dan UKM
	Presentase Koperasi Yang Diawasi Dan Diperiksa	%	50,53	45,21	55,83	123,49	ST	**110,49**	ST	
2	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Koperasi Aktif	%	70	65	68	104,62	ST	**97,14**	ST	
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Peserta Pelatihan Dengan Predikat Baik	%	100	90	75	83,33	T	**75,00**	S	
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	12	10	11	110,00	ST	**91,67**	ST	
5	Program Pengembangan Umkm									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Produk UMKM Yang Terstandarisasi	%	20	15	58	386,67	ST	**290,00**	ST	
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi									Disperindagkop dan UKM
	persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	100	90	0	0,00	SR	**0,00**	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						134,68	ST	110,72	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar 134,68 (Sangat Tinggi).

e. Penanaman Modal

Tabel 2. 85 Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal									DPMPTSP
1)	Persentase peningkatan jumlah investor	%	8	20	63	315,00	ST	100,00	ST	
2	Program Promosi Penanaman Modal									DPMPTSP
1)	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	100	100	1	1,00	SR	1,00	SR	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal									DPMPTSP
3)	Persentase Ijin Yang Diterbitkan	%	100	100	24422	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal									DPMPTSP
	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	8	7,5	75	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal									DPMPTSP
	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	%	45	45	84	186,67	ST	186,67	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						140,53	ST	97,53	ST	

Sumber : DPMPTSP Kab. Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Penanaman Modal tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Penanaman Modal >90% atau berstatus sangat tinggi yang terdiri dari 5 indikator dalam 5 program. Capaian ini didukung adanya dukungan sistem OSS.

f. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2. 86 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	
	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan									Disparpora
	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	Persen	45	25	48,87	195,48	ST	**108,60**	ST	
2	Progam Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan									Disparpora
	Capaian Medali Kejuaraan	medali	50	35	34	97,14	ST	**68,00**	S	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan									Disparpora
	Penghargaan yang diterima	%	10	10	3	30,00	SR	**30,00**	SR	
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					107,54	ST	68,87	S	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga jika dibandingkan dengan target RKPD 2023 sebesar 107,54% (sangat tinggi) sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD 2023-2026 sebesar 68,87% (sedang) yang terdiri dari 3 indikator dan terdapat 1 indikator berstatus sangat rendah. Capaian ini terkendala kemampuan dan pengetahuan pemuda dalam berwirausaha,

berorganisasi dan prestasi pemuda yang perlu ditingkatkan dan meningkatnya atlit di daerah lain yang membuat kompetisi menjadi lebih ketat, serta belum maksimalnya pembinaan organisasi kepramukaan. Namun capaian ini juga didukung beragammya organisasi kepemudaan dan kemampuan anggota yang menjadi modal untuk meningkatkan kapasitas SDM kepemudaan.

g. Statistik

Tabel 2. 87 Kinerja Urusan Statistik Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral									Diskominfo
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	100	93,25	93,25	ST	93,25	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						93,25	ST	93,25	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Statistik tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Statistik sebesar 93,25 (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program berstatus tinggi. Hal ini didukung Adanya kerjasama yang intens dengan pihak produsen data dan instansi vertikal (BPS).

h. Persandian

Tabel 2. 88 Kinerja Urusan Persandian Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi									Diskominfo
	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,00	ST	100,00	ST	

Sumber : Diskominfo Kabupaten Batang, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Persandian tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Persandian sebesar 100% (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program dengan status sangat tinggi. Capaian ini didukung adanya pelatihan persandian dari Pusat.

i. Kebudayaan

Beberapa kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Batang sampai Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 89 Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengembangan Kebudayaan									Disdikbud

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Festival Seni Yang Dilaksanakan	%	80	100	95	95	ST	118,75	ST	
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional									Disdikbud
	Persentase Komunitas/Sanggar Kesenian Yang Difasilitasi	%	80	70	72	102,86	ST	90,00	ST	
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya									Disdikbud
	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	90	75	80	106,67	ST	88,89	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEBUDAYAAN						**104,76**	**ST**	**89,44**	**T**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kebudayaan tahun 2023 , rata-rata tingkat capaian kinerja urusan kebudayaan sebesar 104,76 persen berstatus sangat tinggi jika dibandingkan dengan target RKPD 2023 namun jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 89,44 persen dengan status tinggi.

j. Perpustakaan

Tabel 2. 90 Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pembinaan Perpustakaan									Disperpuska

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	persen	0,16	0,16	0,21	131,25	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						131,25	ST	100	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perpustakaan tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perpustakaan >100% (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program dengan 1 indikator berstatus sangat tinggi. Ketercapaian indikator berstatus sangat tinggi ini didukung dengan adanya layanan mobil keliling dan perpustakaan digital (*eperpus* dan *i-batang*).

k. Kearsipan

Tabel 2. 91 Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Program Pengelolaan Arsip									Disperpuska
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	indeks	76	75,3	150,14	199,39	ST	197,55	ST	
3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip									Disperpuska

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	indeks	23	22,2	67,46	303,87	ST	293,30	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						303,87	ST	293,30	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kearsipan tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kearsipan >100% (sangat tinggi) yang terdiri dari 2 indikator dalam 2 program dengan 2 indikator berstatus sangat tinggi. Capaian hingga 300% dari target pada program perlindungan dan penyelamatan arsip disebabkan karena pengolahan arsip sudah tertata dari level Unit Pencipta Arsip (UPA) sampai dengan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Transmigrasi

Tabel 2. 92 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Taun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi									Disnaker

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Transmigran yang berhasil ditempatkan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,00	ST	100,00	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Transmigrasi tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Transmigrasi sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program dengan 1 indikator berstatus sangat tinggi yang dikarenakan banyaknya minat warga untuk menjadi transmigran, Banyaknya kuota pemberangkatan .

b. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. 93 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap									Dislutkan
	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	**%**	98	94,5	50	52,91	R	51,02	R	
2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan									Dislutkan
	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	**%**	100	100	90	90,00	T	90	T	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya									Dislutkan

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	%	100	92	80	86,96	T	80	T	
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan									Dislutkan
	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	100	95	35	36,84	SR	35	SR	
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	66,68	S	64,01	R	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan sebesar 66% (sedang) terhadap target RKPD 2023 sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD 2023-2026 sebesar 64,01 (Rendah). Urusan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 4 indikator dalam 4 program dengan 2 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus rendah, dan 1 indikator berstatus sangat rendah.

c. Pertanian

Tabel 2. 94 Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian									
	Prosentae Capaian Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan	%	85	85	90	105,88	ST	105,88	ST	Dislutkan

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	0,0106	0,0104	0,04	384,62	ST	377,36	ST	Dispaperta
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian									
	Capaian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**%**	100	100	80	80,00	T	80,00	T	Dislutkan
	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	Dispaperta
3	Program Perizinan Usaha Pertanian									
	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	**%**	100	100	25	25,00	SR	25,00	SR	Dislutkan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
	Persentase Capaian Jumlah Hewan yang Terobati		100	100	85	85,00	T	85,00	T	Dislutkan
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian									
	Persentase Capaian Vaksin ternak	**%**	100	100	90	90,00	T	90,00	T	Dislutkan
	Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	Dispaperta
6	Program Penyuluhan Pertanian									
1)	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, petani, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	Dispaperta
2)	Persentase validitas data dan kelembagaan pertanian	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	Dispaperta
3)	Persentase kenaikan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	Dispaperta
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	115,50	ST	114,84	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pertanian tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pertanian sebesar >100% (sangat tinggi) yang terdiri dari 11 indikator dalam 6 program yang SKPD yang diampu oleh 2 perangkat daerah yakni Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan dan terdiri dari 6 program dengan 11 indikator.

d. Pariwisata

Tabel 2. 95 Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata									Disparpora
	Persentase Peningkatan Pendapatan Sektor Pariwisata	%	20	15	58,62	390,80	ST	**293,10**	ST	
2	Program Pemasaran Pariwisata									Disparpora
	Persentase Peningkatan Wisatawan	%	100	17	65	382,35	ST	**65,00**	R	
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual									Disparpora
	Persentase Jumlah Ekonomi Kreatif Yang Memiliki HAKI	%	100	15	4	26,67	SR	**4,00**	SR	
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif									Disparpora
	Persentase SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Bersertifikat	persen	100	30	40	133,33	ST	**40,00**	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						233,29	ST	100,525	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pariwisata tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pariwisata >100% (sangat tinggi). Hal ini didukung adanya peningkatan kualitas layanan dan manajemen pengelolaan destinasi .

e. Perindustrian

Tabel 2. 96 Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perindustrian									
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri									Disperingdagkop dan UKM
	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku IKM	%	0,78	0,78	1,08	138,46	ST	**100,00**	ST	
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota									Disperingdagkop dan UKM
	Persentase Peningkatan Jumlah Perijinan Berusaha Sektor Industri	%	88	82	0	0,00	SR	**0,00**	SR	
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional									Disperingdagkop dan UKM
	Persentase Jumlah Industri Dalam Siinas	%	88	82	0	0,00	SR	**0,00**	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						46,15	SR	33,33	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perindustrian tahun 2023 , rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perindustrian sebesar 51 (rendah) yang terdiri dari 3 indikator dalam 3 program dengan 1 indikator berstatus sangat tinggi dan 2 indikator berstatus sangat rendah yang disebabkan pada tahun 2023 tidak dianggarkan.

f. Perdagangan

Tabel 2. 97 Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Verifikasi Teknis	%	70	100	100	100,00	ST	**142,86**	ST	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	36	36,36	13	35,75	SR	**36,11**	SR	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Yang Stabilitas Harganya Terjaga	%	75	75	75	100,00	ST	**100,00**	ST	
4	Program Pengembangan Ekspor									Disperindagkop dan UKM
	Nilai Ekspor Perdagangan	nilai/ USD	61.419.729	57.877.183	68.080.380	117,63	ST	**110,84**	ST	
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Alat2 Ukur, Timbang, Takar Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	75	75	75,14	100,19	ST	**100,19**	ST	
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Pelaksanaan Pameran Dagang Dalam Negeri Di Kabupaten Batang	%	100	100	0	0,00	SR	**0,00**	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						75,59	T	81,67	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perdagangan sebesar 81,67 persen dengan predikat tinggi. Namun pada program penggunaan pemasaran produk dalam negeri capaiannya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya pelaksanaan pameran dagang dalam negeri pada tahun 2023.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Fungsi Perencanaan

Tabel 2. 98 Kinerja Fungsi Urusan Perencanaan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah									Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	100	**100**	100,00	ST	100,00	ST	
	persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	**100**	100,00	ST	100,00	ST	
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	100	100	**92**	92,00	ST	92,00	ST	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah									Bapelitbang
	Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	**92**	90	**70**	77,78	T	76,09	T	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	**92**	90	**70**	77,78	T	76,09	T	
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	**92**	90	**70**	77,78	T	76,09	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						87,56	T	86,71	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perencanaan tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perencanaan sebesar 87% (tinggi) yang terdiri dari 6 indikator dalam 2 program dengan 3 indikator berstatus sangat tinggi dan 3 indikator berstatus tinggi. Kendala pencapaian indikator pada urusan perencanaan yaitu adanya dinamika perubahan aturan dari pemerintah pusat dan mandatory yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten serta penginputan data dan capaian kinerja tidak terlaksana sesuai waktu yang telah ditentukan.

b. Keuangan

Tabel 2. 99 Kinerja urusan keuangan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah									BPKPAD

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Penyampaian Raperda APBD Tepat Waktu	status	Tepat Waktu	Tepat waktu	100	100	ST	100	ST	
2)	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	status	Tepat Waktu	Tepat waktu	100	100,00	ST	100,00	ST	
3)	Persentase Realisasi Serapan Belanja terhadap Anggaran Belanja	%	90	90	90	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah									BPKPAD
1)	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan,pemnfaatan dan kondisinya	persen	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									BPKPAD
1)	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	100	0	78,34	51,00	R	78,34	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						90,20	ST	95,67	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Keuangan tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Keuangan sebesar 90,20% (Sangat Tinggi) yang terdiri dari 5 indikator dalam 3 program dengan 2 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus rendah, dan 1 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian sangat rendah disebabkan karena penyampaian raperda APBD paling lambat November pada tahun berjalan sedangkan pada penyerapan

anggaran disebabkan banyaknya SKPd yang hanya melakukan pencairan pada belanja rutin. Pada penerimaan PAD terkendala capaian targetnya karena banyaknya wajib pajak yang mengajukan keberatan atas pajak yang ditagihkan.

c. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Tabel 2. 100 Kinerja Fungsi Urusan Kepegawaian Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Kepegawaian Daerah									BKD
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**100**	ST	**100**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kepegawaian tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kepegawaian sebesar 100% (Sangat Tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program berstatus tinggi. Ketercapaian pada didukung adanya komitmen yang tinggi dari komponen ASN BKD dalam rangka mencapai target dari indikator kegiatan dan program yang sudah direncanakan dengan mengoptimalkan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

d. Pendidikan Pelatihan

Tabel 2. 101 Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia									BKD
	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	100	100	85	85,00	T	85	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**85**	T	**85**	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2023 , rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan sebesar 85% (Tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program dengan status capaian rendah. Namun pencapaian indikator diatas didukung oleh adanya komitmen yang tinggi dari komponen ASN BKD dalam rangka mencapai target dari indikator kegiatan dan program yang sudah direncanakan dengan mengoptimalkan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

e. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2. 102 Kinerja Fungsi Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah									Bapelitbang
	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	**%**	**65**	50	**45**	90,00	T	69,23	S	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						90,00	T	69,23	S	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 , rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan jika dibandingkan dengan target RKPD 2023 sebesar 90 (sangat timggi) yang terdiri dari 3 indikator dalam 1 program yang berstatus sangat tinggi. Hal ini didukung oleh tingginya minat Perangkat Daerah terhadap inovasi.

f. Sekretariat Daerah

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									Setda
	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Skor	48	29,01	34,01	117,24	ST	70,85	S	
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
	Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	169,33	ST	
	Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	90	90	100	111,11	ST	111,11	ST	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									Setda
	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	15	15	11	73,33	S	73,33	S	PSDA
	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	PSDA
	Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	98	95	99	104,21	ST	101,02	ST	ADPEM
	Persentase lelang melalui e-procurement	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	PBJ
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									Setda
	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	100	100	0	0,00	SR	0,00	SR	TAPEM
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	100	100	0	0,00	SR	0,00	SR	TAPEM

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	KESRA
	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	95	95	182,33	191,93	ST	191,93	ST	HUKUM
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						91,48	ST	93,13	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sekretariat Daerah tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Sekretariat Daerah sebesar 93,13 persen dengan predikat sangat tinggi. Hal ini didukung adanya Koordinasi yang baik dengan Instansi terkait serta di dukung Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yan memadai, tersedianya sdm pada OPD pengampu paket pekerjaan dan Sumber Daya Manusia JFPBJ serta tersedianya Sumber Daya Manusia JFPPBJ yang melaksanakan proses tender dan adanya beberapa paket pekerjaan yang dikonsolidasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Namun terkendala adanya salah satu BUMD masih belum dapat menghasilkan laba sehingga tidak dapat memberikan deviden kepada pemerintah daerah, paket pekerjaan dilaksanakan tergantung pada kecepatan OPD melaksanakan proses pemilihan pengadaan barang jasa, dan terbatasnya jumlah penyedia konsultan perencanaan di Kabupaten Batang sehingga menghambat OPD dalam memasukkan dokumen yang akan ditenderkan.

g. Sekretariat DPRD

Tabel 2. 103 Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD									Set.DPRD
1)	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	100	100	150	150,00	ST	150	ST	
2)	Persentase KUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	%	100	100	150	150,00	ST	150	ST	
3)	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
4)	Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
5)	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	100	45	200	444,44	ST	200	ST	
6)	Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
7)	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
8)	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						155,56	ST	68,13	S	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sekretariat DPRD tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Sekretariat DPRD jika dibandingkan dengan target RKPD 2023 sebesar 155,56 persen dengan predikat sangat tinggi. Namun

jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2023-2026 capaian unsur Sekretariat DPRD sebesar 68,13 persen dengan status sedang. Hal ini didukung adanya jadwal pelaksanaan kegiatan anggota dewan yang terlaksana tepat waktu.

h. Pengawasan

Tabel 2. 104 Kinerja Pengawasan Kabupaten Batang Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan									Inspektorat
	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	persen	100	100	80	80,00	T	80	T	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi									Inspektorat
	Level SPIP	kategori	3	3	6	200,00	ST	200	ST	
	Persentase kapabilitas APIP	persen	70	68	3	4,41	SR	4,29	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**94,80**	ST	**94,76**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pengawasan tahun 2022, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pengawasan sebesar 105,92 (sangat tinggi) yang terdiri dari 3 indikator dalam 2 program dengan 1 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus dan 1 indikator berstatus sangat rendah. Ketercapaian indikator berstatus sangat rendah ini dikarenakan sudah bukan menjadi kewenangan inspektorat serta dalam peningkatan profesionalisme melalui diklat terkendala karena jumlah peserta diklat yang diselenggarakan instansi Pembina sangat terbatas.

E. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan Batang

Tabel 2. 105 Kinerja Kecamatan Batang Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Batang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	85	100	117,65	ST	100	ST	
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									Kec. Batang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	25	25,00	SR	25	SR	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									Kec. Batang
	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	75	25	33,33	SR	25	SR	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Batang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	4	100	1	1,00	SR	25	SR	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									Kec. Batang
	Persentase lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang aktif	%	100	85	25	29,41	SR	25	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**41,28**	**SR**	**40**	**SR**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Batang tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Batang sebesar 41 persen. Hal ini terkendala minimnya SDM yang menangani pengawasan desa dan trantibum di masyarakat.

b. Kecamatan Warungasem

Tabel 2. 106 Kinerja Kecamatan Warungasem Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									Kec. Warungasem
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	75	86	114,25	ST	85,69	T	
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									Kec. Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100	100	100,00	ST	100	ST	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Warungasem
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									Kec. Warungasem
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	100	85	76	89,41	T	76	T	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Warungasem

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	85	100	117,65	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**104,26**	**ST**	**92,34**	**ST**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Warungasem tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Warungasem sebesar 104,24 persen dengan predikat sangat tinggi. Capaian ini didukung Koordinasi antara Kecamatan dan Desa berjalan baik, meningkatnya kesadaran desa mengenai tertibnya administrasi Pemerintahan Desa.

c. Kecamatan Wonotunggal

Tabel 2. 107 Kinerja Kecamatan Wonotunggal Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Wonotunggal
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	100	75	75	99,87	ST	74,9	S	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Wonotunggal
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	98,6	98,60	ST	98,6	ST	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Wonotunggal
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Wonotunggal
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	100	85	100	117,65	ST	100	ST	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Wonotunggal
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	100	85	100	117,65	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**90,63**	**ST**	**80,92**	**T**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Wonotunggal tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Wonotunggal sebear 90 persen dengan predikat sangat tinggi. Hal ini didukung telah terbentuknya sinergitas Aparatur TNI/Polri, ASN,Pemerintahan Desa ,Linmas Tokoh masyarakat dalam menegakkan dan menjaga stabilitas kemanan wilayah.

d. Kecamatan Bandar

Tabel 2. 108 Kinerja Kecamatan Bandar Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Bandar
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	100	75	118	157,33	ST	118	ST	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Bandar
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	398	398,00	ST	398	ST	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Bandar
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	50	50,00	SR	50	SR	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Bandar
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	100	85	100	117,65	ST	100	ST	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Bandar
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	85	50	58,82	R	50	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**131,97**	**ST**	**121,33**	**ST**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bandar tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bandar jika dibandingkan dengan target RPD sebesar 131,97 persen dengan predikat sangat tinggi. Capaian ini didukung dengan telah terbentuknya Sinergitas Aparatur TNI/Polri, ASN,Pemerintahan Desa, Linmas Tokoh masyarakat dalam menegakkan dan menjaga stabilitas kemanan wilayah.

e. Kecamatan Reban

Tabel 2. 109 Kinerja Kecamatan Reban Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Reban
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	90	85	100,00	117,65	ST	111,11	ST	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Reban
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	100	75	75,00	100,00	ST	75,00	S	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Reban
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	90	85	85,00	100,00	ST	94,44	ST	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Reban
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Reban

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**103,53**	**ST**	**96,11**	**ST**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Reban tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Reban sebesar 103% (sangat tinggi). Capaian ini didukung dengan telah terbentuknya Sinergitas Aparatur TNI/Polri, ASN,Pemerintahan Desa, Linmas Tokoh masyarakat dalam menegakkan dan menjaga stabilitas kemanan wilayah. Namun terkendala kurangnya SDM yang menangani urusan di kecamatan.

f. Kecamatan Blado

Tabel 2. 110 Kinerja Kecamatan Blado Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Blado
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	94	94,00	ST	94,001	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									Kec. Blado
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	75	91	121,33	ST	91,00	ST	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									Kec. Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	85	85,00	T	85,00	T	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									Kec. Blado
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	90	85	85	100,00	ST	94,44	ST	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Blado
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	90	85	85	100,00	ST	94,44	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**82,07**	**T**	**75,29**	**T**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Blado tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Blado sebesar 82,07 persen dengan predikat tinggi.

g. Kecamatan Kandeman

Tabel 2. 111 Kinerja Kecamatan Kandeman Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Kandeman
	Persentase Pelayanan Paten Yang Sesuai Sop	%	100	75	75,00	100,00	ST	75,00	S	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Kandeman
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	75,00	75,00	S	75,00	S	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Kandeman
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	75,00	75,00	S	75,00	S	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Kandeman
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	90	85	75,00	88,24	T	83,33	T	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Kandeman
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	90	85	75,00	88,24	T	83,33	T	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		**85,3**	**T**	**78,3**	**T**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Kandeman tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Kandeman sebesar 85,3 persen dengan predikat tinggi.

h. Kecamatan Tulis

Tabel 2. 112 Kinerja Kecamatan Tulis Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									Kec. Tulis
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	75	100	133,33	ST	100,00	ST	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Tulis
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	100	85	0	0,00	SR	0,00	SR	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									Kec. Tulis
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Tulis
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	75	75,00	S	75,00	S	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Tulis
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	85	100	117,65	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**85,20**	**T**	**75**	**S**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tulis tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tulis sebesar 85,20 persen dengan predikat tinggi.

i. Kecamatan Subah

Tabel 2. 113 Kinerja Kecamatan Subah Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									Kec. Subah
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	75	98	130,67	ST	98,00	ST	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									Kec. Subah
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	90	85	100	117,65	ST	111,11	ST	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									Kec. Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Subah
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Subah
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	90	85	100	117,65	ST	111,11	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**113,19**	**ST**	**104,04**	**ST**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Subah tahun 2023 , rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Subah sebesar 113,19 persen dengan predikat sangat tinggi.

j. Kecamatan Pecalungan

Tabel 2. 114 Kinerja Kecamatan Pecalungan Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Pecalungan
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	100	75	100	133,33	ST	**100,00**	ST	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Pecalungan
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	**100,00**	ST	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Pecalungan
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	90	85	100	117,65	ST	**111,11**	ST	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Pecalungan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	90	85	100	117,65	ST	**111,11**	ST	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Pecalungan
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	95	95,00	ST	**95,00**	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**112,73**	**ST**	**103,44**	**ST**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Pecalungan tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Pecalungan sebesar 112,73 persen dengan predikat sangat tinggi.

k. Kecamatan Banyuputih

Tabel 2. 115 Kinerja Kecamatan Banyuputih Tahun 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Banyuputih
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100,0	100,00	ST	100	ST	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									Kec. Banyuputih
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	75	100	133,33	ST	100	ST	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									Kec. Banyuputih
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	90	85	100	117,65	ST	111,11	ST	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Banyuputih
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	90	85	100	117,65	ST	111,11	ST	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%								Kec. Banyuputih
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**113,73**	**ST**	**104,44**	**ST**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Banyuputih tahun 2023 , rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Banyuputih sebesar 113,73 persen dengan predikat sangat tinggi .

1. Kecamatan Gringsing

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Gringsing
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	100	75	95,00	126,67	ST	95,00	ST	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Gringsing
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Gringsing
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	90	85	100,00	117,65	ST	111,11	ST	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Gringsing
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Gringsing
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	90	85	100,00	117,65	ST	111,11	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**112,39**	**ST**	**103,44**	**ST**	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Gringsing tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Gringsing sebesar 117,65 persen dengan predikat sangat tinggi.

F. Unsur Pemerintahan Umum

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan									Bakesbangpol
	Persentase Masyarakat Yang Mengamalkan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa Yang Bagus	%	100	95	110	115,79	ST	110	ST	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									Bakesbangpol
	Persentase Parpol Dan Lembaga Pendidikan Yang Berperan Aktif Mendukung Pemerintah	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya									Bakesbangpol
	Persentase Masyarakat Yang Paham Tentang Ketahanan Ekososbud	%	100	100	110	110,00	ST	110	ST	
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									Bakesbangpol
	Persentase Ormas Yang Mendapatkan Fasilitasi Dan Pembinaan	%	100	100	115	115,00	ST	115	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial									Bakesbangpol
	Persentase penurunan konflik sosial	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**108,16**	ST	**107,00**	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol tahun 2023, rata-rata tingkat capaian kinerja diatas 100% dengan status sangat tinggi. Capaian ini didukung dengan adanya partisipasi dan minat masyarakat yang aktif dalam kemasyarakatan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Mendasari Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam Pasal 163 ayat (2)-(3) berbunyi Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah. Permasalahan ini dapat bersumber dari hasil kajian review capaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan maupun dari isu isu berkembang nasional dan/atau provinsi.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan permasalahan yang timbul dalam pencapaian sasaran pembangunan dan indikator kinerja utama (IKU) pembangunan menurut RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Adapun capaian sasaran pembangunan dan IKU dengan capaian kurang dari 100% pada tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 116 Capaian Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Stn	Capaian Sasaran Pembangunan		%
			Target	Realisasi	
1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan					
	PDRB per Kapita (ADHK)	juta Rp	21,7	20,15	92,86
	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,4721	3,878	111,69
1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas					
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	69,66	70,2	100,78
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	91,86	92,48	100,67
	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	63,9	65,63	102,71
2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah					
	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,97-5,0	5,53	111,27
	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan	(Rp.000 /tahun)	9.710	10.470	107,83

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Stn	Capaian Sasaran Pembangunan		%
			Target	Realisasi	
3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran					
	Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	21,5	20,17	93,81
	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,93	6,06	97,85
	Persentase Penduduk Miskin	%	8,4	8,92	94,17
4. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi					
	Indeks Infrastruktur	indeks	191,49	202,68	105,84
5. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	64,94	68	104,71
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel					
	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	67,36	66,01	98,00
6. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah					
	Nilai SAKIP	skor	69,62	68,06	97,76
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	indeks	level 3	Level 2	66,67
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	78	77,95	99,94
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,3	86,24	101,10
3. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif					
	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	160	143,13	89,46
	Indeks Rasa Aman	indeks	4	4,47	100,00
8. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana					
	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,71	0,47	66,20
9. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat					
	Indeks Demokrasi	indeks	70	83,18	100,00
10.Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang					
	Angka kriminalitas	%	0,016	0,007	100,00
Rata-rata capaian IKU					**97,42**

Sumber : Bapelitbang, diolah

Tabel 2. 117 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		%
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Rata-Rata Lama sekolah	tahun	7	7,07	101,00
		Angka Harapan Sekolah	tahun	12,3	12,15	98,78
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	79,8	78,4	98,25
		Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100,00
		Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	70	66,14	94,49
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	85,7	96,84
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	76,5	76,45	99,93
2	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	160	123,7	100,00
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	8,48	10,28	121,23
		Angka prevalensi balita stunting	%	13,87	10,68	100,00
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,84	74,85	100,01
		Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	87	95,43	109,69
		Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	71,42	66,66	93,34
		Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	65	96	147,69
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010	%	10,48	31,9	304,39
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	93,4	105,54
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	79	77,7	98,35
3	RSUD Batang	Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	83	76,25	91,87
		Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	84	80,48	95,81
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	99,20	92,67	93,42
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	79	60,45	76,52
4	RSUD Limpung	Persentase Capaian Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	81	81	100,00
		Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	80	81	101,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	98,33	91	92,55

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		%
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	79	0	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	67,84	74,96	110,50
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	65,61	64,52	98,34
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	85,5	83,36	97,50
		Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	77,01	77,01	100,00
		Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	9,7	11,067	114,09
		Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	28,86	25,51	88,39
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	86,71	97,98
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	65,27	0	-
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	62,5	80,45	128,72
		Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	78	77,99	99,99
		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	61	89,19	146,21
		Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	62,5	77,3	123,68
		Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	80	100	125,00
		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	100	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	60	0	-
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	66	75,46	114,33
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	73	82,08	112,44
		Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	73	100	136,99
		Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	4,5	3	66,67
		Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	71	100	140,85
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	71	77,02	108,48
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kerukunan	%	70	74,59	106,56
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70,5	76,55	108,58
		Persentase demo tertangani	%	100	100	100,00
		Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	100	100	100,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		%
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	0	-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	60,67	96	158,23
		Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	Indeks	100	0	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	83,89	94,79
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	79	73,96	93,62
10	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri, dan berfungsi sosial	%	72	100	138,89
		Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	80	100	125,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,36	86,71	102,79
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	85	76,14	89,58
11	Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	86,75	102,06
		Tingkat Kesempatan kerja	%	97	93,94	96,85
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	30,37	32,43	106,78
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	65	76,45	117,62
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	70	100	142,86
12	DP3AP2KB	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,14	1,44	126,32
		TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Indeks	3	1,67	55,67
		Ratio KDRT	Rasio	0,0071	0,0039	55,47
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	0	0	100,00
		Persentase cakupan pernikahan anak	%	4,2907	0,0438	1,02
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	84,54	95,53
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	79	73,76	93,37
13	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Luas RTH	%	50	90	180,00
		Indeks Kualitas Air	Indeks	50	50	100,00
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	80	80	100,00
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	68	80	117,65
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60	69	115,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	100	117,65
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	22	22	100,00
		Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	54	0,55	1,02
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	0,76	0,77	101,32
		Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	0,46	0,46	100,00
		Persentase pkk aktif	%	37,66	50,3	133,56

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		%
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88	88	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	66	74,8	113,33
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91,33	90	98,54
		Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	81,67	310,65	380,37
		Menurunnya Presentasi Data Ganda dan Anomali	%	2,6	21,5	826,92
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	61	77,06	126,33
16	Dinas Perhubungan	Rasio ijin trayek	rasio	1,48	0	-
		Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	0,48	0	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	86,71	97,98
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	79	76,45	96,77
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	3,4	3,53	103,82
		Indeks Smart City	Indeks	3,46	3,4	98,27
		Indeks Keamanan Informasi	%	100	100	100,00
		Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	100	100	100,00
		Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	100	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	100	112,99
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	12,36	12,75	103,16
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	66	0	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80	0	-
19	DPMPTSP	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	66	101,02	153,06
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	20	24	120,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88	90,91	103,31
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70	74,9	107,00
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	19	89	468,42
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	8	20	250,00
		Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	8	9	112,50

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		%
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70	76,45	109,21
		Jumlah medali yang diperoleh	Medali	30	59	196,67
		Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	4	0	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	86,71	97,98
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	66,29	66,33	100,06
		index pembangunan literasi masyarakat	Indeks	2,7	10,48	388,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	60,4	70,8	117,22
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,63	88,33	100,80
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	75,3	75,07	99,69
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	22,2	33,73	151,94
22	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	84	88,21	105,01
		Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	21,78	19,03	87,37
		Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	95,5	100	104,71
		Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	95	100	105,26
		Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	85	136,3	160,35
		Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	100	689,5	689,50
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	79	70	88,61
23	Dinas Pangan dan Pertanian	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	0,023	0	-
		Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)				
		a. Beras	Ton	124.116	230762	185,92
		b. Jagung	Ton	69.227	54363	78,53
		Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	10,4	18,746	180,25
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	24,75	0	-
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,0104	0,04	384,62
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	74,5	86,71	116,39
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	66,8	76,45	114,45
24	Sekretariat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	85	93,18	109,62

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		%
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	87,33	102,74
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	79	79	100,00
		Nilai EKPPD	Skor	2,96	3,0823	104,13
25	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	77	82,986	107,77
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	60	76,95	128,25
26	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	76	0	-
		Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	90	0	-
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100,00
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100,00
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55	43,76	79,56
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100,00
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	62.00.00	78,15	3.025,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,5	87,76	100,30
27	BPKPAD	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	WTP	WTP	100,00
		Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	100	100	100,00
		Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	00.05	10,99	316.512,00
		Persentase Peningkatan PAD	%	1,02	-5,5	-539,22
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	64	86,05	134,45
28	BKD	Nilai Sistem Merit	Skor	175	274,5	156,86
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	68	78	114,71
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	85	88,19	103,75
		Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	100	100	100,00
		Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	65	100	153,85
29	Inspektorat	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	80	80	100,00
		Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	80	80	100,00
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	80	80	100,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		%
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	85	96,05
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	79	77,8	98,48
32	Kecamatan Batang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	2,4	92,31
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	45	40	88,89
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80	87,15	108,94
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	45	40	88,89
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	60	69,3	115,50
30	Kecamatan Bandar	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	3,14	120,77
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	29	6	20,69
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,1	78,59	95,72
		Presentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	29	6	20,69
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	60	65,5	109,17
31	Kecamatan Banyuputih	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	2,5	96,15
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	55	18	32,73
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87	86	98,85
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	45,5	36,18	79,52
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	95	95,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	60	69,55	115,92
33	Kecamatan Bawang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	3,5	134,62
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	60	26,6	44,33
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87	87,6	100,69
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	65	68,8	105,85
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	90	90,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	66	75	113,64

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		%
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
34	Kecamatan Blado	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	2,6	100,00
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	22,2	0,000001	0,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	91	107,06
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	22,2	0,00001	0,00
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	95	95,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	70	66	94,29
35	Kecamatan Gringsing	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	2,4	92,31
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	60	0	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87	181,12	208,18
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	46,6	30	64,38
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	3	3,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	65	65	100,00
36	Kecamatan Kandeman	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	3,3	3,47	105,15
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	60	50	83,33
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	86,81	102,13
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	85	0	-
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	0	-
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70	72	102,86
37	Kecamatan Limpung	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	3,5	134,62
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	47,06	58,82	124,99
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87	87,5	100,57
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	35,29	30	85,01
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	64	73,75	115,23
38	Kecamatan Pecalungan	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	3	115,38

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		%
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	60	11,11	18,52
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79	92,36	116,91
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	60	11,11	18,52
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	65	62	95,38
39	Kecamatan Reban	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	3,55	136,54
		PersentaseStatus Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	26,31	13	49,41
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	100	89	89,00
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majan Mandiri tiap tahun	%	31,57	0	-
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	33	33,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70	67	95,71
40	Kecamatan Subah	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	3,5	134,62
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	29,41	26,6	90,45
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87	86,71	99,67
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	29,41	68,8	233,93
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	90	90,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	66	76,45	115,83
41	Kecamatan Tersono	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	93,13	3.581,92
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	60	0	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,5	93,13	106,43
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	65	4	6,15
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	60	63,6	106,00
42	Kecamatan Tulis	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	3,57	3,57	100,00
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	70	65	92,86
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89	70	78,65

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2023		%
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	55	50	90,91
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	80	80,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	75	195,7	260,93
43	Kecamatan Warungasem	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	0	-
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	60	50	83,33
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	85,69	100,81
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	85	50	58,82
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	70	57	81,43
44	Kecamatan Wonotunggal	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	2,6	3,47	133,46
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	20	26,66	133,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	86,81	102,13
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	33,3	6,66	20,00
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70	71,61	102,30

Sumber : Bapelitbang, 2024 diolah

Berdasarkan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dapat disimpulkan secara garis besar beberapa bidang pengelompokkan permasalahan utama yang masih perlu perhatian dalam mendukung pencapaian indikator kinerja diatas antara lain :

- Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat sesuai standar;
- Sumber daya aparatur dan pengendalian internal pemerintah daerah;
- Daya saing ekonomi daerah;
- Mitigasi dan penanggulangan bencana;
- Pengembangan Infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- Pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak;
- Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif;

- Pembinaan kepemudaan dan Pengembangan prestasi olahraga
- Budaya literasi masyarakat;
- Pengelolaan sumber pendapatan daerah;
- Pemberdayaan PMKS usia produktif;
- Distribusi komoditas pangan dan pertanian dan penguatan cadangan pangan daerah;
- Pengembangan *city logistic* / perdagangan;
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- Pengembangan wawasan kebangsaan dan kebudayaan daerah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pokok penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Batang dikelompokkan berdasarkan pembagian urusan yaitu permasalahan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, permasalahan urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, permasalahan urusan pilihan dan permasalahan urusan penunjang. Secara rinci permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Permasalahan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan sangat penting dalam peran meningkatkan terlihat masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan untuk kedepan yaitu:

a) Masih terdapat anak usia 5-15 tahun yang belum/tidak mau sekolah;
b) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana minimal pendidikan seperti ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair, khususnya sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang belum semuanya dalam kondisi baik;
c) Masih adanya satuan PAUD yang belum terakreditasi B;
d) Belum semua guru memahami dan mendapatkan pelatihan kurikulum muatan lokal;
e) Belum semua guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi;
f) Masih adanya guru PAUD yang berkualifikasi dibawah S1/D4.

2. Urusan Kesehatan

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan terlihat masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan untuk kedepan yaitu:

a) Tingginya AKI (Angka Kematian Ibu);
b) Belum optimalnya skrining pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, TB, DM;
c) Belum optimalnya penanganan gizi buruk;
d) Masih adanya kasus *Stunting*;
e) Belum optimalnya sarana dan prasarana bidang kesehatan;
f) Belum optimalnya skrining kesehatan bagi warga Negara usia 15-59 tahun;
g) Belum optimalnya pelayanan terhadap Ibu Bersalin maupun Ibu Hamil.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Banyaknya asset tanah pengairan yang dipergunakan masyarakat secara illegal;
b) Masih adanya luasan irigasi dalam kondisi rusak;
c) Belum seluruh ruas jalan kabupaten tersedia drainase serta banyaknya drainase belum terkelola dengan baik;
d) Kondisi geometri jalan kabupaten, terutama yang berada di daerah selatan banyak yang ekstrim (belokan tajam, tikungan, naik, turun);
e) Minimnya tenaga perawat jalan/mantri jalan yang berada di UPTD DPU-PR Kabupaten Batang;
f) Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap kemampuan jalan dalam menerima beban muatan;
g) Belum adanya implementasi dan regulasi tentang penataan bangunan dan lingkungan;
h) Belum terintegrasinya perencanaan pengembangan dan penataan Perkotaan Batang;
i) Peta ruang yang tidak sesuai fakta dilapangan dengan peta existing RTRW sehingga menimbulkan ketidak pastian investasi yang ingin masuk ke Batang; Rawan terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang berdasar RTRW.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam masyarakat, terciptanya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang aman dan sehat

sangat diperlukan. Namun dalam upaya pemenuhannya masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
b) Belum adanya *database* perumahan;
c) Terdapat *backlog* perumahan;
d) Belum tersusunnya perda perumahan dan permukiman.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalah yang perlu diperhatikan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yaitu:

a) Terbatasnya jumlah SDM Linmas untuk mendukung upaya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
b) Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
c) Rendahnya kecepatan respon yang diberikan kepada masyarakat.

6. Urusan Sosial

Berdasarkan permasalah yang perlu diperhatikan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yaitu:

a) Belum optimalnya penanganan PMKS;
b) Masih sedikitnya panti yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial;
c) Masih rendahnya bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS;
d) Validasi dan verifikasi data penerima bantuan yang dilaksanakan oleh desa belum optimal.

b. Permasalahan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan sektor tenaga kerja menjadi sangat penting guna menjawab bagaimana tantangan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga. Dengan begitu, beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dari sektor tenaga kerja yaitu:

a) Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Batang;
b) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Batang;
c) Jumlah lowongan kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pada jumlah angkatan kerja;
d) Banyaknya perusahaan yang belum memahami K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam pelaksanaan pembangunan dengan perspektif gender masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimlanya perwujudan kesetaraan gender dan anak;
b) Belum optimalnya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

3. Urusan Pangan

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam urusan pangan yaitu belum optimalnya penanganan *food loss and food waste* (pemborosan pangan).

4. Urusan Pertanahan

Berdasarkan data capaian kinerja urusan Pertanahan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu masih rendahnya lahan yang bersertifikat.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data capaian kinerja Lingkungan Hidup, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan masih belum baik;
b) Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan pengendalian limbah B3 di Kabupaten Batang;
c) Rendahnya cakupan penanganan persampahan;
d) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah rumah tangga.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan *online* dalam pembuatan dokumen kependudukan;

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan data capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Rendahnya tingkat pemahaman aparatur desa terkait pelestarian budaya desa;
b) Belum optimalnya peran PKK di masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa;
c) Kurang aktifnya pembinaan dan monitoring secara intensif baik ke desa binaan maupun desa non binaan;

d) Belum optimalnya peran tenaga pendamping desa dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat baik infrastruktur maupun non infrastruktur.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:

a) Menurunnya PUS yang menjadi peserta KB aktif;
b) *Unmetneed* KB yang masih relatif tinggi;
c) Menurunnya angka partisipasi KB (akseptor KB) di Kabupaten Batang;
d) Belum optimalnya akses dan pelayanan KB di Kabupaten Batang.

9. Urusan Perhubungan

Berdasarkan data capaian kinerja Perhubungan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Masih rendahnya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, khususnya rambu-rambu dan penerangan jalan umum;
b) Pesatnya pertambahan kendaraan pribadi;
c) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perhubungan.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data capaian kinerja Komunikasi dan Informatika, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kenerja Pemerintah;
b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
c) Belum optimalnya tata kelola dan layanan SPBE;
d) Belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data capaian kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya pengelolaan produk unggulan dan UMKM;
b) Ketidakteriban koperasi dalam pelaporan keuangan dan hasil RAT;
c) Minimnya permodalan UMKM yang menyebabkan UMKM dan wirausaha baru yang tidak dapat bertahan dalam guncangan/isu ekonomi.

12. Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan data capaian kinerja Penanaman Modal, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:.

a) Menurunnya nilai realisasi investasi;
b) Kurang minatnya investor untuk menggunakan lahan KITB;
c) Belum optimalnya penyediaan informasi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan data capaian kinerja kepemudaan dan Olahraga, maka masih terdapat permasalah yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan prestasi pemuda dan atlet dalam keolahragaan;
b) Rendahnya kemampuan dan pengetahuan pemuda dalam berwirausaha, berorganisasi;
c) Rendahnya sertifikasi pelaku ekonomi kreatif;

14. Urusan Statistik

Berdasarkan data capaian kinerja urusan statistik, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah dan juga BPS dalam pengelolaan data statistic serta produsen data sektoral yang terlambat dalam menberikan *update* data.

15. Urusan Persandian

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu :

a) adanya *hacker* yang berusaha menembus sistem keamanan informasi pemerintah;
b) Minimnya tenaga ahli dalam menangani keamanan sistem informasi.

16. Urusan Kebudayaan

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Kebudayaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan komunitas sanggar seni di Kabupaten Batang;

17. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan data capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Penurunan pengunjung perpustakaan;
b) Pergeseran minat baca buku fisik ke buku digital.

18. Urusan Kearsipan

Berdasarkan data capaian kinerja Kearsipan, pada urusan kearsipan masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya perangkat daerah yang belum memahami kearsipan.

c. Permasalahan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Dampak perubahan iklim yang berimbas pada hasil penangkapan ikan dan daya dukung lingkungan perairan darat;
b) Pendangkalan di muara/jalan masuk ke TPI sehingga kapal kesulitan untuk masuk dan melaksanakan bongkar muat ikan di TPI Kab Batang dan memilih untuk melakukan bongkar muatan ikan di TPI lain di luar Kab. Batang;
c) Belum optimalnya binaan kelompok usaha kelautan dan perikanan.

2. Urusan Pariwisata

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Pariwisata, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Terdapat produk ekonomi kreatif terdata dan terdaftar secara resmi.
b) Masih adanya destinasi wisata yang belum bekerjasama dengan Disparpora Kabupaten Batang;
c) Belum optimalnya kapasitas Pokdarwis dan SDM Pelaku Pariwisata;
d) Minimnya aksesibilitas menuju objek wisata dan konektivitas antar lokasi wisata
e) Belum optimalnya kolaborasi multipihak dalam promosi pariwisata dan ekplorasi destinasi baru wisata
f) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata
g) Belum terintegrasinya pemasaran paket wisata daerah.

3. Urusan Pertanian

Pembangunan urusan pertanian diharapkan mampu meningkatkan nilai produksi dan produktivitas serta mampu meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Adanya gap persepsi SOP Tanaman;
b) Kemarau panjang efek el nino yang menyebabkan masa tanam mundur dan pengurangan hasil produksi;
c) Harga komoditas pertanian yang cenderung fluktuatif;
d) Belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi terhadap petani.

4. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung kelancangan perekonomian yang mana saling berkaitan dan menunjang dengan sektor lain. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Keterbatasan informasi jenis barang, persaingan dan lokasi produksi produk perdagangan;
b) Lemahnya jaringan usaha dan akses pasar
c) Pembatasan tarif ekspor;
d) Masih adanya perusahaan yang belum berizin;
e) Rendahnya kontribusi pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD Kabupaten Batang.

5. Urusan Perindustrian

Sebagai salah satu sektor yang menjadi penopang dalam struktur ekonomi di Kabupaten Batang, urusan perindustrin masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Industri Kecil Menengah (IKM) masih banyak yang belum memiliki perijinan dalam usahanya
b) Rendahnya kesadaran akan pentingnya perijinan bagi IKM.

6. Urusan Ketransmigrasian

Permasalahan dalam transmigrasi karena rendahnya minat masyarakat untuk transmigrasi.

d. Permasalahan Urusan Penunjang

1. Perencanaan

Berdasarkan data capaian kinerja Perencanaan,maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan salah satu kendalanya adalah dimana tidak semua Organisasi Perangkat Daerah telah memahami mekanisme dan manfaat perencanaan;
b) Dinamika perubahan regulasi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang cepat.

2. Keuangan

Berdasarkan data capaian kinerja Keuangan,maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b) Kurang kolaborasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait persyaratan pelayanan pajak;

c) Banyaknya wajib pajak yang mengajukan keberatan atas pajak yang ditagihkan;
d) Masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya;
e) Belum optimalnya kepengurusan aset milik daerah (status kepemilikan, kondisi, dan persebaran aset).

3. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan data capaian kinerja Penelitan dan Pengembangan,maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu :

a) Kurangnya pengintegrasian data dari Organisasi Perangkat Daerah agar dapat diakses dengan mudah dan cepat;
b) Belum adanya ekosistem inovasi;
c) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan kelitbangan daerah.

4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Berdasarkan data dan capaian kinerja kepegawaian, belum terdapat permasalahan dominan yang menghambat kinerja kepegawaian di Kabupaten Batang.

5. Sekretariat Daerah

Berdasarkan data capaian kinerja sekretariat daerah,maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
b) Masih adanya Perangkat Daerah yang belum berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan SAKIP;
c) Belum optimalnya penguatan komunikasi informasi kepada organisasi pemerintah daerah;
d) Belum optimalnya implementasi manajemen kinerja.

6. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam urusan sekretaria DPRD yaitu

a) Kurangnya pemahaman anggota dewan pentingnya program kerja dan rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan dewan sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sbg tolok ukur akuntabilitas kinerja dewan

7. Pengawasan

Berdasarkan data capaian kinerja Pengawasan,maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Rendahnya transisi digitalisasi data pengawasan di Kabupaten Batang;
b) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Batang;
c) Sinkronisasi perubahan rencana *Mandatory* pengawasan.

e. Unsur Kewilayahan

Berdasarkan data capaian kinerja kewilayahan, secara umum masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu jumlah usulan banyak yang belum terakomodir dengan baik hal ini dikarenakan usulan tidak termasuk dalam prioritas pembangunan daerah.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional serta isu strategis dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Batang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Rendahnya Kemandirian Keuangan**

   Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan daerah otonom sendiri harus mampu mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dengan adanya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah secara prinsip mampu mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan mengutamakan asas desentralisasi dimana Kabupaten/Kota bertindak sebagai penggerak sedangkan Pemerintah Provinsi sebagai koordinator.

   Namun pada pelaksanaannya, daerah belum mampu mengoptimalkan kemampuan fiskalnya sendiri. Ketergantungan kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini terlihat dari rasio PAD dalam APBD yang masih cukup rendah.

2. **Penyiapan Tenaga Kerja Lokal dalam menghadapi KITB**

   Daya saing semakin mencuat seiring berkembangnya inovasi dan kebijakan dalam pengelolaan daerah. Dalam memenuhi komponen daya saing setiap daerah perlu bersaing dan “berkompetisi” dengan daerah lain guna meningkatkan daya tawar daerah. Daya saing sendiri digambarkan sebagai produktivitas dan kemampuan daerah terhadap wilayah lainnya. Beberapa faktor utama daya saing terdiri dari infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), serta kelembagaan daerah dalam hal ini pemerintah yang bergerak sebagai fasilitator dan regulator dalam pelaksanaannya.

   Kondisi infrastruktur di Kabupaten Batang sudah mencakup diatas 75% dalam kondisi baik. Pembangunan manusia Kabupaten Batang yang direpresentasikan melalui indikator Indeks Pembangunsn Manusia (IPM) dengan tren yang selalu meningkat. Terlihat dari tahun 2018 IPM Kabupaten Batang capaiannya sebesar 67,86 dan terus meningkat sampai tahun 2022 mencapai sebesar 69,45.

   Kawasan Industri Terpadu Batang menjadi *Major Project* Nasional pengembangan kawasan strategis serta mendukung pencapaian

transformasi wilayah Jawa Bali yang tercantum RKP yang beroperasi di Kabupaten Batang akan berdampak bagi perekonomian daerah. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan dengan adanya KITB bagi daerah adalah penyiapan tenaga kerja lokal agar mampu dalam bersaing dan andil dalam kawasan industri tersebut. Tenaga kerja lokal diharapkan mampu bersaing dengan tenaga kerja luar daerah.

3. **Penanggulangan kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung meningkat pada kisaran 4,9 – 5,97 persen. Namun kenaikan ini tidak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan daerah yang hanya menurun dari 8,98% tahun 2022 menjadi 8,92% tahun 2023 atau sekitar 0,06%. Capaian tersebut menandakan masih adanya tugas berat bagi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan daerah.

4. ***Stunting***

Persoalan stunting masih menjadi dalam pembangunan daerah yang cukup krusial karena berpotensi mengganggu tingkat dan kualitas kesehatan bahkan hingga kematian pada anak. Penanganan rawan stunting diperlukan mulai dari anak remaja, calon pengantin, hingga ibu hamil guna menurunan prevalensi stunting di Indonesia hingga daerah. Intervensi stunting perlu dilakukan dalam mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada ibu hamil dan anak. Percepatan penurunan stunting dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan kementrian/lembaga pemerintah pusat.

5. **Permasalahan lingkungan dan penanganan kawasan kumuh**

Permasalahan lingkungan masih menjadi isu penting dalam setiap pembangunan daerah. Dalam pembangunan infrastruktur pasti akan bertolak belakang dengan dampak terhadap lingkungannya. Hingga saat ini Infrastruktur sangat berperan penting dalam menunjang pembangunan karena mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pembangunan kawasan industri pun tak lepas dari adanya potensi kawasan kumuh yang muncul disekitar kawasan penyangga industri serta dampak lingkungan yang dihasilkan dari adanya proyek KI hingga saat beroperasi. Menyeimbangkan antara menjaga lingkungan dengan

pembangunan wilayah masih menjadi isu penting dalam setiap pembangunan.

6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan masyarakat

Tata kelola pemerintahan yang perlu mendapat perhatian antara lain belum optimalnya pelayanan publik serta belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan adalah kemandirian fiskal daerah. Melalui optimalisasi teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penerapan prinsip reformasi birokrasi.

7. Pengembangan Sektor Pariwisata Daerah

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa terdapat empat aspek pengembangan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Upaya pengembangan pariwisata sendiri harus berdasar pada pendekatan perencanaan kolaboratif pemerintah, swasta dan *stakeholders* yang diharapkan mampu menyasar pada daya tarik industri pariwisata daerah. Dalam pengembangan destinasi wisata yang lebih menarik setidaknya mampu memenuhi komponen atraksi, Aksesibilitas, Amenitas (fasilitas pendukung), dan *Ancillary* (layanan tambahan).

Pada tahun 2022, besar kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat kecil yaitu 1,29%. Kabupaten Batang yang mencakup daerah pantai, dataran rendah, dan pegunungan membuka peluang luas untuk pengembangan berbagai jenis wisata. Keberagaman potensi pariwisata terlihat dari wisata alam yang meliputi pantai, perbukitan, dan pegunungan, serta wisata budaya yang kaya akan warisan lokal. Selain itu, keberadaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan potensi besar untuk pengembangan pariwisata.

Tantangan utama Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Batang adalah rendahnya aksesibilitas menuju objek wisata. Infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan rusak, penerangan yang kurang, dan akses jalan yang terlalu sempit pada beberapa lokasi wisata potensial, menjadi hambatan bagi kendaraan pariwisata berukuran besar. Masalah lain yang dihadapi adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pariwisata yang masih membutuhkan

pelatihan untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pengunjung. Selain itu, kurangnya konektivitas antar lokasi wisata juga menyebabkan keterbatasan pilihan bagi wisatawan, yang cenderung memilih destinasi yang lebih mudah dijangkau. Dari segi promosi, kurangnya kolaborasi multipihak menjadi kendala utama. Koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, masyarakat setempat, dan sektor swasta belum optimal, menghambat upaya promosi yang efektif. Eksplorasi dan inventarisasi destinasi wisata baru juga perlu dioptimalkan untuk memperluas penawaran wisata dan menciptakan pengalaman yang lebih beragam bagi wisatawan. Pentingnya peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung seperti akomodasi, restoran, tempat istirahat, dan fasilitas umum lainnya juga merupakan faktor penting. Pengembangan sektor pariwisata harus didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan selama berada di Kabupaten Batang.

8. Peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan

Daya saing menjadi keunggulan yang kompetitif suaru daerah untuk mendorong penciptaan nilai tambah daerah guna menghasilkan produktivitas daerah yang lebih lagi. Peningkatan daya saing daerah menjadi tantangan untuk menonjolkan karakteristik dan potensi daerah untuk mampu menjadi daya tarik investasi sesuai dengan prioritas daerah.

Sementara itu dalam menyinergikan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas lingkungan perlu mendorong peluang investasi baru yang berbasis lingkungan (*green investment)* serta mendukung penerapan ekonomi hijau (*green economy)* yang terbukti mampu menyumbang lebih banyak manfaat bagi daerah maupun negara. Paradigma Ekonomi hijau merupakan model pengembangan ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan dan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan daya saing daerah juga tidak terlepas dari komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Daya saing daerah harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam rangka pembangunan inklusif.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

a. Arah pembangunan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 Ekonomi Indonesia mulai tumbuh sebesar 3,69 persen (y-o-y), lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020. Hingga tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04 persen dari yang sebelumnya 5,31 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 9,83 persen. Namun capaian ini tidak memenuhi target tahun 2023, ebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 6,0-6,3 persen per tahun.

Peningkatan ekonomi ini juga terlihat dampaknya terhadap kondisi ketenagakerjaan dan tingkat kemiskinan. Pengangguran turun menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 dari yang sebelumnya 5,86 persen tahun 2022. Sementara pada tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,36 persen tahun 2023 dari yang sebelumnya 9,57 persen tahun 2022. Mempertimbangkan potensi keberlanjutan dari pembangunan ekonomi tersebut, sehingga tema Pembangunan RKP Tahun 2025 difokuskan pada **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**..

b. Arah Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 tumbuh sebesar 4,98 persen, menurun 0,33 poin dari tahun sebelumnya dengan kontribusi terbesar dari sektor Industri Pengolahan sebesar 34,02 persen yang kemudian disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 13,23 persen.

Peningkatan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,13 persen pada Tahun 2023 dari 5,57 persen pada Tahun 2022. Sementara, Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,93 persen di Tahun 2022, turun menjadi 10,77 persen di Tahun 2023. Sedangkan Inflasi di Jawa

Tengah pada bulan Desember 2023 sebesar 2,83 persen (y-o-y), menurun dibandingkan pada bulan Desember 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y). Mendasari kondisi tersebut, Pembangunan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada **Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter.** Dari tema tersebut pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada 4,80-5,60 persen, tingkat kemiskinan diproyeksikan 9,28-8,08 persen, sedangkan pada Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan pada kisaran 5,20-4,60 persen

c. Tantangan dan Arah Pembangunan Perekonomian Kabupaten Batang

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tumbuh hingga 5,53 persen di tahun 2023. Selama periode tahun 2019-2023 struktur perekonomian Kabupaten Batang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 34,56%; selanjutnya disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan menyumbang sebesar 19,03%; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,53% dari PDRB yang kemudian disusul sektor Konstruksi sebesar 7,75% dan yang terakhir dari sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,43%.

Struktur ekonomi Kabupaten Batang dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa komponen pengeluaran pada tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan terhadap kontribusi PDRB adalah konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 69,68 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 26,22 persen. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) yaitu 77,32 persen. Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventori.

Mengacu pada telaah kondisi perekonomian Kabupaten Batang, perekonomian Kabupaten Batang tahun 2020 sempat berkontraksi hingga 1,29 persen. Namun mulai menunjukkan pemulihan ekonomi pasca Covid 19 pada tahun 2021 menjadi 4,88 persen dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 5,53 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga memberikan *Multiplier effect* pada sektor lainnya seperti pada sektor tenaga kerja. Peningkatan ekonomi ini memberikan dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Batang. TPT Kabupaten Batang menurun menjadi 6,06 persen pada tahun 2023 dari 6,64 persen tahun 2022. Sementara itu, Kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2023 turun pada 8,92 persen dari

8,98 persen tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penguatan upaya dan strategi untuk menekan pengangguran di daerah. Selain itu dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan indentifikasi tandangan, peluang, dan arah kebijakan dalam mewujudkan proyeksi tersebut. Tantangan ekonomi di Kabupaten Batang diantaranya :

- Peningkatan investasi, yang didorong untuk selalu tumbuh. Penguatan kelembagaan hingga prosesdur investasi yang efisien akan mampu mendorong investor masuk untuk menanamkan modal di Kabupaten Batang;
- Kualitas Sumber Daya Manusia, secara kuantitas, penduduk Kabupaten Batang sudah cukup potensial untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Namun dalam sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Batang belum cukup unggul untuk bersaing dengan tenaga kerja global. Hal ini didasari oleh capaian rata-rata lama sekolah serta pendidikan penduduk terakhir ditamatkan yang masih didominasi pada tamatan SD-SMP.
- Ketersediaan Bahan Baku Industri, dengan adanya kawasan industri di Kabupaten Batang seharusnya daerah mampu dalam menyediakan/men-supply dalam jumlah yang banyak untuk menjamin kelangsungan produksi di kawasan industri.
- Kemandirian keuangan daerah yang masih cukup rendah
- Laju inflasi cenderung fluktuatif
- Potensi peningkatan ketimpangan daerah mengingat adanya pembangunan industri baru di Kabupaten Batang

Melihat adanya tantangan ekonomi di Kabupaten Batang, dalam sisi lain pasti terdapat peluang yang ada dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Batang, antara lain :

- Investasi yang akan terus tumbuh mengingat adanya kawasan industri di Kabupaten Batang yakni KIT dan BIP
- Kebijakan Pengembangan aglomerasi Petanglong
- Dukungan perkembangan teknologi informasi
- Potensi Pariwisata yang cukup banyak di Kabupaten Batang, dari adanya wisata gunung hingga pantai. Dampak pariwisata terhadap perekonomian mampu memberi efek penggandaan (*multiplier effect*).

- Penguatan industri dan potensi lokal, pengembangan industri lokal serta potensi lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri lokal Kabupaten Batang.
- Kemudahan dalam perijinan perusahaan serta kemudahan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
- Pemanfaatan CSR (*Corporate Social Responbility*) dalam mendukung prioritas Pembangunan daerah

Memperhatikan tantangan dan prospek ekonomi daerah serta dorongan untuk peningkatan perekonomian daerah pada kisaran 5-6 persen pada tahun 2025 dilakukan strategi sebagai berikut :

a) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif
b) pengembangan kawasan industri yang berkualitas serta sektor perdagangan dan jasa di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura)
c) Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas wisata
d) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian
e) Menjaga stabilitasasi harga barang kebutuhan masyarakat
f) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah
g) Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata “on hand” dengan mengoptimalkan teknologi informasi
h) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif
i) pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

Dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2022, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2025 diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang guna mendukung

kebijakan Kabupaten Batang tahun 2025 yang difokuskan melalui Tema pembangunan "**Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sektor pariwisat**a" dengan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2025 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2025

NO	Indikator	Target Rancangan Awal RKPD 2025	Target Rancangan Akhir RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,10-5,30	5,50-6,10
2.	Inflasi (persen)	2,3-3,3	2,3-3,3
3.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	22,9	22,9
4.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	2,5	2,5
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	5,27	5,80-5,27
6.	Kemiskinan (persen)	8,27	8,34-8,27

Sumber: Bapelitbang Kab. Batang, 2023

Perubahan target Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir RKPD 2025 bersumber dari hasil Rakortek Kab/Kota dengan Provinsi Jawa Tengah terutama pada 4 indikator makro.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum kinerja pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Batang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran.

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggung-jawaban.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai

untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2025 didasarkan atas penghitungan pertumbuhan PDRB dan potensi daerah yang dapat dikembangkan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

a) Proyeksi pajak daerah Tahun 2025, didasarkan atas *baseline* tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan mempertimbangkan potensi Pajak dan retribusi di daerah. Variabel PDRB penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDRB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Pajak Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 sebesar Rp. 230.125.000.000

b) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, proyeksi Pertumbuhan Retribusi Daerah pada tahun 2025 diharapkan dapat tumbuh secara signifikan menjadi sebesar Rp 154.733.598.738.

c) Proyeksi Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari BUMD yang ada di Kabupaten Batang, yaitu dari Perumda Aneka Usaha, Bapera dan PDAM Sendang Kamulyan. Proyeksi ini didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi cukup sigifikan. Sehingga pada tahun 2025 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 16.783.126.320.

d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2021-2023. Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan RSUD Pemerintah Kabupaten Batang dan Puskesmas, namun demikian sesuai regulasi pendapatan ini selanjutnya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD menuju pada kemandirian BLUD. Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2025

diproyeksikan menurun menjadi sebesar Rp. 6.117.457.000

2) Pendapatan Transfer

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data alokasi dana TKDD Tahun Anggaran 2024. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan tahun 2021-2023 :

Tabel 3. 2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
tahun 2021-2023

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	*2*	*3*	***4***	***5***
1	**PENDAPATAN**			
01.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**322.789.372.917,64**	**300.965.726.271,01**	**321.466.260.393,67**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	108.435.863.155,00	129.078.191.268,00	146.747.962.513,00
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	16.163.677.602,00	22.354.240.158,00	25.641.103.116,00
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	12.766.436.070,00	13.058.044.717,00	14.301.507.571,00
01.01.04	Lain-lain PAD	185.423.396.090,64	136.475.250.128,01	134.775.687.193,67
1,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.419.276.630.191,00**	**1.448.970.833.931,00**	**1.087.672.177.775,00**
01.02.01	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**1.068.002.486.995,00**	**1.096.299.986.931,00**	**35.711.305.386,00**

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	*2*	*3*	***4***	***5***
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	62.161.899.343,00	41.909.578.554,00	2.211.659.900,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.558.815.529,00	4.189.088.638,00	776.340.840.173,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	737.685.667.000,00	734.763.251.000,00	273.408.372.316,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	264.596.105.123,00	315.438.068.739,00	203.999.796.000,00
01.02.02	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**221.954.156.235,00**	**208.032.695.000,00**	**1.087.672.177.775,00**
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah (DID)	26.237.653.000,00	7.839.277.000,00	
1.2.2.4	Pendapatan Dana Desa	195.716.503.235,00	200.193.418.000,00	203.999.796.000,00
01.02.03	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**129.319.986.961,00**	**144.638.152.000,00**	**158.774.768.958,00**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	120.623.411.961,00	133.251.678.000,00	139.035.697.158,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	8.696.575.000,00	11.386.474.000,00	19.739.071.800,00
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**79.756.577.886,00**	**1.020.475.000,00**	**26.456.327,00**
01.03.01	Pendapatan Hibah	2.937.773.000,00	1.002.000.000,00	26.456.327,00
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
01.03.03	Pendapatan Lainnya	76.818.804.886,00	18.475.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	**1.821.822.580.994,64**	**1.750.957.035.202,01**	**1.771.939.459.453,67**

Sumber : BPKPAD Kab Batang, 2024

Tabel 3. 3
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Batang Tahun 2024-2025

Uraian	TAHUN	
	2024	2025
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**310.651.090.238**	**407.759.182.058**
Pajak Daerah	136.775.000.000	230.125.000.000
Retribusi Daerah	21.200.663.500	154.733.598.738
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.783.027.000	16.783.126.320
Lain-lain PAD yang Sah	136.892.399.738	6.117.457.000
PENDAPATAN TRANSFER	**1.473.630.735.600**	**1.566.288.258.378**

Uraian	TAHUN	
	2024	2025
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.326.386.644.000	1.474.851.006.578
Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.244.091.600	91.437.251.800
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	**480.000.000**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	480.000.000
Jumlah Pendapatan	**1.784.281.825.838**	**1.974.527.440.436**

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2024

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2025, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- Sosialisasi Pajak daerah dan retribusi daerah baik secara langsung maupun melalui sosial media dan Pelaksanaan kegiatan BPKPAD Hadir/ BPKPAD Rawuh (Beha/ BRa) di dusun-dusun atau desa-desa, di tenpat-tempat keramaian, maupun di festival/ pameran-pameran baik yang diselenggarakan desa, kecamatan, pemerintah Kabupaten, pemrov maupun pemerintah;
- Optimalisasi peran Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan serta BUMDes dalam pemungutan PBB P2;
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUD), Corporate Social Responsibility (CSR), jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;

- Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan;
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, perangkat daerah penghasil, Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan serta instansi vertikal;
- Meningkatkan sinergi pajak daerah sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak MBLB dengan melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi;
- Pemutakhiran data pajak daerah melalui bulan pendataan maupun kegiatan sensus pajak daerah bersama **"Sedulur Pajak"**;
- Optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah dan Pajak MBLB;
- Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain;
- Pemberian *reward* kepada Masyarakat melalui kegiatan Gebyar Sadar Pajak;
- Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah.

B. Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Struktur belanja daerah tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi dengan rincian :

1. Belanja Pegawai

   Guna memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk di dalamnya adalah proyeksi kenaikan jumlah ASN di Kabupaten Batang, maka belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama dalam penambahan dan pemenuhan gaji ASN baru. Belanja pegawai tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 905.659.544.885.

2. Belanja Barang Jasa

   Belanja Barang Jasa diasumsikan menjadi Rp 504.167.409.085. Belanja ini dianggarkan untuk barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3. Belanja Hibah

   Pada pos belanja ini terjadi perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2025 belanja hibah di proyeksikan sebesar Rp. 79.974.221.980.

4. Belanja Bantuan Sosial

   Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin. Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 69.005.437.553.

b. Belanja Modal

Belanja modal diproyeksikan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 170.283.413.975. Belanja modal ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga tahun 2025 sebesar Rp. 12.000.000.000.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer pada tahun 2025 diproyeksikan menjadi sebesar Rp 363.567.346.938.

Tabel 3. 4
Realisasi Belanja Tahun 2021-2023

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	*2*	*3*	***4***	***5***
2	**BELANJA**			
02.01	**BELANJA OPERASI**	**1.241.149.542.241,00**	**1.267.645.675.943,00**	**1.275.215.875.162,00**
02.01.01	Belanja Pegawai	736.685.014.763,00	728.689.787.535,00	725.416.481.530,00
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	409.192.008.978,00	440.412.460.908,00	432.408.106.632,00
02.01.03	Belanja Bunga			
02.01.04	Belanja Subsidi			
02.01.05	Belanja Hibah	78.252.243.500,00	85.009.607.500,00	104.550.637.000,00
02.01.06	Bantuan Sosial	17.020.275.000,00	13.533.820.000,00	12.840.650.000,00

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	*2*	*3*	***4***	***5***
02.01.07	Bantuan Keuangan			
02.02	**BELANJA MODAL**	**196.084.228.826,00**	**183.195.271.255,00**	**132.841.186.498,00**
02.02.01	Belanja Tanah		49.000.000,00	313.120.881,00
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	53.059.021.980,00	33.491.783.408,00	42.983.955.938,00
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	75.262.560.658,00	58.779.585.910,00	42.258.635.988,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.573.496.821,00	89.951.704.275,00	36.048.267.476,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.189.149.367,00	923.197.662,00	11.237.206.215,00
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**3.103.136.850,00**	**4.170.055.600,00**	**3.514.581.828,00**
2,4	**BELANJA TRANSFER**	**340.088.223.959,00**	**346.902.433.685,00**	**348.623.904.431,00**
	Belanja Bagi Hasil	**9.923.621.000,00**	**9.576.624.904,00**	**10.251.862.223,00**
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	9.923.621.000,00	9.576.624.904,00	10.251.862.223,00
	Belanja Bantuan Keuangan	**330.164.602.959,00**	**337.325.808.781,00**	**338.372.042.208,00**
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	330.164.602.959,00	337.325.808.781,00	338.372.042.208,00
	Jumlah Belanja	**1.780.425.131.876,00**	**1.801.913.436.483,00**	**1.760.195.547.919,00**
	Surplus/Defisit	**-41.397.449.118,64**	**- 50.956.401.280,99**	**11.743.911.534,67**

Sumber : BPKPAD, 2024

Tabel 3. 5
Proyeksi Belanja Tahun 2024-2025

Uraian	TAHUN	
	2024	2025
BELANJA		
BELANJA OPERASI	**1.671.308.237.949**	**1.488.676.679.523**
Belanja Pegawai	751.412.698.636	905.659.544.885
Belanja Barang dan Jasa	820.162.057.760	504.167.409.085
Belanja Hibah	88.767.831.553	69.005.437.553
Belanja Bantuan Sosial	10.965.650.000	9.844.288.000
BELANJA MODAL	**114.973.134.208**	**170.283.413.975**

Uraian	TAHUN	
	2024	2025
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000	100.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.054.812.425	31.119.970.223
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.901.229.858	64.572.307.077
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.279.067.696	72.907.212.675
Belanja Modal Aset Lainnya	588.024.229	1.233.924.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**10.000.000.000**	**12.000.000.000**
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	12.000.000.000
BELANJA TRANSFER	**42.082.654.076**	**363.567.346.938**
Belanja Bagi Hasil	13.959.954.076	19.743.886.738
Belanja Bantuan Keuangan	28.122.700.000	343.823.460.200
JUMLAH BELANJA	**1.838.364.026.233**	**2.034.527.440.436**
Total Surplus/(Defisit)		**(60.000.000.000)**

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2023 diolah

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 diarahkan pada :

- Peningkatan layanan pendidikan dan kesehtan;
- Pengembangan kawasan pariwisata;
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- Percepatan penurunan stunting;
- Penanggulangan kemiskinan;
- Pembangunan infrastruktur persampahan, jalan jembatan, dan irigasi;
- Peningkatan produktivitas pertanian dan pencegahan pemborosan pangan;
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengendalian Inflasi;
- Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan
- Pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan mandatory untuk belanja

infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;

- Mengakomodir masukan usulan pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui, bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Batang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Pada tabel berikut dicantumkan hasil realisasi pembiayaan tahun 2021-2023 dan proyeksi dan Belanja Kabupaten Batang tahun 2024-2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN		
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	*2*	*3*	*4*	***5***
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6,1	**PENERIMAAN**			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**179.664.217.216,13**	**215.751.265.851,77**	**144.458.319.116,78**
6,2	**PENGELUARAN**			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**13.668.882.296,00**	**20.342.000.000,00**	**7.700.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**165.995.334.920,13**	**195.409.265.851,77**	**7.700.000.000,00**
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	**203.262.054.761,77**	**144.452.864.570,78**	**148.502.230.651,45**

Sumber : BPKPAD, 2024

Tabel 3. 7
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2025

Uraian	TAHUN	
	2024	2025
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.582.200.395	70.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**61.582.200.395**	**70.000.000.000**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000	10.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**7.500.000.000**	**10.000.000.000**
Pembiayaan Netto	**54.082.200.395**	**60.000.000.000**

Sumber : RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan mempedomani amanat pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 secara khusus amanat pembangunan Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan sinergitas dan amanat pembangunan khususnya dalam amanat RKP Tahun 2025, serta amanat pembangunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Visi Misi RPJPD 2005-2025

Visi Kabupaten Batang yang dicanangkan dalam rangka memotivasi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah selama tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut

"Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan".

Penjelasan makna visi diatas perlu diberikan untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan (stakeholders) secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Batang diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Sejahtera diartikan aman, sentosa dan makmur. Masyarakat Batang yang sejahtera identik dengan masyrakat yang dapat menikmati ketenangan dalam berperikehidupan, dapat menunaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dan dapat meninikmati hasilnya dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Maju diartikan bergerak/berjalan kedepan, tampil kemuka, meningkat, menjadi lebih baik dari sebelumnya, bergerak menuju peradaban yang tinggi. Batang yang maju menunjukkan progress mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh tingkat intelektualitas/rasionalitas

yang semakin baik, termasuk semakin banyak menerapkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berusaha, dan berpemerintahan.

Mantap diartikan teguh, tidak berubah, tidak goyah, stabil, tidak ada gangguan, teguh hati, kukuh, kuat. Batang yang mantap diharapkan mampu untuk teguh pada nilai dan prinsip berbasis pada moral, etika, dan religi; sehingga akan dapat membantu dalam menciptakan kondisi lokal yang stabil dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Mandiri diartikan dalam keadaan berdiri sendiri, dapat mengurus atau mengatasi kepentingannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Batang yang mandiri tidak diartikan sebagai menutup diri, melainkan ditekankan pada masyarakat yang mampu mengoptimalkan berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk kemajuan daerah, mampu menjadi pusat pertumbuhan baru tanpa mengabaikan pentingnya aspek networking.

Berbasis potensi unggulan diartikan sebagai berdasarkan pada karakteristik lokal (kekuatan) yang lebih tinggi, lebih utama, lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain sehingga lebih besar peluang keberhasilannya. Batang yang berbasis potensi unggulan menunjukkan suatu daerah beserta masyarakatnya yang membangun berdasarkan pada kekuatan lokal sebagai modal dasar, kekuatan lokal Batang antara lain terletak pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Dalam rangka mengemban pencapaian visi oleh segenap stakeholders, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif,
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada perikanan dan kelautan, pertanian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi,
3. Pengembangan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, berbasis pada profesionalisme, kapasitas, kapabilitas, dan jejaring,
4. Peningkatan prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang pengembangan kawasan berbasis pada kemampuan dan potensi lokal,
5. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang sejahtera, tenteram, tertib, aman, demokratis, dan kondusif,

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan.

Arah, Tahapan dan Prioritas Pelaksanaan RPJMD IV (2022-2026)

Pelaksanaan RPJMD IV (2022-2026) akan diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan melalui pemantapan pembangunan di berbagai bidang yang ditekankan pada primanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, majunya sumber daya manusia dan perekonomian daerah, berkurangnya kesenjangan, didukung dengan mantapnya situasi politik, keamanan dan ketertiban serta lingkungan hidup.

1) Pada misi pertama,

   Diharapkan terjadi kondisi mantapnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang dalam perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang semakin dinamis dan harmonis.

2) Pada misi kedua,

   Diharapkan terjadi kondisi perekonomian Kabupaten Batang yang mantap dan tumbuh secara positif, mantapnya kontribusi dan daya saing sektor unggulan daerah (perikanan dan kelautan, pertanian, dan pariwisata), mantapnya kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, mantapnya kerjasama dan investasi bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis.

3) Pada misi ketiga,

   Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan semakin mantap, makin mantapnya kinerja kelembagaan pemerintah, makin mantapnya profesionalisme aparatur daerah, makin mantapnya kemampuan keuangan daerah, makin majunya kerjasama bagi kemajuan daerah, dan makin mantapnya kualitas pelayanan publik.

4) Pada misi keempat,

   Diharapkan terjadi kondisi mantapnya kualitas dan kuantitas serta pemerataan prasarana dan sarana pemerintah yang ditujukan bagi kepentingan peningkatan kualitas pelayanan publik, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akibat dukungan prasarana dan sarana yang memadai, dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi yang mendukung kemajuan daerah.

5) Pada misi kelima,

Diharapkan terjadi kondisi sosial dan budaya masyarakat dengan kesejahteraan yang mantap, terciptanya iklim demokrasi yang mantap didukung dengan konsisten kebijakan reformasi, makin matang dan mantapnya kepemimpinan lokal, makin mantapnya supremasi hukum dan kesadaran hukum masyarakat, dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

6) Pada misi keenam

Diharapkan terjadi kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari sehingga menurunkan jumlah kejadian bencana alam, dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

Namun sesuai kondisi peraturan perundang-undangan yang berkembang, telah diamanatkan kepada daerah untuk melakukan penyusunan RPJPD Periode selanjutnya dengan rentang tahun 2025-2045 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Hal ini guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak nasional Tahun 2024.

4.1 Masa Transisi Penyusunan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045

Berdasarkan Instruksi Dalam Negero Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk segera membahas RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten/Kota serta menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 paling lambat minggu keempat Bulan Agustus Tahun 2024. Mendasari hal tersebut makan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 menetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang 2025-2045 sebagai berikut:

"KABUPATEN BATANG YANG BERSATU, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN"

Dari rumusan visi tersebut selanjutnya dijelaskan pengertian frasa pokok pokok visi Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Batang

Sumber : RPJPD Kabupaten Batang 2025-2045, 2024

Bersatu diartikan dengan terciptanya karakter yang guyub dan rukun, terjaganya kondusivitas wilayah, tidak terpecah dan tercerai berai serta mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kondisi ini didasarkan pada permasalahan terkait dengan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dioptimalkan, peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh aktor/stakeholders pembangunan di Kabupaten Batang.

Mandiri diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu mencukupi dan memprioritaskan kebutuhan daerah serta mampu memberikan kontribusi kepada pihak lain. Kondisi ini didasarkan pada permasalahan terkait dengan daya saing daerah yang belum optimal, perwujudan kemandirian berbagai sektor utamanya sektor unggulan sesuai potensi daerah.

Berdaya Saing diorientasikan sebagai daerah Maju dimana daerah mampu tumbuh dan berkembang dengan unggul dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan akselerasi pembangunan Infrastruktur yang harapannya disertai dengan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan dengan tetap menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta ketahanan terhadap resiko bencana secara berkesinambungan. Hal ini disertai

dengan kinerja birokasi yang adaptif dan inovatif dalam mengakselerasi kinerja pembangunan di Kabupaten Batang.

Tabel 4. 1 Sasaran Visi pada Periode 2025-2029

Visi Batang	Sasaran Visi Batang	Indikator	Satuan	Baseline (2025) *)	Target Periodesasi *)
					2025-2029
Kabupaten Batang yang Bersatu, Mandiri, Berdaya Saing dan Membangun yang berkelanjutan	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita	Jt/Rp	36,45-36,70	36,71-76,68
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50-6,10	5,3-5,8
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	35,55	36,66
	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	%	8,27-8,34	6,47
	Birokrasi yang Adaptif dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	67,09	70,5
		Kapabilitas Inovasi	Angka	1,85	1,85-2,25
		Indeks Rasa Aman	Indeks	89,9	89,6-89,9
	Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,75	73,2
	Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	70,66	70,84

Sumber : RPJPD Kabupaten Batang, 2025-2045

Sementara itu dalam rangka mencapai Visi tersebut, ditetapkan 6 Misi guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Batang Yang Berkualitas
2. Akselerasi Ekonomi
3. Pembangunan Wilayah yang adil, merata, berkualitas, dan ramah lingkungan
4. Pemerintahan Yang Dinamis
5. Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah
6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Sebagaimana keterkaitan misi dan arah pembangunan Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Periode pertama pada pembangunan jangka panjang diarahkan pada **Penguatan Modal Dasar Pembangunan Daerah.** Pada periode ini dilakukan dengan penguatan fondasi transformasi pembangunan ekonomi dan sosial yang didukung dengan peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur

yang berkualitas. Kebijakan ini perlu didukung melalui dukungan pembiayaan pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif berbasis pelayanan pada masyarakat dan pembangunan wilayah yang adil merata serta mampu memberikan rasa nyaman aman bagi masyarakat Batang.

Pada periode pertama, Misi **Sumber Daya Manusia Batang yang berkualitas** diarahkan pada Pemerataan akses layanan pendidikan dan kualitas pendidik, peningkatan layanan kesehatan masyarakat di tingkat primer, pemerataan akses dan jaminan kesehatan, penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan sosial secara menyeluruh, peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar, serta peningkatan partisipasi pemuda dan anak dalam pembangunan.

Pada misi **Akselerasi Ekonomi** diarahkan pada Penguatan produksi pada sektor unggulan di Kabupaten Batang yang didukung pada peningkatan infrastruktur dan kelembagaannya, Pengembangan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, serta Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah.

Pada Misi **Pembangunan Wilayah yang adil, merata, berkualitas, dan ramah lingkungan** diarahkan pada penguatan penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapannya, penanganan kawasan kumuh, serta Penguatan kolaborasi kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pada Misi **Pemerintahan yang Dinamis** diarahkan pada Penguatan implementasi tata kelola pemerintahan dalam pemenuhan pelayanan publik, penerapan manajemen risiko pada setiap proses bisnis pemerintahan, peningkatan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, Penguatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan, serta peningkatan kualitas dan integritas penyelenggara pemerintahan desa.

Pada Misi **Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah** diarahkan pada penguatan ketentraman dan ketertiban umum dalam menciptakan rasa aman nyaman bagi masyarakat, penguatan nilai nilai demokrasi Pancasila dalam masyarakat, penguatan stabilitas daerah berupa terkendalinya inflasi dan stabilitas harga dalam menjaga daya beli masyarakat.

Pada Misi **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** diarahkan pada penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan kebudayaan, penguatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak, penguatan cadangan pangan, pengendalian dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan pengelolaan dan cakupan pelayanan

persampahan, Penguatan resiliensi dampak perubahan iklim, serta penguatan kemampuan daerah yang tangguh dalam mitigasi bencana.

Selanjutnya berikut tersaji tabel keterkaitan visi misi, sasaran pokok, dan indikator beserta target pada periode pertama 2025-2029 RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 :

Tabel 4. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan beserta target periode pertama dalam RPJPD Kab. Batang tahun 2025-2045

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	*Baseline 2025*	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6		7
Kabupaten Batang yang Bersatu, Mandiri, Berdaya Saing dan Membangun yang berkelanjutan	1. Sumber Daya Manusia Batang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Batang secara holistik	Akses dan Kualitas Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,14	75,31
				Jumlah Kasus Kematian Ibu	kasus	13	13
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,38	8,84
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	92,5
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	91,25
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,84	98
			Pendidikan Berkualitas Yang Merata	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	0	0	0
				a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	64,04	86,65
				b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	62,26	86,45
				c) Numerasi SD/Sederajat	%	51,06	70,1
				d) Numerasi SMP/Sederajat	%	36,83	63,25
				Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,66	8,2925
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17	13,04
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	%	4,62	5,59

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	*Baseline 2025*	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6		7
				yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi			
				Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	96,99	100
				Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,11	19
			Pemerataan Kesempatan dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,8-5,27	5,27-4,55
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,94	67,92
		Terwujudnya Perlindungan Sosial yang menyeluruh	Akselerasi pemenuhan Perlindungan Sosial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	34	36
	2. Akselerasi ekonomi	Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Peningkatan Sektor Unggulan Daerah yang berdaya saing	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	35,55	36,66
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,21	4,79
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	75	100
			Pemerataan Pembangunan ekonomi masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,77-20,97	21,75
			Peningkatan iklim investasi dan produktivitas ekonomi daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,97	4,14
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	6,22	7,13
				Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,69	3,6
				Disparitas Harga	%	±10	±10
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,08	28,25
	3. Pembangunan Wilayah yang adil, merata, berkualitas, dan ramah lingkungan	Terwujudnya pemerataan kualitas pelayanan infrastruktur	Pemerataan akses dan infrastruktur perekonomian	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83	86
				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	22,45	25,45
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	57,5	59
				Persentase Rumah Tangga	%	60	70

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	*Baseline 2025*	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6		7
				dengan Akses Internet			
			Pemenuhan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,84	10,34
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	54,9	58,5
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	32,48	41,3
	4. Pemerintahan yang dinamis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, tanggap dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat *(agile governance*)	Pelayanan Publik yang berkualitas dan berintegritas	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,51	83
				Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,15	4,37
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,53	3,7
		Terwujudnya pemerintahan desa yang Berdaya saing	Pembangunan dari Desa	Persentase Desa Mandiri	%	3,97	31
	5. Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah	Terciptanya lingkungan yang stabil, aman dan kondusif	Stabilitas ekonomi daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	0,74-0,75
				Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,93	1,1
				Total Kredit pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,6	0,64
			Penguatan keamanan, ketertiban, dan demokrasi	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	n/a	0
				Indeks Reformasi Hukum	Angka	58,7	71,2
	6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Terciptanya masyarakat yang berkarakter dan berbudaya	Peningkatan wawasan dan karakakter budaya masyarakat	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	19,28	23,19
				Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	15034	15395
				Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,1	26,33
				Persentase satuan pendidikan yang	%	100	100

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	*Baseline 2025*	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6		7
				mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan			
			Peningkatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender secara inkusif	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,38 - 0,37	0,38-0,42
				Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,16-65,77	69,68
		Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan	Keutamaan Lingkungan Berkelanjutan dalam Pembangunan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	1572902,67	707822
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	5	20
		Terciptanya kemampuan daerah yang tangguh dalam mitigasi bencana	Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	148,98 - 147,58	145,6-138,9
			Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	83,6	84,51
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8,81	6,64

Sumber : RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045

4.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Batang 2023-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Batang tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 tahap ke empat dan isu strategis aktual. Selanjutnya, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023-2026. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren capaian 5 tahun terakhir dengan diasumsikan kondisi perekonomian telah mulai pulih, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 diuraikan sebegai berikut :

I. **Tujuan I** : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang

seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Melalui tujuan pertama ini, Pemerintah Kabupaten Batang, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup dan kehidupan sekurangnya dari aspek: a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sektor unggulan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran Batang, dan menurunkan kesenjangan antar kelompok pengeluaran. d. Peningkatan harmoni kehidupan, kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan didukung oleh penyediaan dan pemerataan infrastruktur.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator PDRB per Kapita (ADHK) dan Indeks Daya Saing Daerah, serta dijabarkan dalam sasaran :

a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
b. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, dengan indikator sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengeluaran Perkapita.
c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan penganggura, dengan indikator sasaran Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia), Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran terbuka.
d. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi, dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur.
e. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

II. **Tujuan II** : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi serta mendorong reformasi birokrasi pada semua level pemerintahan yang semakin berpihak kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapai masyarakat secara dinamis, serta meningkatnya transparasi dan akuntabilitas.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance,* dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

III. **Tujuan III** : Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.

Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan (*resilience*) serta untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, yang dilator belakangi dalam periode 4 (empat) tahun terakhir ini Kabupaten Batang termasuk daerah dengan resiko bencana tinggi. Tujuan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Batang yang aman dan nyaman, kerukunan antar umat beragama, tanpa ada konflik sosial maupun agama bahkan konflik SARA, serta terciptanya kohesi sosial masyarakat yang baik.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini, diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI) dan Indeks Rasa Aman, dengan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah.
b. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dengan indikator sasaran Indeks Demokrasi.
c. Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang, dengan indikator sasaran Angka kriminalitas.

Perwujudan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten telah ditentukan target dalam empat tahun kedepan. Sebagai landasan

implementasi RKPD tahun 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang akan diwujudkan tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan		PDRB per Kapita (ADHK)	juta Rp	22,9	PDRB th n / jumlah penduduk th n
			Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,5413	Nilai IDSD
		1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	70,75	rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	92,25	Rasio IPM perempuan dengan laki-laki
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	63,96	peran serta wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik dilihat dari 3 komponen, keterwakilan di parlemen; pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan
		2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,50-6,10	{(PDRB th n – PDRB th (n-1)) : PDRB th (n-1)} *100
			Tingkat Pengeluaran Per Kapita	(Rp.000/tahun)	9,896	(Pengeluaran dikurangi Pengeluaran minimal) dibagi (pengeluaran maksimal dikurangi pengeluaran minimal)
		3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	persen	21,7	Persentase pendapatan penduduk 40% terendah terhadap total pendapatan
			Persentase Penduduk Miskin	persen	8,34-8,27	Jumlah penduduk miskin di Kab. Batang dibagi jumlah penduduk Kab. Batang
			Tingkat Pengangguran terbuka	persen	5,80-5,27	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	Formulasi Perhitungan
		4. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi	Indeks Infrastruktur	indeks	200	Indeks infrastruktur dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses tehadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah **Indeks Infrastruktur tingkat Kabupaten/Kota = 0,4122 *jalan + 0,4149*air + 0,4620*sanitasi + 0,4368 * pkpl + 0,5037*telp_int**
		5. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	70,66	IKLH Kabupaten = IKLH =(0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)
						IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IKA = indeks Kualitas air IKU = indeks Kualitas udara
						IKL = Indeks Kualitas Lahan
2	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	69,96	Capaian implementasi reformasi birokrasi yang meliputi 8 komponen :
						1. Manajemen Perubahan; 2.Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3.Penataan dan Penguatan Organisasi; 4.Penataan Tatalaksana; 5.Penataan Sistem Manajemen SDM; 6. Penguatan Akuntabilitas; 7.Pengiatan Pengawasan; 8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	skor	71,25	(30% perencanaan kinerja + 25% pengukuran kinerja + 15% pelaporan kinerja + 10% evaluasi internal + 20% capaian kinerja)
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	indeks	Level 3	Penilaian secara kualitatif melalui reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 8 komponen, 28 aspek

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	Formulasi Perhitungan
						dan 69 kriteria yang telah ditetapkan
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	80	Penilaian terhadap 6 dimensi yaitu: 1. Kesesuainan dokumen perencanaan dengan penganggaran; 2. Pengalokasian belanja APBD; 3.Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4.Penyerapan Anggaran; 5. Kondisi Keuangan Daerah; 6. Opini BPK atas LKPD
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance*	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,6	Kualitatif, melalui survey kepada masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
3	Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	150	Perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability, kapasitas (capacity)
			Indeks Rasa Aman	indeks	4,4	Survei/kuisioner kepada masyarakat
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,83	Kuantitatif & Kualitatif, melalui kuisioner terhadap 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah
		Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Indeks Demokrasi	indeks	74	Kualitatif, melalui kuisioner
		Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang	Angka kriminalitas	persen	0,014	Jumlah kasus kriminalitas dibagi jumlah penduduk

Sumber : RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.3.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 178 yang menyatakan bahwa pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prinsip pembangunan serta ketersediaan kapastitas riil anggaran. Dalam memberikan usulan pokir, anggota dewan menangkap aspirasi dari masyarakat melalui beberapa kegiatan yang menjadi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Batang. Adapun garis besar pokok pikiran DPRD Kabupaten Batang tahun 2025 yang dikelompokkan menjadi beberapa sub unsur yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Pokok- Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

No	Saran dan Pendapat Berupa Pokok Pikiran DPRD	Keterangan
1	Urusan Pendidikan	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
	– Pembangunan dan perbaikan Kelas dan Laboratorium yang Memadai: Pembangunan dan perbaikan Perpustakaan yang Baik: – Pembangunan fasilitas olahraga di sekolah seperti lapangan dan fasilitasnya. – Penyediaan akses internet yang cepat dan stabil, serta menyediakan komputer atau perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran digital. – Instalasi CCTV untuk peningkatan penjagaan, dan pengembangan prosedur keamanan. – Pembangunan dan Perbaikan Toilet dan Fasilitas Kesehatan	
2	Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat :	Meningkatakan Indeks Rasa Aman
	– Pelatihan membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian. – Peningkatkan pemahaman kelompok masyarakat terhadap sejarah dan nilai-nilai nasionalisme. – Peningkatan partisipasi kelompok pemuda dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan nasionalisme	
3	Urusan Kelautan dan perikanan.	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi - Menurunkan Persentase Penduduk Miskin
	– Pembangunan kandang atau kandang yang memada – Bantuan pakan yang seimbang dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan nutrisi hewan. – Bantuan sistem pengelolaan limbah yang baik untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan.	
4	Urusan Tenaga Kerja	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
	– Penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tren industri.	

No	Saran dan Pendapat Berupa Pokok Pikiran DPRD	Keterangan
	– Pelatihan online, pelatihan in-house, dan pelatihan berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan. – Memberikan pelatihan untuk penggunaan teknologi baru yang relevan dengan pekerjaan masing-masing.	
5	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
	– Pengembangan Ruang Terbuka Publik untuk pengadaan lapangan olahraga baru. – Pengadaan alat-alat/perlengakapn olahraga: – Penyediaan papan skor digital – Perluasan fasilitas olahraga yang sudah ada agar dapat menampung lebih banyak peserta. – Perawatan dan pemeliharaan rutin untuk memastikan fasilitas tetap dalam kondisi baik.	
6	Urusan Koperasi dan UKM	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi - Menurunkan Persentase Penduduk Miskin
	– Pemberian bantuan kepada UKM untuk menambah variasi produk atau layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. – Pengembangan/perluasan toko/tempat usaha untuk meningkatkan daya tarik visual dan kenyamanan pelanggan. – Pengadaan etalase untuk menempatkan produk-produk yang paling banyak dicari di tempat yang mudah dijangkau. – Pengadaan alat-alat produksi	
7	Urusan Pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan Indeks Infrastruktur
	– Pengembangan Infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, sanitasi, dan listrik. – Perbaikan jaringan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. – Pembangunan SPAM atau sumur bor atau sistem distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. – Penyediaan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan.	
8	Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman	

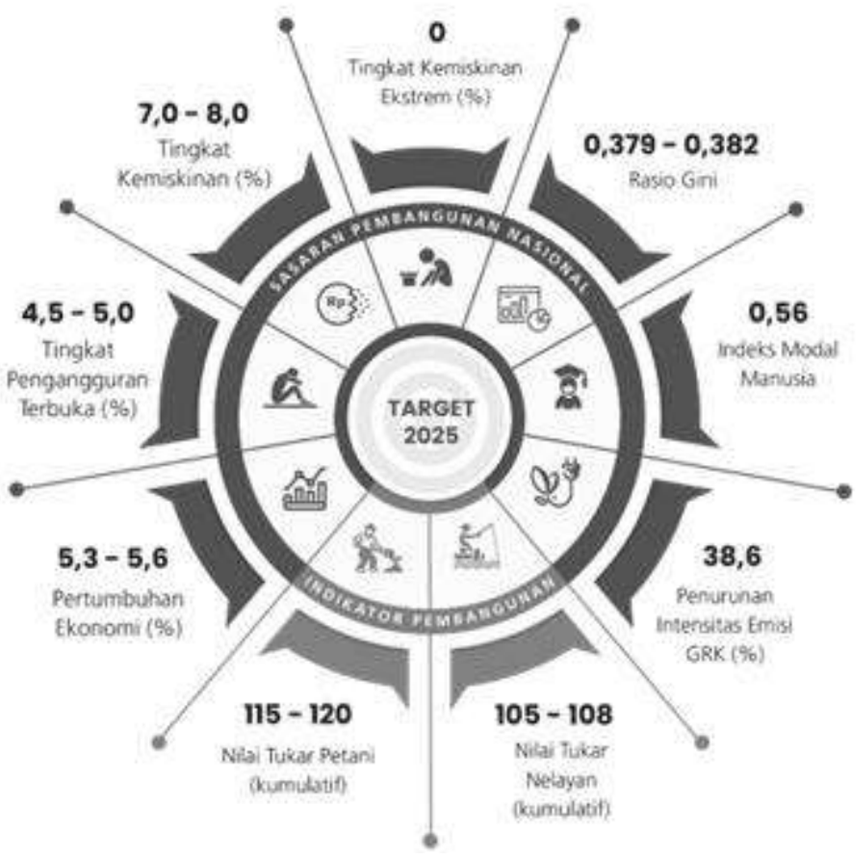
No	Saran dan Pendapat Berupa Pokok Pikiran DPRD	Keterangan
	Perbaikan standar kualitas untuk pembangunan perumahan untuk masyarakat tidak mampu.	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi - Menurunkan Persentase Penduduk Miskin
9	Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan Indeks Infrastruktur
	- Pengadaan CCTV dan jaringan internet desa - Pengadaan Aplikasi untuk masyarakat desa	
9	Urusan Sekretariat Daerah	Menurunkan angka kriminalitas
	– Perluasan atau renovasi fasilitas masjid/mushola untuk memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah. – Penegmbangan fasilitas keagamaan lainnya sehingga masjid/mushola mudah diakses oleh semua anggota masyarakat, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. – Pembangunan Infrastruktur pendukung, seperti parkir, fasilitas sanitasi, dan aksesibilitas transportasi. – Pembangunan fasilitas penunjang yang memadai, seperti ruang pertemuan, ruang kelas, toilet, ruang wudhu dan kanopi.	
10	Urusan Pertanian	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Menurunkan Persentase Penduduk Miskin
	– Peningkatan kemampuan akses kelompok tani ke sumber daya lahan, air, benih berkualitas, dan pupuk. – Penyediaan teknologi pertanian, seperti sistem irigasi modern dan peralatan pertanian yang efisien. – Peningkatan Infrastruktur pertanian seperti jalan, gudang penyimpanan, dan fasilitas pasca panen. – Peningkatan transportasi yang efisien untuk membantu distribusi hasil pertanian.	
11	Urusan Perhubungan	Meningkatkan Indeks Infrastruktur
	Pengadaan PJU pada jalan yang menjadi kewenangan kabupaten	

No	Saran dan Pendapat Berupa Pokok Pikiran DPRD	Keterangan
12	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Indeks Infrastruktur
	Perbaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten	

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

4.3.2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Sebagaimana Target dan sasaran pembangunan Tahun 2025 tersaji pada grambar berikut ini :



Gambar 4. 2 Target dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025
Sumber : RKP 2025



Gambar 4. 3 Prioritas Nasional Tahun 2025
Sumber : RKP 2025

Transisi estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Berikut 8 program hasil terbaik cepat dalam RKP Tahun 2025 :

1. Memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang

membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.

4.3.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merat;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.



Gambar 4. 4 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

4.3.4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025

Dengan menyongsong tema pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025 diarahkan pada **"Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sektor pariwisata"** dengan fokus sebagai berikut :

a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui :
   - Kolaborasi antara pihak pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar;
   - Membangun kolaborasi dalam peningkatan budaya literasi di masyarakat;
   - Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.

b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan :
   - Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
   - Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
   - Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.

c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk :
   - Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah;
   - Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis;
   - Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
   - Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
   - Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.

d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:
   - Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

- Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelataran Anak;
- Perwujudan Kabupaten Layak Anak.

e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui;
- Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test dan PCR;
- Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
- Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS.

f. Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi , melalui :
- Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
- Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas wisata;
- Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
- Menjaga stabilitasasi harga barang kebutuhan masyarakat;
- Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah;
- Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata "*on hand*" dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
- Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, melalui :
- Meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses permodalan bagi Wirausaha dan UMKM, fasilitasi bantuan

pemasaran produk UKM, dukungan sarana & asarana UMKM serta pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM;

- Peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk.

h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui :
   - Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan;
   - Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya disektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, job market serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa;
   - Mengembangkan kesempatan kerja terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu.

i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
   - Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
   - Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
   - Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;
   - Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;
   - Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan.

j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui :
   - Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektifitas antar wilayah;
   - Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu;
   - Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;
- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
- Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.

k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
- Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
- Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.

l. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan :
- Pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
- Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai *Research Based Policy*;
- Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.

m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan:
- Peningkatan upaya dukungan pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership), BUMN serta *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui :
- Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melaluai Krenova;
- Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;
- Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
- Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi;
- Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;
- Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.

o. Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

p. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:
   - Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
   - Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh2 agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik;
   - Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

1) Prioritas Pembangunan Daerah

Mendasari arah kebijakan 2025 yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 maka dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perwujudan kondusivitas wilayah

Kondusivitas wilayah menjadi salah satu prasyarat dalam perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyakarat. Penguatan kondusivitas wilayah difokuskan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, sinergi antar organisasi dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, serta pengamanan pada pelaksanaan pilkades

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan SDM saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing diarahkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Upaya ini

diharapkan mampu mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Batang.

3. **Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata**

   Pengembangan ekonomi lokal sangat diperlukan dalam upaya meningkatan perekonomian di daerah. Langkah ini tak lepas dari peran pemerintah daerah dan juga *stakeholder* yang terkait untuk merangsang aktivitas usaha dalam menciptakan lapangan kerja. Salah satu strategi dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu melalui sektor pariwisata. Pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata ini dilakukan sebagai upaya yang komprehensif guna meningkatkan taraf hidup lebih baik bagi masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam keberlangsungannya. Pengembangan ekonomi lokal melalui sektor industri pariwisata ini diharapkan mampu memantik sektor UMKM dan ekonomi kreatif untuk dapat tumbuh melihat adanya potensi alam, dan keunggulan daerah di setiap kawasan pariwisata. Sehingga dengan langkah ini diharapkan juga mampu meningkatkan perekonomian desa dan daerah melalui pengembangan pariwisata.

4. **Pemantapan kualitas infrastruktur dasar**

   Pelayanan infrastruktur yang berkualitas akan memudahkan pergerakan roda ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur dasar menjadi langkah utama mendukung pemerataan dan aksesibilitas wilayah. Dari tahun ke tahun, pembangunan infrastruktur dasar difokuskan pada pembangunan infrastruktur di wilayah strategis seperti jalan, jembatan, irigasi, dan bendungan; pengembangan aksesibilitas wilayah; Peningkatan Pengelolaan lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau; Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan kumuh; Peningkatan kualitas permukiman padat; serta Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis. Namun pada tahun 2025, dalam mendukung tema pembangunan pada sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur diprioritas mendukung kawasan pariwisata. Infrastruktur pada kawasan pariwisata harus diarahkan pada perbaikan jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, dan sanitasinya.

5. **Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**

   Peningkatan kualitas pelayanan publik akan berdampak positif bagi masyarakat dan pemerintah dan menjadi salah satu agenda utama dilaksanakannya reformasi birokrasi di Indonesia. Peningkatan kualitas

pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas dan efiensiensi penyelenggaraan pemerintah yang lebih cepat, tanggap dan responsif dalam mendukung ketercapaian *Agile Governance.* Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan, pengembangan dan peningkatan budaya inovasi di pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sumber daya aparatur, dan peningkatan kualitas data informasi pembangunan.

Tabel 4. 5 Integrasi Prioritas Pembangunan 2025 dalam menyelesaikan Isu Strategis Tahun 2025

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Tahun 2025
1. Peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan 2. Penyiapan Tenaga Kerja Lokal dalam menghadapi KITB 3. Penanggulangan Kemiskinan 4. *Stunting* 5. Pengembangan Sektor Pariwisata Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
		Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan
		Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi
		Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak,
		Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik
	Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata	Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi
		Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM
		Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi
	Pemantapan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
	Perwujudan kondusivitas wilayah	Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Tahun 2025
		Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah
Permasalahan lingkungan dan penanganan kawasan kumuh	Pemantapan kualitas infrastruktur dasar	Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan
1. Rendahnya Kemandirian Keuangan 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan
		Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan
		Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif
	Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata	Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi

Sumber : Analisa Penyusun, 2024

Tabel 4. 6 Program Prioritas Kabupaten Batang Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan										
		PDRB per Kapita (ADHK)					juta Rp	22,9		
		Indeks Daya Saing Daerah					indeks	3,541		
	1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas									
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				indeks	70,34		
			IPG				indeks	92,25		
			IDG				indeks	63,96		
				Program Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan				171.351.036.042	Disdikbud
						Angka Partisipasi Sekolah	%	100		
						Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	100		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	12,74	497.300.000	Dinkes
					Program Pembinaan Perpustakaan	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,16	778.349.079	Disperpuska

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	100	72.121.448.090	Dinkes
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	100	1.541.912.000	Dinkes
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD Batang)	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Batang)	%	100	5.000.000	RSUD Batang
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD Limpung)	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Limpung)	%	100	5.000.000	RSUD Limpung
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	84	639.604.000	Dinkes
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Limpung)	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	%	100	17.932.000.000	RSUD Limpung
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	95	1.150.000.000	Disdikbud
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	100	1.850.000.000	Disdikbud

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
					Program Pengendalian Penduduk	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	100	460.200.000	DP3Ap2KB
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	74,34	6.555.542.000	DP3Ap2KB
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,51		
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	74	1.214.745.851	Disnaker
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	39	1.340.000.000	Disparpora
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	capaian medali kejuaraan	medali	45	4.356.000.000	Disparpora
				Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	3,4	114.495.000	DP3AP2KB
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	cakupan data pilah gender dan anak	%	100	15.080.000	DP3AP2KB
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan	%	21,43	42.900.000	DP3AP2KB

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
						pembinaan dan penguatan kelembagaan				
					Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	10.000.000	DP3AP2KB
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	cakupan kecamatan layak anak	%	86,67	100.000.000	DP3AP2KB
					Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	52.525.000	DP3AP2KB
	2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah									
			Pertumbuhan Ekonomi				%	5,10-5,30		
			Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan				(Rp.000/tahun)	9.896		
				Program Pengembangan sektor Unggulan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Verifikasi Teknis	%	100	22.400.000	Disperindagkop
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	60	150.000.000	DPMPTSP
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	100	82.800.000	DPMPTSP

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan	%	100	516.293.009	DPMPTSP
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	8	407.747.000	DPMPTSP
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	0,79	5.263.000.000	Disperindagkop
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	86	25.000.000	Disperindagkop
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	36,36	3.003.522.036	Disperindagkop
					Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan	USD	60.215.421	25.505.000	Disperindagkop
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	75	95.000.000	Disperindagkop
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	19	1.587.792.000	Disparpora
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	40	50.000.000	Disparpora
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	0,0108	2.231.407.000	Dispaperta

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	100	7.252.631.800	Dispaperta
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	75	107.950.000	disperindagkop
					Prorgram Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	40.000.000	Dispaperta
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	89,7	1.156.940.000	Dispaperta
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	12,5	6.000.000	Dispaperta
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	30.000.000	Dislutkannak
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	100	27.000.000	Dislutkannak
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	100	800.771.800	Dislutkannak

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
					Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan wisatawan	%	22	250.000.000	Disparpora
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	%	97	1.559.010.000	Dislutkannak
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	%	94	290.000.000	Dislutkannak
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	98	240.000.000	Dislutkannak
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	100	4.506.190.400	Dinsos
				Program penguatan ekonomi kerakyatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	12	417.879.050	Disperindagkop
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	100	29.624.300	Disperindagkop
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	100	125.885.300	Disperindagkop
					Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	20	15.000.000	Disperindagkop
	3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran									

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
			Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)				%	21,7		
				Program Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	%	56,49	20.309.592.800	Dispermades
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif Kecamatan Batang	%	90	7.089.248.250	Kecamatan Batang
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Wonotunggal	%	90		Kecamatan Wonotunggal
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Bandar	%	90		Kecamatan Bandar
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Blado	%	90		Kecamatan Blado
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Bawang	%	90		Kecamatan Bawang
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Kandeman	%	90		Kecamatan Kandeman
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Tulis	%	90		Kecamatan Tulis
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di	%	90		Kecamatan Subah

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
						Desa yang Aktif Kecamatan Subah				
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Pecalungan	%	90		Kecamatan Pecalungan
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Tersono	%	90		Kecamatan Tersono
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Limpung	%	90		Kecamatan Limpung
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Banyuputih	%	90		Kecamatan Banyuputih
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Gringsing	%	90		Kecamatan Gringsing
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Warungasem	%	90		Kecamatan Warungasem
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Reban	%	90		Kecamatan Reban
			Tingkat Pengangguran terbuka				%	5,27		
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	41	258.404.399	Disnaker
					Program Hubungan Industrial	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	14,4	260.479.665	Disnaker

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
			Persentase Penduduk Miskin				%	8,27		
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	63,5	8.734.418.000	DPRKP
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	%	100	125.000.000	DPRKP
					Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	%	100	576.014.400	Dinsos
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	313.326.000	Dinsos
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1.985.000.000	Bapelitbang
						persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	91	1.985.000.000	
						persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	91		
						persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	91		
	4. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur									

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
	yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi									
			Indeks Infrastruktur				indeks	200		
				Program penyediaan dan pemerataan infrastruktur pro pembangunan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%		49.693.400.850	DPUPR
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%		5.474.760.000	DPUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		%		5.500.771.892	DPUPR
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	75,47	1.800.000.000	DPUPR
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%		6.561.935.218	Dishub
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%		11.015.217.933	DPUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				8.275.404.028	DPRKP
						Persentase Jumlah Rumah Tangga yang	%	100		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
						mendapat akses air minum layak				
						Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	100		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	5.373.138.000	DPUPR
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%		9.604.405.420	DPRKP
					Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%		480.000.000	DPUPR
	5. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan									
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				indeks	70,66		
				Program tata kelola Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	70	396.804.600	DLH
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				227.345.600	DLH
						Indeks Kualitas Air	indeks	50	227.345.600	
						Indeks Kualitas Udara	indeks	80		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	80	3.721.660.356	DLH
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	65	78.492.400	DLH
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	100	20.000.000	DLH
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	100	10.020.000	DLH
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel										
		Indeks Reformasi Birokrasi					indeks	69,96		
	6. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah									
			Nilai SAKIP				skor	71,25		
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)				indeks	level 3		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				indeks	80		
				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	100	3.133.012.000	Inspektorat
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.289.816.799	Bapelitbang
						Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	1.289.816.799	
						Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	100		
						persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	100		
					Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan	indeks	22,6	5.765.400	Disperpuska

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
						kesejahteraan rakyat (IKK outcome)				
					Program Perekonomian Dan Pembangunan				2.011.245.960	
						Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	15	2.011.245.960	Bagian Perekonomian
						Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	100		Bagian Perekonomian
						Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	97		Bagian Adpem
						Persentase lelang melalui e-procurement	%	100		Bagian PBJ
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				31.242.710.467	Bag. Kesra
						Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	100	31.242.710.467	Bagian Pemerintahan
						Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	100		Bagian Pemerintahan
						Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	100		Bagian Kesra
						Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	95		Bagian Hukum

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	60	750.000.000	Bapelitbang
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				783.540.000	Inspektorat
						Level SPIP	level	3	783.540.000	
						Persentase kapabilitas APIP	%	70		
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	1,36	3.195.025.300	BPKPAD
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah				370.696.784.630	BPKPAD
						Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu		
						Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	status	Tepat waktu		
						Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	90		BPKPAD
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	%	100	1.950.862.150	BPKPAD
	7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan									

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
	responsif (agile governance)									
			Indeks Kepuasan Masyarakat				indeks	85,6		
				Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	94,5	498.554.000	Disdukcapil
					Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	97,6	413.328.000	Disdukcapil
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	468.137.950	Diskominfo
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	73	1.075.000.000	Diskominfo
					Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	72	1.272.044.000	Diskominfo
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	100	1.750.083.967	BKD
3. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif										
		Indeks Risiko Bencana (IRBI)					indeks	150		
		Indeks Rasa Aman					indeks	4,4		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
	8. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana									
			Indeks Ketahanan Daerah				indeks	0,83		
				Program Peningkatan Ketahanan Daerah dan Perlindungan Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	625.825.100	Dinsos
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	100	1.142.178.000	satpol PP
	9. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat									
			Indeks Demokrasi				indeks	74		
				Program Penguatan Budaya dan Peningkatan Iklim Demokrasi	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase festival seni yang dilaksanakan	%	100	800.000.000	Disdikbud
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	85	507.000.000	Disdikbud
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	95	1.398.045.000	Kesbangpol
					Program Peningkatan Peran Partai	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang	%	100	1.317.099.000	Kesbangpol

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	Tahun 2025		PD
								Target	Pagu Anggaran	
					Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	berperan aktif mendukung Pemerintah				
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	100	68.400.000	Kesbangpol
				Program Peningkatan kondusifitas wilayah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	100	167.580.000	Kesbang
					Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	%	100	900.437.000	Kesbang
	10.Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang									
			Angka kriminalitas				%	0,014		
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	1.972.460.800	satpol PP

Sumber : RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

2) Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Batang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 serta Prioritas Nasional tahun 2025 yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 sebagaimana Prioritas Nasional Tahun 2025 disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 4. 5 Prioritas Nasional Tahun 2025
Sumber : RKP 2025

Dari 8 (delapan) Prioritas Nasional diatas, adapun program daerah yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Program Daerah Tahun 2025

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio Desa mandiri Pangan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun
		Prosentae Capaian Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
		Capaian Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian
		Persentase Capaian Jumlah Hewan yang Terobati
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian
		Persentase validitas data Pertanian
		Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan wisatawan
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase peserta pelatihan dengan predikat baik

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase peserta diklat dengan predikat baik
	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru
	Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA dalam kondisi baik
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (indikator SPM)
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja
	Program Hubungan Industrial	Penurunan Jumlah Perselisihan HI
	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru
	Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target
		Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target
		Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permohonan fasilitasi pernyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)
		Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
		Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target
		Persentase lelang melalui e-procurement
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar /Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)
		Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1/D4
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	cakupan data pilah gender dan anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	cakupan kecamatan layak anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	capaian medali kejuaraan

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Penghargaan yang diterima
	Program Pembinaan Perpustakaan	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pembangunan ketahanandan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan
	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (indikator SPM)
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan yang valid
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi
		Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi
		Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi
		Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase jumlah Industri dalam SIINas
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi di kabupaten Batang
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Verifikasi Teknis
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga
	Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif
	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	persentase transmigran yang berhasil ditempatkan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan
	Program Penataan Desa	persentase budaya desa yang dilestarikan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK outcome)
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan
		Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level SPIP
		Persentase kapabilitas APIP
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu
		Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu
		Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan
Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud
	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH dalam kondisi baik
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase festival seni yang dilaksanakan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Prioritas Nasional	Program Daerah	Indikator Program
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (indikator SPM)
		Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)

Sumber : Analisa penyusun, 2025

3) Kebijakan Sektoral Pembangunan Daerah

Adapun berikut Kebijakan Sektoral Kabupaten Batang dalam mendukung ketercapaian tujuan sasaran Kabupaten Batang

a) Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sementara urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM meliputi enam bidang yaitu

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Capaian SPM bidang pendidikan terus meningkat dari tahun 2022 sebesar 78,56 persen dengan kategori ”Tuntas Pratama”, naik menjadi sebesar 89,04 persen dengan kategori ”Tuntas Madya” di tahun 2023. Tahun 2024 kembali meningkat menjadi sebesar 96,19 persen dengan kategori ”Tuntas Utama”. Meskipun indeks SPM pendidikan semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa indikator SPM yang perlu mendapat perhatian karena capaiannya yang masih rendah yaitu proporsi PTK bersertifikat dan PTK penggerak pada jenjang pendidikan dasar serta kemampuan literasi dan kemampuan numerasi pada jenjang pendidikan kesetaraan. Sedangkan sebagian indikator lainnya meskipun capaiannya tidak terlalu rendah, namun masih belum mencapai angka yang ditargetkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan difokuskan pada:

a) Pemenuhan standar pendidikan.
b) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik, dilaksanakan melalui pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor terlibat aktif; kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor serta **peningkatan profesionalitas** guru/pendidik dan tenaga kependidikan.
c) Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan melalui pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah dan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik juga dilaksanakan melalui: a. pemberian bantuan biaya pendidikan **(beasiswa) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu**; b. Peningkatan pemenuhan layanan pendidikan jenjang PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; c. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; serta d. penyediaan layanan pendidikan di wilayah kantong kemiskinan.

   Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan pelaksanaan pendataan warga masyarakat yang

berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah, pemberian **biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu**; penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan melalui: sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi; fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan; pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak; pemeliharaan dan **perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak** sedang dan rusak berat; pemberian **tunjangan kepada guru honorer** jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan, **serta pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak**.

Bidang urusan Pendidikan, dengan indicator sebagai berikut :

a. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS);
b. Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS);
c. Rata rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen Nasional;
d. Rata-rata kemampuan Numerasi berdasarkan asesmen nasional;
e. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan assesmen nasional;
f. Rata rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional;
g. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B;
h. Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV;
i. Rasio pengawas dan penilik PAUD.

2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Capaian SPM bidang kesehatan terus meningkat dari tahun 2022 sebesar 88,50 persen dengan kategori ”Tuntas Madya”, meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 99,63 persen dengan kategori ”Tuntas Utama”. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pemenuhan SPM bidang kesehatan menjadi ”Tuntas Paripurna” maka arah kebijakan yang diambil adalah mengoptimalkan layanan kesehatan pada semua siklus kehidupan dengan difokuskan pada :

a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di setiap desa serta pelaksanaan ILP di semua desa;
b) **Meningkatkan kualitas layanan RSUD dan puskesmas**, melalui peningkatan dukungan **sarpras** dan **tenaga kesehatan** yang memadai;
c) Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita;
d) Penanganan dan penuntasan TB dan HIV;

Layanan program kesehatan gratis yang berupa **Layanan Gawat Darurat 24 Jam Ambulan Gratis, berobat gratis**, serta **bantuan persalinan dan sunat gratis**, utamanya pada keluarga rentan dan kurang mampu.

Sementara itu sasaran pelayanan sebagai berikut :

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil
b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c) Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
d) Pelayanan Kesehatan balita
e) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis.
l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiancy Virus*).

3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Dengan sasaran pelayanan sebagai berikut :

a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari;
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic.

4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Dengan sasaran pelayanan sebagai berikut :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 2 sub urusan, yaitu :

1) Sub Urusan Pemadam Kebakaran
2) Sub Urusan Bencana

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan pemberian pelayanan standar minimal bidang trantibumlinmas, meliputi;

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat
b. yang terdampak penegakan hukum atas pelanggaran perda dan perkada berupa pemberian:
c. Ganti rugi materiil bagi warga negara yang terdampak baik kerugian materiil ringan, sedang atau berat akibat penegakan perda dan perkada;
d. Pengobatan bagi warga negara yang terdampak baik cacat ringan, sedang atau berat akibat penegakan perda dan perkada.
e. Pelayanan kebakaran kepada masyarakat yang mengalami kejadian
f. kebakaran berupa pelayanan respon time maksimal 15 menit sejak laporan diterima sampai dengan aparatur pemadam kebakaran tiba di tempat kejadi

6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Bidang Urusan Sosial, Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dengan pemberian pelayanan standar minimal bidang Sosial meliputi :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti diberikan untuk pelayanan penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Pemberian Layanan Rujukan, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat penyandang disabilitas berupa hibah uang sebesar Rp.3.000.000,- per/orang.
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti diberikan bantuan sosial berupa hibah uang sebesar Rp. 1.000.000,- per/anak kepada anak Yatim, anak Piatu, dan anak Yatim Piatu di lingkungan kabupaten Batang.
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti diberikan bantuan sosial berupa hibah uang sebesar Rp. 200.000,- per/orang selama 10 bulan kepada lanjut usia terlantar di lingkungan kabupaten Batang.

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti diberikan untuk pelayanan penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, Pemberiana akses layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan dan pemberian layanan rujukan;

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota diberikan bantuan penyediaan sandang dan pelaksanaan Kampong Siaga Bencana.

Berikut Tabel program pemenuhan SPM di Kabupaten Batang Tahun 2025 :

Tabel 4. 8 Program Pelayanan Dasar dalam pemenuhan SPM Kabupaten Batang Tahun 2025

JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR PROGRAM	SAT	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025		PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Rp0	
URUSAN PEMERINTAH WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN					
Program Pengelolaan Pendidikan				171.351.036.042	Disdikbud
	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)	%	100		
	persentase capaian SPM Pendidikan	%	100		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	100	1.850.000.000	Disdikbud
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	100	72.121.448.090	Dinkes
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	%	100	17.932.000.000	RSUD Limpung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	100	1.541.912.000	Dinkes
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	100	5.000.000	RSUD Batang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	100	5.000.000	RSUD Limpung
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				8.275.404.028	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	%	100		

JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR PROGRAM	SAT	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025		PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Rp0	
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	100		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	5.373.138.000	DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	%	100	125.000.000	DPRKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	1.972.460.800	satpol PP
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	100	1.142.178.000	satpol PP
Program Penanggulangan Bencana				952.528.900	BPBD
	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani	%	100		
	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	%	100	576.014.400	Dinsos
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	313.326.000	Dinsos
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	100	4.506.190.400	Dinsos
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	625.825.100	Dinsos

Sumber : Bapelitbang, 2024

b) Arah Kebijakan *Stunting* Kabupaten Batang Tahun 2024

Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 14 persen dan angka prevalensi wasting

pada balita menjadi 7 persen sampai dengan tahun 2024. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana memberikan amanat kepada BKKBN sebagai *leading sector* dalam penanggulangan stunting maka memberi konsekuensi kepada urusan pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Batang untuk turut serta terlibat dalam penanganan stunting, sehingga program kegiatan tahun 2025 diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung penurunan stunting di Kabupaten Batang. Dalam kebijakan penurunan stunting tak lepas dari peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam mengkoor-dikasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kebijakan penurunan stunting tahun 2025 di Kabupaten Batang diprioritaskan pada upaya mewujudkan *zero new stunting* melalui pencegahan dari hulu, terutama pada remaja putri dan ibu hamil agar tidak melahirkan balita stunting baru. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Batang, diantaranya cakupan kehadiran balita di Posyandu dan cakupan layanan intervensi spesifik dan sensitif yang belum optimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor pola asuh yang tidak tepat serta masih kurangnya pemahaman keluarga akan pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita sehingga masih enggan membawa balitanya ke Posyandu, sehingga pertumbuhan balita tersebut tidak dapat terpantau secara berkala dan tidak terintervensi secara optimal. Faktor kurangnya asupan gizi juga masih menjadi masalah utama khususnya pada keluarga miskin. Faktor berikutnya adalah SDM tenaga terlatih yang masih terbatas, serta belum semua rumah tangga mendapatkan akses sanitasi dan air minum layak. Oleh karena itu, intervensi prioritas untuk upaya menjawab permasalahn tersebut adalah peningkatan cakup;an layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, utamanya pemberian pendampingan dan edukasi kepada keluarga beresiko stunting, pemberian makanan tambahan untuk balita stunting selama 90 hari dengan melibatkan peran swasta melalui program CSR, pelatihan dan peningkatan kapasitas kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) serta pemberian akses sanitasi berupa stimulan jamban dan akses air minum layak. Sedangkan upaya untuk meningkatkan

cakupan kunjungan balita ke posyandu dilakukan melalui program ”jemput bola” dengan menggandeng Babinsa dan Babinkamtibmas.

Konvergensi Percepatan Penurunan stunting di Kabupaten Batang juga telah dilaksanakan melalui kolaborasi *Pentahelix* dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, akademisi dan media. Keterlibatan swasta dalam perecepatan penurunan stunting Kabupaten Batang diantaranya melalui CSR dalam bentuk pemberian makanan tambahan baik berupa bantuan susu, telur dan makanan berprotein tinggi lainnya kepada keluarga yang memiliki balita Stunting dengan lokasi prioritas di desa lokus stunting selama 3 (tiga) bulan; Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), melalui pemberian makanan tambahan untuk 18 anak stunting selama 3 bulan; serta dukungan perusahaan untuk edukasi pemenuhan gizi bagi karyawan perempuan guna pencegahan stunting. Sementara keterlibatan akademisi diwujudkan melalui keikutsertaan Perguruan Tinggi dalam upaya penurunan stunting diantaranya penempatan KKN Tematik di Desa lokus stunting dan lokus Kemiskinan Ekstrim. Sedangkan peran media dalam percepatan penurunan stunting adalah sebagai sumber informasi untuk para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terbaru dalam upaya pencegahan stunting. Informasi terbaru yang disajikan dapat digunakan sebagai sumber rujukan, untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan stunting yang telah dilaksanakan.

Tabel 4. 9
Strategi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Belum optimalnya layanan intervensi spesifik dan sensitif untuk percepatan penurunan stunting	pemenuhan 29 indikator esensial sesuai Perpres 72/2021	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri	Dinkes
		layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) untuk Remaja putri	Dinkes
		Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada Calon pengantin /calon ibu	Dinkes
		Pemberian bantuan tunai bersyarat untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos
		pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah kepada	DP3AP2KB

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
		calon Pasangan Usia Subur (PUS)	
		Pemberian bantuan pangan nontunai untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos
		Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu	Dinsos
		Pemberian tambahan asupan gizi untuk Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Dinkes
		Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet kepada ibu hamil	Dinkes
		Peningkatan pelayanan keluarga berencana	DP3AP2KB
		Pemenuhan asupan gizi balita melalui optimaliasasi pemberian (ASI) eksklusif dan MP ASI	Dinkes
		Pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk untuk Anak balita gizi buruk	Dinkes
		tambahan asupan gizi untuk anak balita dengan status gizi kurang	Dinkes, Dispermades
		Pemberian imunisasi dasar lengkap kepada balita	Dinkes
		penuntasan BABS	Dinkes, DPUPR
		Peningkatan penerapan PHBS	Dinkes
		Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri kepada Keluarga berisiko stunting, serta pemberian bantuan olahan ikan, susu dan telur bagi keluarga beresiko stunting	Dislutkannak
		Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	DP3AP2KB
		Pelaksanaan pendampingan kepada Keluarga berisiko stunting	DP3AP2KB
		Pemanfaatan sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi Keluarga berisiko stunting	Dispaperta

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
		Peningkatan akses air minum layak	DPUPR
		Peningkatan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	DPUPR
		Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) tentang kesehatan dan gizi kepada Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinsos
		Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta	Dinsos
Kapasitas KPM yang belum merata serta belum optimalnya peran desa dalam percepatan penurunan stunting	Peningkatan kapasitas KPM dan peran desa dalam percepatan penurunan stunting	Peningkatan Kapasitas KPM	Dispermades
		Peningkatan dukungan DD dan Pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tk Desa	Dispermades
		kebijakan pemberian dukungan operasioal bagi KPM dan kader Posyandu	Dispermades
belum optimalnya Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tk Kabupaten	Bapelitbang
		Perbaikan Manajemen Data	Bapelitbang
		Pelaksanaan Rembug Stunting	DP3AP2KB
belum teridentifikasinya akar masalah penyebab stunting	Audit Kasus Stunting	Audit Kasus Stunting	DP3AP2KB

Sumber : Bapelitbang, 2024

Upaya percepatan penurunan stunting juga diwujudkan melalui inovasi-inovasi penurunan stunting diantaranya ;

1. D'Basinem (Desa Binaan Asi Thok Nem wulan)

Merupakan inovasi dalam memberikan Edukasi Asi Eksklusif yang sekaligus dipadukan dengan perbaikan gizi balita melalui aktivitas memasak menu gizi seimbang untuk diberikan kepada balita, yang dilanjutkan dengan makan bersama balita di posyandu sambil bermain & Brain storming. Inovasi ini telah berhasil meningkatkan cakupan layanan intervensi spesifik pada indikator balita yang mendapatkan ASI eksklusif dari 47,62% tahun 2017 menjadi 64,31% pada tahun 2022.

2. Bambang Tilang (Balita Ditimbang Stunting Hilang)

Merupakan kegiatan pemantauan tumbuh kembang, pemberian vitamin A, imunisasi, konseling dan pemberian makanan tambahan untuk balita, sehinga berhasil meningkatkan cakupan intervensi spesifik pada indikator balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya dari sebesar 73.56 (2021) menjadi 83,84 (2022), balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi dari 91,25% (2021) menjadi 100% (2022), Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap dari 78,29% (2021) menjadi 97,15% (2022).

3. GEMATI (Gerakan Makan Telur Tiap Hari)

Merupakan inovasi untuk menekan angka stunting di Kabupaten Batang dengan memberikan telur kepada sasaran setidaknya 1 telur 1 hari selama 3 bulan berturut-turut sebagai intervensi pencegahan stunting.

4. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan

Merupakan inovasi untuk meningkatkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Kecamatan.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, program dan kegiatan dalam rangka penurunan persentase stunting difokuskan di Desa lokus stunting tahun 2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 441/169/2022 tanggal 26 April 2022, berdasarkan jumlah keluarga beresiko stunting, prevalensi stunting, jumlah balita stunting dan cakupan layanan yang dilakukan, pada 24 Desa sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Daftar Desa/Kelurahan Prioritas Stunting Kabupaten Batang Tahun 2024

NO	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
1	KANDEMAN	KANDEMAN	Depok
2	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Selokarto
3	BAWANG	BAWANG	Sidoharjo
4	BATANG	BATANG III	Kauman
5	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Pretek
6	BLADO	BLADO I	Wonobodro
7	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Gemuh
8	BAWANG	BAWANG	Jambangan
9	BAWANG	BAWANG	Deles
10	KANDEMAN	KANDEMAN	Karanganom
11	PECALUNGAN	PECALUNGAN	Pecalungan
12	BATANG	BATANG III	Cepokokuning

NO	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan
13	BAWANG	BAWANG	Bawang
14	BAWANG	BAWANG	Surjo
15	BANDAR	BANDAR I	Wonomerto
16	LIMPUNG	LIMPUNG	Tembok
17	BATANG	BATANG III	Rowobelang
18	KANDEMAN	KANDEMAN	Botolambat
19	KANDEMAN	KANDEMAN	Cempereng
20	WARUNGASEM	WARUNGASEM	Menguneng
21	BATANG	BATANG III	Watesalit
22	BAWANG	BAWANG	Sangubanyu
23	REBAN	REBAN	Mojotengah
24	BLADO	BLADO II	Keputon

Sumber : Bapelitbang, 2023

c) Arah kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Batang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan diharapkan mampu memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak sehingga mampu meningkatkan peran anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.

Tingginya komitmen Pemerintah Indonesia terhadap berbagai kesepakatan internasional untuk melakukan perlindungan terhadap anak perlu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Program Kota/Kabupaten Layak Anak yaitu Kabupaten/Kota yang mempunyai

sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 4. 11 Strategi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Batang

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual	Pencegahan, penanganan, pendampingan, pemberian bantuan, dan pemberian perlindungan terhadap anak	pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial	DP3AP2KB, Dinkes, RSUD
		Pemberian pendampingan antara lain dalam pemberian psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan	DP3AP2KB
		pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu	DINSOS
		Kolaborasi dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak	DP3AP2KB, Dispermades
		Edukasi dan promosi terkait kesadaran tentang kekerasan seksual dan memotivasi masyarakat untuk bertindak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.	DP3AP2KB, Disdikbud
		Pembentukan UPTD PPPA	DP3AP2KB
		Pembentukan Forum Anak Kecamatan	DP3AP2KB
Belum optimalnya dukungan regulasi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Penyusunan PerBup tentang Komite aksi daerh penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;	DP3AP2KB
		Penyusunan Perbup tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	DP3AP2KB
Belum optimalnya dukungan Dunia Usaha dalam menunjang program dan Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak anak	Peningkatan kerjasama dengan Dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Dinkes

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Pemenuhan Hak anak			
		Pelatihan Konvensi Hak Anak pada Perangkat Daerah, Lembaga Masysarakat, Media dan Dunia Usaha	DP3AP2KB
		Penyediaan Data Pilah Gender dan Anak	DP3AP2KB
Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran	fasilitasi kepemilikan akta kelahiran	fasilitasi kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil
		Kerjasama dengan fasilitas kesehatan dalam Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		Kerjasama dengan lembaga masyarakat dan PT dalam upaya percepatan kepemilikan akte kelahiran anak	Disdukcapil
Belum semua Sekolah Ramah Anak	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pembangunan sarana, prasarasna dan utilitas sekolah dasar menuju ramah anak	Disdikbud
		pembangunan sarana, prasarasna dan utilitas sekolah menengah pertama menuju ramah anak	Disdikbud

Sumber : Bapelitbang, 2024

Disamping memaksimalkan pemenuhan hak anak di Kabupaten Batang, Pemerintah Daerah juga diwajibkan responsif terhadap isu perempuan. Hal ini menjadi amanat dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (SDG's) guna mencapaian target di tahun 2030. Pembangunan pemberdayaan perempuan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Paradigma gender saat ini sudah berkembang dan tidak lagi terbatas pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan saja, namun juga termasuk didalamnya keadilan dan kesetaraan untuk kaum rentan.

Berikut pemetaan permasalahan serta strategi dalam rangka pemenuhan kesetaraan gender di Kabupaten Batang Tahun 2025 :

Tabel 4. 12 Strategi Pengarustamaan Gender Kabupaten Batang

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Belum semua Perangkat Daerah mengakomodir Program/kegiatan/subkegitan responsif yang gender	Penguatan peran tim teknis Pokja PUG untuk mendorong dan mengimplementasi-kan Perencanaan dan penganggaran responsif gender pada OPD	Kebijakan satu OPD minimal dua subkeg yang di ARG kan	Bapelitbang
		Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender kepada OPD (rekom hasil evaluasi PUG dari inspektorat)	DP3AP2KB
		Penyusunan profil gender dan penyediaan data pilah gender	DP3AP2KB
		Penyusunan analisis gender dan Sinkronisasi analisis gender dalam dokumen perencanaan	Bapelitbang
Masih adanya kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, dan manfaat hasil pembangunan	meningkatkan peran perempuan dan kaum rentan dalam akses, partisipasi, dan manfaat hasil pembangunan	Meningkatkan implementasi anggaran responsif gender dalam perencan aan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisir kesenjangan gender	Bapelitbang, BPKPAD, Inspektorat
Adanya stereotip gender, marginalisasi perempuan, *sub ordinary* dan *double burden*	Mengatasi stereotip gender, marginalisasi perempuan, *sub ordinary* dan *double burden*	Sosialisai, edukasi serta meningkatkan pendidikan dan keahlian SDM perempuan	DP3AP2KB, Disnaker

Sumber : Bapelitbang, 2024

d) Arah Kebijakan Kemiskinan Kabupaten Batang Tahun 2024

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase kemiskinan di Kabupaten Batang cenderung fluktuatif. Setelah mengalami peningkatan pada Tahun 2020 dan 2021 akibat adanya Pandemi Covid 19, pada Tahun 2022 dan 2023 persentase kemiskinan di Kabupaten Batang kembali mengalami penurunan. Penurunan persentase kemiskinan ini diikuti pula dengan penurunan persentase kemiskinan ekstrem dari 2,97% pada Tahun 2021 menjadi 1,55% pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 tidak ada rilis persentase kemiskinan ekstrem untuk kabupaten/kota. Persentase kemiskinan ekstrem pada Tahun 2023 yang dirilis hanya sampai level provinsi, dimana persentase kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari 1,97% pada Tahun 2022 menjadi 1,11% pada Tahun 2023. Hal ini dapat diasumsikan

bahwa persentase kemiskina ekstrem di Kabupaten Batang juga mengalami penurunan walaupun seberapa besar penurunannya tidak dapat diketahui.

Penghapusan kemiskinan merupakan tujuan pertama *Sustainable Developments Goals (SDGs)* yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ini dapat dilaksanakan dengan strategi kebijakan sebagai berikut:

a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin

   Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yang berkolaborasi dengan CSR dan Program Pemerintah Pusat.

   Program Pemerintah Pusat melalui Kemensos, Kemendikbudridtek dan Kemenkes memberikan bantuan berupa PKH, BPNT, Program Indonesia Pintar, dan juga PBI Jaminan Kesehatan Nasional.

   Sedangkan melalui CSR (BUMD & Swasta) melalui Bank jateng, PT Bhimasena Power Indonesia dan juga PT Nestle memberikan bantuan berupa Bantuan Makanan Tambahan, Jambanisasi, Pembagian Sembako, Pengembangan kapasitas guru dan kesetaraan, pemberian demplot tanaman obat keluarga serta pemberian bantuan sosial kepada warga rentan.

b. peningkatan pendapatan masyarakat

   Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Batang berkolaborasi dengan CSR (BUMD & Swasta) yang menyediakan kemitraan dengan KUB dalam penyediaan bibit pada program *green belt* serta penyediaan lowongan kerja bagi tenaga kerja di desa sekitar; dan Pemerintah Pusat dengan menyediakan Program Kartu Prakerja.

c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

   Dalam upaya menurukan kantong kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Batang berkolaborasi dengan CSR (BUMD & Swasta) dengan menyediakan program renovasi RTLH, Pembangunan taman literasi, renovasi penataan drainase lingkungan sekolah, program bank sampah berbasis desa serta kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat melalui program PKK dan pelatihan kepada masyarakat desa.



Gambar 4. 6 Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan dengan CSR (BUMD & Swasta) dan Pemerintah Pusat

Sumber : Bapelitbang, 2024

Strategi kebijakan penghapusan kemiskinan tersebut didukung dengan inovasi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan. Inovasi tersebut diantaranya adalah

1. Perbaikan akurasi data, yang dilaksanakan melalui proses pemutakhiran, verifikasi dan validasi data warga miskin sebagai sasaran program,
2. Perbaikan mekanisme program,
3. Konvergensi program, yang dilaksanakan dengan metode kolaborasi multipihak (Pentahelix) antara pemerintah baik pusat maupun daerah, badan usaha melalui dana CSR dan filantropi, perguruan tinggi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat/komunitas dan media massa sebagai sarana untuk edukasi publik.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam upaya penanganan kemiskinan pada Tahun 2025 adalah pembangunan inklusif yang melibatkan dan memberi manfaat bagi semua orang, termasuk kaum wanita, lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Ketersediaan data yang akurat dapat mendorong terwujudnya pembangunan inklusif tersebut. Ketersediaan data tersebut diantaranya adalah data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, data perkawinan dan lain-lain. Ketersediaan data yang terpilah dapat menunjukkan kondisi keberagaman gender, ras, suku, agama, disabilitas, kondisi sosial ekonomi, dan kelompok rentan. Ketersediaan data terpilah ini juga dapat mendorong ketepatan sasaran program dan memberi

kesempatan semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan.

Perubahan paradigma perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan inklusif. Misalnya, untuk penyandang disabilitas. Bila sebelumnya penyandang disabilitas merupakan objek pembangunan, mendapat perlakuan khusus dengan pendekatan *charity based*, hanya berpartisipasi di bidang sosial dan menjadi tanggung jawab Kementrian/Dinas Sosial, maka pada pembangunan inklusif penyandang disabilitas akan menjadi subyek pembangunan yang tidak mengalami diskriminasi dengan pendekatan *human right based*, dapat berpartisipasi pada semua sektor (multi sektor) dan menjadi tanggung jawab semua kementrian/lembaga/instansi/perangkat daerah.

e) Kebijakan Satu Data Indonesia Kabupaten Batang

Dalam mengamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Batang sebagai dasar serta upaya untuk memenuhi tata Kelola pengelolaan statsitik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Tindak Lanjut dari Perbup tersebut akan dibentuk Forum Satu Data Indonesia yang terdiri dari :

a. Pembina SDI yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang;
b. Koordinator SDI yaitu Bapelitbang Kabupaten Batang;
c. Walidata SDI yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang; dan
d. Produsen Data yaitu seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Batang.



Gambar 4. 7 Forum Satu Data Indonesia

Sumber : Bapelitbang, 2024

Forum Satu Data di Kabupaten Batang rencananya dilakukan satu kali dalam setahun. Selain Forum SDI, Kabupaten Batang juga telah melaksanakan kegiatan Forum tematik SDI dan kegiatan pembinaan statistik sektoral dengan perangkat daerah sebagai produsen data bersama BPS dan Diskominfo Kabupaten Batang. Kegiatan pembinaan yang berupa visitasi tersebut dalam rangka untuk mewujudkan tata Kelola data statistik sektoral di Kabupaten Batang yang sesuai dengan 4 prinsip SDI melalui media online yaitu *Open* Data (data.batangkab.go.id) serta sistem informasi statistik sektoral (sitika) kabupaten batang (sitika.batangkab.go.id) dan Geoportal (geoportal.batangkab.go.id) data spasial yang juga merupakan data sektoral sudah dapat didesiminasikan dan sudah terintegrasi dengan tingkat provinsi dan pusat pada portal SDI (data.go.id). Jumlah data Prioritas tahun 2024 sesuai hasil kesepakatan forum Satu Data Indonesia sebanyak 1346 data.

Sementara itu, aplikasi Sitika terus dilakukan pengembangan dan hingga saat ini telah mengakomodir ± 4500 data yang bersumber dari eWalidata dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilakukan guna memastikan sinkronisasi indikator prioritas nasional dan program kerja daerah.

f) Penyiapan Sarana Pendukung TPST Sentul dan Randukuning

Mendasari kondisi sampah yang telah menggunung serta *overloud,* TPA Randukuning Kabupaten Batang, perlu dilakukan upaya guna menangani sampah di Kabupaten Batang yang kian melonjak. Penggunaan metode *Open Dumping* mengakibatkan pencemaran lingkungan, *overload,* dan Risiko Kesehatan. Potensi timbulan sampah di KIT Batang perhari diperkirakan 140 ton/hari yang akan diolah di TPST KITB, namun akan menghasilkan residu sebesar 12% yang akan keluar dari TPST tersebut dengan jumlah yaitu 12% x 140 ton, sehingga total residu yang akan dibuang ke luar dari TPST KITB menuju Randukuning adalah 16,8 Ton/hari. Sesuai dengan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Batang, Pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah dilaksanakan guna meningkatkan cakupan layanan persampahan yang meliputi pengembangan dan pembangunan TPA sampah Batang wilayah

timur, pengembangan dan pengelolaan TPS 3R, TPST, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga.

Rekomendasi solusi persampahan Kabupaten Batang antara lain:

1. Pembangunan TPST Di Sebelah TPA Randukuning Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman

   Pengolahan sampah di TPA serta untuk mengatasi permasalahan sampah perkotaan

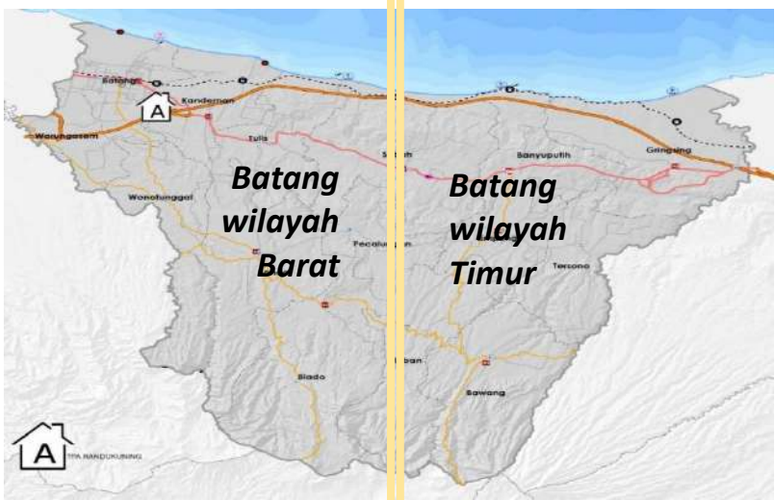
2. Pembangunan TPST di Desa Sentul Kecamatan Gringsing

   Digunakan bersama Oleh Pemerintah Kabupaten Batang dan Pembuangan Residu dari KITB

3. Penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan TPA / TPST Batang Wilayah Timur.

   Berdasarkan tata cara pemilihan lokasi dan hasil analisis kelayakan lokasi TPA/TPST, maka lokasi TPA/TPST yang sesuai adalah sebagai berikut :

   - Lahan Pemkab Batang : Desa Sentul (1) Kecamatan Gringsing (TPST)



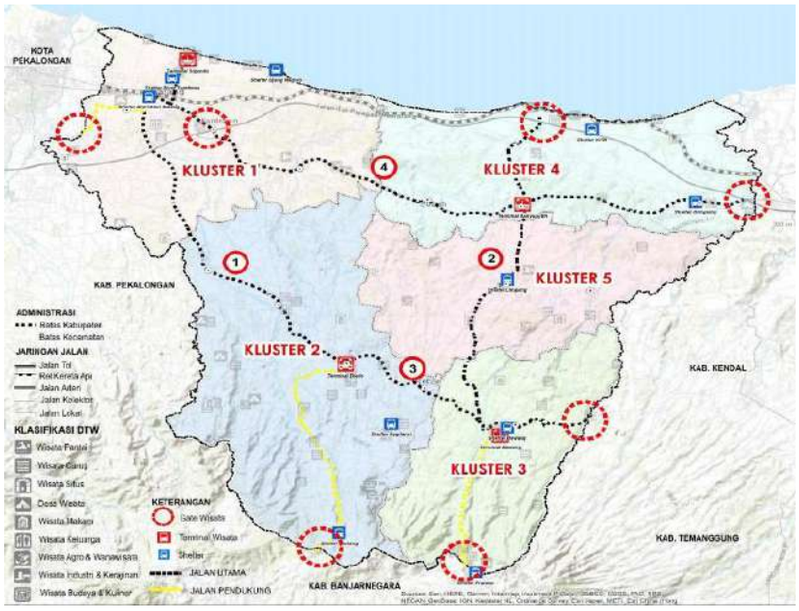
Gambar 4. 8 Pembagian wilayah persampahan dan penangannnya di Kabupaten Batang

Sumber : IPW Bapelitbang, 2024

g) Peningkatan Kualitas Jalan dan askesibilitas Menuju Kawasan Tujuan Wisata

Kerangka wisata Kabupaten Batang atau Tourism Skeleton yang menjadi jalur utama pergerakan wisatawan yang akan berwisata terdiri dari Jalan Utama, Jalan Pendukung Utama, Pintu masuk wisata, Terminal Wisata dan Shelter, serta Jalan Pendukung di tiap

Klaster pariwisata Kabupaten Batang. Koridor Utama Wisata Kabupaten Batang sebagai berikut:



Gambar 4. 9 Kerangka Wisata (Jalan Wisata) Kabupaten Batang
Sumber : Kajian Pariwisata Kabupaten Batang

1. **KORIDOR SIGANDU – BATANG – BLADO**

   Menghubungkan kluster 1 (Alun-alun Batang, Sigandu, Ujung Negoro,) dengan kluster 2 (Bandar, dan Terminal Blado)

2. **KORIDOR KITB – BANYUPUTIH – BAWANG**

   Menghubungkan kluster 4 (KITB Batang, Siluwuk, Sri Gunung) menuju Kluster 5 (Terminal Banyuputih dan Terminal Limpung) dan berakhir di Kluster 3 (Bawang, Tol Khayangan)

3. **KORIDOR BLADO – SURJO – BAWANG**

   Menghubungkan Kluster 2 (Bandar, dan Terminal Blado) dengan Kluster 3 (Bawang, Tol Khayangan) dan berakhir di Pintuk Masuk Sukorejo (Kabupaten Batang)

2. **KORIDOR PANTURA**

   Menghubungkan Kluster 1 dengan Kluster 4 melalui jalur pantura dan berakhir di Gringsing (Pintu Masuk dari Kabupaten Kendal via Pantura).

Matriks Penguatan Jaringan Jalan Utama Pariwisata

NO	NAMA KORIDOR	NAMA JALAN	KELAS JALAN	PANJANG JALAN (m)
1.	Koridor Sigandu – Batang – Blado	Jl. Sultan Agung	Kabupaten	2.590
		Jl. Pemuda	Kabupaten	3.520
		Jl. Raya Wonotunggal - Bandar	Kabupaten	17.750
2.	Koridor Jalan KITB – Bayuputih _ Bawang	Jl. Kedawung – Banyuputih	Kabupaten	7.350
		Jl. Banyuputih – Terminal Limpung	Kabupaten	5.381
		Jl. Terminal Limpung – Bawang	Kabupaten	10.850
3.	Koridor Blado – Surjo – Bawang	Jl. Reban – Bawang – Sukorejo	Kabupaten	17.050
4.	Koridor Pantura	Jl. Pantura	Negara	39.061

Sumber: SK Bupati Batang 50/243/2016 dan Analisis Penyusun 2022

Gambar 4. 10 Matriks Penguatan Jaringan Jalan Utama Pariwisata

Sementara itu, diperlukan akses tambahan untuk menuju lokasi tepat objek wisata. Hal tersebut dikarenakan tidak semua objek wisata berada di Jalur Utama Wisata Kabupaten Batang. Jaringan jalan kabupaten atau jalan desa yang menghubungkan jalur utama wisata dengan objek objek wisata yang tersebar ditiap klusternya disebut dengan jalan pendukung kluster yang terdiri dari matriks jalan dalam 4 kluster wisata.

h) Arah Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan identifikasi lokasi-lokasi kawasan kumuh yang disusun oleh masing-masing daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Penanganan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi wewenang. Kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 hektar ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, kawasan kumuh dengan luas 10-15 hektar ditangani oleh Pemerintah Provinsi, dan kawasan kumuh dengan luas lebih dari 15 Ha ditangani oleh Pemerintah Pusat.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Batang telah dilakukan pemutakhiran data dan telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah dan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Jawa III, serta diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Lokasi kumuh di Kabupaten Batang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/422/2023 tertanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Batang. Lokasi kumuh meliputi 64 (enam puluh empat) lokasi yang tersebar di 11 (sebelas) desa/kelurahan,

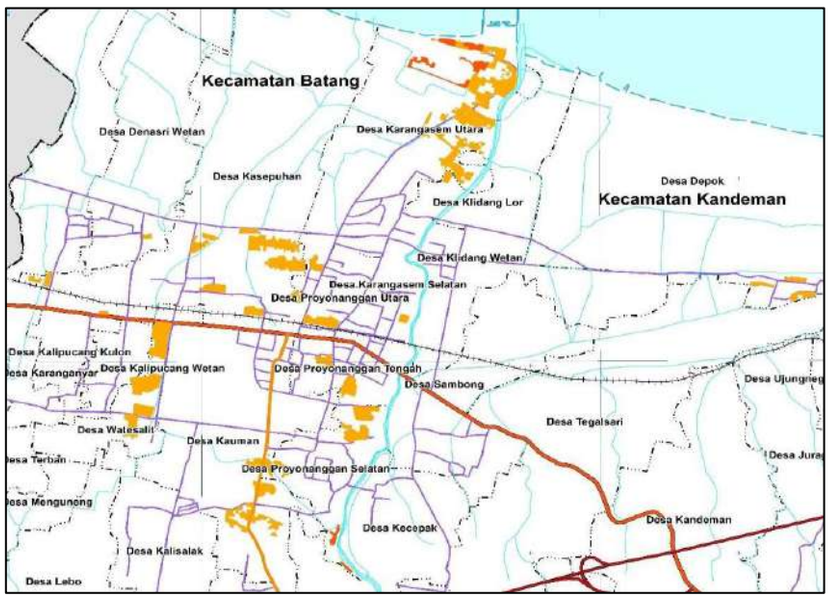
di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman, dengan luas total sebesar 105,38 (seratus lima koma tiga puluh delapan) hektar. SK tersebut ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Kabupaten Batang, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

Berdasarkan hasil Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2023 dengan mempertimbangkan perhitungan kolaborasi penanganan kumuh (APBD II, APBD I, APBN, dan pihak lainnya) bersama Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), telah dihitung capaian penanganan kawasan kumuh tingkat Kabupaten sebesar 20,94 ha dengan luas kumuh awal 95,58 ha. Terdapat 3 desa/ kelurahan di Kabupaten Batang yang telah mencapai luas kumuh 0 ha. Sehingga total luasan kumuh di Kabupaten Batang pada awal tahun 2024 adalah sebesar 74,64 ha meliputi 11 desa/ kelurahan dalam 2 kecamatan. Luasan kumuh dapat bertambah jika dilakukan pendataan ulang (update baseline survey). Lokasi kumuh di Kabupaten Batang pada awal tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4. 13 Lokus Kawasan Kumuh Kabupaten Batang

No.		Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh (ha)	Kewenangan
A.	1.	Batang	Denasri Wetan	0,51	
	2.	Batang	Karangasem Selatan	2,26	
	3.	Batang	Karangasem Utara	34,78	Pusat
	4.	Batang	Kasepuhan	20,87	Pusat
	5.	Batang	Kauman	9,34	
	6.	Batang	Klidang Lor	0,87	
	7.	Batang	Proyonanggan Selatan	10,75	Provinsi
	8.	Batang	Proyonanggan Tengah	4,21	
	9.	Batang	Proyonanggan Utara	3,09	
	10.	Batang	Watesalit	15,32	Pusat
B.	11.	Kandeman	Depok	3,38	
Total				**105,38**	

Sumber : SK Bupati Batang Nomor 050/422/2023 dan BA Pengurangan Kumuh Tahun 2023.



Gambar 4. 11 Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Batang
Sumber : *SK Bupati Nomor 050/422/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Batang*

Dalam rangka penyelesaian permasalahan kumuh, Pemerintah Kabupaten Batang sedang berupaya untuk mengikuti program yang didanai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK TPPKT) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya mencakup pengintegrasian komponen rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didukung oleh sarana prasarana seperti air minum, sanitasi (ari limbah dan sampah), jalan, dan drainase lingkungan. serta sarana prasarana proteksi kebakaran. Terdapat 4 (empat) macam menu dalam penanganan kumuh meliputi :

1. Peremajaan yaitu menata ulang permukiman secara total/ menyeluruh (konsolidasi total);
2. Pemugaran yaitu menata ulang permukiman secara sebagian (konsolidasi sebagian);
3. Relokasi yaitu pemindahan permukiman kumuh dari lokasi yang tidak sesuai RDTR/ permukiman yang terdapat pada kawasan rawan bencana;
4. Pembangunan permukiman baru yaitu pembangunan baru permukiman melalui kelompok/ komunitas masyarakat untuk mengurangi *backlog*.

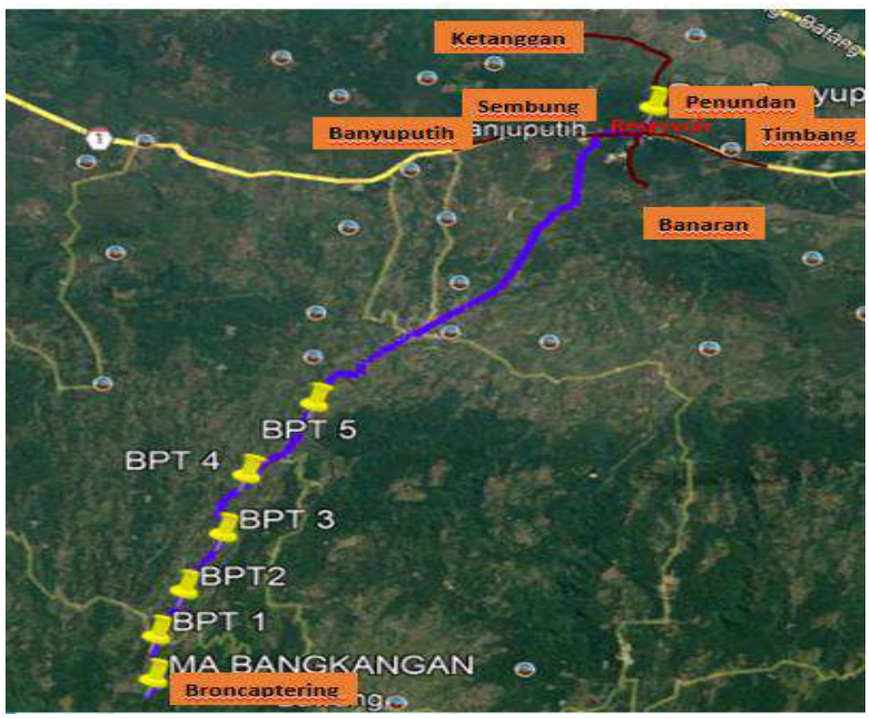
Sementara itu, kawasan Karangasem Utama yang berada di Kecamatan Batang dengan luas kumuh terluas yaitu 33,15 Ha. Kawasan ini memiliki nilai strategis dalam penanganan kumuh di Kabupaten

Batang karena berada di Ibukota Kabupaten Batang dan memiliki potensi dalam pembangunan Kabupaten Batang yaitu Kawasan Pelabuhan. Arah pengembangan penanganan kumuh pada kawasan ini yaitu peningkatan dan pengembangan wisata muara sungai sambong serta pembangunan *coastal road* pencegah abrasi.

i) Pengembangan Jaringan SPAM IKK Banyuputih

Banyuputih merupakan satu-satunya Ibu Kota Kecamatan yang belum ada jaringan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Kecamatan Banyuputih sebagai salah satu kawasan penyangga penting KITB yang diperkirakan bertambah penduduk yang mengakibatkan bertambah-nya kebutuhan prasarana permukiman dimana Kecamatan Banyuputih juga sering terjadi kekeringan saat musim kemarau.

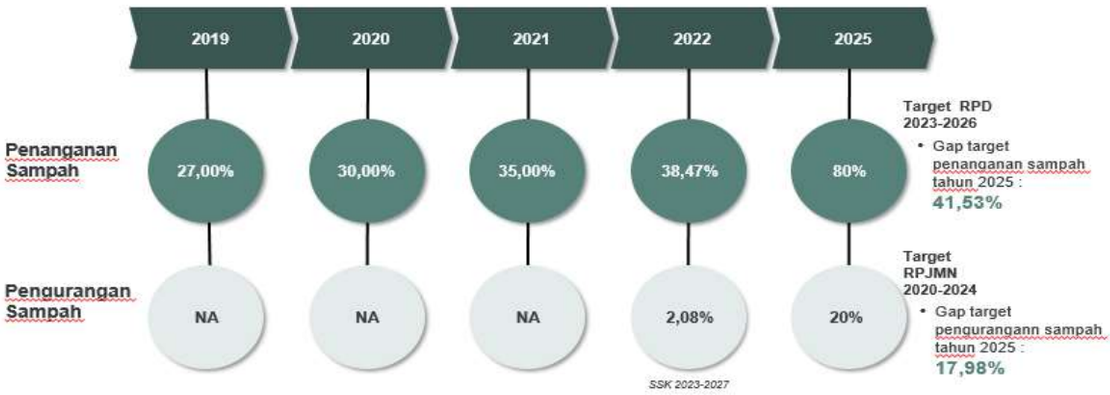
Pembangunan SPAM Di Kec. Banyuputih Yang Merupakan Penyangga KIT Batang rencananya (1) Menggunakan Mata Air Bangkangan dengan debit 100 ltr/dtk, (2) Dalam proses penyusunan Review FS dan DED (oleh PERUMDAM) serta (3) Rencana pemanfaat untuk 2000 SR



Gambar 4. 12 Rencana SPAM IKK Banyuputih
Sumber : PDAM Kab Batang

j) Pengembangan Jaringan Prasarana Permukiman (Sampah, Air Minum, Jalan Lingkungan, Drainase, Sanitasi)

a. Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan



Gambar 4. 13 Kondisi cakupan pelayanan pengelolaan persampahan Kabupaten Batang

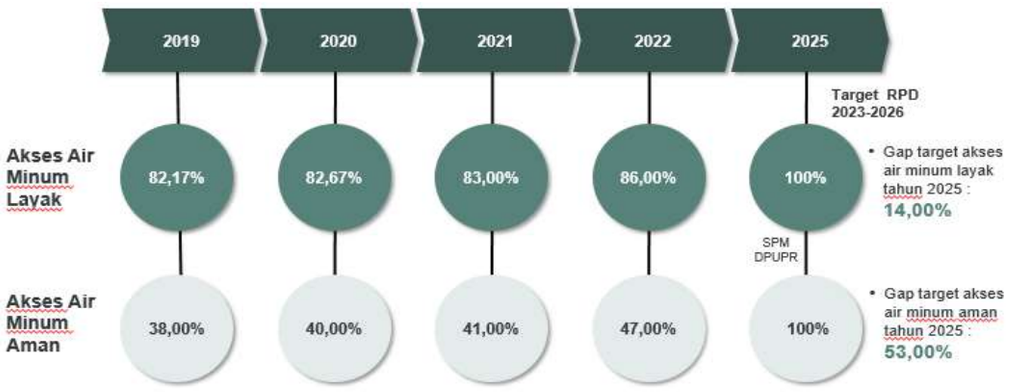
Sumber : simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id dan SSK 2023

Kapasitas TPA eksisting yang *overload* dan melebihi umur pakai serta kesulitan lahan untuk membuat TPA Baru di kawasan padat permukiman, sehingga konsep pengelolaan sampah dilakukan melalui pendekatan hulu-hilir difokuskan pada upaya pengurangan sampah dan pengolahan sampah semaksimal mungkin (dengan pemanfaatan teknologi) untuk mengurangi sisa residu sampah. Pengurangan sampah pendekatan hulu-hilir dilakukan antara lain melalui: pembangunan TPS3R skala desa, TPST lokal/ kawasan, serta peningkatan sistem pengelolaan sampah.

Strategi :

- Memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, antar kabupaten/kota dan desa
- Memperkuat kerja sama dengan swasta
- Dukungan terhadap Peraturan Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Peningkatan nilai ekonomi hasil pengolahan sampah
- Kerjasama pemanfaatan RDF oleh UMKM, industri, dan PLTU

b. Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



Gambar 4. 14 Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Batang

Sumber : simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id dan SSK 2023

Wilayah Perkotaan :

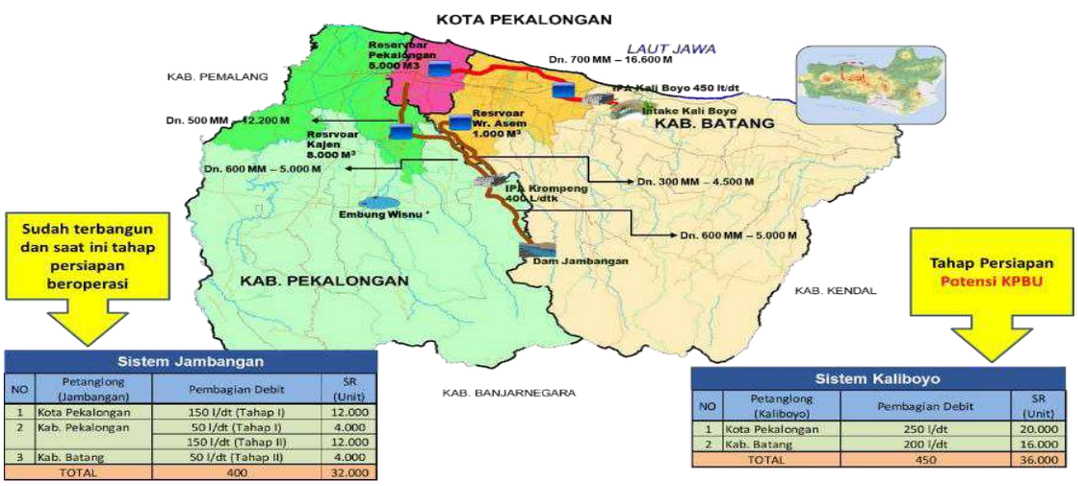
- Penambahan sambungan rumah disetiap tahunnya dengan peningkatan persentase pelayanan;
- Pengendalian kebocoran yang dilakukan melalui penurunan kebocoran secara bertahap;
- Penambahan kapasitas produksi melalui sumber air baku yang ketersediaannya masih mencukupi;
- Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan dan;
- Peningkatan efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan.

Wilayah Perdesaan :

- Sosialisasi program penyediaan air bersih kepada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air minum terlindungi (akses aman) sehingga masyarakat dapat mengajukan proposal dalam penyediaan sarana air bersih;
- Penambahan sambungan rumah di daerah yang sudah direncanakan sebagai peruntukan permukiman perdesaan;
- Menjadikan lokasi BJP masuk dalam jaringan perpipaan dengan persiapan pembuatan jaringan baru (masuk dalam program PAMSIMAS, DAK, dan/atau Hibah Air Minum Perdesaan)

c. Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

RENCANA PELAYANAN SPAM REGIONAL PETANGLONG – Sistem Kaliboyo Kab. Batang : Kec. Batang, Kandeman, Tulis (200 L/d)



Sistem Jambangan

NO	Petanglong (Jambangan)	Pembagian Debit	SR (Unit)
1	Kota Pekalongan	150 l/dt (Tahap I)	12.000
2	Kab. Pekalongan	50 l/dt (Tahap I)	4.000
		150 l/dt (Tahap II)	12.000
3	Kab. Batang	50 l/dt (Tahap II)	4.000
TOTAL		400	32.000

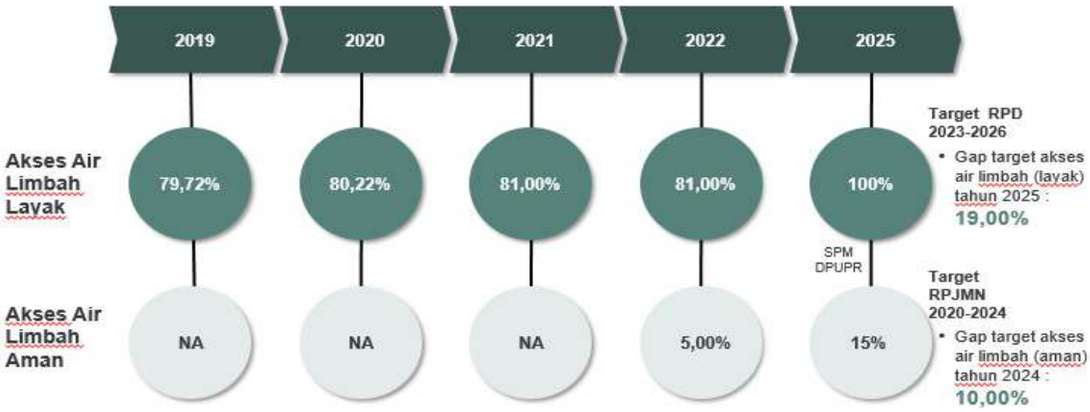
Sistem Kaliboyo

NO	Petanglong (Kaliboyo)	Pembagian Debit	SR (Unit)
1	Kota Pekalongan	250 l/dt	20.000
2	Kab. Batang	200 l/dt	16.000
TOTAL		450	36.000

Gambar 4. 15 Rencana Pengembangan SPAM Regional Petanglong

d. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kondisi capaian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Batang sebagai berikut :



Gambar 4. 16 Cakupan pelayanan Air Limbah Domestik
Sumber : simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id dan SSK 2023

Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi layak (kloset menggunakan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik);
- ✓ Meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi aman (rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 3-5 tahun terakhir);
- ✓ Peningkatan sarana prasarana layanan pengelolaan air limbah dengan mengoptimalkan IPLT Randukuning;
- ✓ Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik
- ✓ Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan;
- ✓ Penguatan kelembagaan dan kemampuan manajemen pengelolaan air limbah domestik (belum ada UPTD PAL);
- ✓ Meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

e. Jalan dan Drainase Lingkungan

Isu Permasalahan dan Kebutuhan Penanganan sebagai berikut :

Tabel 4. 14 Penanganan Jalan dan drainase Lingkungan

Aspek	Isu Permasalahan	Kebutuhan Penanganan
Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan dalam kondisi sedang – buruk • Pengembangan jalan coastal road	• Pengaturan pembangunan dan pemanfaatan jalan lingkungan • Pembangunan jalan lingkungan baru • Perbaikan jaringan alan yang mengalami kerusakan
Drainase	• Kurang baiknya kondisi drainase lingkungan • Sedimentasi sungai • Sistem drainase tercampur oleh air hujan dan air buangan rumah tangga	• Penyusunan regulasi terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan • Membangun drainase baru • Memisahkan saluran drainase dari saluran air limbah

Aspek	Isu Permasalahan	Kebutuhan Penanganan
	• Sebagian besar saluran drainase dalam keadaan kurang memadai • Banyak saluran yang tidak berfungsi • Terdapat beberapa kawasan jalan yang belum memiliki drainase • Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase masih rendah	• Memperbaiki saluran drainase yang rusak

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang, 2024

k) Penanganan Banjir Rob dan Abrasi Pantai

Kerusakan terparah terjadi di sepanjang Pantai Sigandu hingga Ujungnegoro. Abrasi ini telah merusak bangunan milik pelaku dan menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian. Jika dibiarkan, maka kerusakan lingkungan menjadi semakin parah. Hasil identifikasi dari tahun 2009 hingga 2017 garis pantai mengalami kemunduran antara 50 m - 100 m. Garis pantai terbagi dalam 3 segmen dengan kondisi sebagai berikut :

1. Segmen 1 : batas Kabupaten Pekalongan - dermaga batang dengan 3 titik abrasi sebagai berikut :
   - Abrasi 1 seluas 87,287 m^2 di desa Denasri Kulon
   - Abrasi 2 seluas 9.533 m^2 di desa Kasepuhan
   - Abrasi 3 seluas 10.103 m^2 di desa Karangasem Utara

   Kondisi Eksisting Intrusi Air Laut desa Luas Area genangan 3,022,841 m^2 didesa Denasri kulon, Denasri Wetan.
2. Segmen 2 : dari pantai Sigandu – Ujungnegoro dengan 4 titik abrasi sebagai berikut :
   - Abrasi 4 seluas 48.408 m2 di desa Klidang Lor
   - Abrasi 5 seluas 5.791 m2 di desa Klidang Lor
   - Abrasi 6 seluas 76.493 m2 di desa Depok
   - Abrasi 7 seluas 4.844 m2 di desa Ujungnegoro Tulis

   Kondisi Eksisting Kerusakan Bangunan disekitar pantai sigandu.
3. Segmen 3 : dari Ds Kenconorejo Kec Tulis - Ds Yosorejo Kec Gringsing dengan 1 titik abrasi sebagai berikut :
   - Abrasi 8 seluas 27.585 m2 di desa Gondang Kec Subah

   Kondisi Eksisting Pencemaran Lingkungan tidak ada hanya sebagian titik titik lokasi sampah di pantai.

   Kondisi Eksisting Sedimentasi berada di pantai Roban

Rencana Penanganan Banjir, Rob dan Abrasi Pantai sebagai berikut :

- Penataan permukiman/ fasilitas umum dan Kawasan
- Perlu penataan kawasan pertanian dan perkebunan

- Instrumen AMDAL, UKL UPL Program Kali Bersih
- Program Pantai Lestari
- Penyediaan air bersih
- Konservasi dan rehabilitasi mangrove
- Pembatasan pembuatan sumur dalam
- Perbaikan system drainase
- Penataan Kawasan pantai pantai
- Dilakukan kegiatan perawatan alur
- Dilakukan kegiatan perawatan dan monitoring
- Dilakukan kegiatan rehabilitasi dan perbaikan bangunan
- Perlu dibuatkan bangunan pantai sebagai pelindung
- Penyuluhan masyarakat Pantai mengenai pentingnya terumbu karang
- Penyuluhan manfaat hutan mangrove terhadap pengamanan Pantai
- Pembangunan bangunan penghambat laju erosi disesuaikan penyebabnya

Adaptasi lingkungan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penanaman Mangrove
2. Relokasi Bangunan
3. Pemasangan Batu
4. Pemasangan Trucuk Bambu
5. Pemasangan Geotube
6. Reklamasi Pantai

l) Arah Kebijakan yang mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Batang

Ketahanan pangan di Kabupaten Batang melibatkan kerjasama dari berbagai lintas sektoral. Ketahanan pangan ditujukan untuk mengantisipasi kerawanan dan krisis pangan di daerah karena suatu kondisi serta untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyakarat. Kebijakan ketahanan pangan ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Batang.

Selain dukungan dari terbitnya Perbup tersebut, beberapa kebijakan spesifik yang mendukung ketahanan pangan daerah antara lain :

1. *Food Loss* dan *Food Waste*

Komitmen Pemerintah Kabupaten Batang untuk menurunkan angka Food Loss dan Food Waste dilakukan melalui sosialisasi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang kepada masyarakat untuk meningkatkan praktik penanganan pangan yang baik (good handling practices) dengan selalu menghabiskan makanan yang dimakan atau makan sesuai porsi yang dibutuhkan. Penurunan angka food loss dan food waste menjadi hal yang penting dilakukan karena syarat tercapainya

ketahanan pangan suatu daerah adalah adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan gizi bagi penduduk. Bahan pangan yang dapat diproduksi di dalam daerah diupayakan tetap menjadi pilar utama dalam penyediaan pangan daerah

2. Konsep Lumbung Pangan

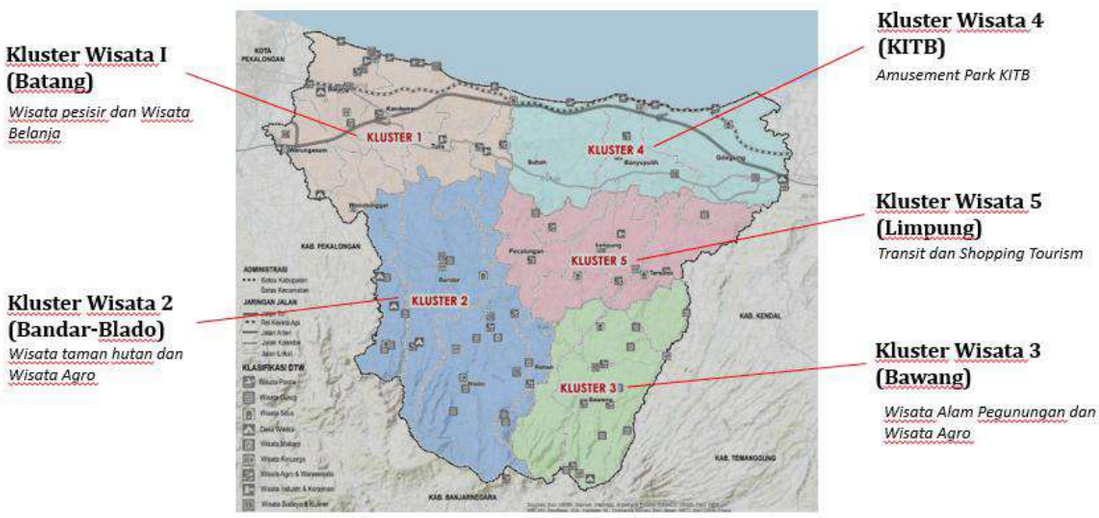
Lumbung Pangan ditujukan untuk menopang ketahanan Kebutuhan Pangan daerah. Terdapat 4 lumbung pangan yang telah diresmikan di Kabupaten Batang antara lain

a. Pengadaan Th 2021: Desa Pejambon (kec warungasem)
b. Pengadaan Th.2022 : desa wonobodro kec. Blado
c. Pengadaan Th 2022 : desa sidorejo kec. Gringsing
d. Pengadaan 2022 : desa tersono kec. Tersono

m) Arah Pengembangan Pariwisata

a. Pengembangan Kluster Pariwisata

Pengembangan kluster pariwisata Kabupaten Batang yang terbagi dalam 5 kluster pengembangan, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut ini :



Gambar 4. 17 Pengembangan Kluster Pariwisata Kabupaten Batang
Sumber : Kajian Pariwisata Kabupaten Batang

b. Pengembangan *Community Based Tourism* – Desa Wisata

Ekosistem pariwisata Kabupaten Batang yang sudah terbentuk saat ini terdiri dari beberapa kelompok yaitu berbasis komunitas, dikembangkan swasta, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Batang memiliki peran fasilitasi dan regulasi sehingga seluruh komponen dari ekosistem dapat berjalan lancar dan terintegrasi untuk saling memberikan dampak positif.



Gambar 4. 18 Peta Wisata Desa Kabupaten Batang
Sumber : Kajian Pariwisata Kabupaten Batang

Community Based Tourism – Desa Wisata dalam pengembangannya didukung dengan peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan serta memperhatikan faktor *Ancilliary* atau pelayanan tambahan sebagai pendukung kepariwisataan di Kabupaten Batang

n) Arah Kebijakan dalam Mendukung Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Batang diarahkan kepada pengembangan kawasan yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan kawasan industri. Diharapkan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan industri dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah, mendorong kemandirian daerah dalam kemampuan keuangan dan kesejahteraan masyarakat serta tetap mempertahankan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

Kawasan industri di Kabupaten Batang yang telah berdiri dan sedang dikembangkan yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang berada di Kecamatan Banyuputih dan Gringsing, dan Batang Industrial Park (BIP) yang berada di Kecamatan Tulis. Di samping itu masih ada rencana pengembangan kawasan industri baru yang juga berlokasi di Kecamatan Tulis.

Berdasarkan tinjauan lokasi kawasan industri di Kabupaten Batang memiliki akses yang baik dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Pekalongan, dan Semarang serta dengan adanya jalan tol Trans Jawa. Akses melalui jalan non-tol juga tersedia khususnya menuju lokasi tapak yaitu jalan raya Pantura. Hal ini juga mendorong bertumbuhnya kawasan penyangga di sekitar kawasan industri, terutama sektor perumahan dan penyediaan barang jasa yang membutuhkan infrastruktur pendukung kawasan. Kebutuhan *supply chain* (semisal penyediaan kardus untuk bungkus produk tertentu) dalam kawasan juga berpotensi untuk dikerjakan oleh investor lokal sehingga dapat meningkatkan usaha UMKM. Keberadaan kawasan industri akan membutuhkan kurang lebih 300 ribu tenaga kerja dan secara demografi mendorong perubahan mata pencaharian masyarakat di sektor agraris menuju sektor industri. Untuk itu diperlukan pelatihan agar siap untuk dipekerjakan. Isu lingkungan juga tetap menjadi perhatian utama agar keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang dapat dipertahankan kualitasnya.

Strategi pengembangan kawasan industri

Upaya dan strategi dalam mencapai tujuan sasaran pengembangan kawasan industri :

1. Mengarahkan pengembangan kawasan penyangga di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial Park (BIP) dalam bentuk pengembangan infrastruktur pendukung :
    - Pembangunan dan pengembangan jalan akses baru (termasuk jembatan dan drainase) melalui pertigaan Banyuputih tembus ke arah jalan kabupaten Kedawung-KITB, penyediaan kawasan permukiman dan penyediaan barang jasa dengan panjang 25 km dan lebar 12 m.
    - Pembangunan dan pengembangan jalan akses baru (termasuk jembatan dan drainase) melalui jalan pantura Tulis menuju BIP dengan panjang sekitar 4 km dan lebar 12 m.
    - Penyediaan lahan permukiman dan perumahan di sekitar Kecamatan Gringsing, Banyuputih, Limpung untuk mendukung KITB.
    - Penyediaan transportasi massal.
    - Penyediaan lahan permukiman dan perumahan di sekitar Kecamatan Tulis, Bandar, Kandeman untuk mendukung BIP.

- Pembangunan dan penyediaan sistem jaringan air minum di Kecmatan Banyuputih.
- Mendorong peran serta BUMD dalam kerjasama investasi di dalam kawasan industri.

2. Pemberdayaan UMKM untuk mendukung *supply chain* di kawasan industri dan kebutuhan barang jasa di kawasan penyangga.
   - Pembangunan dan pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) di dalam KITB yang terdiri dari pembangunan rest area, pusat UMKM, ruko, hotel, pergudangan dan perkantoran.
   - Inisiasi penyediaan kebutuhan dasar seperti katering, laundry, kos, kontrakan dan sebagainya yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha desa dengan profesional.
   - Kemudahan permodalan dan pelatihan UMKM.
3. Percepatan kesiapan penyediaan tenaga kerja
   - Pengadaan data base tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan industri.
   - Pembangunan gedung BLK beserta sarana prasarana pendukung di Kecamatan Batang.
4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
   - Mengembangkan sarana prasarana pendukung pengukuran kualitas air dan udara di seluruh sungai dan kawasan industri di Kabupaten Batang.
   - Mendorong komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.
   - Memperbanyak tutupan lahan terutama lahan kritis di kawasan lindung di Batang bagian selatan.
   - Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Gringsing.

Aksesibilitas Kawasan Industri dengan Kawasan Penyangga

Jalan Kabupaten cukup penting sebagai akses menuju KITB dan juga digunakan masyarakat dalam setiap hari, terdapat dengan kondisi jalan yang rusak karena dilewati kedaraan berat dalam masa pembangunan KITB. Selain itu lebar jalan yang hanya 4 meter diperkirakan akan menghambat aksesibilitas dan berpotensi terjadi kemacetan di waktu mendatang, terlebih belum tersedianya moda angkutan umum yang pasti dan menjangkau Kawasan Industri.

Jalan yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja BIP, dengan kondisi saat ini:

- Jalan Bandar – Tulis, panjang 10 Km lebar 4 m. Jalan ini membelah KI BIP, menghubungkan pantura Kec Tulis dan bandar.
- Jalan Tulis – Batiombo, panjang 4,3 Km lebar 4 m. menghubungkan pantura tulis dari arah barat
- Jalan Cempereng – Botolambat, panjang 5 Km lebar 4 m. menghubungkan pantura Kandeman

Jalan yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja KITB, dengan kondisi saat ini:

- Jalan Plelen – Kedawung, panjang 11,6 Km lebar 4 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Gringsing
- Jalan Banyuputih – Kedawung, panjang 7,35 Km lebar 4 m. merupakan jalan masuk dari Pantura Banyuputih
- Jalan Kedawung – Mangunsari, merupakan jalan yang melewati KI menghubungkan Dukuh Mangunsari dan Pantai Celong.
- Jalan Kalimanggis – Kedawung Pos, panjang 5.5 Km lebar 3 m. merupakan jalan masuk dari Pantura Subah
- Jalan Subah – Kedawung, panjang 10,2 Km lebar 4 m merupakan jalan masuk dari Pantura Subah



Gambar 4. 19 Aksesibilitas menuju Kawasan Industri
Sumber : Bapelitbang, 2023

4.3 Inovasi Kabupaten Batang

Pada tahun 2023 ini, terdapat 70 Perangkat Daerah yang memiliki inovasi daerah yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dengan masing-masing kategori sebagai berikut:

Gambar 4. 20 Daftar Inovasi di Kabupaten Batang Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
1	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG	SINAWAS (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan)
		LAKON'E (Lapor dan Konsultasi Elektronik)
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG	JDIH DPRD Batang Terintegrasi
		E-Aspirasi
		Digital Library DPRD
		Pojok UMKM DPRD Kabupaten Batang
3	SATPOL PP KABUPATEN BATANG	MAS-Linmas
		LAPOR-PP
4	BAPELITBANG KABUPATEN BATANG	(DELIMA) Digitalisasi Izin Magang dan Penelitian
		Sentra Kekayaan Intelektual (HKI)
5	BPKPAD KABUPATEN BATANG	E-BPHTB
		E-PBB (Implementasi Digitalisasi Pelaporan dan Elektronifikasi Pembayaran pajak Bumi Bangunan)
		E-SPTPD
		GEBYAR PAJAK
		SIMPATDA
		SP2D ONLINE
		SIKEND (SISTEM INFORMASI KENDARAAN)
		E-LAYANAN (Digitalisasi Pelayanan Perubahan Pajak Bumi Bangunan)
		SENSUS PAJAK
		BILLING CENTER
		BULAN KEPATUHAN PAJAK
		EPERBEND (Sistem Informasi Penyelenggaraan Perbendaharaan Derah)
		SIM Aset (Sistim Informasi Pengelolaan Aset Daerah Terintegrasi)
6	BKD KABUPATEN BATANG	E-Kinerja
		E-Presensi
		SIMPEG Plus Pelayanan Kepegawaian Online
		Portal Aplikasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang
		Channel YouTube : BKD Kabupaten Batang
		E-Jabatan
		Si-Elang
7	BAKESBANGPOL KABUPATEN BATANG	SIOPA (Sistem Informasi Pengawasan Ormas, Parpol dan Orang Asing)
8	BPBD KABUPATEN BATANG	SIPITUNG (Siaga Pitulungan)
		SILADNA
		Alibaba (Aplikasi Layanan dan Informasi Bencana Batang)
		BASKOMLOG (Bantuan Satu Komando Logistik Penanggulangan Bencana)
9	DISDIKBUD KABUPATEN BATANG	Penerimaan Peserta Didik Baru Online Jenjang SMP
		Bandikmenti (Aplikasi Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik pendidikan menengah dan mahasiswa berprestasi)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		PAUD Holistik Integratif (Penurunan Stunting melalui kegiatan PAUD Holistik Integratif secara berkala)
		Transisi PAUD ke SD untuk menjembatani dan tidak menciptakan halangan tumbuh kembang anak
10	DINAS KESEHATAN BATANG	E-Logis (Elektronik Logistik Obat Di Puskesmas)
11	DPUPR KABUPATEN BATANG	Batang Smart Spasial Sistem (BS3)
		Sijantan (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan) Kab. Batang
		Layanan Perizinan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha Online
12	DPRKP KABUPATEN BATANG	CIAMIK (Citra Manajemen Perumahan dan Kawasan Permukiman)
		Mas Darsani (Masyarakat Sadar Sanitasi dalam rangka percepatan ODF Memfasilitasi Masyarakat memiliki jamban sehat)
13	DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG	Sistem Informasi Santunan Kematian (e-Sakti)
		Sistem Informasi Santunan Kematian (e-Sakti)
		PUSKESSOS (Pusat Kesejahteraan Sosial)
14	DISNAKER KABUPATEN BATANG	Batang Career
		Sistem Informasi Data Hubungan Industrial (SIDAHI)
		Sistem Seleksi Online Peserta Pelatihan di Era Pandemi (SILENI)
15	DP3AP2KB KABUPATEN BATANG	TERAJANA (Integrasi Laporan Jejaring Dan Jaringan Keluarga Berencana)
		SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak)
		NGOPI KENCANA (Ngobrol Pagi Keluarga Berencana)
		CETING NGANTEN (Cegah Stunting Melalui Pendampingan Pengantin)
		NYANTING (Nyambangi Kasus Stunting)
		SAPA KELUARGA (layanan informasi dan konsultasi terkait permasalahan perempuan, anak, dan keluarga)
		EMPING GARING (Elektronik Monitoring Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting)
16	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG	Budidaya Coro Pedang dan Budidaya Talas Pratama
		Penelitian Pupuk Organik
		e-Pertanian
		SIKEP
		E- Farming
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG	Pembentukan Pasukan Got
		Aplikasi Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan
		Pengelolaan Bank Sampah
		Inovasi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)
		Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Kerajinan
		Pengolahan Limbah dengan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah)
		Pengolahan Limbah dengan Biodigester
		Gerakan Setor Sampah Setiap Jum'at di OPD Kab. Batang
18	DISDUKCAPIL KABUPATEN BATANG	SIPPADUKA (Integrasi Pelayanan Pengadilan Agama, Disdukcapil dan KUA dalam hal perubahan status perkawinan)
		Podcast (Pelayanan Online Disdukcapil dengan Smathphone baik berbasis mobile)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		SISUK SARAHAN (SIAK Masuk Desa Kelurahan)
		Calon Manten (Catatan Sipil Online untuk Masyarakat Kabupaten Batang)
		Cekatan (Cetak dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa turun dari Kendaraan (drive thru))
		Susis Bakpia (Semua Siswa Bakal Punya Kartu Identitas Anak)
19	DISPERMADES KABUPATEN BATANG	Pengisian Perangkat Desa Sistem CAT
20	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG	ATCS (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM)
		Penyelenggaraan Layanan KIR Online
21	DISKOMINFO KABUPATEN BATANG	SIGADIS (Desiminasi Data Statistik Sektoral dengan Infografis)
		Dashboard Sistem Informasi Eksekutif
		Penyelenggaraan Integrasi Layanan Panggilan Darurat 112 di Wilayah Kabupaten Batang
		Penerapan Sistem Perkantoran Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik (Tanda Tangan Elektronik)
		Pembuatan E-Kliping Berita Daerah
		Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Android
		Podcast Special Bincang Batang
		Batangkab CSIRT
		Media Analitics
		SI TIKA (Sistem Informasi Statistik Sektoral)
		Perluasan Pengawasan Area Publik dengan CCTV
		Perluasan Jaringan Komunikasi Radio Komunitas
22	DISPERIDAGKOP & UKM KABUPATEN BATANG	CINTA PRODUK Batang
		KLINIK BISNIS (Sistem informasi dan sentra layanan konsultasi dan fasilitasi bisnis bagi Industri Kecil dan Menengah)
		E-Retribusi (Pengoptimalan restribusi darimenggunakan sistem elektronik)
23	DPMPTSP KABUPATEN BATANG	Mal Pelayanan Publik Kab. Batang
		Percepatan Pelayanan SIM Drive Thru Perpanjangan SIM A dan SIM C di Mal Pelayanan Publik Kab. Batang
		SIPUAS (Gerakan Setor Sampah Setiap Jum'at di OPD Kab. Batang)
		Service Point Pelayanan Perizinan Usaha
24	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG	Pembuatan buku E-katalog Ekonomi Kreatif
		Penerapan E-Tiketing
		Sinergitas Sistem Data Dan Pelaporan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Branding Batang melalui Kalender Event/Kalender Pariwisata
25	DISPERPUSKA KABUPATEN BATANG	SIMARDI (Sistem Manajemen Arsip Dinamis)
		JIKD (Jaringan Informasi Kearsipan Daerah)
		e-Perpus Batang
		Soleha (Strategi Olah Arsip Efektiv Dan Handal)
		Rasah Tuku (Gerakan Satu Orang Hibah Satu Buku)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		Sapu Geni (Saka Pustaka untuk Gerakan Literasi Berbasis Inklusi Sosial)
		ARTIS (Layanan Peminjaman Arsip Statis
		TELENOVELA (Memasyarakatkan Literasi dengan Program satu Desa Satu Perpustakaan)
26	DISLUTKANNAK KABUPATEN BATANG	APLIKASI PENERBITAN REKOM BBM SUBSIDI
		APLIKASI PROFIL NELAYAN KECIL
		Aplikasi Profil Unit Pengolahan Ikan (UPI)
		Demplot Budidaya Ikan Air Payau (Polikultur Kerapu dan Bandeng) di Tambak
		Penandaan dan Pendataan Hewan menggunakan eartag berbasis aplikasi dengan scan barcode
		Pengelolaan Limbah Batubara Menjadi Rumah Ikan
27	BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG	Pembuatan Aplikasi Penyusunan Data Base LPPD dan LKPJ tahun 2024
28	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG	LAKON (Layanan Konsultasi) JDIH Kabupaten Batang
		Podcast JDIH
		Lomba menulis esai hukum
		Lomba Pengelolaan JDIH Pemerintah Desa
		Lomba menulis esai hukum
		Ebook JDIH
		E-Sakip
		Penyelenggaraan dan Pengembangan Layanan Simpelbang (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan)
		SIPemerintahan Batang
		e-Agenda
		DIGITAL Kliping Internal Prokompin
29	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BATANG	Simpelbang NG (Sistem Informasi Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan New Generation) alamat web: simpelbang.Batangkab.go.id
30	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN BATANG	BPR BAPERA VIRTUAL ACCOUNT
31	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BATANG	E-Sakip
32	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN BATANG	CILOG (LOMBA CIPTA LOGO DALAM RANGKA HUT KABUPATEN Batang)
		DIKENAL Prokompin (DIGITAL Kliping Internal Prokompin)
33	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BATANG	e-Agenda
34	KECAMATAN BATANG	SISTEM INFORMASI DESA (SID)
		Program Digitalisasi Buku Letter C Desa (PROTADES)
		PERMADANI (Persaudaraan Madani)
		ANTI GRATIFIKASI, SUAP dan KORUPSI
35	KECAMATAN TULIS	SISTEM INFORMASI DESA (SID)
		Program Digitalisasi Buku Letter C Desa (PROTADES)
		One Point Service
36	KECAMATAN WONOTUNGGAL	GERTAK PBB (Gerakan Serentak Pembayaran PBB)
37	KECAMATAN WARUNGASEM	LAPOR CAMAT WARAS
38	KECANATAN BLADO	Cepat Halalin
39	KECAMATAN BANDAR	Warung Pelayanan

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
40	KECAMATAN REBAN	Gebyar Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Serentak
41	KECAMATAN KANDEMAN	Monev SERASI (Senyum Ramah Selalu Inovatif)
42	KECAMATAN TERSONO	MANIS LEGIT SI GULA SEMUT
43	KECAMATAN GRINGSING	Desa LUK (Laboratorium Unit Kerja)
		GAPS (Gringsing Ayo Pilah Sampah)
		KETAN (Kecamatan Ramah Anak)
44	KECAMATAN BAWANG	Percepatan Pelayanan Perijinan melalui Klinik OSS menuju optimalisasi pemberdayaan UKM di Kecamatan Bawang Kab.Batang
45	KECAMATAN BANYUPUTIH	Kegiatan Gerakan Serentak Lunas Pajak PBB (GERTAK LUPA PBB)
46	KECAMATAN LIMPUNG	Gebyar PBB Serentak
47	KECAMATAN PECALUNGAN	Creative Farm
48	KECAMATAN SUBAH	Digitalisasi UMKM
		"Angkringan Ijin Usaha Mikro dan Kecil" Melalui pelayanan keliling ke Desa dan tempat keramaian (pasar)
49	RSUD BATANG	My RSUD Batang
50	RSUD LIMPUNG	Si Emping RSUD Limpung
		Elektronik Rekam Medis (ERM) RSUD Limpung
51	PUSKESMAS GRINGSING 1	SABTU BERKAH (abtu Bersama Makan Buah)
		SINGSET PUBER (Gringsing Sehat Pantau Bersama)
		SENIN AMUNISI
		SELASA AKRAB
52	PUSKESMAS BATANG 2	SUKET BIRU (Suluh Kesehatan Berhenti Merokok Yuk)
		KULTUM KIA (Kuliah Tujuh Menit buku KIA)
		BIOPORI ALAS ROBAN (Atasi Limbah Sampah Organik Karo Banjir)
		AKU GEMES (Aksi Menuju Generasi Merdeka Stunting)
		DIGAJI HEBAT (Gangguan Jiwa Harus Minum Obat)
		NYEDAK RONDHO (Nyetor Dahak Loro TBC Endho)
		PORA CETAR (Pojok Ramah Anak Cerdas Pintar)
53	PUSKESMAS BANDAR I	SIGITAR TUA (Implementasi Gigitan Ular Terkini dan Aktual)
		SAIFA (Sahabat Ibu Nifas)
		SADESAWAT (Satu desa satu perawat)
		KOPI PINTAR (Program Promkes dengan melakukan pemberian fotocopi materi saat penyuluhan kepada peserta agar bisa di baca dan dipelajari dengan baik)
		JEJAMA (Jelajah jamban masyarakat)
		KURMA MANIS (Kunjungan rumah ibu nifas dan bayi baru lahir)
		UBER SI MIKO (Berburu dengan investigasi microbacterium)
		KAMPAS (Kampanye peduli stunting)
		GREBEG MIKORESA PLUS PLUS
		GEPREK PITIK
		GEPREK BASO
54	PUSKESMAS BAWANG	BINA ASI (Bapak Ibu Nenek, Aku Mau Asi Eksklusif ini)
		CETING MAS (Cegah Stunting dengan Wong Meteng, ASI Eksklusif dan Sanitas)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		JUS TOMAT (Jumat Sehat Temukan Obat TB Masyarakat)
55	PUSKESMAS PECALUNGAN	JBRET (Jumat Berkah Entuk Sehat)
		SADESAPER
		GREBEG TIK-TOK (Tim gerak cepat terhadap kejadian penyakit menular (DBD))
56	PUSKESMAS REBAN	GEMBIL (Gerakan Bersama Jaga Ibu Hamil)
		POSYANDU CENDIKIA
		PLESIR
57	PUSKESMAS SUBAH	DE BASINEM (Desa binaan ASI thok nem wulan)
		PIJAT MESRA (Pijat mesra berupa pijak oksitocin yang merupakan pemijatan pada sepanjang tulang belakang)
		GERAK PESAT (Gerakan Serentak Pesan Singkat)
		SI GESIT IRIT (Diskusi gerakan komunikasi interaktif dan deteksi resiko tinggi)
58	PUSKESMAS BLADO I	BAMBANG TILANG (balita ditimbang stunting Hilang)
		JABAT KASIH (Jamban Sehat,kaline bersih)
		LASEGAR (Lansia Sehat dan Bugar)
		ANTI BAPER (Ayo Tingkatkan Imun bebaskan penyakit Tidak menular)
		SIDIKJARI (Sistim Informasi Dini Kesehatan Jiwa Mandiri)
		PIPI BAPAO (Pijat Pijat buat anak sehat tanpa obat)
		JAHE CANTING (Remaja Hebat Cegah Stunting)
		SIBUNTAR (Kelas Ibu Pintar)
59	PUSKESMAS BLADO II	Goyang Ibu Hamil Mantap
		Susu Sapi (Susunan Surat Satu Pintu)
		Jebol Gravitasi (Jemput Bola dengan Gerakan Bersama melawan Covid-19 melalui Tanggap Vaksinasi)
		Sambar Nasehat (Senam Bersama Guna Sehat Bersama dan Jum'at bersih)
		Sisuper Limbad (Aplikasi Surat Perjalanan Dinas Puskesmas Blado Dua)
		Safari Kesehatan (Pelayanan peningkatan upaya promotif, preventif Puskesmas di Luar gedung dengan cara Jemput Bola ke Desa Binaan secara berkala)
		Gemindu (Gerakan Mobile Posbindu)
60	PUSKESMAS BATANG 1	Gerak Berjuang (Gerakan ber KB jangka panjang)
		Siduta (Pemberian ASI 2 tahun)
61	PUSKESMAS BANDAR 2	GERSANG JIWA (Program Kesehatan Jiwa yang dilatarbelakangi banyaknya kasus gangguan jiwa)
		KAKA DESI (Kader kesehatan deteksi tuberkulosis)
62	PUSKESMAS KANDEMAN	SIMAMAT (Pengisian Materi 5 menit)
		PONLINE (PENDAFTARAN ONLINE)
		Media sehat Puskesmas Kandeman
63	PERUMDA AIR MINUM SENDHANG KAMULYAN	Aplikasi Banyu
		Tim ULC (Unit Layanan Cepat)
		Sistem Informasi Pelanggan Baru (SIMPB)
		Web GIS SPAM dan Pelanggan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		Sistem Informasi Skematik SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan Monitoring Data Logger
64	PUSKESMAS BATANG 3	BUCIN (Rabu Cerita Informasi Kesehatan)
		SPIK (Seputar Informasi Kesehatan)
		Desa Binaan "Sego Ceting ASIEX"
65	PUSKESMAS BANYUPUTIH	PENTOL PUTIH (Pendaftaran Online Puskesmas Banyuputih)
66	PUSKESMAS LIMPUMG	TIGER PATAS Puskesmas Limpung
		MAS DAESANI Puskesmas Limpung
		MAIN GASING Puskesmas Limpung
		KURAS ANIK Puskesmas Limpung
67	PUSKESMAS GRINGSING 2	Saking Cinta (Deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA)
		Pijat Oksitosin (Kegiatan memijat punggung ibu paska bersalin)
		Kebuli dalam Ceting (Kegiatan pembelajaran kelompok balita dengan sasaran ibu)
		Jamali TB (Kegiatan deteksi dini/penemuan kasus TBC)
		Kejar Bumil (Kegiatan dalam rangka penurunan AKI dan AKB)
		Gebrak DB (kunjungan keluarga kasus (pe) dan gerakan kader untuk pemantauan jentik berkala di RT keluarga)
68	PUSKESMAS TULIS	PUSKESMAS SANTUN LANSIA
		PUSKESMAS RAMAH ANAK
		SI PITUNG (Edukasi kesehatan dalam gedung durasi 7 menit)
		PAJERO SIDIA (PELAYANAN JEJARING SOSIAL MEDIA)
		Jumatik (Pelacakan dan pemberantasan jentik nyamuk)
		PEGANG GRAJI (Pemeriksa Orang Dengan Gangguan Jiwa)
		POTENSI (Pemeriksa Dengan Hipertensi)
		DESI ASIK (Desa Binaan ASI EKSKLUSIF)
		PASUTRI HAMIL (Pelayanan USG Trimester 1 &3 Ibu Hamil)
		GADIS MANIS (Gerakan Deteksi Dini Metode IVA & Sadanis)
		KADUS NINGRAT (Keluarga Peduli Skrining Bayi Baru Lahir Sehat)
		GEMPITA NING RATRI (Gerakan Minum Table FE dan Skrining Remaja Putri)
69	PUSKESMAS TERSONO	MISTORMIL (Kamisan Monitor ibu Hamil. Kegiatan bertujuan untuk menekan angka kematian ibu bersalin)
		GRABS (Gerakan Anti Buang air besar Sembarangan)
		PDKT (Penyuluhan dan edukasi kesehatan Terpadu, penyuluhan ke desa dengan berbagai disiplin ilmu atau tenaga kesehatan)
		KAMPUNG IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat merupakan salah satu metode deteksi dini untuk kanker serviks)
		TEBAS TB (Tersono Bebas TB)
70	PUSKESMAS WARUNGASEM	Inisiasi Kader Desa Siaga Sehat Jiwa
		Kepiting Cabe (Keluarga Peduli Stunting Cegah dengan Berkabe)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
71	PUSKESMAS WONOTUNGGAL	PURA BALI (Puskesmas ramah balita dan lansian)
		SI - GOLAN (Pelayanan jemput bola pada pelayanan Posyandu Lansia bagi Lansia yang tidak bisa datang ke Posyandu)

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang, 2024

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Kerangka Pendanaan Tahun 2025 Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2025 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 1
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**407.759.182.058**
Pajak Daerah	230.125.000.000
Retribusi Daerah	154.733.598.738
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.783.126.320
Lain-lain PAD yang Sah	6.117.457.000
PENDAPATAN TRANSFER	**1.566.288.258.378**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.851.006.578
Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**480.000.000**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	480.000.000
Jumlah Pendapatan	**1.974.527.440.436**
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	**1.488.676.679.523**
Belanja Pegawai	905.659.544.885
Belanja Barang dan Jasa	504.167.409.085
Belanja Hibah	69.005.437.553
Belanja Bantuan Sosial	9.844.288.000
BELANJA MODAL	**170.283.413.975**
Belanja Modal Tanah	100.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.119.970.223
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.572.307.077
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.907.212.675
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.233.924.000
Belanja Modal Aset Lainnya	350.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**12.000.000.000**

URAIAN	JUMLAH
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000
BELANJA TRANSFER	**363.567.346.938**
Belanja Bagi Hasil	19.743.886.738
Belanja Bantuan Keuangan	343.823.460.200
Jumlah Belanja	**2.034.527.440.436**
Total Surplus/(Defisit)	**(60.000.000.000)**
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**70.000.000.000**
Penerimaan Pinjaman Daerah	70.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**10.000.000.000**
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10.000.000.000**
Pembiayaan Netto	**60.000.000.000**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**
TOTAL APBD	**2.044.527.440.436**

Sumber : Penyusun, 2024

5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Mendasarkan kerangka pendanaan, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Pada Tabel 5.2 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar,18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan,2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) urusan pengawasan, serta 15 (limabelas)) unsur kewilayahan

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan pendidikan PAUD, dan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang didukung dengan pembangunan atau Rehabilitasi sedang/berat unit sekolah baru, ruang kelas, ruang guru, serta fasilitas sekolah lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka partisipasi sekolah dan persentase capaian SPM Pendidikan serta difokuskan juga untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Prosentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan melalui Perhitungan, Pemetaan, serta penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase guru berkualifikasi S1/D4.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, terselenggaranya sistem informasi kesehatan terintegrasi, serta kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang kesehatan serta difokuskan juga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan melalui pemberian jaminan kesehatan pada masyakarat miskin.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten melalui Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan, kegiatan pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan dan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten melalui Perencanaan, distribusi, pemerataan, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Kompetensi Teknis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten Kota melalui Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber daya manusia

kesehatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase tenaga kesehatan yang berizin.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui pengendalian, pengawasan, penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTP sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dan Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga melalui Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Peningkatan upaya promosi kesehatan,

advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita serta difokuskan untuk mendukung percepatan penunan stunting.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase luas sawah yang beririgasi dan rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Batang yang dilayani oleh jaringan irigasi.

b. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampang Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dari mulai penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pembangunan, peningkatan rehabilitasi sistem pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota serta Pembinaan dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase TPA dalam kondisi baik.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Kabupaten Batang serta

difokuskan juga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak dan Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) Skala Permukiman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah Kabupaten Batang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air dalam kondisi baik.

f. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Batang, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan gedung yang sesuai dengan peruntukan.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan dilaksanakan melalui : penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan; pengelolaan leger jalan; survei kondisi jalan/ jembatan; pembangunan jalan; pelebaran jalan menuju standar; pelebaran jalan menambah lajur; rekonstruksi jalan; pemeliharaan berkala jalan; pemeliharaan rutin jalan; pembangunan jembatan;

penggantian jembatan; pelebaran jembatan; rehabilitasi jembatan; pemeliharaan rutin jembatan; dan pemeliharaan berkala jembatan serta difokuskan juga untuk mendukung peningkatan daya saing daerah. Program penyelenggaraan jalan dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam).

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Program ini dilakukan untuk rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah beserta dengan pemanfaatan tata ruang dan diarahkan juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Program ini dilakukan guna mencapai indikator Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase RLH bagi korban bencana/ terdampak program pemerintah.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada : kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh; dan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase luasan

kawasan kumuh yang tertangani serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dilaksanakan melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penanganan gangguan Trantibum Linmas; Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota; Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; Pengembangan kinerja dan kapasitas Satlinmas Kabupaten/Kota serta difokuskan juga untuk mendukung peningkatan daya saing daerah. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase waktu tanggap *"response time"*.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada pengembangan potensi kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran tindak kekerasan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. pelaksanaan program ini guna mencapai indikator persentase Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang berhasil dipulangkan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar melalui penyediaan permakanan, Sandang, Alat Bantu, Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Pemberian Akses ke Layanan

Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dan Pemberian Layanan Rujukan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pengelolaan anak terlantar dan data miskin kabupaten melalui penjangkauan anak-anak terlantar dan data fakir miskin serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan memenuhi kebutuhan dasar bencana alam dan sosial dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang didukung dengan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial dan dengan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan memelihara Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang didukung dengan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, pemeliharaan, serta pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Kegiatan yang mengacu RTK

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta serta pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu rasio penduduk yang bekerja serta difokuskan juga untuk mendukung peningkatan daya saing daerah dan penanggulangan kemiskinan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya melalui kegiatan pelayanan antar kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase pencari pekerja yang mendapat pekerjaan.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan. Selain itu, melalui kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, program hubungan industrial diarahkan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu penurunan jumlah perselisihan HI.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG; Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui

advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak melalui pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak; Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator partisipasi angkatan kerja perempuan

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data melalui penyediaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan data pilah gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;

Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak; Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan kecamatan layak anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak; Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan; Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Indikator yang hendak dicapai dengan adanya program ini adalah cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan, termasuk penyediaan infrastruktur lumbung pangan, penyediaan infrastruktur lantai jemur, penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya serta difokuskan juga untuk mendukung peningkatan daya saing daerah. program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah melalui penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, dan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia serta difokuskan juga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan serta pembangunan secara berkelanjutan. Selain itu, program ini diarahkan pada pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten. Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah Skor Pola Pangan Harapan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan serta penanganan kerawanan pangan. melalui penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten; pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah. Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam, penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok serta difokuskan untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan pembangunan secara berkelanjutan. Adapun indikator yang

akan dicapai dengan adanya program ini adalah rasio desa mandiri pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan untuk menjaga persentase pengawasan keamanan pangan yang merupakan indikator yang ingin dicapai dari adanya program ini melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fasilitasi hak atas tanah program daerah dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui penyusunan dan penetapan RPPLH serta pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten Batang. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang serta pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah serta difokuskan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kondisi baik.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH serta pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan dengan pelaksanaan sosialisasi terhadap komunitas peduli LH. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penilaian sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah melalui penyusunan masterplan persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kegiatan pasukan got, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan sampah di Kabupaten Batang.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pencatatan sipil serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa penting. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan serta pemanfaatan dan penyajian database kependudukan. Program ini dilakukan dengan cara pengolahan

dan penyajian data kependudukan untuk mencapai indikator persentase penyajian data kependudukan yang valid.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan desa yang didukung fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase budaya desa yang dilestarikan.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang didukung dengan adanya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemdes, fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta penyelenggaraan kepala desa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Desa melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang didukung dengan fasilitasi kelembagaan desa, penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan desa, fasilitasi tim penggerak PKK, serta fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam peningkatan PAD serta difokuskan untuk penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk melalui penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK); Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal; Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal; Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal; Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal; Pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga; Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk melalui perumusan parameter kependudukan; Penyediaan dan pengolahan data kependudukan; penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga; Penyediaan data dan informasi keluarga; Pencatatan dan pengumpulan data keluarga; Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB; Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK serta difokuskan untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan audit stunting. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana .

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah; dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator peningkatan cakupan kesertaan Ber-KB serta difokuskan juga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL).

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, peningkatan kapasitas penilai Andalalin, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin, serta audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan. Program ini dilaksanakan untuk

mencapai indikator persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui pengelolaan media komunikasi publik; Layanan hubungan media; Pelayanan informasi publik; Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; Monitoring opini dan aspirasi publik; Manajemen komunikasi krisis; dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta difokuskan juga untuk mendukung peningkatan daya saing daerah. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten melalui penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah dan terselenggaranya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten melalui Pengelolaan pusat data pemerintah daerah; Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan kota cerdas; dan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jumlah layanan yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam satu daerah Kabupaten. Melalui

pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi, program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase koperasi aktif.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase peserta pelatihan dengan predikat baik.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada monitoring, evaluasi dan pendampingan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten serta pembinaan dan pengawasan koperasi. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase peserta diklat dengan predikat baik.

d. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM)

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase pertambahan wirausaha baru.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; promosi produk Usaha Kecil dan Menengah; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM serta difokuskan juga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan melalui fasilitasi kemitraan usaha mikro kecil. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase produk UMKM yang terstandarisasi.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan melalui penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota; penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota serta difokuskan juga untuk mendukung peningkatan daya saing daerah. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui penyusunan strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota melalui Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan; serta Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah jumlah izin usaha yang diterbitkan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui

koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda melalui koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota; pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan; pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Kabupaten/Kota; pemberian penghargaan pemuda dan

organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi; peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda; dan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera. Selain itu, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan juga diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha serta peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase organisasi kepemudaan yang dibina.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; serta pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah capaian medali kejuaraan.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik; peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah; pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah; penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah; penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; serta partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. Indikator yang akan

dicapai dengan adanya program ini adalah penghargaan yang diterima.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan statistik adalah program penyelenggaraan statistik sektoral. Program ini diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan,analisis dan diseminasi data statistik sektoral, membangun metadata statistik sektoral, pengembangan infrastruktur melalui pemeliharaan dan pengembangan sistem statistik sektoral, serta peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan persandian adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Program ini diarahkan pada pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan dan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator peningkatan jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan cagar budaya. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase benda cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota, penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan, kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota, dan kegiatan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota; pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI); serta penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah prosentase capaian produksi perikanan tangkap serta difokuskan juga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting melalui penyediaan sarana budidaya ikan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil melalui pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha serta pengelolaan pembudidayaan ikan melalui penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian produksi perikanan budidaya serta difokuskan juga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting melalui penyediaan prasarana budidaya ikan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air melalui pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah capaian bina kelompok masyarakat pengawas.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil melalui penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam satu daerah Kabupaten/Kota serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota melalui peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian tingkat konsumsi makan ikan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata diarahkan pada pengelolaan daya tarik wisata; pengelolaan kawasan strategis pariwisata;; pengelolaan destinasi pariwisata; dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah tingkat Kabupaten/Kota serta difokuskan juga untuk mendukung peningkatan daya saing daerah penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat pada kawasan strategis pariwisata. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata diarahkan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota; penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri; peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri; monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan wisatawan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur; pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif; fasilitasi kekayaan intelektual; perlindungan hasil kreativitas; penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif; dan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; pelatihan dasar sdm kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa); sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif; fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif; dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia Usaha; Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian melalui pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota melalui peningkatan kualitas SDG hewan / tanaman. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dan pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya; dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator capaian jumlah hewan yang terobati.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator jumlah asuransi usaha ternak sapi/kerbau dan calon/penerima (orang/perusahaan) pendampingan perizinan usaha peternakan

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa; dan pembentukan badan usaha milik petani. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian, Persentase validitas data Pertanian, dan Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan tanda daftar gudang; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator jumlah verifikasi teknis.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya melalui pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; dan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan; Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi; dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota; Pameran dagang nasional; Pameran dagang lokal; Misi dagang bagi produk ekspor unggulan; Peningkatan citra produk ekspor; dan pembinaan pelaku usaha ekspor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator nilai ekspor perdagangan.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang; Pengawasan/penyuluhan metrologi legal. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase pelaksanaan pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah pelaku IKM.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/ Kota.

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah perizinan berusaha sektor industri.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINas; dan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah industri dalam SIINas.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota melalui pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase transmigran yang berhasil ditempatkan serta difokuskan juga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan melalui penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan serta fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat melalui fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat, kegiatan fasilitasi

dan koordinasi hukum melalui fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, serta kegiatan fasilitasi kerjasama daerah melalui fasilitasi kerja sama dalam negeri. Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu, Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi, Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi, dan Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang didukung pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, dan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD; kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang didukung melalui Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang didukung melalui Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; serta kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang didukung Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan Air. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal), Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti, Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target, dan Persentase lelang melalui e-procurement.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Beberapa kegiatan dalam Urusan Sekretariat Daerah ada yang masuk ke dalam program penunjang. Kegiatan ini diarahkan dalam Penataan Organisasi, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,Fasilitasi

Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tingkat Kematangan OPD, Persentase Kegiatan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Kepala Daerah, Persentase layanan kebutuhan kantor yang terpenuhi, Persentase layanan kepegawaian yang terpenuhi, Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, melalui penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan Perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik. Kemudian, program juda diarahkan pada Pembahasan Kebijakan Anggaran, melalui pembahasan KUA dan PPAS. pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan Laporan Semester, dan pembahasan Pertanggungjawaban APBD. kemudian juga diarahkan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Setelah itu program juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dprd melalui pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi dewan, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan penyusunan program kerja DPRD. Arahan lain dari program ini adalah pada penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, melalui kunjungan kerja dalam

daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan pelaksanaan reses. Arahan lain yaitu pada pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, melalui pengawasan kode etik DPRD. yang terakhir program ini diarahkan pada fasilitasi tugas DPRD melalui koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah, dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peraturan daerah non APBD yang ditetapkan, persentase perda APBD yang ditetapkan, serta persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, melalui Analisis Kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis Pembangunan Daerah, Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun.

Kemudian program ini juga diarahkan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penyusunan Profil pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah data dan informasi yang tersedia.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah, melalui Monitoring, evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaporkan evaluasi tepat waktu

Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu, persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah, serta Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Kegiatan ini untuk memenuhi Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

kemudian terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Selain itu, terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil perencanaan bidang IPW.

Program ini dilakukan untuk mencapai target persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target, persentase indikator program pembangunan bidang PSDA yang mencapai target, dan persentase indikator program pembangunan bidang IPW yang mencapai target.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan

pengelolaan perbendaharaan daerah, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dipenuhi yaitu penyampaian Raperda APBD tepat waktu.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan melalui penyusunan standar harga penatausahaan barang milik daerah; pengamanan barang milik daerah; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator tersusunnya data aset Pemerintah Daerah menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemanfaatan, dan kondisinya.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui perencanaan pengelolaan pajak daerah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah; pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah; penetapan wajib pajak daerah; pelayanan dan konsultasi pajak daerah; penagihan pajak daerah; serta pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dicapai yaitu persentase peningkatan penerimaan PAD, penyampaian raperda pertanggungjawaban tepat waktu, dan persentase realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah. Program ini diarahkan pada kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, kegiatan mutasi dan promosi ASN, kegiatan pengembangan kompetensi ASN, dan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan sumber daya manusia. Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, melalui Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan. kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi target Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Kemudian Program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, melalui Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kajian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, melalui Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Serta program ini juga diarahkan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, melalui Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang

Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Program ini ini dilakukan untuk memenuhi target Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

F. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu melalui penyediaan bahan logistik kantor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah pemeriksaan yang dilakukan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada pendampingan dan asistensi melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Pengawasan kinerja pemerintah daerah; Reviu laporan kinerja; Reviu laporan keuangan; Pengawasan desa; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Kerjasama pengawasan internal; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; Pengawasan dengan tujuan tertentu; Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi; Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan

Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan. program ini ditujukan untuk mencapai indikator Level SPIP.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Batang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan serta difokuskan juga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan melalui fasilitasi pengembangan usaha masyarakat dan Pemdes dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target

dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

2. Kecamatan Wonotunggal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

3. Kecamatan Bandar

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

4. Kecamatan Blado

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

5. Kecamatan Bawang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

6. Kecamatan Kandeman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan

peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

7. Kecamatan Tulis

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target

dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

8. Kecamatan Subah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

9. Kecamatan Pecalungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

10. Kecamatan Tersono

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

11. Kecamatan Limpung

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

12. Kecamatan Banyuputih

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan

peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

13. Kecamatan Gringsing

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target

dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

14. Kecamatan Warungasem

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

15. Kecamatan Reban

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase masyarakat yang mengikuti Wasbang.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melalui Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud.

e. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase penurunan konflik sosial.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase Persentase ketercapaian layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah; Persentase unit kerja internal yang terlayani; Persentase capaian kinerja Perangkat daerah yang mencapai target.

Berikut ini pagu indikatif pada setiap program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025. Secara rinci untuk penjabaran program/ kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Pagu Indikatif Program Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			690.610.081.173	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			686.911.081.173	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			686.911.081.173	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,6%	512.560.045.131	
							Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%		
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	96,5%		
							cakupan layanan operasional kantor	93%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	75%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	2.475.400.000	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	921.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.504.400.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	505.522.676.853	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1850 Orang/bulan	503.312.579.853	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.516.470.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	43.627.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	85.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	200.000.000	
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	626.821.000	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.821.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	100.000.000	
	1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	2.124.074.278	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	392.234.278	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	234.580.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.492.260.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	1.511.073.000	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	585.073.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	26.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)	100%	171.351.036.042	
							Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	100%		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP Angka Partisipasi Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD Angka Putus Sekolah (APS) SD Prosentase SD yang kondisi bangunannya baik	100 % 89.00 % 0,026 % 0,027 % 89,00 % 97 %	90.894.996.005	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pedidikan sekolah dasar			
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	330.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.354.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	760.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	660.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah				
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Peserta Didik	460.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1 Satuan Pendidikan	17.093.596.005	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	57.383.900.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1 Orang	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.440.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	1.415.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	7.040.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.398.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/Sederajat Angka Putus Sekolah (APS) SMP Prosentase SMP yang kondisi bangunannya baik Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pedidikan sekolah menengah pertama	88 % 0.067 % 88 % 82.60 %	52.249.924.021	
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	299.970.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	895.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	2.903.286.410	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	89.991.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	388.564.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1.722.833.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	942.296.727	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Peserta Didik	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	7.587.214.157	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	25.956.700.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 Orang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	8.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1.273.068.727	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.041.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	86%	21.620.788.416	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1.082.975.863	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD				
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	584.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	16.959.612.553	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				
							-	-	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	575.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	802.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1.017.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	35%	6.585.327.600	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	119.316.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	5.127.504.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Peserta Didik	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	413.507.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	425.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	95%	1.150.000.000	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan Pemerintah Daerah	75 %	1.150.000.000	
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	1 Orang	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar				
							Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	5 Buku	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	100%	1.850.000.000	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik	59%	1.850.000.000	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	850.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.699.000.000	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.699.000.000	
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase festival seni yang dilaksanakan	100%	800.000.000	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	8 buah	200.000.000	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pegiat seni yang terlibat dalam penyelenggaraan kesenian tradisional	72 %	600.000.000	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan	3 Objek	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			
6	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	75%	2.392.000.000	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga kesenian yang dibina mementaskan hasil kesenian tradisional	60 %	2.392.000.000	
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	550 Lembaga	2.392.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	85%	507.000.000	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan benda cagar budaya yang berhasil diidentifikasi dan didaftarkan setiap tahun	6 buah	507.000.000	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya				
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	275.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya				
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	232.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						DINAS KESEHATAN			201.110.372.045	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			201.110.372.045	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			201.110.372.045	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	126.310.107.955	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	284.973.000	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.385.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	106.524.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	137.064.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan yang disusun	2 Dokumen	123.525.316.705	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	820 Orang/bulan	122.809.361.247	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	709.755.458	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.100.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.100.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	14 Dokumen	25.000.000	
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	3 Paket	599.397.250	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	231.397.250	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	36.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	90.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	58.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	5 Unit	55.000.000	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	6 Jenis	925.653.150	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	469.153.150	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	33.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	421.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	54 Unit	825.286.000	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	371.440.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	372.786.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	51.060.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	69.481.850	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	69.481.850	DINAS KESEHATAN
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	72.121.448.090	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	21 unit	22.243.617.564	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas				
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Paket Unit	5.716.649.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	7.321.324.800	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	1.351.220.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	1.482.470.400	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	60.037.950	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	8 Paket	6.261.211.514	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Paket	50.703.900	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah balita stunting Jumlah Desa ODF Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue Jumlah kasus kematian balita Jumlah kasus kematian bayi Jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal Jumlah semua Kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	5.400 bayi 160 desa/kelurahan 35 orang 165 orang 100 balita 95 bayi 14 orang 21 pusk 1.000 orang	49.447.830.526	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12000 Orang	84.800.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11000 Orang	94.150.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11500 Orang	317.364.490	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58000 Orang	92.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121196 Orang	91.300.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550439 Orang	41.590.750	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109000 Orang	53.080.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226251 Orang	15.600.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13847 Orang	1.105.226.196	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2114 Orang	23.900.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8000 Orang	828.675.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11000 Orang	382.675.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	105.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22 Dokumen	5.352.269.500	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.509.216.200	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	236.683.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	28.946.500	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	182.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang	18.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	1.850.551.590	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	32.210.072.500	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	62.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	226.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100 % Unit	115.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	90.360.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	80.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit	100 % Unit	926.799.800	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	350 Orang	23.600.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500 Orang	57.070.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	22 Dokumen	113.400.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	2 aplikasi 1 dok	180.000.000	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	180.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes yang berijin	56 fasyankes	250.000.000	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100 % Unit	9.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100 % Unit	241.000.000	DINAS KESEHATAN
10	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100%	1.541.912.000	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan	690 orang 690 Orang 170 orang 170 Orang	55.000.000	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDMK Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDMK	1 dokumen 1 Dokumen	245.345.000	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta	1 Dokumen	20.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2500 Orang	78.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	147.345.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	40 nakes 40 Nakes	1.241.567.000	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	1.241.567.000	DINAS KESEHATAN
11	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	84%	639.604.000	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek yang berijin Jumlah Apotek yang berijin Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin Jumlah Toko Obat yang berijin Jumlah Toko Obat yang berijin	74 apotek 74 Apotik 13 Toko alkes/optikas 13 Toko Alkes / Optikas 4 Toko obat 4 Toko Obat	112.443.000	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 Dokumen	112.443.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat Jumlah PIRT yang mendapatkat sertifikat	220 sertifikat 220 Sertifikat	149.369.000	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	120 Dokumen	149.369.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	460 TPM	111.543.000	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	111.543.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	33 PIRT 33 PIRT	266.249.000	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit	266.249.000	DINAS KESEHATAN
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	497.300.000	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	35 desa	92.100.000	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	92.100.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	2 dokumen	230.000.000	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	230.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 Posyandu	175.200.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	175.200.000	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS WONOTUNGGAL			2.862.552.053	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.862.552.053	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.862.552.053	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	2.187.189.053	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	2.187.189.053	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.187.189.053	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	630.262.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	630.262.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	62.100.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	8.020.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	15.800.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	7.850.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	4.500.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	125 Dokumen	173.063.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	7.000.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20 Dokumen	18.680.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	97.200.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	120.569.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	1.200.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250 Orang	16.800.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	4.200.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	30 Dokumen	6.830.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	30 Dokumen	86.450.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
15	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	45.101.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	45.101.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30 Dokumen	45.101.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
						PUSKESMAS BANDAR 1			4.139.432.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.139.432.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.139.432.000	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	3.405.500.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	3.405.500.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.405.500.000	PUSKESMAS BANDAR 1
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	664.632.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	664.632.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	44.400.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	24.825.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	20.700.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.600.000	PUSKESMAS BANDAR 1

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	3.750.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	182.440.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	5.000.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	13.075.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	120.913.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	131.029.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	600.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.600.000	PUSKESMAS BANDAR 1

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	500.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	39.600.000	PUSKESMAS BANDAR 1
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	74.600.000	PUSKESMAS BANDAR 1
18	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	69.300.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	69.300.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	69.300.000	PUSKESMAS BANDAR 1
						PUSKESMAS GRINGSING 1			3.303.207.500	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.303.207.500	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.303.207.500	
19	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	2.750.100.500	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	2.750.100.500	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.750.100.500	PUSKESMAS GRINGSING 1
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	476.982.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	476.982.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	39.200.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6.375.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	38.500.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	4.000.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	750.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	135.604.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	6.000.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	23.120.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	57.600.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	98.743.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.000.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	2.500.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.000.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	5.240.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	57.350.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
21	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	76.125.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	76.125.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	76.125.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
						PUSKESMAS GRINGSING 2			1.493.009.500	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.493.009.500	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.493.009.500	
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	939.429.500	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	939.429.500	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	939.429.500	PUSKESMAS GRINGSING 2
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	510.530.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	510.530.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	26.200.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	23.925.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11.600.000	PUSKESMAS GRINGSING 2

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	3.500.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	300.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	148.849.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	14.000.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	41.725.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	84.855.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	98.826.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.400.000	PUSKESMAS GRINGSING 2

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.500.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	500.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.550.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	40.800.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
24	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	43.050.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	43.050.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	43.050.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
						PUSKESMAS LIMPUNG			3.057.689.300	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.057.689.300	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.057.689.300	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
25	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	2.256.187.300	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	2.256.187.300	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan Unit Kerja	2.256.187.300	PUSKESMAS LIMPUNG
26	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	728.677.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	728.677.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	62.640.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	37.250.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	21.050.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	2.750.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	204.857.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	11.500.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	31.235.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	125.047.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	143.088.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	2.000.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.400.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	4.580.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	79.280.000	PUSKESMAS LIMPUNG
27	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	72.825.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	72.825.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	72.825.000	PUSKESMAS LIMPUNG
						PUSKESMAS BATANG 1			1.864.285.850	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.864.285.850	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.864.285.850	
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	1.288.159.600	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.288.159.600	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.288.159.600	PUSKESMAS BATANG 1
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	545.194.250	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	541.763.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	20.600.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	17.150.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28.800.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	14.500.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	4.500.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	142.888.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7.600.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	31.000.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	70.800.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	98.595.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	20.020.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.500.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4.000.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	12.600.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	3.410.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	63.800.000	PUSKESMAS BATANG 1
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	2 aplikasi 1 dok	3.431.250	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	3.431.250	PUSKESMAS BATANG 1
30	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	30.932.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	30.932.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	30.932.000	PUSKESMAS BATANG 1
						PUSKESMAS BATANG 3			2.210.735.250	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.210.735.250	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.210.735.250	
31	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	1.468.580.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.468.580.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.468.580.000	PUSKESMAS BATANG 3
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	616.155.250	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	616.155.250	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	25.900.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	56.220.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	25.000.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	6.000.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.950.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	154.629.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	8.400.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	14.425.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	70.200.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	164.819.250	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	600.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4.800.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	500.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	6.612.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							0	0 0	75.200.000	PUSKESMAS BATANG 3
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	900.000	PUSKESMAS BATANG 3
33	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	126.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	126.000.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	126.000.000	PUSKESMAS BATANG 3
						PUSKESMAS BATANG 4			2.026.417.250	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.026.417.250	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.026.417.250	
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	1.388.350.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.388.350.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.388.350.000	PUSKESMAS BATANG 4

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	579.162.250	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	574.927.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	41.400.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	10.150.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	15.200.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	5.000.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	750.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	169.669.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7.000.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	17.900.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	92.242.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	105.551.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	23.165.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.000.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.000.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.000.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	6.500.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	75.400.000	PUSKESMAS BATANG 4
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	2 aplikasi 1 dok	4.235.250	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	4.235.250	PUSKESMAS BATANG 4
36	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	58.905.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	58.905.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	58.905.000	PUSKESMAS BATANG 4
						PUSKESMAS WARUNGASEM			3.035.988.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.035.988.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.035.988.000	
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	2.176.500.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	2.176.500.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.176.500.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	781.258.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	781.258.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	58.680.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	12.800.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	0	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	23.200.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	5.000.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	3.600.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	215.798.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.000.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	26.610.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	132.700.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	153.440.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1.000.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	5.000.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	6.750.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.000.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	126.680.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
39	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	78.230.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	78.230.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	78.230.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
						PUSKESMAS KANDEMAN			3.212.770.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.212.770.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.212.770.000	
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	2.460.800.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	2.460.800.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.460.800.000	PUSKESMAS KANDEMAN
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	688.966.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	684.428.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	885 Orang	56.680.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	831 Orang	5.315.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.192 Orang	31.200.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	513 Orang	11.400.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	836 Orang	2.000.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	189.747.400	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	10.600.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	25.900.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	102.750.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	129.255.600	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	5.100.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	8.000.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4.000.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	20.000.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	82.480.000	PUSKESMAS KANDEMAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	2 aplikasi 1 dok	4.538.000	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	4.538.000	PUSKESMAS KANDEMAN
42	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	63.004.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	63.004.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	63.004.000	PUSKESMAS KANDEMAN
						RSUD BATANG PEMKAB BATANG			70.902.183.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			70.902.183.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			70.902.183.000	
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	0	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	100 %	0	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 Orang/bulan	0	RSUD BATANG PEMKAB BATANG
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	70.897.183.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan	86 %	900.000.000	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	500.000.000	RSUD BATANG PEMKAB BATANG
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	400.000.000	RSUD BATANG PEMKAB BATANG
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	69.997.183.000	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	69.997.183.000	RSUD BATANG PEMKAB BATANG
45	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100%	5.000.000	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	94 %	5.000.000	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	5.000.000	RSUD BATANG PEMKAB BATANG
						RSUD LIMPUNG			17.937.000.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.937.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			17.937.000.000	
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	17.932.000.000	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan	86 %	900.000.000	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	500.000.000	RSUD LIMPUNG
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	400.000.000	RSUD LIMPUNG
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	17.032.000.000	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	17.032.000.000	RSUD LIMPUNG
47	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100%	5.000.000	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	94 %	5.000.000	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	5.000.000	RSUD LIMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						PUSKESMAS BANDAR 2			1.684.885.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.684.885.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.684.885.000	
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	1.131.900.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.131.900.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.131.900.000	PUSKESMAS BANDAR 2
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	512.470.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	512.470.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	31.440.000	PUSKESMAS BANDAR 2

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	14.225.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	30.000.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	3.200.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.800.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	177.710.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	15.600.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	26.400.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	47.400.000	PUSKESMAS BANDAR 2

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	98.730.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	3.400.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.300.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.800.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	18.225.000	PUSKESMAS BANDAR 2
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	39.240.000	PUSKESMAS BANDAR 2
50	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	40.515.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	40.515.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	40.515.000	PUSKESMAS BANDAR 2
						PUSKESMAS BLADO 1			2.666.703.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.666.703.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.666.703.000	
51	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	2.113.260.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	2.113.260.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.113.260.000	PUSKESMAS BLADO 1
52	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	519.468.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	519.468.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	24.840.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	9.450.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	33.900.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	6.000.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	1.500.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	142.572.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	12.000.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	39.675.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	88.200.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	98.801.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	1.200.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	6.000.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	1.200.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	7.350.000	PUSKESMAS BLADO 1
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100 Dokumen	46.780.000	PUSKESMAS BLADO 1
53	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	33.975.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	33.975.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	33.975.000	PUSKESMAS BLADO 1
						PUSKESMAS BLADO 2			1.710.541.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.710.541.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.710.541.000	
54	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	1.124.700.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.124.700.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan Unit Kerja	1.124.700.000	PUSKESMAS BLADO 2
55	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	534.341.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	534.341.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	6.600.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan Orang	17.695.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan Orang	12.000.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan Orang	1.800.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan Orang	6.900.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	217.986.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan Dokumen	36.000.000	PUSKESMAS BLADO 2

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Bulan Dokumen	34.800.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	24.603.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	124.457.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.100.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Bulan Orang	1.800.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Bulan Orang	1.100.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Bulan Dokumen	36.300.000	PUSKESMAS BLADO 2
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Bulan Dokumen	11.200.000	PUSKESMAS BLADO 2

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
56	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	51.500.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	51.500.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Bulan Dokumen	51.500.000	PUSKESMAS BLADO 2
						PUSKESMAS REBAN			3.374.446.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.374.446.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.374.446.000	
57	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	2.590.749.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	2.590.749.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.590.749.000	PUSKESMAS REBAN
58	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	749.572.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	749.572.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	78.660.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2.760.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4867 Orang	24.500.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	446 Orang	4.800.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	609 Orang	4.800.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	201.037.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	4.050.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	19.760.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	160.226.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	139.909.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	800.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4.800.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	1.310.000	PUSKESMAS REBAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	102.160.000	PUSKESMAS REBAN
59	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	34.125.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	34.125.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	34.125.000	PUSKESMAS REBAN
						PUSKESMAS BAWANG			4.651.489.250	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.651.489.250	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.651.489.250	
60	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	3.854.891.250	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	3.854.891.250	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.854.891.250	PUSKESMAS BAWANG
61	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	768.878.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	768.878.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	60.800.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3.375.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	47.200.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	20.000.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.500.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	203.466.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	9.200.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	28.200.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	127.700.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	193.847.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	2.000.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.000.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	3.750.000	PUSKESMAS BAWANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	54.840.000	PUSKESMAS BAWANG
62	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	27.720.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	27.720.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	27.720.000	PUSKESMAS BAWANG
						PUSKESMAS TERSONO			2.819.261.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.819.261.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.819.261.000	
63	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	2.078.274.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	2.078.274.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.078.274.000	PUSKESMAS TERSONO
64	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	716.737.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	716.737.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	30.400.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	6.520.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	24.200.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	11.600.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	1.500.000	PUSKESMAS TERSONO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.645.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.000.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.190.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	130.222.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	188.135.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	9.600.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	600.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.725.000	PUSKESMAS TERSONO
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	90.400.000	PUSKESMAS TERSONO
65	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	24.250.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	24.250.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	24.250.000	PUSKESMAS TERSONO
						PUSKESMAS SUBAH			3.983.797.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.983.797.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.983.797.000	
66	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	3.339.650.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	3.339.650.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.339.650.000	PUSKESMAS SUBAH
67	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	580.517.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	580.517.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	21.280.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	13.980.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	39.400.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.500.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	300.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	179.513.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	15.000.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	20.990.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	92.418.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	114.996.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.700.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.500.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	500.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	13.860.000	PUSKESMAS SUBAH
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	63.580.000	PUSKESMAS SUBAH
68	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	63.630.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	63.630.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	63.630.000	PUSKESMAS SUBAH
						PUSKESMAS TULIS			2.731.067.035	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.731.067.035	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.731.067.035	
69	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	1.999.153.035	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.999.153.035	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	1.999.153.035	PUSKESMAS TULIS
70	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	670.216.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	670.216.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	58.820.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang	11.540.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93 Orang	17.050.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18 Orang	3.600.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	2.250.000	PUSKESMAS TULIS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	61 Dokumen	175.557.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	74 Dokumen	9.100.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	34.580.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen	74.898.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen	168.586.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	3.000.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	3.600.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24 Orang	1.200.000	PUSKESMAS TULIS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	6 Dokumen	9.970.000	PUSKESMAS TULIS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	96.465.000	PUSKESMAS TULIS
71	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	61.698.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	61.698.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	61.698.000	PUSKESMAS TULIS
						PUSKESMAS BATANG 2			2.027.335.250	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.027.335.250	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.027.335.250	
72	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	1.357.620.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.357.620.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.357.620.000	PUSKESMAS BATANG 2
73	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	584.515.250	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	584.515.250	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28.800.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	19.300.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28.800.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	15.800.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	4.800.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	10.000.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	203.993.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	4.000.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	15.099.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	59.622.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	138.601.250	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	5.100.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4.800.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	3.200.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	12.400.000	PUSKESMAS BATANG 2
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	30.200.000	PUSKESMAS BATANG 2
74	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	85.200.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	85.200.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	85.200.000	PUSKESMAS BATANG 2
						PUSKESMAS PECALUNGAN			2.588.828.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.588.828.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.588.828.000	
75	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	1.929.500.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.929.500.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.929.500.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
76	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	592.199.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	592.199.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13200 Orang	52.400.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000 Orang	34.700.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	24.800.000	PUSKESMAS PECALUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	8.000.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	750.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	168.336.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7.500.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	19.607.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	96.150.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	117.706.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	200.000	PUSKESMAS PECALUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	2.500.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.200.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	7.630.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	50.720.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
77	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	67.129.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	67.129.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	67.129.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
						PUSKESMAS BANYUPUTIH			2.089.291.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.089.291.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.089.291.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
78	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	1.466.520.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.466.520.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.466.520.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
79	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	100%	621.271.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	86 %	621.271.000	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497 Orang	40.440.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	471 Orang	3.060.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang	33.440.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5474 Orang	32.415.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24418 Orang	6.640.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	394 Orang	12.500.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	12.000.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2061 Dokumen	198.031.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	22.200.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25 Dokumen	17.070.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	64.600.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	158.875.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2061 Dokumen	20.000.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
80	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12,74rasio	1.500.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	700 posyandu	1.500.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1.500.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
						UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.			1.980.000.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.980.000.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.980.000.000	
81	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	1.980.000.000	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94%		
							cakupan layanan operasional kantor	92%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	16%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21 Puskesmas	1.980.000.000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.980.000.000	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			105.370.283.450	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			105.370.283.450	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			105.370.283.450	
82	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program DPUPR	93,44%	17.621.355.147	
							persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan DPUPR	94,1%		
							Persentase ASN DPUPR yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	15,3%		
							cakupan layanan operasional kantor	83,98%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Tahun	30.596.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.596.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah dokumen penatausahaan verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	13.132.767.255	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126/12 Orang/bulan	12.511.427.255	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	621.340.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	399.360.000	
	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	399.360.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	272.917.000	
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	272.917.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket listrik yang disediakan, Alat Tulis Kantor, makan minum, cetak penggandaan, surat kabar/majalah serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	266.614.808	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.339.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.651.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.487.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	2.220.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	118.216.108	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung /pendukung gedung kantor atau bangunan lainya	23 Unit	2.009.495.200	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	429.005.200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	180.490.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	516.840.000	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	466.880.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.960.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayarkan pajaknya dan peralatan mesin yang dipelihara serta jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitasi	595 Kendaraan/barang	992.764.884	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	300 Unit	302.818.651	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	263 Unit	576.916.233	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	113.030.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
83	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28%	11.015.217.933	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	5,00 Km	11.015.217.933	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,5 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,4 KM	7.169.217.933	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,6 KM	3.846.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
84	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak (indikator SPM)	100%	8.275.404.028	
							Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman (indikator SPM)	100%		
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum	88 %	8.275.404.028	
	1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
							Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Lembaga	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1000 Liter/Detik	8.275.404.028	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA dalam kondisi baik	100%	0	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA dalam kondisi Baik	1 Unit	0	
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	945 Ton/hari	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
86	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (indikator SPM)	100%	5.373.138.000	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah penduduk yg memperoleh layanan pengelolaan air limbah	82,5 %	5.373.138.000	
	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				
							Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	600 M³/Hari	5.373.138.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
							Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	100 Penyelenggara	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
87	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	71,43%	5.500.771.892	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	3,04 Km	5.500.771.892	
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3,05 Sistem Drainase Perkotaan	3.300.771.892	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan	2.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
88	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	59,04%	480.000.000	
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Praarana dan Sarana Pemukiman yang dibangun dikawaan strategis Daerah Kabupate/Kota	10 Sistem Jaringan	480.000.000	
	1	03	07	2.01	0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	590,07 M³/Hari	480.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
89	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	100%	5.474.760.000	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengawasan dan pemeliharaan, jumlah regulasi terkait bangunan gedung, jumlah konsultansi bangunan teknis bangunan gedung, jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan serta jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah derat yang telah dilakukan pemerikasaan kelaikan fungsi	22 Dokumen/unit	5.474.760.000	
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	22 Dokumen	5.474.760.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
90	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5%	49.693.400.850	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	865 KM 103 Km	49.693.400.850	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	15 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	15 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan				
							Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan				
							Panjang Jalan yang Dibangun	45 KM	6.643.647.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan				
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	25 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar				
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	5 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan				
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	16.818.187.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	540,45 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan				
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	26.231.566.850	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan				
							Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	2 Jembatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
91	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	12,5%	136.235.600	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis yang mengikuti pelatihan serta Dokumen SOP tentang pelatihan tenaga konstruksi	50 Orang	136.235.600	
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	136.235.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	75,47%	1.800.000.000	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perda/perkada selain RTRW dan	10 Dokumen	525.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	370.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	5 Laporan	155.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk kajian pendukung RTRW dan RRTR yang disusun	9 Dokumen	575.000.000	
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	575.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, singkronisasi dan data informasi penataan ruang	19 Dokumen	300.000.000	
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	25 Dokumen	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Sistem Informasi	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan singkronisasi penertiban pelaksanaan penataan ruang	21 Dokumen	400.000.000	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	14 Dokumen	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG			500.000.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			500.000.000	
93	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program DPUPR	93,44%	0	
							persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan DPUPR	94,1%		
							Persentase ASN DPUPR yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	15,3%		
							cakupan layanan operasional kantor	83,98%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket listrik yang disediakan, Alat Tulis Kantor, makan minum, cetak penggandaan, surat kabar/majalah serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	0	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							-	-	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							-	-	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	0	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayarkan pajaknya dan peralatan mesin yang dipelihara serta jumlah sarana dan prasarana	595 Kendaraan/barang	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							pendukung gedung kantor yang direhabilitasi			
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG
94	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28%	200.000.000	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	4,75 Km	200.000.000	
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 KM	200.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG
95	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5%	300.000.000	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	96 Km	300.000.000	
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	15 KM	300.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR			500.000.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			500.000.000	
96	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program DPUPR	93,44%	0	
							persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan DPUPR	94,1%		
							Persentase ASN DPUPR yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	15,3%		
							cakupan layanan operasional kantor	83,98%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket listrik yang disediakan, Alat Tulis Kantor, makan minum, cetak penggandaan, surat kabar/majalah serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	0	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	0	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayarkan pajaknya dan peralatan mesin yang dipelihara serta jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitasi	595 Kendaraan/barang	0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR
97	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28%	200.000.000	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	4,75 Km	200.000.000	
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
							-	-	200.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR
98	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5%	300.000.000	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	96 Km	300.000.000	
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	15 KM	300.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR
						UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH			500.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			500.000.000	
99	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program DPUPR	93,44%	0	
							persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan DPUPR	94,1%		
							Persentase ASN DPUPR yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	15,3%		
							cakupan layanan operasional kantor	83,98%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket listrik yang disediakan, Alat Tulis Kantor, makan minum, cetak penggandaan, surat kabar/majalah serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	0	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	0	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayarkan pajaknya dan peralatan mesin yang dipelihara serta jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitasi	595 Kendaraan/barang	0	
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	10 Unit	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH
100	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28%	200.000.000	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	4,75 Km	200.000.000	
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 KM	200.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH
101	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5%	300.000.000	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	96 Km	300.000.000	
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	15 KM	300.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH
						UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG			500.000.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			500.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
102	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program DPUPR	93,44%	0	
							persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan DPUPR	94,1%		
							Persentase ASN DPUPR yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	15,3%		
							cakupan layanan operasional kantor	83,98%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket listrik yang disediakan, Alat Tulis Kantor, makan minum, cetak penggandaan, surat kabar/majalah serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	0	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	0	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayarkan pajaknya dan peralatan mesin yang dipelihara serta jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitasi	595 Kendaraan/barang	0	
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG
103	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28%	200.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan, direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	4,75 Km	200.000.000	
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 KM	200.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG
104	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5%	300.000.000	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	96 Km	300.000.000	
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	15 KM	300.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG
						UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH LIMPUNG			500.000.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			500.000.000	
105	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,28%	200.000.000	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingaktkan,	4,75 Km	200.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	direhabilitasi, dioprasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air			
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 KM	200.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH LIMPUNG
106	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	65,5%	300.000.000	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	96 Km	300.000.000	
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	15 KM	300.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH LIMPUNG
						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			23.160.808.940	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.130.808.940	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			23.130.808.940	
107	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	68%	4.666.985.520	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	25%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	11.029.000	
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	11.029.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	3.928.820.920	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	3.641.468.420	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	287.352.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	86.845.000	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	16.845.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	70.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	181.908.400	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.300.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.155.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.929.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.523.900	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	99.977.000	
	1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	14.685.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	5.292.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	117.750.100	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.600.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.650.100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	240.655.100	
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	216.655.100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	14.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
108	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah (indikator SPM)	100%	125.000.000	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	0	
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				
							Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	25.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
109	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	63,5%	8.734.418.000	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	8.734.418.000	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	143 Unit Rumah	3.515.418.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	9 Laporan	5.114.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	105.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
110	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	84%	9.604.405.420	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	9.604.405.420	
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi	9.179.405.420	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	425.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.000.000	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			30.000.000	
111	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase permohonan fasilitasi pernyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	85%	30.000.000	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			15.844.837.560	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.844.837.560	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.844.837.560	
112	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program SATPOL PP	97%	12.730.198.760	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	97%		
							cakupan layanan operasional kantor	98,5%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	84%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	93,5%		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	40.079.000	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12 Laporan	40.079.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	6.267.611.703	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.195.791.703	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.820.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	137.200.000	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	100.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	36.950.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	190.210.857	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.885.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.896.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.013.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.916.557	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	5.742.821.200	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	142.821.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	133.276.000	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.776.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	219.000.000	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	185.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
113	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	1.972.460.800	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		1.622.460.800	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	532.086.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	139.065.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	705.484.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	190.725.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0 Unit	5.100.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-		350.000.000	
	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	75.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
							-	-	75.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
114	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	100%	1.142.178.000	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		1.092.178.000	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	54.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.022.928.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam	12 Dokumen	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-		50.000.000	
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	12 Desa/Kelurahan	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH			6.234.502.216	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.234.502.216	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.234.502.216	
115	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program BPBD	100%	5.281.973.316	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	98%		
							cakupan layanan operasional kantor	97%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	80%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan	100 %	43.895.901	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan			
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	43.895.901	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	3.208.493.955	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.171.603.955	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	28.440.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	8.450.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	30.000.000	
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	30.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	141.975.760	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.086.300	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.293.900	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.500.500	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	77.695.060	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	1.587.140.200	
	1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	87.140.200	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.500.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	99.262.500	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.762.500	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	45.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	52.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	171.205.000	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	155.705.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
116	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (indikator SPM)	100%	952.528.900	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	85.348.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	360 Orang	85.348.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	295.872.500	
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 Kegiatan	5.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	99.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	22.450.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	8.800.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	43.872.500	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80 Orang	8.150.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	76.200.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	12.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	19.400.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya penanganan korban bencana serta terpenuhinya pelaporan penanganan bencana	100 %	324.576.400	
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	13.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	7 Dokumen	184.622.450	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	22.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	135 Orang	84.893.950	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2 Dokumen	6.600.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan	12.460.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	246.732.000	
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan	2 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Penanggulangan Bencana di Daerah			
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	30.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	3 Dokumen	40.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Laporan	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	66.732.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi	1 Lembaga	10.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal			
	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				
							Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL			9.905.917.359	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.905.917.359	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			9.905.917.359	
117	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	3.759.599.425	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	96,25%		
							cakupan layanan operasional kantor	84%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	80%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	86,25%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	20.000.000	
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	20.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	18 Laporan	2.628.503.639	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.303.503.639	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	300.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	25.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penanganan laporan administrasi umum perangkat daerah	105 Laporan	221.002.250	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.953.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	28.725.750	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	46.640.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.313.500	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.800.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	123.570.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli/ direhab	1 Unit	146.708.813	
	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	146.708.813	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7 Laporan	211.500.000	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3570 Laporan	8.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	95.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	108.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang dipelihara	1315 Unit	531.884.723	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	161.111.700	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23.950.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	313.499.823	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	33.323.200	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
118	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (indikator SPM)	100%	576.014.400	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengalami peningkatan kemampuan	85 Orang	576.014.400	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	264 Orang	20.771.000	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	204.950.000	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	160519 Keluarga	201.233.400	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Lembaga	80.460.000	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Sertifikat	68.600.000	DINAS SOSIAL
119	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	45%	3.500.000	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran yang pulang ke desa/kelurahan asal	8 Orang	3.500.000	
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	3.500.000	DINAS SOSIAL
120	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	313.326.000	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penanganan dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	76%	313.326.000	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	19.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang				
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya	70 Orang	13.800.000	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang	1.300.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	160.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	1.066.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan				
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	42.660.000	DINAS SOSIAL
121	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)	100%	4.506.190.400	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penerima bantuan sosial untuk anak terlantar	1600 Orang	1.550.000.000	
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1530 Orang	1.550.000.000	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos yg didirikan/ difasilitasi	11 Lembaga	2.956.190.400	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	170872 Orang	106.423.700	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	76556 Keluarga	38.976.700	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2100 Keluarga	2.708.840.000	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	101.950.000	DINAS SOSIAL
122	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	100%	625.825.100	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	220 Orang	587.840.100	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	8.000.000	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	551.565.100	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial				
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	28.275.000	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	1 Kegiatan	37.985.000	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	37.985.000	DINAS SOSIAL
123	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	100%	121.462.034	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	umlah TMP yang mendapat pemeliharaan	1 TMP	121.462.034	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	102.262.034	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.200.000	DINAS SOSIAL
						DINAS KETENAGAKERJAAN			7.356.450.524	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.247.664.024	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.247.664.024	
124	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98,8%	5.514.034.109	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	95%		
							cakupan layanan operasional kantor	98,5%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	65%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	98,5%		
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen pelaporan dinas	5 dokumen	10.000.000	
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banyaknya petugas pengelola keuangan OPD Gaji dan Tunjangan PNS	12 bulan 12 bulan	2.851.783.723	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.637.332.523	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	214.451.200	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat	2 orang	35.982.000	
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	35.982.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan rutin Dinas	12 tahun	135.918.500	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.814.800	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.199.900	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.600.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.303.800	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	47.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan operasional kantor	undefined undefined	2.017.192.400	
	2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	17.192.400	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.000.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	311.811.400	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.750.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.061.400	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan operasional kantor	12 bulan	151.346.086	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	92.846.086	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	40.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
125	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	100%	0	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1 dokumen	0	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0	DINAS KETENAGAKERJAAN
126	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rasio penduduk yang bekerja	74%	1.214.745.851	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	768 orang	646.860.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 Orang	646.860.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mendapatkan pembinaan	85 lembaga	360.300.000	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	360.300.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri / Wirausaha baru	100 orang	207.585.851	
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	207.585.851	DINAS KETENAGAKERJAAN
127	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	41%	258.404.399	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jml pencari kerja yang mendapat pelayanan AK.1	6955 orang	258.404.399	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja				
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500 Orang	258.404.399	DINAS KETENAGAKERJAAN
128	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	14,4rasio	260.479.665	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PP yang disyahkan	17 lembaga	138.343.865	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait	100 Perusahaan	74.658.000	DINAS KETENAGAKERJAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	63.685.865	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Perselisihan HI yang berhasil dilakukan mediasi	100 persen	122.135.800	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	122.135.800	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			108.786.500	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			108.786.500	
129	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	persentase transmigran yang berhasil ditempatkan	100%	108.786.500	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran yang mendapat pelatihan	5 KK	108.786.500	
	3	32	03	2.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi				
							Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	5 Kepala Keluarga	108.786.500	DINAS KETENAGAKERJAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			16.533.164.051	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.533.164.051	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.924.722.051	
130	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	95%	4.589.722.051	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	97,9%		
							cakupan layanan operasional kantor	96,8%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	83,33%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	14.405.000	
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.405.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	3.230.013.691	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.146.313.691	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	83.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	25.000.000	
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	256.687.288	
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.700.800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.920.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.780.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.877.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	161.409.488	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	835.346.072	
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
										PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	729.546.072	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	228.270.000	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	95.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	123.270.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
										PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
131	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	3,4%	114.495.000	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/instansi pemerintah yang memiliki komitmen PUG	50 Lembaga	50.084.029	
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	50.084.029	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan yang didampingi dalam pemberdayaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	80 %	50.000.000	
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
										PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	60 %	14.410.971	
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	14.410.971	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
132	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100Index	10.000.000	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta rakor/ sosialisasi/pendampingan terkait Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	90 Orang	10.000.000	
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
133	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	21,4285714285 714%	42.900.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi peningkatan kualitas keluarga	80 Orang	23.950.000	
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.950.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan	100%	18.950.000	
	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	18.950.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
134	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	cakupan data pilah gender dan anak	100%	15.080.000	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pilah gender dan anak	1 data	15.080.000	
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan	2 Dokumen	15.080.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
135	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	cakupan kecamatan layak anak	86,67%	100.000.000	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan pelembagaan PHA pada Lembaga	70 %	25.000.000	
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan lembaga penyedia layanan	55 Lembaga	75.000.000	
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
136	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%	52.525.000	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak yang diberi layanan rujukan	100 %	52.525.000	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	52.525.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			11.608.442.000	
137	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	100%	460.200.000	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	100 %	460.200.000	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
										PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	187.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	213.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
138	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,34%	6.555.542.000	
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,51%		
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Bangga Kencana)	4.7 %	1.160.000.000	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK				
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	80.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	465.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	225.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	32 Organisasi	280.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase jml PKB/PLKB (1 PKB/PLKB mengampu 2 Desa)	56.45 %	1.811.600.000	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	253 Orang	1.811.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan	35 Faskes	3.028.692.000	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	28.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode	49016 Orang	1.995.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				
							Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	12 Laporan	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	830.392.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	159.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas yang berperan serta	3 ormas	555.250.000	
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	35 Kampung	551.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
139	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pembangunan ketahanandan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	78,71%	4.592.700.000	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Kegiatan	655.600.000	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan / Dokumen	336.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
										PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	19.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah ormas	3 ormas	3.937.100.000	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	12 laporan	1.851.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	2.086.100.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN			30.744.058.498	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.414.940.000	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.414.940.000	
140	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	12,5%	6.000.000	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pengembangan LPMD Terlaksananya pengembangan LPMD	1 kegiatan 1 kegiatan	6.000.000	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit	6.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
141	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	89,7%	1.156.940.000	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	jumlah kegaiatn penyediaan dan penyaluran pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah jumlah kegiatan penyediaan dan	4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan	91.620.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							penyaluran pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Terlaksananya kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah			
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	26.620.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	5.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				
							Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan cadagan pangan kabupaten atau Kota Jumlah pelaksana kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kab/Kota	1 kegiatan 1 kegiatan	1.000.000.000	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Ton	1.000.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	60 Ton	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi Jumlah pelaksanan kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	1 kegiatan 1 kegiatan	65.320.000	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	65.320.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
142	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rasio Desa mandiri Pangan	17%	212.000.000	
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan penanganan kerawanann pangan kewenangan kabupaten Kota	2 kegiatan	212.000.000	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	1 Dokumen	20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	192.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
143	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100%	40.000.000	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelaksanaan pengawsan keamanan panga segar daerah kabupaten Kota jumlah kegiatan pelaksanan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota	2 kegiatan 2 kegiatan	40.000.000	
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	40.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			29.329.118.498	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			29.329.118.498	
144	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	86,24%	18.297.807.898	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	88,23%		
							cakupan layanan operasional kantor	97,9%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	83,33%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang	94,6%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan			
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3 kegiatan	79.708.338	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	23.008.338	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	15.750.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.950.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	2 kegiatan	14.974.403.338	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/bulan	14.934.923.338	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	39.480.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan	1 kegiatan	25.000.000	
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	6 kegiatan	452.396.214	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.733.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	188.838.214	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.245.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.980.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.800.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	140.800.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 kegiatan	1.876.410.508	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	276.813.508	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.265.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.552.832.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 kegiatan	889.889.500	
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	154.801.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	511.292.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	223.796.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
145	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	0,0108%	2.231.407.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Prosentae Capaian Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan	85%		
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	prosentase penggunaan sarana pertanian	100 %	2.045.507.000	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1.995.507.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten atau kota	1 kegiatan	35.000.000	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	35.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendampingan mutu, kegiatan pengawasan serta pembinaan di kawasan sapi perah	4 kegiatan/40 sampel	72.500.000	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	72.500.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak untuk Pakan	8 paket	78.400.000	
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	2 Laporan	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	5 Laporan	28.400.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
146	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100%	7.252.631.800	
							Capaian Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%		
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian	1 kegiatan	348.230.000	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	348.230.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian	5 kegiatan	6.184.401.800	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	755.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	480.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	3.942.180.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10 Unit	1.000.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan				
							Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	7.221.300	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Kelompok Ternak yang mendapatkan bantuan	8 kelompok	720.000.000	
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				
							Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan	720.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
147	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	100%	800.771.800	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan Ternak yang Mendapatkan Penjaminan Kesehatan	5200 Ekor Ternak Besar dan Kecil	103.750.000	
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	83.750.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKKN yang diterbitkan	85 dokumen	20.000.000	
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	80 laporan	20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga THL Pelayan jasa medik veteriner dan pengadaan alat laboratorium dan obat obatan pada puskeswan	4 orang/2paket	628.725.100	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	628.725.100	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kegiatan pelayanan RPH dan kegiatan usaha ternak serta pembuatan laporan hasil kegiatan pengawasan	4002 kegiatan/1 laporan	48.296.700	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				
							Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	10 Unit Usaha	28.296.700	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
148	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	100%	30.000.000	
							Persentase Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	100%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengendalian dan pengendalian Bencana Pertanian	1 kegiatan	30.000.000	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha	30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
149	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	100%	27.000.000	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	27.000.000	
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	5 Laporan	27.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
150	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	100%	689.500.000	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian	3 kegiatan	689.500.000	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	380.500.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	309.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP			17.055.023.456	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.055.023.456	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			17.055.023.456	
151	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	93%	12.426.840.600	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	92,5%		
							cakupan layanan operasional kantor	93%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	89%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	93%		
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	55.000.000	
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	55.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	5.204.586.130	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	5.122.332.830	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	82.253.300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	328.306.139	
	2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	215.725.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	112.580.639	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	281.070.063	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.228.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.305.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.658.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	2.160.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	165.718.363	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	46.813.258	
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	46.813.258	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	4.265.845.840	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	2.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	95.050.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4.168.295.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	2.245.219.170	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	144.087.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	2.044.131.970	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	57.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
152	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	100%	65.000.000	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	100 %	65.000.000	
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
153	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	50indeks	227.345.600	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah emisi GRK	80	43.145.600	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	43.145.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya dokumen laporan	100 %	184.200.000	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Buku IKPLHD Laporan	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	134.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
154	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH dalam kondisi baik	70%	396.804.600	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase jumlah RTH dan Sarpras yang dikelola	100 %	396.804.600	
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	396.804.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
155	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	100%	10.020.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah limbah b3	40	10.020.000	
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	25 Dokumen	10.020.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
156	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	65%	78.492.400	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang terselesaikan	100 %	78.492.400	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	50 Dokumen	32.360.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha	46.132.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
157	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	100%	20.000.000	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000	
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	90 Orang	20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
158	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	100%	108.859.900	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kinerja	100 %	108.859.900	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	30 Entitas	108.859.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
159	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	80%	3.721.660.356	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah, volume , dokumen dan unit kegiatan yang dilaksanakan	100 %	3.451.016.056	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	35 Kelompok	100.963.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	5 Dokumen	3.350.053.056	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan sampah	100 %	270.644.300	
	2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	5 Laporan	270.644.300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.784.665.647	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.784.665.647	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.784.665.647	
160	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	5.736.197.027	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94,05%		
							cakupan layanan operasional kantor	95,04%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	13%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	94,05%		
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang selama 1 Tahun	100 %	68.695.500	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	68.695.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan	100 %	4.276.103.487	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	4.221.443.487	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	54.660.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengamanan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batang	100 %	123.900.000	
	2	12	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	123.900.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Dengan Baik	100 %	262.814.800	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	166.876.300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	40.867.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	50.071.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kegiatan Kantor	100 %	499.461.240	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	371.300.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	123.161.240	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	100 %	505.222.000	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	251.222.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	159.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	95.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
161	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	94,5%	498.554.000	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	85 %	498.554.000	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	468.554.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
162	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	97,6%	413.328.000	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	97,4 %	413.328.000	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	0 Dokumen	306.368.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	0 Layanan	106.960.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
163	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	95,6%	1.136.586.620	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	95,4 %	57.217.200	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	0 Dokumen	57.217.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	95 %	1.079.369.420	
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	1.079.369.420	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			27.025.508.405	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.025.508.405	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			27.025.508.405	
164	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	95%	3.333.829.042	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	97,9%		
							cakupan layanan operasional kantor	96,8%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	83,33%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian Kinerja anggaran program perangkat daerah	95 Prosen	14.994.000	
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.994.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	2.961.821.435	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.888.459.885	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73.361.550	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	25.000.000	
	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	103.043.407	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.124.700	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.842.307	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.984.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.492.400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	133.970.200	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	2.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.170.200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	95.000.000	
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
165	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	persentase budaya desa yang dilestarikan	60%	35.000.000	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah adat dan budaya desa yang dibina	40 Desa	35.000.000	
	2	13	02	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
166	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	56,49desa	20.309.592.800	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang dibina dan diawasi Penyelenggaraan Administrasinya	46,03 Desa	20.309.592.800	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	239 Dokumen	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	239 Dokumen	3.486.584.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	15 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	204 Laporan	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	200 Laporan	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	239 Dokumen	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				
							Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	239 Dokumen	16.558.008.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
167	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	75%	3.347.086.563	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKD yang Aktif dalam Pemberdayaan Desa	70 Desa	3.347.086.563	
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239 Dokumen	580.815.113	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239 Unit	149.999.900	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	2.095.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	239 Laporan	121.271.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239 Dokumen	400.000.050	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						DINAS PERHUBUNGAN			35.781.771.959	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			35.781.771.959	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			35.781.771.959	
168	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	29.219.836.741	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	70%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	10.199.400	
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.199.400	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	5.450.397.091	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	5.414.937.091	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.460.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	425.364.300	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.693.800	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.470.500	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.200.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	106.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	0	
	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	22.658.080.400	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	22.107.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	547.080.400	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	650.795.550	
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	55 Unit	515.795.550	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	35.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	25.000.000	
	2	15	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
169	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	87%	6.561.935.218	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	4 Kegiatan	4.968.505.218	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1000 Unit	2.151.344.108	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	1.644.134.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	700 Unit	1.173.027.110	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang terkelola	6 Unit	270.694.000	
	2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	4 Dokumen	270.694.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terselenggaranya pengelolaan perparkiran	12 Bulan	392.640.600	
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	392.640.600	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terujinya Kendaraan Bermotor Wajib Uji	71,80%	440.496.600	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	300 Unit	7.048.600	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor				
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	300 Unit	166.843.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300 Dokumen	125.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	141.605.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	12 bulan	100.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	5 Dokumen	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dokumen analisis dampak lalu intas	12 Bulan	69.900.000	
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	19.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	12 Bulan	256.070.000	
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	256.070.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengkajian dan penetapan jaringan trayek pedesaan	4 Kegiatan	63.628.800	
	2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	63.628.800	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.474.904.915	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.474.904.915	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.906.766.965	
170	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program Diskominfo	100%	5.559.722.965	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100-		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	20.000.000	
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3.776.059.555	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.716.685.555	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59.374.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	0	
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	273.591.960	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.152.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.024.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.008.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.577.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	126.829.660	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarpras penunjang kinerja aparatur OPD	100 %	7.026.600	
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	7.026.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan operasional kantor	100 %	1.193.109.100	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.625.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.484.100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarpras penunjang kinerja aparatur OPD	100 %	264.935.750	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	143.935.750	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	16.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	25.000.000	
	2	16	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
171	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	72%	1.272.044.000	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik pemerintah Daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	69 %	1.272.044.000	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	774.628.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	60.934.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik				
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	115.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12 Media	321.481.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
172	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	73%	1.075.000.000	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah layanan yang diselenggarakan secara online	100 %	1.075.000.000	
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	120.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang	42 Perangkat Daerah	245.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas				
							Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	710.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			468.137.950	
173	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100%	468.137.950	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dalam satu tahun	210 datasheet	468.137.950	
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	52 Orang	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional				
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	78.137.950	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral				
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia				
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			100.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
174	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	100%	100.000.000	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	100 %	100.000.000	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			17.733.175.693	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.003.242.930	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			9.003.242.930	
175	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program Disperindagkop dan UKM	92%	8.321.535.930	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	92%		
							cakupan layanan operasional kantor	96,81%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	5,7%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	96,81%		
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 4 Dokumen	10.200.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	6.858.701.530	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	6.824.961.530	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	28.740.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	25.000.000	
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	207 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	257.503.700	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	35.103.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.000.700	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	42.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
										DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	338.508.700	
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	323.508.700	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	536.838.000	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	5.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	433.476.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.862.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	294.784.000	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	42.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	206.784.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
176	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	10.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya perizinan sesuai aturan Persentase Verifikasi Teknis	25 unit usaha 100 persen	10.000.000	
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit Usaha	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
177	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	50,53%	62.942.650	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya SDM pengelola Koperasi	87 Orang	62.942.650	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	62.942.650	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
178	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	68%	20.375.700	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	koperasi yang ber RAT Presentase koparesi aktif	87 dokumen 65 persen	20.375.700	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	13 Unit Usaha	20.375.700	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
179	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	100%	125.885.300	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Koperasi Presentase peserta pelatihan predikat baik	75 lembaga 90 persen	125.885.300	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	125.885.300	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
180	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peserta diklat dengan predikat baik	100%	29.624.300	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	29.624.300	
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				
							0	12 Bulan 0	29.624.300	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
181	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	12%	417.879.050	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru terfasilitasinya modal UKM	10 persen 40 UKM	417.879.050	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	208.613.400	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	209.265.650	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
182	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	20%	15.000.000	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi Peningkatan usaha mikro	15 persen 25 orang	15.000.000	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro				
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	90 Unit Usaha	15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.729.932.763	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.416.932.763	
183	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program Disperindagkop dan UKM	92%	152.555.727	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	92%		
							cakupan layanan operasional kantor	96,81%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	5,7%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	96,81%		
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	152.555.727	
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.555.727	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
184	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Verifikasi Teknis	100%	22.400.000	
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Verifikasi Teknis	100 persen	22.400.000	
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	22.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
185	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	36,36%	3.003.522.036	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Revitalilisasi pasar	4 unit	600.000.000	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	600.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
										DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan sarana perdagangan	11 dokumen	2.403.522.036	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	134/12 Dokumen	2.403.522.036	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
186	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	75%	107.950.000	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersedian stok barang	41 unit	34.700.000	
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	34.700.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	monitoring stok barang	365 kegiatan	40.000.000	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	40.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring pengawasan harga pupuk	1 Kegiatan	33.250.000	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	33.250.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
187	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	nilai ekspor perdagangan	60215421USD	25.505.000	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanan pembinaan ekspor	5 Kegiatan	25.505.000	
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor				
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	25.505.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
188	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	75%	95.000.000	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Jumlah pengawasan UTTP yang dilakukan kegiatan yang dilaksanakan	75 persen 50 kegiatan 250 kegiatan	95.000.000	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20 Orang	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
										DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
189	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	100%	10.000.000	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	10.000.000	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25 UMKM	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			5.313.000.000	
190	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	0,79%	5.263.000.000	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	0,79 persen	5.263.000.000	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	125 Dokumen	4.963.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	10 Dokumen	300.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
191	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	86%	25.000.000	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan sinas Persentase jumlah Industri dalam SIINas	147 dokumen 86 persen	25.000.000	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
192	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase jumlah Industri dalam SIINas	86%	25.000.000	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan sinas Persentase jumlah Industri dalam SIINas	147 dokumen 86 persen	25.000.000	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	12 Dokumen	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			5.581.603.400	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.581.603.400	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.581.603.400	
193	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	4.335.016.991	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	7%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	12.011.000	
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	12.011.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	2.938.992.680	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.910.792.680	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	28.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	25.000.000	
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	269.953.700	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	20.207.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	75.815.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44.999.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.996.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	75.936.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	163.440.600	
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100.220.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	63.220.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	686.982.411	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	316.625.211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan	365.357.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	238.636.600	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	177.955.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.181.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
194	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	60%	150.000.000	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijikan daerah mengenai pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	25 Dokumen	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang disusun	50 dokumen	0	
	2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				
							Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	5 Daerah	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
195	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi di kabupaten Batang	100%	82.800.000	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase promosi di Kabupaten Batang Jumlah event promosi penanaman modal yang diikuti	100 3 event	82.800.000	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	82.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
196	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ijin yang diterbitkan	100%	516.293.009	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan pengaduan kepada masyarakat dan terlaksananya pedoman pelaporan pengaduan Terlaksannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) Terlaksannya pelayanan perijinan yang memadai dan jumlah perijinan yang terlayani	8 orang 100 % 5100 ijin	516.293.009	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	1250 Pelaku Usaha	348.750.109	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	90.758.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	76.784.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
197	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	8%	407.747.000	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina Jumlah perusahaan yang dikoordinasikan	240 perusahaan 120 perusahaan	407.747.000	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan Usaha.	65.688.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	200 Pelaku Usaha	269.357.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal				
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	72.702.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
198	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	45%	89.746.400	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	Satuan 3 kegiatan	89.746.400	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	89.746.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			13.176.719.472	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.334.369.604	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			6.334.369.604	
199	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	438.369.604	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	23%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	209.129.977	
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	67.677.347	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	141.452.630	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	136.757.200	
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tahun Paket	8.347.200	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	tahun Paket	60.392.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tahun Paket	36.922.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	tahun Paket	31.096.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	0	
	2	19	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	tahun Unit	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	92.482.427	
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	tahun Unit	92.482.427	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
200	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	39%	1.340.000.000	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Capaian Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	32 persen	100.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	5 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	15.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	35.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 kegiatan	1.240.000.000	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi	1.240.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
201	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	capaian medali kejuaraan	45medali	4.356.000.000	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	40 kegiatan	3.406.000.000	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit	250.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	20 Dokumen	3.156.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	capaian penyelenggaraan kejuaraan olahraga dilaksanakan	6 kegiatan	450.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	100.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota				
							Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	5 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	500 Orang	350.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	capaian prestasi olahraga berjenjang, dan berkelanjutan	30 kegiatan	250.000.000	
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah				
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	500 Orang	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	200 Orang	200.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	10 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	capaian olahraga rekreasi yang dibina	30 kegiatan	250.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	250.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
202	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Penghargaan yang diterima	10%	200.000.000	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	capaian pembinaan organisasi kepramukaan	4 kegiatan	200.000.000	
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Laporan	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.842.349.868	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			6.842.349.868	
203	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	4.705.977.868	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	23%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	4.289.911.622	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.214.669.622	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	75.242.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	219.232.800	
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	29.232.800	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	190.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	170.021.500	
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tahun Laporan	2.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	tahun Laporan	137.500.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	tahun Laporan	30.521.500	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	26.811.946	
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	tahun Unit	26.811.946	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	tahun Unit	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
204	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	19%	1.587.792.000	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	capaian destinasi wisata yang dikelola	10 obyek	100.000.000	
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	100.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	0 Orang	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	capaian Destinasi Pariwisata yang dikelola	9 obyek	1.487.792.000	
	3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	200.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	150.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	1.137.792.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
205	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan wisatawan	22%	250.000.000	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Capaian jumlah wisatawan	20 persen	250.000.000	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Kegiatan	100.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Promosi	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
206	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	25%	248.580.000	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	17 Unit	248.580.000	
	3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	123.580.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	26	04	2.02	0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif				
							Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	75.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2 Laporan	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual				
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	20 Produk	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
207	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	40%	50.000.000	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 Orang	50.000.000	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	capaian Pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif	100 orang	0	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			5.578.922.329	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.578.922.329	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.276.424.779	
208	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	87%	4.498.075.700	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	93,79%		
							cakupan layanan operasional kantor	97,72%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	60%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	11.525.347	
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	8 Laporan	11.525.347	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	3.697.776.970	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.675.396.970	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	22.380.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	25.000.000	
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	199.894.437	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.187.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	63.386.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.792.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.440.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	7.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.966.037	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	6.121.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	382.595.100	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	3.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	149.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	230.595.100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	181.283.846	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	144.874.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	1.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.472.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	23.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	587.046	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.350.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
209	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	0,16%	778.349.079	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang aktiv	131 perpustakaan	506.660.229	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	16 Perpustakaan	82.266.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	17 Layanan	4.425.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	12.015.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	372.953.429	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai skor rata rata durasi membaca	56,8 Menit	271.688.850	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan	30.044.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	74.604.450	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	100 Lokus	167.040.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			302.497.550	
210	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK outcome)	75,5indeks	296.732.150	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	36500 Dokumen	111.850.230	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	109500 Berkas	73.596.630	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Laporan	38.253.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	20 dokumen	147.440.100	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	147.440.100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah arsip yang diunggah ke SJIKN	50 Dokumen	37.441.820	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	0 Pengguna	1.912.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	35.529.820	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
211	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)	22,6indeks	5.765.400	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang dimusnahkan dengan retensi di bawah 10 tahun	2000 dokumen	2.749.500	
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan	4 Arsip	2.749.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	jumlah daftar arsip statis dan hasil alih media yang diautentikasi	1 daftar	3.015.900	
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	3.015.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.575.713.575	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.575.713.575	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.575.713.575	
212	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	5.386.703.575	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	94,5%		
							cakupan layanan operasional kantor	97,3%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	20%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	6.420.318	
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.420.318	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	4.464.819.452	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/bulan	4.106.821.452	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	357.998.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	84.000.000	
	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	5.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang	25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	54.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	307.737.105	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	115.054.257	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.825.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	112.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.657.848	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	25.000.000	
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	212.873.900	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81.623.900	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	285.852.800	
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	70.852.800	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	210.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
213	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	97%	1.559.010.000	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	Cakupan Lokasi Kegiatan Pengelolaan Penangkapan ikan	1 lokasi	19.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	19.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anggota Kelompok Nelayan	200 orang	40.010.000	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	150 Orang	20.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	20.010.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola	6 lokasi	1.475.000.000	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	1.475.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembuatan rekomendasi BBM Bagi Nelayan dan Rekomendasi Pembuatan PAS Kapa	40 dokumen	25.000.000	
	3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				
							Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	40 Rekomendasi	25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
214	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	94%	290.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan kelompok pembudidaya yang mendapatkan pendampingan pembinaan, dan bantuan sarpras usaha	10 Kelompok	52.355.000	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	38.663.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				
							Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0 Kelompok	13.692.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarpas pembudidayaan yang dikelola pada kelompok budidaya	5 Kelompok	237.645.000	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	197.645.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Unit	40.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
215	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	100%	100.000.000	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota POKMASWAS yang ikut kegiatan pembinaan	125 Orang	100.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan				
							-	-	100.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
216	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	98%	240.000.000	
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	240.000.000	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35000 Ton	240.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			0	
						SEKRETARIAT DAERAH			61.457.274.659	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			61.457.274.659	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			61.457.274.659	
222	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	90%	28.203.318.232	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	90%		
							cakupan layanan operasional kantor	85%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	90%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	90%		
							Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	36 (sedang)skor		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%		
							Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	100%		
							Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	90%		
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	3.045.000	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	3.045.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	15.297.970.804	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	14.712.188.804	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	542.782.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	43.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	120.000.000	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	1.774.286.400	
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	260.245.900	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	314.040.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	165.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	67.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	450.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	418.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	403.537.600	
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	256.063.200	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	97.474.400	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	1.895.666.100	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	143.202.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	930.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	255.020.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	567.443.600	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	3.131.840.200	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	128.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	1.789.078.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	285.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	919.262.200	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya kebutuhan KDH dan WKDH	1 Laporan	929.232.528	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	179.232.528	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan tugas tugas pimpinan daerah	9	3.300.230.000	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	1.829.020.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	1.050.030.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 Paket	421.180.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi	52 SKPD	616.335.000	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	227.883.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	211.993.900	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	50.491.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	125.966.300	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan Daerah	144 Kegiatan	731.174.600	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	144 Laporan	219.664.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	144 Laporan	143.527.200	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	144 Laporan	367.982.600	SEKRETARIAT DAERAH
223	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	100%	31.242.710.467	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	100%		
							Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%		
							Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	95%		
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	1 Dokumen	648.312.000	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	19 Dokumen	182.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	106.640.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	359.422.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kebijakan fasilitasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan	1 Kebijakan	29.807.283.900	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	29.618.809.900	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	108.279.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	80.195.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	1 kegiatan	709.866.567	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200 Dokumen	184.423.717	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum				
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	326.767.070	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	198.675.780	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah MOU kerjasama daerah yang dilaksanakan	1 MoU	77.248.000	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	37.248.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
224	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	15%	2.011.245.960	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	100%		
							Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	97%		
							Persentase lelang melalui e-procurement	100%		
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah monev dan pelaporan kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	12 bulan	500.000.000	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	182.480.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	192.520.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	15 Dokumen	125.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembangunan	1 Dokumen	560.080.000	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	158.270.300	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	229.259.400	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	172.550.300	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang ditenderkan	100 paket	562.551.800	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	65 Dokumen	315.336.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	105.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	142.215.300	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembangunan	1 Dokumen	388.614.160	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	8 Dokumen	305.753.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan	4 Dokumen	82.860.660	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			
						BAGIAN UMUM			0	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			0	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			0	
225	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	0	
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	0	BAGIAN UMUM
						SEKRETARIAT DPRD			58.615.987.995	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			58.615.987.995	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			58.615.987.995	
226	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	38.585.987.995	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	12bulan		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							Persentase administrasi keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaranm dan evaluasi kinerja	9 dokumen	90.000.000	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terfasilitasi	3 kegiatan	3.785.762.275	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.576.262.775	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	199.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.999.500	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi barang milik daerah	10 dokumen	233.000.000	
	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	220.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	20 orang	118.000.000	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	18.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terfasilitasi	8 kegiatan	590.000.000	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150 Dokumen	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	165.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 unit	300.000.000	
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang kantor yang tersedia	10 unit	354.054.220	
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	174.054.220	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Laporan	30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	149 unit	850.000.000	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	320.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	31.965.171.500	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	31.660.171.500	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	135 Paket	205.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	300.000.000	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
227	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	100%	20.030.000.000	
							Persentase kUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	100%		
							Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	100%		
							Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	100%		
							Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	45%		
							Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	100%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	100%		
							Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda non APBD yang ditetapkan	5 Perda	1.100.000.000	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	950.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah kebijakan anggaran yang dibahas	8 dokumen	330.000.000	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	80.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	360 laporan	1.230.000.000	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	80 Laporan	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	80 Laporan	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	80 Laporan	230.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	80 Laporan	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10 Dokumen	350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100 %	2.790.000.000	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD				
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	305.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD				
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD				
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen	85.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah anggota DPRD yang melakukan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	45 orang	880.000.000	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses				
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	815.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase kepatuhan Anggota DPRD terhadap kode etik DPRD	100 %	10.000.000	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD	100 %	13.690.000.000	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80 Dokumen	13.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	650.000.000	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			9.187.984.043	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.187.984.043	
	5	01				PERENCANAAN			8.437.984.043	
228	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	85%	5.163.167.244	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	97%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	75%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	20.000.000	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	4.008.140.420	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.859.388.420	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	143.724.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.028.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah SK/dokumen kepegawaian yang disusun	27 laporan	66.650.000	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	16.650.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	50.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	3 jenis	228.558.424	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.124.600	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.559.450	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	66.484.374	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.890.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.500.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	100.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	1 jenis	43.164.000	
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	43.164.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran	3 jenis	306.974.400	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.002.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.900.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	132.072.400	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah yang terpelihara	3 jenis	489.680.000	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	218.680.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	45.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	226.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
229	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	1.289.816.799	
							Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	100%		
							Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	100%		
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	3 Dokumen	840.534.999	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	264.599.999	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	25.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik				
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	45.220.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	46.423.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	105.496.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	15 Usulan	11.657.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	342.138.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang tersedia	1 Data	204.937.500	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	130.638.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	74.299.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaporkan evaluasi tepat waktu	52 Perangkat Daerah	244.344.300	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	244.344.300	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
230	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	91%	1.985.000.000	
							Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	91%		
							Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	91%		
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 laporan	740.000.000	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	233.774.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	361.231.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	134.995.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 Laporan	440.000.000	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	185.955.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 Laporan	43.872.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	11.250.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	153.985.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	35.963.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	8.975.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Laporan	805.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	344.315.250	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	59.449.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	73.020.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	308.880.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	10.335.750	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	9.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			750.000.000	
231	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	60%	750.000.000	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi utama kajian bidang pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan	2 Rekomendasi	236.450.000	
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	206.450.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	30.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi kajian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan	2 Rekomendasi	125.000.000	
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	125.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	52 Perangkat Daerah	388.550.000	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	156.458.900	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	50.917.700	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	113.007.400	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	26.550.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	41.616.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			419.995.701.558	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			419.995.701.558	
	5	02				KEUANGAN			419.995.701.558	
232	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	44.153.029.478	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	97%		
							cakupan layanan operasional kantor	96%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	96%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	46.492.500	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.355.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.637.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	19.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	31.652.642.383	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	31.494.302.383	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	158.340.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	824.953.800	
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	774.953.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	1.320.571.158	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	32.000.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	789.381.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	72.883.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	156.592.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	83.686.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	180.527.508	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	7.383.578.000	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	7.383.578.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	1.181.216.640	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	524.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	647.216.640	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	1.743.574.997	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	111 Unit	713.850.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	85.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	809.049.997	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	135.675.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
233	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	Tepat waktu (status)	370.696.784.630	
							Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	Tepat waktu (status)		
							Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	90%		
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah rancangan APBD yang tersusun	2 dokumen	11.406.661.250	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	134.729.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	134.598.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	343.328.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	149.677.350	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	18.677.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	14.715.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	349.802.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	334.869.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	9.400.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	52.773.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	154.590.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	30.800.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	288.099.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan SDA sesuai aturan	12 OPD	1.157.016.200	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	33.384.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	315.443.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	15.593.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	117.387.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	128.401.050	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	1 Dokumen	237.513.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	309.292.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang tersusun	1 Dokumen	964.301.700	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	37.059.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	112.389.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	46 Laporan	303.345.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	222.184.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	71.271.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	94.401.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	123.650.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Dana Desa, ADD dan BHP	100%	357.168.805.480	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	325.428.452.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	12.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.740.353.280	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
234	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	100%	1.950.862.150	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD Kabupaten Batang tersusun	1 Laporan	1.950.862.150	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga				
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	237.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.055.000.650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	173.983.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	376.280.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	108.597.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
235	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	1,36%	3.195.025.300	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya mutu pelayanan pendapatan	87%	3.195.025.300	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.681.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	115.261.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1.393.939.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	157.885.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah				
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	195.965.050	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	844.209.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	287.083.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			9.179.017.169	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.179.017.169	
	5	03				KEPEGAWAIAN			7.428.933.202	
236	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program BKD	100%	4.981.040.072	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti Bintek,Sosialisasi dan workshop purna tugas	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 dokumen	30.000.000	
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	27 Laporan	30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	3.575.932.022	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.549.592.022	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	26.340.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Bintek,Sosialisasi dan workshop	3 laporan	187.218.650	
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	34.635.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165 Orang	152.583.250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	12 laporan	442.438.000	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14.746.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	124.431.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	94.920.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	46.888.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.451.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan operasional kantor	12 bulan	427.896.400	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243.137.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.645.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	317.555.000	
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	189.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	127.755.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
237	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	2.447.893.130	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 laporan	1.118.959.890	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	26.862.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	843.452.900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	67.637.360	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	107.007.790	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	73.999.840	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN	12 laporan	816.620.000	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 Dokumen	27.620.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	37.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	752.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	12 laporan	132.575.840	
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	51.555.840	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	81.020.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai,pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	100 %	379.737.400	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	168.702.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN				
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2500 Orang	136.205.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	74.830.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.750.083.967	
238	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	100%	1.750.083.967	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	1 laporan	150.000.000	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Latsar CPNS	200 ASN	1.600.083.967	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	1.600.083.967	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT DAERAH			12.925.535.497	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			12.925.535.497	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			12.925.535.497	
239	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	95%	9.008.983.497	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	95%		
							cakupan layanan operasional kantor	95bulan		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	95%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	95%		
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Non Keuangan	undefined undefined	51.392.000	
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	51.392.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Pencapaian Laporan Administrasi Keuangan	undefined undefined	6.861.053.497	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	6.749.693.497	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	58.560.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah pencapaian keamanan	undefined undefined	134.250.000	
	6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	134.250.000	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase jumlah Kualitas dan Komptenesi SDM Pengawasan	001 undefined	524.328.000	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	274.328.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	250.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	undefined undefined	600.312.000	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.162.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.550.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	154.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	273.600.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase jumlah pencapaian pengadaan barang	undefined undefined	0	
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian realisasi penyediaan jasa kantor	undefined undefined	293.540.000	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.540.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana dalam keadaan baik	001undefined %undefined	544.108.000	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	12.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	433.008.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	99.100.000	INSPEKTORAT DAERAH
240	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	100%	3.133.012.000	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	80 Persen	2.509.480.000	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	490.012.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	373.804.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja				
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	484.252.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	110.448.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	131.988.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal				
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	298.576.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	620.400.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase jumlah penanganan kasus	80 Persen	623.532.000	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	108.080.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	515.452.000	INSPEKTORAT DAERAH
241	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level SPIP	Level 3	783.540.000	
							Persentase kapabilitas APIP	70%		
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase jumlah pencapaian kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi	80 Persen	367.100.000	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	124.500.000	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	242.600.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase jumlah pendampingan dan asistensi	80 Persen	416.440.000	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 perangkat daerah	40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 perangkat daerah	101.080.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	241.880.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42 perangkat daerah	33.480.000	INSPEKTORAT DAERAH
						KECAMATAN BATANG			12.694.157.443	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.694.157.443	
	7	01				KECAMATAN			12.694.157.443	
242	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	11.577.786.593	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	12bulan		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 buah	15.762.100	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.762.100	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	9.977.128.576	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	9.069.401.684	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	907.726.892	KECAMATAN BATANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	42.000.000	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.000.000	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	15.000.000	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	291.872.150	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	29.363.100	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	77.121.250	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	98.415.000	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	59.672.800	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	12.300.000	KECAMATAN BATANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.000.000	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	91.568.800	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.568.800	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	10 kegiatan	586.576.317	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.887.500	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	144.910.057	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	431.778.760	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 kegiatan	572.878.650	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	167.819.300	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	367.066.850	KECAMATAN BATANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	37.992.500	KECAMATAN BATANG
243	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	25.971.500	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 kegiatan 1 kegiatan	25.971.500	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.971.500	KECAMATAN BATANG
244	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	1.055.974.350	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	90 %	5.677.600	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.677.600	KECAMATAN BATANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	1.050.296.750	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	67.496.750	KECAMATAN BATANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	982.800.000	KECAMATAN BATANG
245	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	12.239.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum Jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	21 laporan 100 %	12.239.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.239.000	KECAMATAN BATANG
246	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	4.070.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	4.070.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4.070.000	KECAMATAN BATANG
247	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	18.116.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	18.116.000	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BATANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.116.000	KECAMATAN BATANG
						KELURAHAN WATESALIT			650.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	
	7	01				KECAMATAN			650.000.000	
248	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	455.000.000	KELURAHAN WATESALIT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	195.000.000	KELURAHAN WATESALIT
						KELURAHAN KAUMAN			650.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	
	7	01				KECAMATAN			650.000.000	
249	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	455.000.000	KELURAHAN KAUMAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	195.000.000	KELURAHAN KAUMAN
						KELURAHAN KASEPUHAN			650.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	
	7	01				KECAMATAN			650.000.000	
250	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	455.000.000	KELURAHAN KASEPUHAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	195.000.000	KELURAHAN KASEPUHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN			650.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	
	7	01				KECAMATAN			650.000.000	
251	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	455.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	195.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN
						KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH			650.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	
	7	01				KECAMATAN			650.000.000	
252	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	455.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	195.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA			650.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	
	7	01				KECAMATAN			650.000.000	
253	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	455.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	195.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA
						KELURAHAN KARANGASEM UTARA			650.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	
	7	01				KECAMATAN			650.000.000	
254	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	455.000.000	KELURAHAN KARANGASEM UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	195.000.000	KELURAHAN KARANGASEM UTARA
						KELURAHAN KARANGASEM SELATAN			650.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	
	7	01				KECAMATAN			650.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
255	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	455.000.000	KELURAHAN KARANGASEM SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	195.000.000	KELURAHAN KARANGASEM SELATAN
						KELURAHAN SAMBONG			650.000.000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000	
	7	01				KECAMATAN			650.000.000	
256	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bintek kpd Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang diselenggarakan dengan lancar	90 %	650.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	455.000.000	KELURAHAN SAMBONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	195.000.000	KELURAHAN SAMBONG
						KECAMATAN TULIS			2.028.820.151	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.028.820.151	
	7	01				KECAMATAN			2.028.820.151	
257	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	1.948.820.151	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 Laporan 2 Laporan	1.504.510.151	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.491.070.151	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	13.440.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset yang disusun Persentase pengadaan barang milik daerah	1 Laporan 100 %	7.680.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.680.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	3 Laporan	68.000.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.000.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	54.000.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5.000.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase administrasi perangkat daerah	1 Laporan 6 Laporan	156.640.000	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.600.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.580.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	960.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.500.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase pengadaan barang milik daerah	1 Laporan 100 % 3 Laporan	67.990.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.640.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	48.350.000	KECAMATAN TULIS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	4 Unit 8 Unit	139.000.000	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	115.000.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.000.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	KECAMATAN TULIS
258	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	35.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP Persentase Pelayanan PATEN yang sesuai SOP undefined	1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen undefined undefined	25.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.000.000	KECAMATAN TULIS
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN TULIS
259	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	1 Laporan 100 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN TULIS
260	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	13.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibun	17 Desa	13.000.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	13.000.000	KECAMATAN TULIS
261	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	13.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan 1 Laporan	13.000.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	13.000.000	KECAMATAN TULIS
262	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	14.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase aparatur Desa yang	1 Laporan 100 %	14.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa			
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	14.000.000	KECAMATAN TULIS
						KECAMATAN WARUNGASEM			2.355.388.225	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.355.388.225	
	7	01				KECAMATAN			2.355.388.225	
263	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	2.225.061.425	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 buah	5.000.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun undefined	1 tahun undefined undefined	1.678.052.225	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.640.888.225	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	37.164.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	1 tahun	32.000.000	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	5.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	1 tahun	77.268.800	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.504.400	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.874.500	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.715.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.834.800	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.340.100	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	1 paket	42.704.400	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	16.110.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.594.400	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	1 tahun	72.799.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.100.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.400.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.299.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	1 tahun 1 Paket	317.237.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	77.745.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	223.992.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.500.000	KECAMATAN WARUNGASEM
264	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	45.773.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 laporan	28.990.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	28.990.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 Tahun	16.783.000	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	16.783.000	KECAMATAN WARUNGASEM
265	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	5.005.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	1 tahun	5.005.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.005.000	KECAMATAN WARUNGASEM
266	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	17.786.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	1 tahun	17.786.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	17.786.000	KECAMATAN WARUNGASEM
267	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	27.254.800	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	27.254.800	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	86 Orang	20.254.800	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
268	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	34.508.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	1 tahun	34.508.000	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	13.883.000	KECAMATAN WARUNGASEM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	7.500.000	KECAMATAN WARUNGASEM
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.125.000	KECAMATAN WARUNGASEM
						KECAMATAN WONOTUNGGAL			3.459.325.655	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.459.325.655	
	7	01				KECAMATAN			3.459.325.655	
269	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	3.402.347.155	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 buah	5.000.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 12 bulan 12 bulan	1.663.890.295	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang Orang/bulan	1.630.146.295	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.744.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan 12 bulan 12 Bulan	45.060.000	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	37.380.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Wonotunggal) Persentase aparatur yang disiplin Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan 1 Stel 100 % 1 Kali	37.850.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	5.850.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	5.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	27.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase administrasi perangkat daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 % 1 tahun	101.755.000	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.095.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.085.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.950.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.595.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.440.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28.590.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase pengadaan barang milik daerah	20 Unit 1 tahun 100 %	1.425.186.400	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	31.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.300.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	68.100.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	26.086.400	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pengadaan barang milik daerah	12 bulan 12 bulan 1 tahun 100 %	60.494.460	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.875.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.358.960	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.260.500	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	63.111.000	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.111.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	8.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
270	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	25.678.500	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kali	25.678.500	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.678.500	KECAMATAN WONOTUNGGAL
271	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	1 Tahun	5.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
272	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	6.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah hasil Koordinasi Harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	6.000.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	6.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
273	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	10.150.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	45 Orang 1 Laporan	10.150.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	45 Orang	10.150.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0	KECAMATAN WONOTUNGGAL
274	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	10.150.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan 1 Kegiatan	10.150.000	
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	10.150.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
						KECAMATAN BANDAR			2.747.116.771	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.747.116.771	
	7	01				KECAMATAN			2.747.116.771	
275	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98%	2.634.461.771	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 buah	5.000.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	1.945.300.771	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.917.616.771	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	27.684.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	51.550.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	10.500.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	61 Orang	27.000.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang	14.050.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	196.053.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.499.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	61.012.500	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	59.550.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.591.500	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	10 kegiatan	38.000.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.600.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	15.000.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.400.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 kegiatan	398.558.000	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	58.658.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	334.000.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.900.000	KECAMATAN BANDAR
276	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	30.455.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 kegiatan	19.600.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	19.600.000	KECAMATAN BANDAR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 Tahun	10.855.000	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	10.855.000	KECAMATAN BANDAR
277	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	10.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	90 %	10.000.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000	KECAMATAN BANDAR
278	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	52.200.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum Jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	21 laporan 100 %	52.200.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.200.000	KECAMATAN BANDAR
279	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	10.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	10.000.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10.000.000	KECAMATAN BANDAR
280	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	10.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	85 %	10.000.000	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN BANDAR
						KECAMATAN BLADO			2.085.859.420	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.085.859.420	
	7	01				KECAMATAN			2.085.859.420	
281	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	2.023.170.420	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	1 Dokumen	5.000.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun Jumlah laporan keuangan yang disusun	100 % 12 Laporan	1.363.649.420	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.352.609.420	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.040.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	1 laporan	26.492.400	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	21.692.400	KECAMATAN BLADO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	32.000.000	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.000.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	5.000.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	196.855.900	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.514.700	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							-	-	57.630.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	67.430.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.201.200	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.580.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	34.500.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	30.655.000	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	27.500.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.155.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 %	90.117.200	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.089.600	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.027.600	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	278.400.500	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	51.634.800	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.900.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.865.700	KECAMATAN BLADO
282	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	6.600.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	100 %	6.600.000	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	6.600.000	KECAMATAN BLADO
283	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	23.989.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 %	18.989.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	18.989.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	2 kegiatan	5.000.000	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	KECAMATAN BLADO
284	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	7.700.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 %	7.700.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.700.000	KECAMATAN BLADO
285	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	7.700.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	100 %	7.700.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	7.700.000	KECAMATAN BLADO
286	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	16.700.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	16.700.000	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	9.000.000	KECAMATAN BLADO
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7.700.000	KECAMATAN BLADO
						KECAMATAN REBAN			2.734.306.678	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.734.306.678	
	7	01				KECAMATAN			2.734.306.678	
287	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	2.674.288.678	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang	100%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100 %	5.000.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100 %	1.975.976.922	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.917.556.678	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.120.244	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18.300.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset yang disusun Persentase pengadaan barang milik daerah	1 Laporan 100 %	26.820.122	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	21.060.122	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.760.000	KECAMATAN REBAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	71.500.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	12.500.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	54.000.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	5.000.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	99.849.500	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.449.500	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.526.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.994.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.200.000	KECAMATAN REBAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.680.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.000.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	47.000.650	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	17.797.600	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	29.203.050	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 %	54.174.122	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.200.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.974.122	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 kegiatan	393.967.362	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	79.967.400	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	23.000.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	230.000.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.999.962	KECAMATAN REBAN
288	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	35.768.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun 1 Tahun	25.768.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	17.768.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	8.000.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 Tahun	10.000.000	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN REBAN
289	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Tahun	5.000.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	KECAMATAN REBAN
290	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	8.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Jumlah gangguan trantibun yang dapat diselesaikan dibagi jumlah gangguan trantibun) dikali 100	12 Bulan	8.000.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.000.000	KECAMATAN REBAN
291	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	3.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 Tahun	3.000.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	3.000.000	KECAMATAN REBAN
292	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	8.250.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 persen	8.250.000	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5.500.000	KECAMATAN REBAN
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	2.750.000	KECAMATAN REBAN
						KECAMATAN KANDEMAN			1.922.245.025	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.922.245.025	
	7	01				KECAMATAN			1.922.245.025	
293	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	1.871.162.225	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	90%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	1.449.195.025	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.426.495.025	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	22.700.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	12 bulan	20.760.000	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.760.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	36.022.400	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4.500.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	4.522.400	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 persen	126.619.780	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.500.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.887.500	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.752.480	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.979.800	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	53.720.200	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	53.720.200	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	10 kegiatan	79.309.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33.650.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	42.659.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	105.535.820	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	61.223.820	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	16.312.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
294	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	20.618.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 persen	20.618.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	20.618.000	KECAMATAN KANDEMAN
295	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	4.999.800	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Peningkatan Efektitfitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.999.800	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.999.800	KECAMATAN KANDEMAN
296	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	10.755.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	13 desa	10.755.000	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.755.000	KECAMATAN KANDEMAN
297	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	7.255.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	erlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 kegiatan	7.255.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39 Orang	7.255.000	KECAMATAN KANDEMAN
298	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta	90 %	7.455.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	100 persen	7.455.000	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	7.455.000	KECAMATAN KANDEMAN
						KECAMATAN TERSONO			2.491.061.123	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.491.061.123	
	7	01				KECAMATAN			2.491.061.123	
299	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	2.335.759.623	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	99%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	80%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10 Laporan	1.696.369.763	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.657.521.763	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.848.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	2 Laporan	5.760.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.760.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	65.000.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	54.000.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	5.000.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	176.802.000	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.783.500	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.030.200	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.250.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.208.300	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.280.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	36.250.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	80 %	220.478.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	5.000.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	215.478.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 %	115.370.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.250.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	15.900.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	10.000.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	83.220.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	55.979.860	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4.999.860	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	8.000.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	21.980.000	KECAMATAN TERSONO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	21.000.000	KECAMATAN TERSONO
300	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	14.665.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	8 Layanan	14.665.000	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	14.665.000	KECAMATAN TERSONO
301	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	25.300.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	8 usulan	20.300.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	20.300.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	2 kegiatan	5.000.000	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	KECAMATAN TERSONO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
302	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	20.900.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	20 desa	20.900.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.900.000	KECAMATAN TERSONO
303	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	38.026.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial) Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	7 Kegiatan 7 laporan	38.026.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	17.630.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20 Dokumen	20.396.000	KECAMATAN TERSONO
304	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta	90 %	56.410.500	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	56.410.500	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	68 Dokumen	20.950.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	9.615.000	KECAMATAN TERSONO
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	19.845.500	KECAMATAN TERSONO
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	6.000.000	KECAMATAN TERSONO
						KECAMATAN GRINGSING			1.984.811.734	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.984.811.734	
	7	01				KECAMATAN			1.984.811.734	
305	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	1.853.041.734	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 buah	5.000.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							0	1 tahun 0	5.000.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	1.408.859.014	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.391.759.014	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	17.100.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset yang disusun Persentase pengadaan barang milik daerah	1 Laporan 100 %	4.800.000	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	42.300.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	10.300.000	KECAMATAN GRINGSING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	27.000.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	5.000.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	114.392.720	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.471.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.350.650	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	15.621.070	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.000.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.500.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan	32.450.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	46.710.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	12.400.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	34.310.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	10 kegiatan	129.980.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.480.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.000.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 kegiatan	101.000.000	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	70.000.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.000.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	19.000.000	KECAMATAN GRINGSING
306	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	50.450.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	100 %	43.450.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.400.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 tahun Dokumen	25.050.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 Tahun	7.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 tahun Dokumen	7.000.000	KECAMATAN GRINGSING
307	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	1 laporan	5.000.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	KECAMATAN GRINGSING
308	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	23.860.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 %	23.860.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	23.860.000	KECAMATAN GRINGSING
309	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	7.325.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	1 kegiatan	7.325.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7.325.000	KECAMATAN GRINGSING
310	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	45.135.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	1 kegiatan	45.135.000	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	23.300.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	15.300.000	KECAMATAN GRINGSING
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	6.535.000	KECAMATAN GRINGSING
						KECAMATAN SUBAH			2.347.707.494	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.347.707.494	
	7	01				KECAMATAN			2.347.707.494	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
311	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	2.263.707.494	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	1.687.735.493	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.603.207.493	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	45.924.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.604.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset yang disusun Persentase pengadaan barang milik daerah	1 Laporan 100 %	28.242.000	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	20.562.000	KECAMATAN SUBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	51.593.200	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	5.600.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	109 Orang	27.000.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	18.993.200	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	84.394.800	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.004.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.168.800	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.202.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.220.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.000.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	45.737.200	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	45.737.200	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	10 kegiatan	44.004.801	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	750.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.892.801	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.362.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 kegiatan	322.000.000	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	33.000.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	9.000.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	280.000.000	KECAMATAN SUBAH
312	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	3.600.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 kegiatan	3.600.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	3.600.000	KECAMATAN SUBAH
313	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	44.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	90 %	28.000.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000	KECAMATAN SUBAH
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	2 kegiatan	16.000.000	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000	KECAMATAN SUBAH
314	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	4.400.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum Jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	21 laporan 100 %	4.400.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	1 Laporan	4.400.000	KECAMATAN SUBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
315	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	13.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	13.000.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	13.000.000	KECAMATAN SUBAH
316	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	19.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	85 %	19.000.000	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	19.000.000	KECAMATAN SUBAH
						KECAMATAN LIMPUNG			2.262.084.245	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.262.084.245	
	7	01				KECAMATAN			2.262.084.245	
317	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	2.213.869.345	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	90%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan wali data pendukung statistik sektoral	1 Dokumen	5.000.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100 %	1.583.894.517	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.504.759.317	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.835.200	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18.300.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun Jumlah laporan aset yang disusun	100 % 2 Laporan	30.480.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	22.800.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin Persentase aparatur yang disiplin	100 % 1 kegiatan	38.750.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	6.750.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	27.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah Persentase administrasi perangkat daerah	100 % 100 %	78.719.100	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.539.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.410.000	KECAMATAN LIMPUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.678.600	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.991.500	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah Persentase pengadaan barang milik daerah	100 % 100 %	33.500.000	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	33.500.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	100 %	138.823.420	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.375.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.245.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.169.100	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.034.320	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 kegiatan	304.702.308	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	61.990.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	63.712.308	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	174.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
318	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	18.177.400	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	100 %	18.177.400	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.177.400	KECAMATAN LIMPUNG
319	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN LIMPUNG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
320	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	5.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 %	5.000.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
321	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	6.225.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	100 %	6.225.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	51 Orang	6.225.000	KECAMATAN LIMPUNG
322	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	13.812.500	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	13.812.500	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.812.500	KECAMATAN LIMPUNG
						KECAMATAN BANYUPUTIH			2.349.752.283	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.349.752.283	
	7	01				KECAMATAN			2.349.752.283	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
323	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	2.289.093.183	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	1 Dokumen 100 %	5.000.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 bulan	1.617.932.923	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.526.600.923	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	70.632.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.700.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	12 bulan	29.280.000	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	21.600.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.680.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	42.590.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	7.650.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	7.940.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	53.664.800	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.489.800	KECAMATAN BANYUPUTIH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.575.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.950.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.600.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11.450.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	125.368.207	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	53.348.300	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	72.019.907	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	50.745.100	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.245.100	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	364.512.153	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	20.480.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.032.153	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	260.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
324	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	27.901.500	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 kegiatan	27.901.500	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.257.500	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	9.644.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
325	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Peningkatan Efektitfitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
326	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	8.503.800	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.503.800	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.503.800	KECAMATAN BANYUPUTIH
327	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	8.228.800	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial) Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Kegiatan 1 tahun	8.228.800	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	8.228.800	KECAMATAN BANYUPUTIH
328	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	11.025.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	100 %	11.025.000	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11.025.000	KECAMATAN BANYUPUTIH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						KECAMATAN PECALUNGAN			2.643.067.355	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.643.067.355	
	7	01				KECAMATAN			2.643.067.355	
329	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	2.583.537.355	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 buah	3.405.000	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.405.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	1.452.621.355	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.427.617.355	KECAMATAN PECALUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	23.004.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset yang disusun Persentase pengadaan barang milik daerah	1 Laporan 100 %	46.800.000	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	42.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.800.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	34.300.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	109 Orang	27.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	7.300.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	104.616.315	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.919.835	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.591.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.834.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.021.480	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.100.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	29.150.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	748.681.520	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	748.681.520	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	10 kegiatan	76.172.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	22.200.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	51.972.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 kegiatan	116.941.165	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	39.650.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10.291.165	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	67.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
330	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	24.835.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	1 kegiatan	24.835.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.225.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	6.610.000	KECAMATAN PECALUNGAN
331	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	10.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	90 %	5.000.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN PECALUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	2 kegiatan	5.000.000	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
332	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	5.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum Jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	21 laporan 100 %	5.000.000	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
333	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	9.695.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	9.695.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7.695.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
334	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	10.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	85 %	10.000.000	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN PECALUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						KECAMATAN BAWANG			2.181.354.992	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.181.354.992	
	7	01				KECAMATAN			2.181.354.992	
336	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	2.040.578.392	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	100%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Orang	5.000.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Tahun Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	1.412.864.993	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.344.854.993	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45.060.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	22.950.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset yang disusun Persentase pengadaan barang milik daerah	1 Laporan 100 %	39.800.000	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.800.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	61.650.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	7.650.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	54.000.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	0	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	141.802.099	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.077.900	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.087.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.100.999	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.096.200	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.440.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.000.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	30.000.000	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan kantor menjadi lebih baik dan lancar	5 Kegiatan	15.007.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.250.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.600.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.157.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kecamatan Bawang Terpeliharanya Barang Milik Daerah	20 Desa 13 Unit	334.454.300	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	43.454.300	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	25.000.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.000.000	KECAMATAN BAWANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
337	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	100 %	36.985.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan Kepada Masyarakat Yang Memiliki SOP	12 Layanan	26.505.000	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	26.505.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	10.480.000	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.480.000	KECAMATAN BAWANG
338	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	90 %	29.980.100	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan yang masuk prioritas atau perangkingan	8 Kegiatan	20.000.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Bimtek Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Diselenggarakan Dengan Lancar	2 Kegiatan	9.980.100	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.980.100	KECAMATAN BAWANG
339	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	21.490.500	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penanganan trantibum	20 Desa	21.490.500	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.490.500	KECAMATAN BAWANG
340	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	12.321.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	12.321.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	12.321.000	KECAMATAN BAWANG
341	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 %	40.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Aparatur Desa yang memahami tentang keuangan dan administrasi desa	100 Orang	40.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN BAWANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN BAWANG
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7.537.483.016	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			7.537.483.016	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7.537.483.016	
342	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	100%	3.685.922.016	
							persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	100%		
							cakupan layanan operasional kantor	100%		
							Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	10%		
							persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	9.865.000	
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	9.865.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	96.50 %	2.708.056.017	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.633.703.017	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.628.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.725.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	25.000.000	
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	452 dokumen	251.319.639	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.450.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.234.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.001.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	15.973.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	23.175.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.220.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	135.266.339	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kend dinas yang dibeli, jumlah alat yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumalh asert yang dibeli, jumlah gedung yang dibangun, jumlah Sarpras gedung yang dibeli	6 Unit	444.496.000	
	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	444.496.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	24 orang	124.185.360	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.185.360	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	96 %	123.000.000	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	111.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	6.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
343	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	95%	1.398.045.000	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	19 kegiatan	1.398.045.000	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1050 Orang	253.045.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang	645.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka				
							Jumlah Paskibraka	100 Orang	500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
344	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	100%	1.317.099.000	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran Parpol dan lembaga pendidikan	4 kegiatan	1.317.099.000	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	1200 Orang	300.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	93 Orang	998.699.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13 Laporan	18.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
345	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100%	68.400.000	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan untuk pemantapan bidang pemberdayaan dan ormas	2 kegiatan	68.400.000	
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	68.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
346	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	100%	167.580.000	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan upacara dan sosialisasi yang dilaksanakan	5 kegiatan	167.580.000	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	167.580.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
347	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial	100%	900.437.000	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	51 kegiatan	900.437.000	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	700 Orang	31.212.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	3000 Orang	199.224.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
							Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	670.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**2.034.527.440.436, 00**	

Sumber : Bapelitbang, 2024 dianalisis

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025

Sub bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja daerah. Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 6. 1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian tahun 2025	Perangkat Daerah Koordinator
-1	-2	-3	-4	-5
1	PDRB Per Kapita (ADHK)	juta rupiah	22,9	Sekretariat Daerah
2	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,5413	Sekretariat Daerah
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	70,75	Sekretariat Daerah
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	92,25	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	63,96	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50-6,10	Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	ribu rupiah	9.896	Sekretariat Daerah
8	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	21,7	Sekretariat Daerah
9	Persentase Penduduk Miskin	%	8,34-8,27	Sekretariat Daerah
10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,80-5,27	Sekretariat Daerah
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	200	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,66	Sekretariat Daerah
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,96	Sekretariat Daerah
14	Nilai SAKIP	Skor	71,25	Sekretariat Daerah
15	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	Level 3	Sekretariat Daerah
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	80	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,6	Sekretariat Daerah
18	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	150	Sekretariat Daerah
19	Indeks Rasa Aman	Indeks	4,4	Sekretariat Daerah
20	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,83	Sekretariat Daerah
21	Indeks Demokrasi	Indeks	74	Sekretariat Daerah
22	Angka Kriminalitas	%	0,014	Sekretariat Daerah

Sumber : RPD Kab. Batang Tahun 2023-2026

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada

pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 6. 2
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Rata-Rata Lama sekolah	tahun	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	7,2
		Angka Harapan Sekolah	tahun	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,5
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	80,5
		Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100
		Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79
2	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kematian ibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cidera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	112
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	7,6
		Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	13,61
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,94

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan : jumlah penduduk x 100	90
		Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar : jumlah puskesmas kali 100	90,47
		Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	75
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/ X/2010	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x 100	13,31
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
3	RSUD Batang	Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standart yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang seharusnya di miliki x 100 persen	88
		Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	88
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.30
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
4	RSUD Limpung	Persentase Capaian Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	93
		Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,25
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x 100	74,58
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x 100	74,15
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap : Jumlah total panjang jalan kabupaten: kota x 100	91,5

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi : Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01
		Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x 100	15,94
		Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah ber HPL : HGB x 100	28,88
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,94
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni : Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	63,5
		Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik : Luas Total Perumahan dan Permukman) x 100	84
		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	Jumlah infrastruktur yg dipenuhi : jumlah infrastruktur yg ada lalu x 100	65
		Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	(Luas lingkungan kumuh yg tertangani : Luas lingkungan kumuh lalu) x 100	63,5
		Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	{ (jumlah sengketa tanah tahun berkenaan - jumlah sengketa tanah tahun lalu) : jumlah sengketa tanah tahun lalu } x 100	90
		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	(Jumlah kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terdaftar) x 100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78
		Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x 100	78
		Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x 100	3,5
		Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) x 100	73
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kerukunan	%	Survei melalui 3 komponen yaitu : (Toleransi + kesetaraan + kerjasama) : 3 x 100	80
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71
		Persentase demo tertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada) x 100	100
		Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Peduduk dikawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana: Jumlah Penduduk dikawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana: Jumlah Desa Rawan Bencana x 100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan: JUmlah Sasaran Dampak Bencana yang dilakukan tanggap Bencana x100 +Jumlah Kejadian Bencana yng direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi: Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100 : 4	74,17
		Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	Indeks	Jumlah bencana yang tertangani : jumlah bencana x 100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
10	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri, dan berfungsi sosial	%	Jumlah PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga : Jumlah PMKS di kab Batang X 100	76
		Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos : Jumlah PSKS di kab batang X 100	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,06
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87
11	Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja : jumlah angkatan kerja x 100	97
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100	32,01

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	Jumlah indikator sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target : Jumlah indikator sasaran strategis Perangkat Daerah x 100	80
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	**r = {Pt: P0) x (1: t)-1} x 100** r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah Penduduk tahun t P_0 = Jumlah penduduk tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P_0	1,12
		TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Indeks	5 Σ ASFR	2,9
		Ratio KDRT	Rasio	Jumlah KDRT: Jumlah Rumah Tangga X 100	0,0067
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100	0
		Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X 100	4,2747
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
13	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Luas RTH	%	Luas RTH: Luas lahan x 100	70
		Indeks Kualitas Air	Indeks	ci baru = cim-ci (hasil pengukuran): cim-LiJ	50
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	100-(50: 0.0 x ieu-0.1)	80
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Luas tutupan hutan: Luas wilayah administrasi	68,8
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	jumlah desa maju : total jumlah se kab. batang x 100	24
		Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,57
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,81
		Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,51
		Persentase pkk aktif	%	Jumlah pkk aktif : jumlah pkk x 100	62,76
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,72
		Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	[(Jumlah Kepemilikan KIA : Jumlah Peduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber-KTP el : Jumlah Peduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber-akta kelahiran	88,33

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
				usia 0-18 th : jumlah penduduk usia 0-18 th) : 3] x 100	
		Menurunnya Presentasi Data Ganda dan Anomali	%	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data ganda dan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu] x 100	2
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63
16	Dinas Perhubungan	Rasio ijin trayek	rasio	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan: jumlah penduduk	1,5
		Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	v / c ratio Jalan Kabupaten v : volume kendaraan c : kapasitas jalan	0,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	Domain SPBE	3,55
		Indeks Smart City	Indeks	Dimensi Smart City	3,48
		Indeks Keamanan Informasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100
		Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100
		Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	Jumlah informasi yang diakses publik : dengan jumlah penyebaran informasi x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	Data BPS	13,24
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Perangkat daerah Jumlah capaian sasaran strategis Perangkat daerah x 100	79
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahun lalu : investasi tahun ini) x 100	80

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	Jml investor tahun n dikurangi jml investor tahun (n-1) dibagi jml investor tahun n x 100	60
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	23
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1 kali 100	15
		Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah produk ekonomi kreatif: kajian yang dilaksanakan) x 100	12
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72
		Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	40
		Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	{(Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n – Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1) : Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1} x 100	4
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	TGM= (0,3 ×(FM+DM+JB))+0,05×(FAI+DAI)	66,37
		index pembangunan literasi masyarakat	Indeks	IPLM= ∑UPLM: AM	2,9
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,2
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,69
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	T=(a+i+s+j): 4 T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktiv yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,5
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	Indeks	T=(m+b+g+a+c+i): 6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	22,6

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	
				b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	
				g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten: kota dengan NSPK	
				a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	
				c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	
				i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	
22	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	nilai rata- rata Indeks semua pelayanan yang dilaksanakan	85
		Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilis setiap bulan februari)	21,95
		Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidaya x 100	97
		Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat konsumsi makan ikan x 100	98
		Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun n x 100	90
		Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
23	Dinas Pangan dan Pertanian	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,025
		Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)			
		a. Beras	Ton	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversi dengan rendemen beras 62,74	121.734,00
		b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau xkan dengan angka konversi jaguang 89	72.573,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	Jumlah cadangan pangan kabupaten : standar cadangan pangan kabupaten x 100	10,7
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : Jumlah PDRB x 100	24,77
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan, Horti da Perkebunan) per hektar per tahun : luas panen *100	0,0108
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,3
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,1
24	Sekretariat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	Jumlah PD yang mendapat nilai B : jumlah PD yang ada x 100	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
		Nilai EKPPD	Skor	Nilai hasil evaluasi LPPD nasional menurut Kemendagri	2,99
25	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey: Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	79
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65
26	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	60 Capaian sasaran pemda+20 sasaran perangkat daerah+20capaian program daerah	79
		Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	(Rata-rata capaian indikator kinerja program + rata-rata capaian IKU + rata-rata Capaian IKD) /3 x 100	91
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	Jumlah program dalam RKPD th berkenaan : jumlah program APBD th berkenaan x 100	100
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	Jumlah Program dalam Renja Perangkat Daerah : Jumlah Program dalam Renstra Perangkat Daerah X 100	100
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	63,00
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	(Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan : Jumlah total hasil kelitbangan) x 100	100
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,8
27	Badan Pengelolaan Keuangan,	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	STATUS	WTP

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Pendapatan, dan Aset Daerah				
		Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP : jumlah total OPD) x 100	100
		Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	[(Realisasi Pendapatan Daerah tahun n)-(Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)]: (Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)*100	0.5
		Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)]: (Realisasi PAD Tahun n-1) x100	1,36
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,5
28	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)	225
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	(Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter : Total Parameter Yang Terisi) x (1: jumlah parameter) x Nilai Dasar 25	87
		Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	(Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja "baik" : Jumlah ASN Kab. Batang) x 100	100
		Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	(Jumlah realisasi ASN yg dilatih : Jumlah Pendaftar Pelatihan) x 100	80
29	Inspektorat	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x 100	85
		Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x 100	85
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	85
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
30	Kecamatan Bandar	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	41
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,15
		Presentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	41

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
31	Kecamatan Banyuputih	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	65
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	45,5
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
32	Kecamatan Batang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	60
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
33	Kecamatan Bawang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	75
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
34	Kecamatan Blado	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	38,8

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	38,8
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
35	Kecamatan Gringsing	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	66,6
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
36	Kecamatan Kandeman	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,50 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	90
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85
37	Kecamatan Limpung	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70,59
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	47,06
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68
38	Kecamatan Pecalungan	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	70
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
39	Kecamatan Reban	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		PersentaseStatus Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri: Jumlah Desa) x 100	47,36
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	36,84
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
40	Kecamatan Subah	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	35,29
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x 100	35,29
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
41	Kecamatan Tersono	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	75
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60
42	Kecamatan Tulis	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,80 (SB)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	70
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
43	Kecamatan Warungasem	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	85
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
44	Kecamatan Wonotunggal	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	33,3
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	46,6
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

6.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang tahun 2025, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran, IKU perangkat daerah, serta indikator program perangkat daerah. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	{(PDRB th n – PDRB th (n-1)) : PDRB th (n-1)} x100	5,50-6,10	Sekretariat Daerah
2	Laju Inflasi (%)	%	Angka Inflasi	2,3-3,3	Sekretariat Daerah
3	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	juta rupiah	PDRB th n : jumlah penduduk th n	22,9	Sekretariat Daerah
4	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	Persentase pendapatan penduduk 40 terendah terhadap total pendapatan	21,7	Sekretariat Daerah
5	Persentase Angka Kemiskinan (%)	%	Jumlah penduduk miskin di Kab. Batang : jumlah penduduk Kab. Batang	8,34-8,27	Sekretariat Daerah
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran	70,75	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	Rasio IPM Perempuan dibanding IPM Laki-Laki	92,25	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	Peran serta wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik	63,96	Sekretariat Daerah
9	Angka Harapan Hidup (tahun)	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,94	Sekretariat Daerah
10	Harapan Lama Sekolah (th)	tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,5	Sekretariat Daerah
11	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	7,2	Sekretariat Daerah
12	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	ribu rupiah	Rata-rata pengeluaran penduduk per tahun	9.896	Sekretariat Daerah
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja : Jumlah penduduk angkatan kerja) x100	5,80-5,27	Sekretariat Daerah
14	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa/kelurahan x 100	14,11	Sekretariat Daerah
15	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja : jumlah angkatan kerja x 100	97	Sekretariat Daerah
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas : Angkatan Kerja x 100	74	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat	85,6	Sekretariat Daerah
18	Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)] : (Realisasi PAD Tahun n-1)*100	1,36	Sekretariat Daerah
19	Opini BPK	opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Sekretariat Daerah
20	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,025	Sekretariat Daerah
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,7	Sekretariat Daerah
22	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan : Jumlah PDRB x 100	24,77	Sekretariat Daerah
23	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1) x 100	19	Sekretariat Daerah
24	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dari BPS	13,24	Sekretariat Daerah
25	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor industrin terhadap PDRB dari BPS	33,02	Sekretariat Daerah
B	**Aspek Daya Saing Daerah**				
1	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	Nilai IDSD	3,5413	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Capaian implementasi reformasi birokrasi yang meliputi 8 komponen	69,96	Sekretariat Daerah
3	Nilai SAKIP	skor	(30 perencanaan kinerja + 25 pengukuran kinerja + 15 pelaporan kinerja + 10 evaluasi internal + 20 capaian kinerja)	71,25	Sekretariat Daerah
4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	indeks	Penilaian secara kualitatif melalui reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 8 komponen, 28 aspek dan 69 kriteria yang telah ditetapkan	level 3	Sekretariat Daerah
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	IKLH Kabupaten = IKLH =(0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	70,66	Sekretariat Daerah
6	Indeks Infrastruktur	indeks	Indeks Infrastruktur tingkat Kabupaten/Kota = 0,4122 *jalan + 0,4149*air + 0,4620*sanitasi + 0,4368 * pkpl + 0,5037*telp_int	200	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	Penilaian terhadap 6 dimensi yaitu: 1. Kesesuainan dokumen perencanaan dengan penganggaran; 2. Pengalokasian belanja APBD; 3.Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4.Penyerapan Anggaran; 5. Kondisi Keuangan Daerah; 6. Opini BPK atas LKPD	80	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
8	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota	150	Sekretariat Daerah
9	Indeks Rasa Aman	indeks	survei / kuisioner kepada masyarakat	4,4	Sekretariat Daerah
10	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	Kuantitatif & Kualitatif, melalui kuisooner terhadap 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah	0,83	Sekretariat Daerah
11	Indeks Demokrasi	indeks	Kualitatif, melalui kuisioner	74	Sekretariat Daerah
12	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	Total Pengeluaran RT Non Pangan : Total Pengeluaran x 100	47,56	Sekretariat Daerah
13	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	rasio	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa / PDB	0,09	Sekretariat Daerah
14	Angka kriminalitas	rasio	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun : Jumlah penduduk	0,014	Sekretariat Daerah
15	Angka Beban ketergantungan	%	(Penduduk usia64 : Penduduk usia 15-64) x100	42,66	Sekretariat Daerah
C	**Aspek Pelayanan Umum**				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	**Pendidikan**				
	Angka Partisipasi Sekolah	%	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun : jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100	100	Disdikbud
	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	80,5	Disdikbud
	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	Jumlah guru berkualfiikasi S1/D4 : jumlah guru seluruhnya x 100	100	Disdikbud
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Disdikbud
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	Disdikbud
	Persentase capaian SPM Pendidikan	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Pendidikan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Pendidikan x 100	100	Disdikbud
	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruh satuan pendidikan x 100	95	Disdikbud
2	**Kesehatan**				
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kematian ibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cidera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	112	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran	7,6	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000		
	Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	13,61	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan : jumlah penduduk x 100	90	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar : jumlah puskesmas kali 100	90,47	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	75	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x 100	13,31	Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Dinas Kesehatan
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,94	Dinas Kesehatan
	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	Jumlah capaian masing masing indikator SPM : Jumlah indikator SPM x 100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin : jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang ada x 100	84	Dinas Kesehatan
	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	Jumlah posyandu mandiri : jumlah balita x 100	12,74	Dinas Kesehatan
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Batang)	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standart yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang seharusnya di miliki x 100	100	RSUD Batang
	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	88	RSUD Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,3	RSUD Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	RSUD Batang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Batang) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Batang
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun (RSUD Batang)	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	88	RSUD Batang
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Limpung)	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	100	RSUD Limpung
	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan (RSUD Limpung)	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Kesehatan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Kesehatan x 100	100	RSUD Limpung
	Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	90	RSUD Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,25	RSUD Limpung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	RSUD Limpung
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Limpung) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	RSUD Limpung
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x 100	74,58	DPUPR
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x 100	74,15	DPUPR
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap : Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota x 100	91,5	DPUPR
	Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi : Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01	DPUPR
	Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x 100	15,94	DPUPR
	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah ber HPL / HGB x 100	28,88	DPUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting : luas daerah	4,28	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100		
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	Jumlah TPA dalam Kondisi baik : jumlah TPA seluruhnya x 100	100	DPUPR
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100	DPUPR
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) : Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x 100	71,43	DPUPR
	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	Panjang jalan dan drainase lingkungan : Panjang jalan dan drainase lingkungan seluruhnya x100	59,04	DPUPR
	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	Jumlah Gedung negara yang sesuai dengan peruntukkan : Jumlah Bangunan Gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab xkan 100	100	DPUPR
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100	90,42	DPUPR
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi operator dan teknis/analis : Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota x 100	12,5	DPUPR
	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	Luas wilayah RRTR yang ditetapkan : luas wilayah RRTR yang ditargetkan x 100	81,5	DPUPR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	DPUPR
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni : Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	63,5	DPRKP
	Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik : Luas Total Perumahan dan Permukman) x 100	84	DPRKP
	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	Jumlah infrastruktur yg dipenuhi : jumlah infrastruktur yg ada x 100	65	DPRKP
	Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	(Luas lingkungan kumuh yg tertangani : Luas lingkungan kumuh lalu) x 100	63,5	DPRKP
	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi	%	Jumlah Perumahan yang sdh dilengkapi PSU : Jumlah	84	DPRKP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		Perumahan se Kab. Batang x 100		
	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah (SPM)	%	Jumlah rumah korban bencana yg ditangani : Jumlah Rumah Korban Bencana seluruhnya x 100	100	DPRKP
	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	Jumlah Luas kawasan kumuh yang tertangani : Jumlah luas kawasan kumuh seluruhnya x 100	63,5	DPRKP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	DPRKP
5	**Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
	IKM terhadap penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	78	Satpol PP
	Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x 100	78	Satpol PP
	Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x100	3,5	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) x 100	73	Satpol PP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satpol PP)	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	Satpol PP
	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Peduduk di kawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana/ Jumlah Penduduk dikawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana/ Jumlah Deas Rawan Bencana x 100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan/ JUmlah Sasaran Dampak Bencana yang dilakukan tanggap Bencana x 100 + Jumlah Kejadian Bencana yng direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi/ Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100 /4	74,17	BPBD
	Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	%	Jumlah bencana yang tertangani : jumlah bencana x 100	100	BPBD
	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani (SPM)	%	Jumlah laporan gangguan trantib yang tertangani : jumlah seluruh laporan gangguan trantib x 100	100	Satpol PP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (SPM)	%	Jumlah korban bencana yang ditangani / Jumlah Korban Bencana X 100	100	BPBD
	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (SPM)	%	(Jml desa Terkena bencana mendapat penanggulangan bencana/Jml. desa terkena bencana) x 100	100	BPBD
	Persentase waktu tanggap "respon time" (SPM)	%	Jumlah penanganan kebakaran sesuai respon time : jumlah kejadian kebakaran x 100	100	Satpol PP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	BPBD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	BPBD
6	**Sosial**				
	Persentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	Jumlah PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga : Jumlah PMKS di kab Batang X 100	76	Dinas Sosial
	Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos : Jumlah PSKS di kab batang X 100	90	Dinas Sosial
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	Dinas Sosial
	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (SPM)	%	Jumlah Potensi sumber Kesejahteraan Sosial ditingkatkan kemampuannya : Jumlah PSKS di Daerah Kabupaten X 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	jumlah warga negara migran yang berhasil dipulangkan : Jumlah warga migran korban kekerasan x 100	45	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah PMKS di Kabupaten Batang x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	Jumlah jenis layanan SPM Urusan sosial yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Urusan sosial x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	jumlah korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah korban bencana alam dan sosial x 100	100	Dinas Sosial
	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	Presentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik : Jumlah Taman Makam Pahlawan x 100	100	Dinas Sosial
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,06	Dinas Sosial
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
1	**Ketenagakerjaan**				
	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja / jumlah angkatan kerja x 100	97	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100	32,01	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang diaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegitan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten / Kota x 100	100	Dinas Ketenagakerjaan
	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas / Angkatan Kerja x 100	74	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : dengan jumlah pencari kerja terdaftar x 100	41	Dinas Ketenagakerjaan
	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	Jumlah sengketa pengusaha pekerja : jumlah perusahaan x 1000	14,4	Dinas Ketenagakerjaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Dinas Ketenagakerjaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Dinas Ketenagakerjaan
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
	Ratio KDRT	rasio	Jumlah KDRT : Jumlah Rumah Tangga X 100	0,0067	DP3AP2KB
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100	0	DP3AP2KB
	Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X 100	4,2747	DP3AP2KB
	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	Jml ARG pada Anggaran Program Kegiatan APBD : jml seluruh anggaran pada Program Kegiatan x 100	3,4	DP3AP2KB
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg tertangani : Jml kekerrasan thd perempuan yg terlaporkan x 100	100	DP3AP2KB
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Jumlah angkatan kerja perempuan : jumlah penduduk usia kerja perempuan x 100	1,64	DP3AP2KB
	cakupan data pilah gender dan anak	%	jumlah jenis data yang tersedia : jumlah jenis data yang dibutuhkan x 100	100	DP3AP2KB
	cakupan kecamatan layak anak	%	Jml Kec yg sudah layak anak : jml kecamatan x 100	86,67	DP3AP2KB
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg tertangani : Jml kekerasan thd perempuan yg terlaporkan x 100	100	DP3AP2KB
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	DP3AP2KB
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	DP3AP2KB
3	**Pangan**				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,025	Dinas Pangan dan Pertanian
	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)				
	a. Beras	Ton	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversi dengan rendemen beras 62,74	121.734	Dinas Pangan dan Pertanian
	b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau xkan dengan angka konversi jagung 89	72.573,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	Jumlah cadangan pangan kabupaten : standar cadangan pangan kabupaten x 100	10,7	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan keamndirian pangan : jumlah seluruh kegiatan ketahanan pangan x 100	12,5	Dinas Pangan dan Pertanian
	Skor Pola Pangan Harapan	%	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	89,7	Dinas Pangan dan Pertanian
	Rasio Desa mandiri Pangan	%	Desa yang mendapatkan fasilitas Desa Mandri Pangan : jumlah desa di Kab. Batang x100	17	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	Jumlah daerah pengawasan keamanan pangan : jumlah daerah aman pangan x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,3	Dinas Pangan dan Pertanian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,1	Dinas Pangan dan Pertanian
4	**Pertanahan**				
	Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	{ (jumlah sengketa tanah tahun berkenaan - jumlah sengketa tanah tahun lalu) : jumlah sengketa tanah tahun lalu } x 100	90	DPRKP
	Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	(Jumlah kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terdaftar) x 100	100	DPRKP
	Persentase permohonan fasilitasi pernyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%	jumlah permohonan yang terfasilitasi : jumlah permohonan tanah seluruhnya x 100	85	DPRKP
5	**Lingkungan Hidup**				
	Persentase Luas RTH	%	Luas RTH : Luas lahan x 100	70	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	Indeks	ci baru = cim-ci (hasil pengukuran)/cim-LiJ	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	100-(50/0.0 x ieu-0.1)	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Luas tutupan hutan : Luas wilayah administrasi	68,8	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Dinas Lingkungan Hidup
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	jumlah dokumen yang disusun : jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	Jumlah persetujuan yang dikeluarkan : jumlah permohonan x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH : izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang ditangani /Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten x 100	65	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	Jumlah komunitas pduli LH yang di edukasi : Jumlah komunitas LH yang direncanakan edukasix 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	Jumlah Dunia Pendidikan yang memenuhi nilai standar : jumlah sekolah yang mendaftar x 100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penanganan sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani : jumlah timbulan sampah x 100	80	Dinas Lingkungan Hidup
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,72	Disdukcapil
	Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	[(Jumlah Kepemilikan KIA : Jumlah Peduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber-KTP el : Jumlah Peduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber-akta kelahiran usia 0-18 th : jumlah penduduk usia 0-18 th) : 3] x 100	88,33	Disdukcapil
	Persentase menurunnya data ganda dan anomali	%tase	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data ganda dan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu] x 100	2	Disdukcapil
	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	[(Jumlah penduduk memiliki KTP el : Jumlah penduduk usia 17 th ke atas) + (Jumlah penduduk memiliki KIA : jumlah penduduk di bawah usia 17 th) : 2] x 100	94,5	Disdukcapil
	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	[(Jumlah kepemilikan akta nikah : jumlah pemohon) + (jumlah akta usia bayi 0-5 th : penduduk usia 0-5 th) : 2] x 100	97,6	Disdukcapil

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	%	(Jumlah data kependudukan yang valid : jumlah seluruh data kependudukan) x 100	95,6	Disdukcapil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Disdukcapil
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	jumlah desa maju : total jumlah se kab. batang x 100	24	Dispermades
	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,57	Dispermades
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,81	Dispermades
	Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,51	Dispermades
	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	%	Jumlah pkk desa binaan : pkk desa sekab. Batang x 100	62,76	Dispermades
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Dispermades
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	Dispermades
	Persentase budaya desa yang dilestarikan	%	jumlah adat dan budaya desa yang dilestarikan : jumlah adat budaya desa x 100	60	Dispermades
	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya : total desa di Kabupaten Batang x 100	56,49	Dispermades
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	jumlah LKD yang aktif : jumlah LKD keseluruhan x 100	75	Dispermades
8	**Pengendalian Penduduk dan KB**				
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	**r = {Pt/P_0) x (1/t)-1} x 100** r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah Penduduk tahun t P_0 = Jumlah penduduk tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P_0	1,12	DP3AP2KB
	TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Index	5 Σ ASFR	2,9	DP3AP2KB
	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	Jml jenis data kependudukan bid KB : Target jml jenis data kependudukan bid. KB x 100	100	DP3AP2KB
	Peningkatan Cakupan Kesertaan Ber-KB	%	PUS yang ber-KB : Jum. PUS x 100	74	DP3AP2KB
	Cakupan pembangunan ketahanandan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	%	Jumlah keluarga yang didampingi kelompok Tribina	78,71	DP3AP2KB
9	**Perhubungan**				
	Rasio ijin trayek	rasio	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan : jumlah penduduk	1,5	Dinas Perhubungan
	Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	v / c ratio Jalan Kabupaten v : volume kendaraan c : kapasitas jalan	0,5	Dinas Perhubungan
	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan : jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang ditetapkan x 100	87	Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Dinas Perhubungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Dinas Perhubungan
10	**Komunikasi dan Informatika**				
	Indeks SPBE	Indeks	Domain SPBE	3,55	Diskominfo
	Indeks Smart City	Indeks	Dimensi Smart City	3,48	Diskominfo
	Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	Jumlah informasi yang diakses publik : dengan jumlah penyebaran informasi x 100	100	Diskominfo
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,5	Diskominfo
	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Jumlah informasi yang diakses publik : jumlah penyebaran informasi x 100	72	Diskominfo
	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi : jumlah layanan x 100	73	Diskominfo
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Diskominfo
11	**Koperasi dan UKM**				
	Persentase koperasi aktif	%	(jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	68	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	(jumlah UMKM Baru tahun n - jumlah UMKM tahun n-1) : jumlah UMKM tahun n-1 } x 100	12	Disperindag-kop dan UKM
	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) :Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) X 100	20	Disperindag-kop dan UKM
12	**Penanaman Modal**				
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahun lalu : investasi tahun ini) x 100	80	DPMPTSP
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Trilyun	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di batang	2,5	DPMPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	DPMPTSP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	DPMPTSP
	Persentase peningkatan jumlah investor	%	Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor	60	DPMPTSP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			tahun (n-1) : jumlah investor tahun n x 100		
	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x100	100	DPMPTSP
	Persentase ijin yang diterbitkan	%	Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100	100	DPMPTSP
	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM : jumlah perusahaan	8	DPMPTSP
	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	%	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	45	DPMPTSP
13	**Kepemudaan dan Olahraga**				
	Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	40	Disparpora
	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	{(Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n – Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1) : Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1} x 100	4	Disparpora
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina : jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar x 100	39	Disparpora
	capaian medali kejuaraan	medali	Jumlah total medali yang didapat selama 1 Tahun	45	Disparpora
	Penghargaan yang diterima	%	Jumlah penghargaan yang diterima:jumlah kegiatan yang diikuti X 100	10	Disparpora
14	**Statistik**				
	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	Diskominfo
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi / Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	Diskominfo
15	**Persandian**				
	Indeks Keamanan Informasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	Diskominfo
	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	Diskominfo
16	**Kebudayaan**				

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100	Disdikbud
	Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	75	Disdikbud
	Persentase festival seni yg dilaksanakan	%	jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) : jumlah festival seni yang ditargetkan x 100	100	Disdikbud
	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	jumlah komunitas / sanggar kesenian yang difasilitasi : jumlah komunitas / sanggar seni yang terdaftar x 100	75	Disdikbud
17	**Perpustakaan**				
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	TGM= (0,3 ×(FM+DM+JB))+0,05×(FAI+DAI)	66,37	Disperpuska
	indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	IPLM= ∑UPLM/AM	2,9	Disperpuska
	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	(Jumlah peningkatan pengunjung : Jumlah pengunjung tahun sebelumnya) x 100	0,16	Disperpuska
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,2	Disperpuska
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,69	Disperpuska
18	**Kearsipan**				
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	**T=(a+i+s+j)/4** T = tingkat ketersediaan arsip a = tase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = tase arsip inaktiv yang telah dibuatkan daftar arsip s = tase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = tase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,5	Disperpuska
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	**T=(m+b+g+a+c+i)/6** T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK	22,6	Disperpuska

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
	Urusan Pilihan				
1	**Kelautan dan Perikanan**				
	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	nilai rata- rata Indeks semua pelayanan yang dilaksanakan	85	Dislutkannak
	Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilis setiap bulan februari)	21,95	Dislutkannak
	Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidaya x 100	97	Dislutkannak
	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat konsumsi makan ikan x 100	98	Dislutkannak
	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	(Realisasi Jumlah Pokmaswas yang Diberdayakan : Target) x 100	100	Dislutkannak
	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	(Realisasi Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan : Target Tingkat Konsumsi Makan Ikan) x 100	98	Dislutkannak
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Dislutkannak
2	**Pariwisata**				
	Persentase Peningkatan kunjungan Wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	23	Disparpora
	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1 x 100	15	Disparpora
	Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah produk ekonomi kreatif/kajian yang dilaksanakan) x 100	12	Disparpora
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	Disparpora
	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	%	jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI :jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar X 100	25	Disparpora
	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat : Jumlah SDM	40	Disparpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			Pariwisata dan ekonomi kreatif X 100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Disparpora
3	**Pertanian**				
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : Jumlah PDRB x 100	24,77	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan, Horti da Perkebunan) per hektar per tahun : luas panen x 100	0,0108	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun n x 100	90	Dislutkannak
	Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	100	Dislutkannak
	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan yang Terobati di Puskeswan : Target Hewan yang Terobati di Puskeswan) x 100	100	Dislutkannak
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	Dislutkannak
	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	(Realisasi Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan : Target) x 100	100	Dislutkannak
	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian yang mengikuti pelatihan : jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase validitas data Pertanian	%	jumlah kesesuaian data yang tervalidasi : jumlah kesesuaian data yang ada x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan	%	jumlah data laporan yang tersedia : jumlah BPP x 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : luas panen X 100	0,0108	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian : rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanian X 100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
4	**Perdagangan**				
	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto	%	Data BPS	13,24	Disperindagkop dan UKM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	(PDRB) Sektor Perdagangan				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	Disperindagkop dan UKM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Disperindagkop dan UKM
	Persentase Verifikasi Teknis	%	Jumlah verifikasi teknis : Jumlah yang pengajuan x100	100	Disperindagkop dan UKM
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL yang direvitalisasi/renovasi : jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL keseluruhan x 100	36,36	Disperindagkop dan UKM
	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	barang pokok yang stabil harganya : seluruh barang kebutuhan pokok x100	75	Disperindagkop dan UKM
	nilai ekspor perdagangan	USD	nilai ekspor perdagangan - nilai impor pada tahun n kabupaten kota	60.215.421	Disperindagkop dan UKM
	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertera /tera ulang : Potensi UTTP x 100	75	Disperindagkop dan UKM
	Presentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	Jumlah Pelaksanaan pameran : jumlah pameran yang direncanakan x 100	100	Disperindagkop dan UKM
5	**Perindustrian**				
	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	jumlah pelaku IKM tahun n-jumlah pelaku IKM tahun n-1) : jumlah pelaku IKM tahun n-1 x 100	0,0079	Disperindagkop dan UKM
	Persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	jumlah izin usaha tahun n-jumlah izin usaha tahun n-1) : jumlah izin usaha tahun n-1 x 100	86	Disperindagkop dan UKM
	Persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	jumlah Industri dalam SIINas tahun n- jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1) : jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1 x 100	86	Disperindagkop dan UKM
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1	**Sekretariat Daerah**				
	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	Jumlah PD yang mendapat nilai B : jumlah PD yang ada x 100	95	Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,5	Sekretariat Daerah
	Nilai EKPPD	Skor	Nilai hasil evaluasi LPPD nasional menurut Kemendagri	2,99	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	Jumlah tersusunnya LPPD tepat waktu : jumlah keseluruhan LPPD perangkat daerah x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	Jumlah penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi : jumlah	100	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			keseluruhan administrasi tata pemerintahan x 100		
	Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	jml kegiatan yang terlaksana : jml kegiatan yg direncanakan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	(realisasi persentase penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + persentase perkara hukum yang terselesaikan + tase penyediaan informasi produk) : (persentase target penyusunan produk hukum daerah yang berhasil difasilitasi + tase perkara hukum yang terselesaikan + persentase penyediaan informasi produk hukum) x 100	95	Sekretariat Daerah
	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	%	(Jumlah deviden : Jumlah Penyertaan Modal) x 100	15	Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti : jumlah kebijakan yang dikeluarkan baik pusat atau daerah)* 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan : Jumlah seluruh paket pekerjaan yang direncanakan x 100	97	Sekretariat Daerah
	Persentase lelang melalui e-procurement	%	Jumlah Paket yang dilelang : Jumlah Total Rencana Paket Lelang x 100	100	Sekretariat Daerah
	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	skor	Total nilai kematangan PD : jumlah PD	36 (sedang)	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	Jumlah PD yang mendapat telah menerapkan SOP : jumlah PD x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi : jumlah permohonan fasilitasi kegiatan pimpinan x 100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH, Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda : target x 100	90	Sekretariat Daerah
2	**Sekretariat DPRD**				
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey/Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	79	Sekretariat DPRD
	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah non APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda non APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 5 Perda)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase KUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah APBD yang	100	Sekretariat DPRD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 3 Perda, dan 2 Perbup KUA/PPA)		
	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	Capaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana : target kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan x 100 (target sesuai jumlah kegiatan pengawasan yang dijadwalkan per tahun)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	Rata-rata capaian kinerja fasilitasi kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100	Sekretariat DPRD
	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD per tahun : jumlah seluruh anggota DPRD x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	Jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang dijadwalkan x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	Jumlah kegiatan admnistrasi Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan administasi Dewan yang dijadwalkan x 100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	Jumlah anggota DPRD yang mendapat layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD : jumlah Anggota DPRD x 100	100	Sekretariat DPRD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Sekretariat DPRD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	**Perencanaan**				
	Indeks Perencanaan	Indeks	60%*Capaian sasaran pemda+20%*sasaran perangkat daerah+20%*capaian program daerah	79	Bapelitbang
	Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	(Rata-rata capaian indikator kinerja program + rata-rata capaian IKU + rata-rata Capaian IKD) /3 x 100	91	Bapelitbang
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	Jumlah Program dalam RKPD : Jumlah Program dalam APBD X 100	100	Bapelitbang
	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	Jumlah Program dalam Renja Perangkat Daerah : Jumlah Program dalam Renstra Perangkat Daerah X 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu : jumlah dokumen yang dihasilkan x 100	100	Bapelitbang
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dievaluasi : jumlah dokumen evaluasi dan	100	Bapelitbang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
			pelaporan yang dihasilkan x 100		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	jumlah elemen data/informasi yang tersedia : jumlah elemen data/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis x100	100	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA) x 100	91	Bapelitbang
	Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM) x 100	91	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW) x 100	91	Bapelitbang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63.00.00	Bapelitbang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,8	Bapelitbang
2	**Keuangan**				
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	OPINI	WTP	BPKPAD
	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP / jumlah total OPD) x 100	100	BPKPAD
	Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	[(Realisasi Pendapatan Daerah tahun n)-(Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)] : (Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1) x 100	0,5	BPKPAD
	Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)]/(Realisasi PAD Tahun n-1) x 100	1,36	BPKPAD
	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	%	Dokumen KIB per SKPD se Kabupaten Batang	100	BPKPAD
	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
	Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	realisasi belanja : anggaran belanja x 100	90	BPKPAD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,5	BPKPAD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	BPKPAD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
3	**Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**				
	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)	225	BKD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	BKD
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	(Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter : Total Parameter Yang Terisi) x (1/jumlah parameter) x Nilai Dasar 25	87	BKD
	Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	(Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja x : Jumlah ASN Kab. Batang) x 100	100	BKD
	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	(Jumlah realisasi ASN yg dilatih : Jumlah Pendaftar Pelatihan) x 100	80	BKD
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	(Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu : Jumlah semua layanan administrasi kepegawaian yang ada) x 100	100	BKD
	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat)x100	100	BKD
4	**Penelitian dan Pengembangan**				
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	63.00.00	Bapelitbang
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	(Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan : Jumlah total hasil kelitbangan) x 100	100	Bapelitbang
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	100	Bapelitbang
	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah rekomendasi utama kegiatan kelitbangan yg mjd bahan masukan penyusunan renja : Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan) x100	60	Bapelitbang
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
1	**Pengawasan**				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x 100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x 100	85	Inspektorat Daerah
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	85	Inspektorat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	Jumlah LHP yang diterbitkan dibandingkan jumlah obrik x 100	100	Inspektorat Daerah
	Level SPIP	level	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	3	Inspektorat Daerah
	Persentase kapabilitas APIP	%	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	70	Inspektorat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15	Inspektorat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Inspektorat Daerah
	Unsur Kewilayahan				
1	**Kecamatan Batang**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Batang
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Kecamatan Batang
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	60	Kecamatan Batang
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Batang
	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	(Usulan yang masuk perangkingan : Jumlah Usulan Perencanaan) x 100	100	Kecamatan Batang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Batang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Batang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Batang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Batang
2	**Kecamatan Banyuputih**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Banyuputih
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	65	Kecamatan Banyuputih
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Kecamatan Banyuputih

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Jumlah Desa dengan Status maju dan Mandiri	Desa	Jumlah Desa dengan Status maju dan Mandiri	5	Kecamatan Banyuputih
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Banyuputih
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Banyuputih
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Banyuputih
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Banyuputih
3	**Kecamatan Bandar**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Bandar
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	41,18	Kecamatan Bandar
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,15	Kecamatan Bandar
	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	desa	Jumlah desa dengan status maju dan mandiri	7	Kecamatan Bandar
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Bandar
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bandar
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Bandar
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Bandar

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
4	**Kecamatan Bawang**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Bawang
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(jumlah Desa yang mencapai target : jumlah desa seluruhnya) x 100	80	Kecamatan Bawang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Bawang
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	75	Kecamatan Bawang
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kecamatan Bawang
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Bawang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Bawang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Bawang
5	**Kecamatan Blado**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Blado
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	38,8	Kecamatan Blado
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Blado
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	38,8	Kecamatan Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Blado
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Blado
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Blado

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Blado
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Blado
6	**Kecamatan Gringsing**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Gringsing
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Gringsing
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Kecamatan Gringsing
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	66,6	Kecamatan Gringsing
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	Kecamatan Gringsing
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Gringsing
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	90	Kecamatan Gringsing
7	**Kecamatan Kandeman**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,50 (B)	Kecamatan Kandeman
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Kandeman
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Kandeman
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	90	Kecamatan Kandeman
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	Kecamatan Kandeman

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Kandeman
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Kandeman
	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Kandeman
8	**Kecamatan Limpung**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Limpung
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70,59	Kecamatan Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Kecamatan Limpung
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	47,06	Kecamatan Limpung
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	Kecamatan Limpung
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Limpung
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Limpung
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Limpung
9	**Kecamatan Pecalungan**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Pecalungan
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Pecalungan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Kecamatan Pecalungan
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Pecalungan
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Pecalungan
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Pecalungan
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Pecalungan
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Pecalungan
10	**Kecamatan Reban**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Reban
	Persentase Status Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	47,36	Kecamatan Reban
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Kecamatan Reban
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Majan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri/ Jumlah Desa) x 100	36,84	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Kecamatan Reban
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Reban
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Reban
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek	90	Kecamatan Reban

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	yang dilaksanakan dengan baik		wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100		
11	**Kecamatan Subah**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Subah
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(jumlah Desa yang Maju dan Mandiri : jumlah desa seluruhnya) x 100	35,29	Kecamatan Subah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Subah
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	35,29	Kecamatan Subah
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kecamatan Subah
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Subah
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Subah
12	**Kecamatan Tersono**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Tersono
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Tersono
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5	Kecamatan Tersono
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	75	Kecamatan Tersono
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	Kecamatan Tersono
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tersono
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tersono

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tersono
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Tersono
13	**Kecamatan Tulis**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,80 (SB)	Kecamatan Tulis
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tulis
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Kecamatan Tulis
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	70	Kecamatan Tulis
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Tulis
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Tulis
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Tulis
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Tulis
14	**Kecamatan Warungasem**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Warungasem
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	Kecamatan Warungasem
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Kecamatan Warungasem
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	85	Kecamatan Warungasem
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Warungasem
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Warungasem
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	90	Kecamatan Warungasem
15	**Kecamatan Wonotunggal**				
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,01 (B)	Kecamatan Wonotunggal
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	33,3	Kecamatan Wonotunggal
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,42	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	46,6	Kecamatan Wonotunggal
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	90	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	Kecamatan Wonotunggal
	Unsur Pemerintahan Umum				**Bakesbangpol**
	Indeks Kerukunan	%	Dilakukan Survey (Toleransi+Kesetaraan+Kerjasama) : 3*100	80	**Bakesbangpol**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Targer capaian tahun 2025	Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-12
	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Skor	Nilai hasil evaluasi mplementasi SAKIP oleh Kemenpan RB	72	**Bakesbangpol**
	Persentase demo tertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada)*100	100	**Bakesbangpol**
	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) * 100	100	**Bakesbangpol**
	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	(Jumlah masyarakat yang telah mendapat Sosialisasi wasbang yang mengamalkan ideologi dan karakter bangsa yang bagus : jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi wasbang) x 100	95	**Bakesbangpol**
	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan dibatang) x 100	100	**Bakesbangpol**
	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	(Jumlah Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan : Jumlah Ormas yang terdaftar resmi) x 100	100	**Bakesbangpol**
	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	(Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialiasi dan paham terhadap ketahanan Ekosbud : jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi) x 100 (Melalui Pretest dan postest)	100	**Bakesbangpol**
	Persentase penurunan konflik sosial	%	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100	**Bakesbangpol**

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 telah merujuk atau mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan diatasnya.

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2025. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2025.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antarpelaku pembangunan.

Agar RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif, maka beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2024, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang

berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2025 kedalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA tahun Anggaran 2025, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2023.

3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 diharapkan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4. RKPD Tahun 2025 akan dijabarkan kedalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang tahun 2025 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja.
6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025.
7. Dalam Pelaksanaannya, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sesuai dengan amanat regulasi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat Kabupaten Batang pada tahun yang direncanakan yakni tahun 2025.

PJ BUPATI BATANG,

Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M